



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 118 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA INDUK PENGELOLAAN BATAS
WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN
PERBATASAN TAHUN 2020-2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Hal tersebut lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (UU Wilayah Negara) yang menyatakan bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Selain itu dinyatakan pula bahwa Indonesia memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya di wilayah yurisdiksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Kedua ketentuan di atas menekankan pentingnya pengelolaan atas wilayah negara dan wilayah yurisdiksi negara untuk merealisasikan cita-cita bangsa yaitu terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia dengan memperhatikan kekhususan pada karakter negara kepulauan. Sebagai konsekuensinya, karakter negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara harus senantiasa tercermin dalam setiap regulasi dan kebijakan dalam pengelolaan wilayah negara termasuk pengelolaan perbatasan negara.

Perbatasan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Perbatasan negara meliputi dua dimensi, yaitu dimensi Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Berdasarkan UU Wilayah Negara, yang dimaksud dengan Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional, sedangkan Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain. Dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan. Sementara dalam hal Batas Wilayah Negara di laut, berdasarkan penjelasan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dimaksud dengan Kawasan Perbatasan negara adalah wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas. Kawasan Perbatasan negara meliputi Kawasan Perbatasan darat dan Kawasan Perbatasan laut, termasuk Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT).

Mengingat Kawasan Perbatasan merupakan kawasan strategis dalam menjaga integritas wilayah negara, diperlukan pengaturan secara khusus. Pengaturan Batas Wilayah Negara dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan wilayah negara, dan hak-hak berdaulat di wilayah yuridiksi negara. Negara juga berkepentingan untuk ikut memanfaatkan laut bebas dan dasar laut internasional sesuai dengan hukum internasional. Pemanfaatan di laut bebas dan di dasar laut meliputi pengelolaan kekayaan alam, perlindungan lingkungan laut, dan keselamatan navigasi.

Pengelolaan wilayah negara dilakukan dengan pendekatan keamanan, kesejahteraan, dan kelestarian lingkungan. Pendekatan keamanan dalam arti pengelolaan wilayah negara untuk menjamin keutuhan wilayah dan kedaulatan negara serta perlindungan segenap bangsa. Pendekatan kesejahteraan dalam arti upaya-upaya pengelolaan wilayah negara hendaknya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kawasan Perbatasan, sedangkan pendekatan kelestarian lingkungan dalam arti pembangunan Kawasan Perbatasan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan yang merupakan wujud dari pembangunan yang berkelanjutan. Peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi sangat penting terkait dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam mengelola pembangunan Kawasan Perbatasan.

Kebijakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Kebijakan pengembangan Kawasan Perbatasan melihat kondisi dan karakteristik wilayah perbatasan Indonesia yang berbeda satu dengan yang lainnya, baik Kawasan Perbatasan di wilayah darat maupun laut, sehingga masing-masing memerlukan kebijakan khusus dan strategi serta pendekatan yang berbeda. Diperlukan suatu kebijakan dasar yang dapat dijadikan sebagai payung seluruh kebijakan dan strategi secara nasional untuk seluruh Kawasan Perbatasan. Pengembangan Kawasan Perbatasan memerlukan suatu pola atau kerangka penanganan Kawasan Perbatasan yang menyeluruh (holistik), meliputi berbagai sektor dan kegiatan pembangunan, serta koordinasi dan kerja sama yang efektif mulai dari pemerintah pusat sampai ke tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota. Pola penanganan tersebut dijabarkan melalui penyusunan kebijakan dari tingkat makro sampai mikro dan disusun berdasarkan proses partisipatif, baik secara horizontal di pusat maupun vertikal dengan pemerintah daerah.

Strategi pengembangan Kawasan Perbatasan, baik darat maupun laut, perlu dilaksanakan melalui upaya-upaya: (1) penyelarasan kegiatan-kegiatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui anggaran pembangunan sektoral dan daerah, yang diarahkan pada pengembangan kawasan pertumbuhan dan pengembangan wilayah terpadu Kawasan Perbatasan; (2) keberpihakan dan perhatian yang lebih besar dari kementerian/lembaga dalam penetapan kebijakan dan strategi pengelolaan Kawasan Perbatasan antarnegara; (3) dukungan dan fasilitasi pengembangan Kawasan Perbatasan oleh perguruan tinggi, swasta, masyarakat, dan media massa.

Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP) sejalan dengan arah pengembangan dalam Desain Besar Pengelolaan BWN-KP Tahun 2011-2025 yang dilakukan dalam mewujudkan perbatasan negara sebagai wilayah yang aman, tertib, dan maju. Perbatasan negara sebagai wilayah yang aman, diupayakan melalui peningkatan kondisi pertahanan dan keamanan yang kondusif untuk berbagai kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya, serta penguatan sistem pertahanan perbatasan darat dan laut. Perbatasan negara sebagai wilayah yang tertib, diupayakan melalui peningkatan kerja sama internasional, penegakan hukum, kesadaran politik, serta penegasan dan penetapan tapal batas negara. Sementara perbatasan negara sebagai wilayah yang maju, diupayakan melalui peningkatan kegiatan ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, diperlukan perbatasan negara yang kuat dan tangguh. Pemerintah memberikan komitmen terhadap hal tersebut melalui kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Untuk itu peran strategis wilayah negara dan Kawasan Perbatasan negara, harus dapat berkontribusi untuk memperkuat kedaulatan dan kesejahteraan sebagai bagian dari ketahanan nasional dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan perbatasan sebagai beranda depan negara. Tanggung jawab atas pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan Kawasan Perbatasan dilakukan secara koordinatif baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam UU Wilayah Negara. Hal tersebut dilakukan melalui pengelolaan BWN-KP yang melibatkan semua komponen, meliputi unsur pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, dan media secara sinergis.

Dalam pengelolaan BWN-KP, UU Wilayah Negara mengamanatkan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan; menetapkan rencana kebutuhan anggaran; mengoordinasikan pelaksanaan; dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, BNPP memiliki fungsi antara lain melaksanakan penyusunan dan mengusulkan penetapan Renduk Pengelolaan BWN-KP kepada Presiden dan menetapkan Renaksi Pengelolaan BWN-KP.

Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 disusun sesuai dengan (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024; (3) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); (4) Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RTRKPN). Selain itu Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 disusun dengan memperhatikan kondisi dan isu strategis Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Renduk Pengelolaan BWN-KP ditetapkan oleh Presiden sebagai acuan

pelaksanaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

pelaksanaan teknis pembangunan BWN-KP yang dilakukan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 merupakan kebijakan pemerintah mengenai rencana pengelolaan perbatasan negara yang bersifat lintas sektor dan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 selanjutnya dijabarkan dalam Renaksi Pengelolaan BWN-KP pada setiap tahun anggaran.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 adalah tersusunnya pedoman pengelolaan BWN-KP dalam kurun waktu tahun 2020-2024.

Selanjutnya penyusunan Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 bertujuan untuk:

1. memperkuat dan memperkokoh kedaulatan negara;
2. mengoptimalkan kehadiran negara dalam mendorong pemenuhan hak dasar warga negara di perbatasan;
3. memperkuat posisi wilayah perbatasan negara yang menjadi pintu keluar-masuk wilayah NKRI;
4. mengoptimalkan pengelolaan perbatasan sebagai beranda depan dan beranda penghubung internasional;
5. mewujudkan pemerataan pembangunan bagi masyarakat Kawasan Perbatasan;
6. mewujudkan sinergitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan perbatasan;
7. mengoptimalkan kebijakan afirmatif pembangunan yang mempertimbangkan kondisi kewilayahan masing-masing Kawasan Perbatasan.

BAB II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BAB II

ISU, VISI DAN MISI, SERTA ARAH KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN BWN-KP BERDASARKAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2020-2024

A. ISU PENGELOLAAN BWN-KP

Pengelolaan BWN-KP merupakan representasi kehadiran negara dalam pemenuhan hak warga negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan semangat kedaulatan negara sehingga terwujud Kawasan Perbatasan negara sebagai beranda depan dan penghubung internasional. Indonesia memiliki hubungan batas darat secara langsung dengan tiga negara yaitu Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini, serta batas laut dengan sepuluh negara yaitu Malaysia, Timor Leste, Papua Nugini, India, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Palau, dan Australia. Dalam pengelolaan perbatasan negara tersebut terdapat berbagai isu strategis yang menjadi perhatian sekaligus tantangan ke depan.

Beberapa kondisi yang dihadapi dan menjadi isu strategis pada aspek pengelolaan Batas Wilayah Negara antara lain: (1) belum selesainya penetapan dan penegasan Batas Wilayah Negara dengan negara tetangga pada beberapa segmen; (2) belum maksimalnya pengawasan dan pemeliharaan tanda batas negara; (3) keadaan dan strategi politik negara tetangga untuk menyelesaikan perundingan; (4) masih adanya potensi kerentanan dan kebutuhan penguatan wawasan kebangsaan dan nasionalisme pada masyarakat perbatasan.

Pada aspek pengelolaan lintas batas negara, Kawasan Perbatasan negara yang merupakan area pelintasan antarnegara sangat rawan dan rentan terhadap isu yang disebabkan oleh adanya aktivitas atau interaksi lintas batas negara secara ilegal. Isu strategis yang menjadi perhatian dalam pengelolaan aktivitas lintas batas negara antara lain: (1) belum terpadunya sistem pemeriksaan dan pelayanan lintas batas pada jalur non-Pos Lintas Batas Negara (PLBN); (2) masih relatif banyaknya jalur-jalur perlintasan tidak resmi; (3) terbatasnya sumber daya manusia dan dukungan teknologi dalam penyelenggaraan pelayanan lintas batas (*custom, immigration, quarantine, security*); (4) belum memadainya sarana dan prasarana pendukung pengamanan lintas batas negara, baik di darat maupun di laut (Pos Pengamanan Perbatasan/Pamtas, Pos TNI Angkatan Laut, Pos Kepolisian,

termasuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

termasuk teknologi pengamanan perbatasan); (5) belum terbangunnya sistem pengamanan perbatasan terpadu (*integrated border security system*); serta (6) berbagai permasalahan lintas batas baik terkait aspek ekonomi dan sosial budaya, maupun aktivitas kejahatan lintas negara (*transnational crime*) lainnya.

Dalam satu dekade terakhir pengelolaan perbatasan negara mulai bergeliat secara signifikan ditandai dengan komitmen negara yang hadir di perbatasan melalui penegakan kedaulatan dan pembangunan Kawasan Perbatasan negara. Namun demikian masih cukup banyak langkah strategis dan sentuhan pembangunan yang masih harus terus dilakukan untuk memperkuat wilayah perbatasan negara. Luasnya cakupan wilayah dan pembangunan perbatasan yang dilakukan secara bertahap harus dapat diimbangi dengan pengelolaan sumber daya yang terbatas terutama anggaran serta pelibatan seluruh *stakeholders* untuk membangun Kawasan Perbatasan secara berkelanjutan. Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan sosial dasar, optimalisasi pengelolaan sumber daya alam lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, diperlukan guna mengoptimalkan fungsi Kawasan Perbatasan sebagai pintu gerbang negara. Untuk mengembangkan wilayah perbatasan, perlu secara terus menerus dilakukan identifikasi, inventarisasi dan penggalan potensi lokal yang akan menjadi faktor penting dalam penyusunan kebijakan dan pembangunan Kawasan Perbatasan. Isu strategis yang menjadi perhatian pada aspek pembangunan Kawasan Perbatasan negara antara lain: (1) percepatan penyelesaian dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta pengendalian dan pemanfaatan ruang; (2) belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan potensi komoditas lokal (pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata); (3) belum optimalnya pemanfaatan sumber daya hayati dan nonhayati pesisir dan laut untuk kepentingan perekonomian masyarakat; (4) masih rendahnya produktivitas produk unggulan daerah yang berorientasi pada pasar negara tetangga (pengembangan *branding*); (5) masih rendahnya daya saing dan belum berkembangnya pusat/sentra industri, perdagangan dan pariwisata di kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN); (6) masih rendahnya konektivitas dan layanan infrastruktur transportasi terutama yang mendukung rantai lalu lintas pasokan komoditas (distribusi logistik/*supply chain*) dan hubungan sosial budaya antarwilayah; (7) belum meratanya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan akses telekomunikasi, informasi dan penyiaran; (8) masih terbatasnya akses terhadap sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar berupa pendidikan, kesehatan, perekonomian, perdagangan, dan permukiman yang memadai; (9) belum meratanya pelayanan pemerintahan kecamatan dan desa atau sebutan lain di Kawasan Perbatasan.

Pengelolaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pengelolaan wilayah perbatasan dilaksanakan berdasarkan UU Wilayah Negara. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UU Wilayah Negara menyebutkan bahwa masing-masing tingkatan pemerintah mempunyai kewenangan dan harus dilakukan secara sinergis agar kebijakan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan terkait dengan pengelolaan BWN-KP berjalan efektif dan efisien. Isu strategis yang menjadi perhatian dalam pengembangan kelembagaan pengelolaan BWN-KP antara lain: (1) belum efektifnya kelembagaan horizontal (antar-lembaga dalam pemerintah pusat); (2) belum efektifnya kelembagaan vertikal (hubungan antara pusat dan daerah) di daerah; (3) masih lemahnya kelembagaan pengendali lapangan sebagai fungsi pengendalian pelaksanaan, monitoring, serta evaluasi program dan kegiatan.

Berkembangnya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah memberikan dampak sosial dan ekonomi yang berpengaruh terhadap rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian rencana pembangunan strategis melalui kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional.

Menyikapi kondisi tersebut, Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 telah disusun dengan memprioritaskan program/kegiatan dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan fiskal negara. Kegiatan dalam Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 disusun dengan asumsi dan target yang dinamis dengan memperhatikan kebijakan strategis dan kemampuan keuangan negara. Selanjutnya terhadap kebutuhan penyesuaian kegiatan dan pendanaan dalam pelaksanaan Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024, dilakukan dalam mekanisme penyusunan Renaksi Pengelolaan BWN-KP yang dilakukan pada setiap tahun dan dikoordinasikan oleh BNPP.

B. VISI DAN MISI

Visi pengelolaan BWN-KP tahun 2020-2024 mencerminkan peran dalam menyukseskan Visi Presiden tahun 2019-2024, yang berisi keinginan dan cita-cita untuk melanjutkan langkah transformasi yang telah dilaksanakan dalam pengelolaan perbatasan negara. Visi pengelolaan BWN-KP tersebut sekaligus merupakan arah dalam upaya pengelolaan perbatasan negara yang dilakukan secara berkelanjutan yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Visi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Visi pengelolaan BWN-KP tahun 2020-2024 adalah:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong di Perbatasan Negara”.

Visi pengelolaan BWN-KP tahun 2020-2024 dilaksanakan melalui 4 (empat) Misi, yang dijabarkan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
 - a. penyediaan dan pemerataan pendidikan formal dan nonformal dalam upaya meningkatkan kualitas dan kapasitas masyarakat di Kawasan Perbatasan;
 - b. meningkatkan kualitas masyarakat di Kawasan Perbatasan negara serta berkepribadian dan berjiwa nasionalisme;
 - c. mewujudkan masyarakat di Kawasan Perbatasan yang mandiri dan berdaya saing.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
 - a. meningkatkan kegiatan ekonomi pada 18 (delapan belas) PKSNDan 26 (dua puluh enam) PLBN;
 - b. membangun daerah berbasis potensi sumber daya alam setempat secara berkelanjutan dalam upaya mewujudkan kemandirian daerah;
 - c. mewujudkan tata kelola pembangunan ekonomi daerah agar mampu mandiri dan mempunyai daya saing, baik terhadap wilayah lainnya di dalam negeri maupun terhadap wilayah negara tetangga.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
 - a. membuka keterisolasian wilayah melalui pembangunan konektivitas antarwilayah perbatasan negara di 222 (dua ratus dua puluh dua) Lokpri;
 - b. mengembangkan dan memanfaatkan potensi Kawasan Perbatasan negara yang berbasis kearifan lokal di 222 (dua ratus dua puluh dua) Lokpri;
 - c. mengatur pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan.
4. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
 - a. meningkatkan sarana dan prasarana pertahanan keamanan serta pengawasan di wilayah perbatasan negara pada 222 (dua ratus dua puluh dua) Lokpri, 18 (delapan belas) PKSNDan 49 (empat puluh sembilan) PPKT, dan 26 (dua puluh enam) PLBN;

b. menyelenggarakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- b. menyelenggarakan pelayanan yang terpadu, efektif, dan efisien bagi para pelintas batas negara.

Keempat Misi dimaksud dilaksanakan melalui:

1. pengelolaan Batas Wilayah Negara yang aman, tertib, dan berdaulat;
2. pengelolaan lintas batas negara yang aman dan tertib;
3. pengelolaan Kawasan Perbatasan negara sebagai wilayah yang maju dan menjadi beranda depan NKRI;
4. pengelolaan sistem tata kelola perbatasan negara yang holistik, integratif, tematik, serta berorientasi pada konektivitas antarruang yang berkelanjutan.

Pelaksanaan Misi tersebut dilakukan dengan memperhatikan 5 (lima) Arahan Presiden dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

1. pembangunan sumber daya manusia;
2. pembangunan infrastruktur;
3. penyederhanaan regulasi;
4. reformasi birokrasi;
5. transformasi ekonomi.

Selanjutnya untuk mengimplementasikannya, kelima Arahan Presiden tersebut disinkronkan dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan, yang terdiri atas:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

C. ARAH . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

C. ARAH KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN BWN-KP BERDASARKAN RPJMN TAHUN 2020-2024

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, pengelolaan BWN-KP dilaksanakan sesuai kebijakan pembangunan nasional dengan memenuhi prinsip-prinsip:

1. Membangun Kemandirian

Pembangunan dilaksanakan berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai kondisi masyarakat, pranata sosial yang ada, serta memanfaatkan kelebihan dan kekuatan bangsa Indonesia. Untuk itu membangun kemandirian perlu:

- a. memiliki sumber daya manusia yang berkarakter, unggul, bertanggung jawab, dan kreativitas tinggi;
- b. memiliki penguasaan atas ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. mampu mengelola sumber daya alam melalui proses nilai tambah;
- d. menjadi negara yang selalu aktif dan terbuka dalam bekerja sama.

2. Menjamin Keadilan

Pembangunan dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang menjadi hak warga negara, bersifat proporsional dan tidak melanggar hukum dengan:

- a. menjamin akses dan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi untuk berpartisipasi seluas-luasnya dalam pembangunan dan mendapatkan manfaatnya;
- b. penegakan hukum yang menjamin kesetaraan, keadilan, kepastian hukum, dan asas manfaat pada masyarakat;
- c. menumbuhkan kepercayaan dan tanggung jawab antarpelaku pembangunan agar tercipta pembangunan ekonomi yang berkualitas dan inklusif.

3. Menjaga Keberlanjutan

Pembangunan dilaksanakan secara keberlanjutan untuk memastikan bahwa upaya pembangunan guna memenuhi kebutuhan saat ini sekaligus mempertimbangkan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan pada saatnya nanti.

Pelaksanaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pelaksanaan 7 (tujuh) agenda pembangunan dalam pengelolaan BWN-KP dengan menggunakan prinsip-prinsip tersebut di atas, meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Pembangunan ekonomi di Kawasan Perbatasan negara dilaksanakan melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan pengelolaan sumber daya ekonomi dan pendekatan peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

a. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi

- 1) pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Kawasan Perbatasan negara;
- 2) peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dukungan infrastruktur dalam ketahanan air meliputi penyediaan air baku untuk kawasan prioritas pada daerah tertinggal, terluar, terdepan, dan PPKT. Pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi antara lain melalui revitalisasi danau difokuskan seperti Danau Sentarum di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
- 3) peningkatan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan untuk Kawasan Perbatasan, pengelolaan sumber daya pangan, yang difokuskan pada daerah rawan pangan, rentan kelaparan, dan *stunting*, antara lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Maluku, dan Provinsi Papua;
- 4) peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, untuk Kawasan Perbatasan dilakukan melalui fasilitasi usaha, pembiayaan, teknologi dan pasar, peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan nelayan terpadu, serta perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil.

b. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi

- 1) penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan koperasi; dan
- 2) peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil. Fokus kegiatan antara lain pengembangan akses dan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) yang berada di sekitar

Kawasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Kawasan Perbatasan seperti Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Pengembangan destinasi pariwisata lainnya antara lain meliputi Batam-Bintan-Karimun secara terintegrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Batam-Bintan-Karimun, Sambas-Singkawang, Derawan-Berau, dan Biak-Teluk Cendrawasih, difokuskan pada peningkatan kesiapannya untuk menampung peningkatan kunjungan wisatawan. Beberapa kawasan industri juga akan difasilitasi dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Dalam mewujudkan keunggulan kompetitif, pengembangan wilayah dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan, sebagaimana tercermin dari pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan berbasis wilayah pulau. Koridor pertumbuhan berorientasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional melalui percepatan pengembangan kawasan-kawasan pertumbuhan, meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), DPP, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), kota-deserta serta kawasan aglomerasi perkotaan pada kabupaten/kota yang terletak pada koridor pertumbuhan. Sementara koridor pemerataan berorientasi untuk pemenuhan pelayanan dasar yang lebih merata melalui pengembangan PKW, dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sehingga terbentuk pusat-pusat pelayanan dasar baru yang menjangkau daerah pelayanan yang lebih luas di kabupaten/kota pada koridor pemerataan.

Pengelolaan BWN-KP dalam kerangka kebijakan dan strategi pembangunan kewilayahan tahun 2020-2024 yaitu:

a. meningkatkan pemerataan antarwilayah, melalui:

- 1) pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan afirmatif untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal, kecamatan Lokpri, PPKT, serta kawasan transmigrasi;
- 2) percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya, dan ekonomi desa;
- 3) penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan berbasis keunggulan wilayah desa, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, dan PKSNN perbatasan negara.

b. meningkatkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

- b. meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah, khususnya wilayah perbatasan, melalui optimalisasi pembangunan kawasan strategis prioritas sebagai pusat-pusat pertumbuhan wilayah, seperti KEK, KI, DPP, dan perikanan, antara lain dengan penguatan basis produksi dan pengolahan komoditas unggulan daerah yang tersebar pada sentra-sentra hilirisasi pertanian dan perikanan di KPPN, kawasan transmigrasi, PKSNN, dan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)/Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP);
 - c. meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian;
 - d. meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah, melalui strategi penegakan rencana tata ruang yang berbasis mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana untuk menjamin perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Pencegahan dampak negatif ini dilakukan antara lain melalui: (1) peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR; (2) penyediaan peta dasar skala besar; dan (3) penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
- Kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, melalui strategi pembangunan:
- a. pengendalian pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan;
 - b. pelaksanaan perlindungan sosial;
 - c. peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 - d. peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - e. peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - f. pengentasan kemiskinan; dan
 - g. peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilakukan melalui strategi pembangunan:

- a. pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkokoh ketahanan budaya dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter;
- b. meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
- c. meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan peningkatan pelayanan dasar dilakukan melalui strategi pembangunan berupa penyediaan:

a. Infrastruktur Pelayanan Dasar

- 1) penyediaan sarana dan prasarana dasar pendidikan dan kesehatan;
- 2) penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau;
- 3) pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan;
- 4) penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman;
- 5) keselamatan dan keamanan transportasi;
- 6) ketahanan kebencanaan infrastruktur.

b. Infrastruktur Ekonomi

1) Konektivitas Jalan

Kegiatan prioritas mendukung konektivitas jalan antara lain pembangunan jalan strategis nasional seperti Jalan Seajar Perbatasan dan Jalan Akses Perbatasan, Jalan Trans pada 18 (delapan belas) pulau tertinggal, terluar, dan terdepan, serta jalan di Kawasan Perbatasan.

2) Konektivitas Laut

Kegiatan prioritas mendukung konektivitas laut antara lain pengembangan pelabuhan utama, seperti: Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu (*Major Project*), pembangunan serta pengembangan pelabuhan mendukung tol laut, pembangunan serta pengembangan pelabuhan lokal.

3) Konektivitas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

3) Konektivitas Udara

Prioritas pengembangan konektivitas udara antara lain jembatan udara di Papua, pembangunan bandar udara (bandara) baru, pengembangan bandara hub primer, rehabilitasi dan pengembangan bandara mendukung PPKT kawasan prioritas, dan pembangunan bandara perairan (*waterbased airport*) mendukung destinasi pariwisata perairan.

c. Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan

Penyediaan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan dilakukan sejalan dengan upaya diversifikasi sumber penyediaan energi dan ketenagalistrikan. Sebagai contoh pemanfaatan potensi tenaga surya yang merupakan salah satu sumber energi bersih antara lain atap panel surya (*solar rooftop*) dan sumber-sumber EBT lainnya. Selanjutnya penyediaan energi ketenagalistrikan untuk pemenuhan rasio elektrifikasi terus didorong melalui kegiatan peningkatan akses dan keterjangkauan, serta kecukupan dan keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan.

d. Infrastruktur Digital

- 1) penyediaan dan peningkatan kualitas layanan akses telekomunikasi dan internet, melalui penyediaan *Base Transceiver Station* (BTS) untuk desa nonkomersil dan akses internet yang dapat dijangkau masyarakat secara bertahap;
- 2) peningkatan infrastruktur jaringan pitalebar hingga ke kecamatan-kecamatan dengan prioritas pada kawasan strategis nasional dan Lokpri;
- 3) penyiapan infrastruktur untuk mendukung keberlanjutan akses informasi penyiaran sesuai kebijakan migrasi penyiaran analog ke digital.

6. Membangun Lingkungan Hidup

Pengelolaan BWN-KP dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan sejalan dengan kebijakan lingkungan hidup. Pembangunan dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem lingkungan hidup, yaitu pembangunan yang berorientasi pada pengelolaan sumber daya alam sekaligus melakukan upaya perlindungan dan pengembangan, serta meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

7. Memperkuat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik

Kebijakan penguatan stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik dilaksanakan melalui strategi:

- a. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
 - 1) memperkuat integritas wilayah NKRI dan perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri;
 - 2) memperkuat kerja sama internasional;
 - 3) meningkatkan citra positif Indonesia di dunia internasional.
- b. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional
 - 1) penguatan keamanan dalam negeri;
 - 2) penguatan kemampuan pertahanan;
 - 3) penguatan keamanan laut;
 - 4) peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - 5) penguatan keamanan dan ketahanan siber.

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, telah ditetapkan 41 (empat puluh satu) *Major Project* yang menjadi acuan penekanan kebijakan dan pendanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahunannya, serta menjadi alat kendali pembangunan sehingga sasaran dan target pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dapat terus dipantau dan dikendalikan. Penjabaran *Major Project* dimaksud, khususnya pembangunan yang terkait Kawasan Perbatasan antara lain:

1. Destinasi Pariwisata Prioritas, di antaranya pengembangan pariwisata Raja Ampat di Provinsi Papua Barat dan Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara;
2. Integrasi Pelabuhan Perikanan dan *Fish Market* Bertaraf Internasional, melalui pengembangan SKPT yang sudah ada, yaitu SKPT Nunukan dan SKPT Morotai, serta membangun SKPT baru;
3. Pembangunan Wilayah Batam-Bintan untuk meningkatkan pertumbuhan industri dan pariwisata Batam-Bintan, sebagaimana di Batam dibangun KEK yang akan menjadi pusat pengembangan ekonomi tingkat nasional yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan integrasi pengelolaan Batam-Bintan-Karimun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Pusat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

4. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yaitu PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, dan PKSN Merauke, dengan target antara lain sebagai pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga, sebagai pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga, sebagai pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya, serta sebagai pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya;
5. Jembatan udara di Papua yang menjangkau daerah-daerah di Kawasan Perbatasan untuk menurunkan harga bahan pokok;
6. Peningkatan/pembangunan Jalan Lingkar/Jalan Trans Pulau pada 18 (delapan belas) pulau tertinggal, terluar, dan terdepan, dengan target meningkatkan konektivitas dan mobilitas barang dan penumpang untuk menekan tingginya harga komoditas. Dari 18 (delapan belas) pulau tersebut, beberapa diantaranya termasuk dalam Kawasan Perbatasan negara yaitu: (1) Natuna; (2) Kei Besar; (3) Selaru; (4) Moa; (5) Wetar; (6) Morotai; dan (7) Biak;
7. Penguatan Keamanan Laut di Natuna, berupa peningkatan *deterrent effect* dan penegakan kedaulatan di perairan Natuna, dengan target penurunan aktivitas perompakan, kekerasan dan tindak kejahatan di laut, *illegal, unreported and unregulated fishing, transnational crime* dan penguatan sistem pengelolaan pengamanan navigasi.

BAB III . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

BAB III

ARAH STRATEGIS, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PELAKSANAAN

A. ARAH STRATEGIS

Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 menjabarkan 7 (tujuh) agenda pembangunan dalam Visi dan Misi Presiden dan difokuskan pada 2 (dua) agenda pembangunan, yaitu agenda ke-2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dan agenda ke-7 Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik. Kedua agenda pembangunan tersebut diturunkan ke dalam 4 (empat) arah strategis pengelolaan BWN-KP, yang selanjutnya diuraikan ke dalam masing-masing bidang melalui penetapan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Arah Strategis 1 Pengelolaan Batas Wilayah Negara

Mewujudkan penetapan dan penegasan Batas Wilayah Negara, penguatan sistem pertahanan dan keamanan, serta penegakan hukum dan kesadaran politik atas kedaulatan negara.

a. Tujuan

- 1) Mewujudkan penetapan dan penegasan tanda batas negara untuk menjaga keutuhan NKRI;
- 2) Memperkuat sistem pertahanan negara di Kawasan Perbatasan;
- 3) Mewujudkan Kawasan Perbatasan sebagai cerminan keamanan dan kedaulatan negara.

b. Sasaran

- 1) Terwujudnya penetapan dan penegasan tanda batas negara untuk menjaga keutuhan NKRI;
- 2) Meningkatnya sistem pertahanan negara di Kawasan Perbatasan negara;
- 3) Terwujudnya Kawasan Perbatasan yang aman dan tertib.

c. Bidang

- 1) Penetapan Batas Wilayah Negara;
- 2) Pertahanan wilayah negara;
- 3) Keamanan dan ketertiban wilayah.

2. Arah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

2. Arah Strategis 2 Pengelolaan Aktivitas Lintas Batas Negara

Mewujudkan peningkatan pelayanan lintas batas negara serta kerja sama lintas negara di perbatasan sebagai media untuk menjaga keharmonisan hubungan antarnegara.

a. Tujuan

- 1) Menjadikan Kawasan Perbatasan sebagai beranda penghubung antarnegara melalui pelayanan pintu gerbang yang optimal;
- 2) Mewujudkan pengelolaan perbatasan negara sebagai upaya dalam menciptakan hubungan antarnegara yang lebih kondusif melalui kerja sama internasional.

b. Sasaran

Terwujudnya Kawasan Perbatasan sebagai beranda penghubung antarnegara.

c. Bidang

- 1) Manajemen Lintas Batas Negara;
- 2) Kerja sama Lintas Batas Negara.

3. Arah Strategis 3 Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara

Mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

a. Tujuan

- 1) Mengembangkan penataan ruang Kawasan Perbatasan yang tematik, terintegrasi dan berkelanjutan;
- 2) Mewujudkan Kawasan Perbatasan negara sebagai pusat pertumbuhan melalui peningkatan kegiatan ekonomi berbasis potensi unggulan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- 3) Mewujudkan pengelolaan Kawasan Perbatasan sebagai upaya hadirnya negara dalam melaksanakan pembangunan yang berkeadilan sosial.

b. Sasaran

- 1) Terwujudnya tata ruang Kawasan Perbatasan yang tematik, terintegrasi, dan berkelanjutan;

2) Terwujudnya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- 2) Terwujudnya pusat/sentra ekonomi, industri, dan perdagangan baru Kawasan Perbatasan negara sebagai pusat pertumbuhan melalui peningkatan kegiatan ekonomi berbasis potensi unggulan dan kualitas sumber daya manusia;
 - 3) Terwujudnya keadilan sosial di Kawasan Perbatasan dengan meratanya pembangunan sarana dan prasarana.
- c. Bidang
- 1) Penataan ruang Kawasan Perbatasan;
 - 2) Pertumbuhan ekonomi Kawasan Perbatasan;
 - 3) Pemerataan pembangunan Kawasan Perbatasan.
4. Arah Strategis 4 Penguatan Kelembagaan Pengelolaan BWN-KP
- Mewujudkan pengelolaan perbatasan negara secara holistik, integratif, tematik serta berorientasi pada konektivitas antarruang yang berkelanjutan.
- a. Tujuan
- 1) Melaksanakan pengelolaan perbatasan negara secara holistik dan integratif, baik secara vertikal dan horizontal, serta multipihak;
 - 2) Mewujudkan perbatasan negara yang aman, tertib, dan maju secara tematik, berdasarkan target yang telah ditetapkan;
 - 3) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan perbatasan negara.
- b. Sasaran
- 1) Terlaksananya pengelolaan perbatasan negara yang holistik, integratif, serta berbasis partisipasi multipihak;
 - 2) Terwujudnya wilayah perbatasan yang secara tematik terkelola dalam rangka kedaulatan NKRI;
 - 3) Terlaksananya pengendalian dan pengawasan pengelolaan perbatasan negara yang sesuai dengan tujuan bernegara serta pemerataan pembangunan berbasis tata ruang.
- c. Bidang
- 1) Koordinasi Pengelolaan Perbatasan Negara;
 - 2) Perencanaan Pengelolaan Perbatasan Negara;
 - 3) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Perbatasan Negara.

Berdasarkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

Berdasarkan 4 (empat) arah strategis di atas, pengelolaan BWN-KP dibagi menjadi 4 (empat) kebijakan dan strategi pelaksanaan, yaitu:

1. kebijakan dan strategi pelaksanaan pengelolaan Batas Wilayah Negara;
2. kebijakan dan strategi pelaksanaan pengelolaan aktivitas lintas batas negara;
3. kebijakan dan strategi pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan negara; dan
4. kebijakan dan strategi pelaksanaan penguatan kelembagaan pengelolaan BWN-KP.

B. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA

Pengelolaan Batas Wilayah Negara pada dasarnya dilakukan untuk mewujudkan Kawasan Perbatasan sebagai wilayah yang aman dan tertib dari aspek kedaulatan negara serta keamanan kawasan. Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan upaya melalui kebijakan serta strategi pelaksanaan berdasarkan bidang sebagai berikut:

1. Bidang Penetapan Batas Wilayah Negara
 - a. Subbidang Batas Wilayah Darat

Kebijakan Subbidang Batas Wilayah Darat diarahkan pada penyelesaian batas negara wilayah darat Indonesia-Malaysia, Indonesia-Timor Leste dan permasalahannya, serta mengoptimalkan penegasan batas Indonesia-Papua Nugini.

Upaya penetapan dan penegasan batas negara wilayah darat dilakukan melalui perundingan segmen batas negara, serta melaksanakan demarkasi dengan menggunakan tanda batas negara seperti patok/pilar batas negara yang didukung oleh teknologi informasi geospasial. Strategi pelaksanaannya adalah:

- 1) Mengoptimalkan Penyelesaian dan Penegasan Batas Negara Wilayah Darat
 - a) Batas Wilayah Darat Indonesia-Malaysia

Penyelesaian batas wilayah darat Indonesia-Malaysia masih menyisakan 7 (tujuh) *Outstanding Boundary Problems* (OBP). Untuk Sektor Timur terdapat 3 (tiga) OBP yaitu: (1) Segmen OBP Pulau Sebatik, di lokasi Kecamatan Sebatik

Barat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

Barat, Sebatik Tengah, dan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan; (2) Segmen OBP Sungai Sinapad di lokasi Kecamatan Lumbis Hulu, Desa Kabungalor, Desa Tatagas, dan Desa Limpagas, Kabupaten Nunukan; (3) Segmen OBP B2700-B3100 di lokasi Desa Kabungalor, Desa Tatagas, dan Desa Limpagas, pada Kecamatan Lumbis Hulu, Kabupaten Nunukan. Tahapan untuk melakukan survei bersama ketiga OBP dimaksud telah disepakati kedua negara pada Persidangan *Joint Indonesia-Malaysia (JIM)* tanggal 21 November 2019 di Kuala Lumpur.

Selanjutnya Sektor Barat terdapat 4 (empat) OBP yaitu: (1) Segmen OBP Sungai Buan/Gunung Jagoi di Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat; (2) Segmen OBP Gunung Raya di Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat; (3) Segmen OBP Batu Aum di Kecamatan Siding, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat; (4) Segmen OBP Titik D400 di Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Pengelolaan batas Republik Indonesia-Malaysia oleh kedua negara dilakukan antara lain melalui JIM yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri.

b) Batas Wilayah Darat Indonesia-Timor Leste

Terdapat 1 (satu) segmen batas darat yang belum selesai tersurvei (*Unsurveyed Segment*) yaitu batas antara Indonesia dengan Timor Leste pada Segmen Subina-Oben. Pelaksanaan survei direncanakan mulai tahun 2022 pada 4 (empat) lokasi: (1) Segmen Subina di Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur; (2) Segmen Pistana di Kecamatan Bikomi Tengah dan Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur; (3) Segmen Haumeniana-Nifonunpo di Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur; (4) Segmen Tubu-Nilulat di Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selain itu terdapat 2 (dua) *Unresolved Segment* Indonesia-Timor Leste, yaitu Segmen Noel Besi-Citrana yang direncanakan tindak lanjutnya pada tahun 2022, dan Segmen

Manusasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

Manusasi-Bijael Sunan yang direncanakan tindak lanjutnya pada tahun 2023. Pengelolaan batas Indonesia-Timor Leste oleh kedua negara dilakukan antara lain melalui: (1) *Senior Officer Consultation* (SOC) Indonesia-Timor Leste yang dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri; dan (2) *Joint Border Committee* (JBC) Indonesia-Timor Leste yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri.

c) Batas Wilayah Darat Indonesia-Papua Nugini.

Penegasan batas wilayah Indonesia-Papua Nugini masih perlu dilakukan dengan perapatan pilar dalam rangka meningkatkan demarkasi. Pengelolaan batas Indonesia-Papua Nugini oleh kedua negara dilakukan antara lain melalui: (1) JBC Indonesia-Papua Nugini dan Sub Komite Teknis Survei Penegasan dan Penetapan Batas Indonesia-Papua Nugini, dikoordinasikan Kementerian Dalam Negeri; (2) *Joint Sub Committee On Security Matters* (JSC-SM) Indonesia-Papua Nugini dikoordinasikan Tentara Nasional Indonesia.

2) Identifikasi, Perbaikan, dan Pemeliharaan Patok/Pilar Batas Negara

Patok/pilar batas merupakan objek batas negara penting yang memerlukan pemeliharaan melalui *investigation*, *refixation*, dan *maintenance*. Untuk mendukung kegiatan pemeliharaan, disiapkan mekanisme dan sumber daya, seperti dasar hukum dan kebijakan pemeliharaan patok, sumber daya manusia untuk berpatroli, sarana dan prasarana akses menuju patok, dan dukungan teknologi. Selain itu basis data mengenai batas negara secara keruangan (spasial) dalam peta harus disiapkan untuk mempermudah dalam memelihara batas negara.

3) Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pengamanan Perbatasan

Partisipasi masyarakat dalam pengamanan perbatasan sesuai Pasal 19 UU Wilayah Negara dilakukan melalui fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa terdepan di perbatasan negara sebagai bagian dari sistem pertahanan dan keamanan. Partisipasi masyarakat tersebut merupakan Program Prioritas Nasional yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan peran serta dan sinergitas antara tokoh masyarakat, pemerintah desa, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pemerintah pusat dalam

pertahanan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

pertahanan dan keamanan. Kegiatan dilakukan dalam bentuk pemberian pemahaman berupa kebijakan pengelolaan Batas Wilayah Negara, kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan batas negara wilayah darat, pengamanan terpadu, peran pemerintahan desa dan kelembagaan desa dalam mendukung keamanan dan ketertiban wilayah, menjaga dan memelihara patok/pilar batas negara, kunjungan lapangan, dan Rencana Kerja Tindak Lanjut.

- 4) Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi Geospasial untuk Pengamanan Patok Batas Negara

Pemeliharaan dan pengamanan patok batas negara di perbatasan darat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi geospasial. Beberapa pemanfaatan teknologi yang akan digunakan antara lain: Satelit Penginderaan Jauh, *Unmanned Aerial Vehicles and Unmanned Aircraft Systems*, dan Tapal Batas *Reference*.

b. Subbidang Batas Wilayah Laut

Kebijakan Subbidang Batas Wilayah Laut diarahkan pada penyelesaian delimitasi laut teritorial, ZEE, dan landas kontinen, terutama beberapa batas wilayah laut Indonesia yang masih belum selesai. Strategi pelaksanaannya adalah:

- 1) Meningkatkan Progres Penyelesaian Delimitasi Batas Laut Teritorial

Secara bilateral menyelesaikan kesepakatan yang belum diratifikasi pada 1 (satu) segmen (Indonesia-Malaysia), dan perlu kesepakatan pada 12 (dua belas) segmen dengan Malaysia, Singapura, Timor Leste, dan Papua Nugini.

- 2) Meningkatkan Progres Penyelesaian Delimitasi Batas ZEE

Secara bilateral, saat ini terdapat 3 (tiga) segmen pada 2 (dua) negara yang telah selesai dirundingkan namun belum diratifikasi yaitu: (1) Indonesia-Australia dan (2) Indonesia-Papua Nugini, meliputi segmen Samudera Pasifik dan Laut Arafura. Selain itu terdapat 15 (lima belas) segmen yang perlu kesepakatan.

3) Meningkatkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

3) Meningkatkan Progres Penyelesaian Delimitasi Batas Landas Kontinen

Hal tersebut dilakukan melalui perundingan batas maritim yang belum dilakukan secara bilateral dengan negara tetangga, di antaranya batas landas kontinen dengan: (1) Filipina di Laut Sulawesi; (2) Palau di Samudera Pasifik; (3) Timor Leste.

c. Subbidang Batas Wilayah Udara

Kebijakan Pengelolaan Batas Wilayah Udara diarahkan pada pengaturan ruang udara nasional. Strategi pelaksanaannya dilakukan melalui upaya: (1) mendorong ketersediaan data dan informasi; dan (2) mendorong penyelesaian regulasi mengenai pengelolaan ruang udara nasional.

2. Bidang Pertahanan Wilayah Negara

a. Subbidang Pertahanan Wilayah Darat

Kebijakan pengelolaan pertahanan di perbatasan wilayah darat diarahkan pada peningkatan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta sesuai Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang didukung dengan teknologi. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat sistem pertahanan di Batas Wilayah Negara dari berbagai ancaman dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan memanfaatkan perkembangan teknologi di bidang pertahanan. Strategi pelaksanaannya adalah:

1) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Sistem Pertahanan Berbasis Teknologi di Kawasan Perbatasan

Peningkatan sistem pertahanan dilakukan melalui pengembangan sarana dan prasarana berbasis teknologi untuk meningkatkan kemampuan pertahanan nasional. Termasuk di dalamnya adalah mengembangkan peranti keras dan peranti lunak yang akan menghasilkan informasi geospasial guna mendukung fungsi pengawasan, pemantauan, pengamanan, dan pelaporan terhadap kondisi dan posisi patok/pilar batas negara, yang diharapkan ke depannya dapat memberikan informasi berupa data secara waktu nyata (*real time data*).

2) Meningkatkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

2) Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pertahanan

Sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas keamanan negara, termasuk di wilayah perbatasan. Peningkatan sumber daya manusia pertahanan untuk menghadapi berbagai ancaman di wilayah perbatasan dilakukan melalui penyiapan kapasitas sumber daya manusia yang handal dalam pembuatan kebijakan pertahanan serta sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, penguasaan teknologi, dan kapabilitas sumber daya manusia di bidang pertahanan untuk menjaga perbatasan negara.

b. Subbidang Pertahanan Wilayah Laut

Kebijakan Subbidang Pertahanan Wilayah Laut di Kawasan Perbatasan negara diarahkan pada peningkatan sistem pertahanan wilayah laut berbasis kawasan laut strategis dan PPKT. Sistem pertahanan wilayah laut dilaksanakan bersinergi dengan sistem keamanan wilayah laut. Keduanya saling berkolaborasi dan saling memengaruhi. Aspek pertahanan difokuskan pada penanggulangan ancaman wilayah negara Indonesia. Sedangkan aspek keamanan lebih banyak berkaitan dengan penanggulangan pelanggaran hukum dan kejahatan transnasional baik dalam negeri maupun internasional secara lintas negara. Strategi pelaksanaannya adalah:

1) Membangun Sistem Pengawasan Maritim dan Sistem Keamanan Laut Nasional yang Terintegrasi

Sistem tersebut menyinergikan kegiatan secara bersama dan terpadu dalam bentuk operasi laut, membangun kekuatan dan menggelar kekuatan bersama.

2) Mendorong Terbentuknya Pengaturan mengenai Keamanan Laut

Peraturan perundang-undangan mengenai keamanan laut diperlukan sebagai kunci dalam mengamankan kawasan laut Indonesia. Penanggulangan berbagai aktivitas yang bersifat ancaman kedaulatan negara seperti potensi konflik baik secara konvensional maupun nonkonvensional menjadi penting dalam menjaga keamanan laut. Pola ancaman terhadap wilayah Indonesia terus menjadi perhatian, seperti pelanggaran batas kedaulatan wilayah perairan Indonesia dan pelanggaran di wilayah yurisdiksi Indonesia. Pengaturan terkait keamanan laut di atas sangat diperlukan dalam rangka melaksanakan pertahanan dan keamanan dengan melibatkan semua pihak

terkait . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

terkait di garda depan. Selanjutnya terhadap hal-hal yang diindikasikan bersifat kriminal, ditangani oleh lembaga penegak hukum.

3) Mengembangkan Sistem Pertahanan Laut di Kawasan Laut Strategis Berbasis PPKT

Upaya dalam melaksanakan pertahanan laut Indonesia di Kawasan Perbatasan dapat dilakukan dengan berbasis pemetaan kawasan laut strategis. Proses pemetaan dimaksud menghasilkan pengelompokan (regionalisasi) kawasan laut, untuk memudahkan dalam mengklasifikasikan kawasan laut yang rentan terhadap ancaman kedaulatan. Dari hasil pemetaan tersebut, keberadaan PPKT terdekat dapat digunakan sebagai basis pertahanan. PPKT dimaksud dapat digunakan sebagai Pos TNI Angkatan Laut dilengkapi berbagai sarana prasarana pertahanan dan keamanan serta teknologi yang dapat menjangkau kawasan laut strategis di sekitarnya.

Untuk menggabungkan wilayah NKRI sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas, PPKT memiliki posisi yang strategis sebagai titik dasar dari garis pangkal kepulauan Indonesia dalam penetapan wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, salah satu proyek prioritas adalah koordinasi perencanaan dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan di PPKT tidak berpenduduk.

c. Subbidang Pertahanan Wilayah Udara

Kebijakan Subbidang Pertahanan Wilayah Udara diarahkan pada peningkatan Sistem Pertahanan Wilayah Udara berdasarkan Zona Strategis Pertahanan Udara pada *Air Defense Identification Zone* (ADIZ). Keberadaan zona strategis pertahanan udara menjadi penting untuk mengidentifikasi berbagai potensi ancaman terhadap kedaulatan Indonesia. Strategi pelaksanaannya adalah:

1) Menetapkan ADIZ Wilayah Udara Indonesia

Rencana dan mandat penetapan ADIZ telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Proses penyusunan ADIZ dilakukan di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan. Oleh karena itu, pada tahun 2020-2024 diharapkan sudah dapat ditetapkan ADIZ yang akan menjadi dasar dalam memetakan berbagai ancaman kedaulatan berbasis klasifikasi ruang udara Indonesia.

2) Meningkatkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

2) Meningkatkan Kemampuan Sarana dan Prasarana Deteksi Lalu Lintas Udara di Bandara Kawasan Perbatasan

Hal ini diperlukan di berbagai penjuru tanah air, karena selama ini proses pemantauan didominasi oleh radar pasif pada bandara sipil. Idealnya bandara strategis di Kawasan Perbatasan dilengkapi dengan sarana dan prasarana deteksi lalu lintas udara yang dapat mendukung pemantauan sekaligus mengawal pertahanan wilayah udara Indonesia di perbatasan negara.

3. Bidang Keamanan dan Ketertiban Wilayah

a. Subbidang Keamanan dan Ketertiban Wilayah Darat

Kebijakan Subbidang Keamanan dan Ketertiban Wilayah Darat diarahkan pada upaya peningkatan ketertiban masyarakat dan pengurangan potensi aktivitas kriminal lintas negara. Skema pertahanan dan keamanan dipertegas dengan membedakan antara aktivitas yang mengancam kedaulatan wilayah negara dan aktivitas yang bersifat kriminal murni yang terdapat aspek kemanusiaan di dalamnya. Keamanan dan ketertiban wilayah darat dilakukan dengan meningkatkan ketertiban masyarakat dan pengurangan potensi aktivitas kriminal lintas negara. Strategi pelaksanaannya adalah:

- 1) meningkatkan kewaspadaan dan menegakkan hukum terhadap aktivitas ilegal di Kawasan Perbatasan darat;
- 2) meningkatkan kewaspadaan dan optimalisasi penanggulangan terorisme dan paham radikal pada masyarakat di perbatasan;
- 3) meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap transformasi sosial, ekonomi serta teknologi virtual yang dipengaruhi negara lain.

b. Subbidang Keamanan dan Ketertiban Wilayah Laut

Kebijakan Subbidang Keamanan dan Ketertiban Wilayah Laut diarahkan pada pengurangan potensi pelanggaran kedaulatan dan pelanggaran yurisdiksi wilayah laut Indonesia. Pengurangan tersebut terkait dengan pencegahan sampai dengan penindakan yang bersifat mengikat dan dapat memberikan efek jera. Strategi pelaksanaannya adalah:

- 1) meningkatkan penegakan hukum dan kedaulatan negara di laut;
- 2) mengembangkan kerja sama pengelolaan dan pengamanan wilayah laut lintas negara;

3) mengembangkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

- 3) mengembangkan sistem pengawasan dan penegakan hukum terpadu di wilayah laut;
 - 4) meningkatkan optimalisasi penanggulangan terorisme dan kegiatan ilegal pada masyarakat perbatasan.
- c. Subbidang Keamanan dan Ketertiban Wilayah Udara

Kebijakan Subbidang Keamanan dan Ketertiban Wilayah Udara diarahkan pada pengurangan potensi pelanggaran kedaulatan wilayah udara. Upaya yang dilakukan adalah menyusun pengaturan dan pengawasan aktivitas penerbangan di ruang udara wilayah nasional serta meningkatkan diplomasi pengaturan penerbangan dengan negara-negara tetangga. Optimalisasi diplomasi pengaturan penerbangan di ruang udara wilayah Natuna menjadi sangat penting, mengingat pengaturan ruang wilayah udara tersebut masih dilakukan oleh negara lain. Strategi pelaksanaannya adalah:

- 1) melanjutkan penataan *Flight Information Region* (FIR) di atas wilayah Batam, Tanjung Pinang, dan Natuna;
- 2) pengawasan wilayah udara nasional melalui pengaturan pengelolaan ruang udara nasional.

Kebijakan dan pengaturan terkait pengelolaan ruang udara nasional menjadi penting sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yang menyatakan bahwa pengelolaan ruang udara perlu diatur dengan undang-undang tersendiri. Regulasi mengenai pengelolaan ruang udara nasional tersebut didasari oleh adanya kepentingan atas wilayah ruang udara dan adanya nilai sosial, ekonomi, politik dan pertahanan keamanan dalam pemanfaatan ruang wilayah udara. Hal tersebut diperlukan untuk meminimalisir potensi munculnya konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang wilayah udara.

C. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN PENGELOLAAN AKTIVITAS LINTAS BATAS NEGARA

Pengelolaan aktivitas lintas batas negara pada dasarnya dilakukan untuk melaksanakan arah strategis guna mewujudkan Kawasan Perbatasan sebagai pintu gerbang yang dikelola secara optimal dan terintegrasi dengan negara tetangga, baik dalam hal sosial ekonomi maupun lingkungan hidup.

Oleh . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

Oleh karena itu, upaya untuk mewujudkannya dirumuskan dalam kebijakan dan strategi pelaksanaan berdasarkan bidang, sebagai berikut:

1. Bidang Manajemen Lintas Batas Negara

Subbidang Pembangunan dan Pelayanan Pos Lintas Batas

Kebijakan pembangunan dan pelayanan Pos Lintas Batas diarahkan pada optimalnya pembangunan dan pelayanan aktivitas Lintas Batas Negara di Kawasan Perbatasan. Strategi pelaksanaannya adalah:

a. Membangun Fasilitas PLBN Menuju *Smart Border Post*

Hingga tahun 2024 aktivitas lintas batas negara direncanakan akan dilayani oleh 26 (dua puluh enam) PLBN. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan, hingga tahun 2019 telah terbangun 7 (tujuh) PLBN masing-masing di Provinsi Kalimantan Barat (PLBN Aruk, PLBN Entikong, dan PLBN Nanga Badau), Provinsi Nusa Tenggara Timur (PLBN Motaain, PLBN Wini, dan PLBN Motamasin), dan Provinsi Papua (PLBN Skouw). Selanjutnya dalam kurun waktu tahun 2020-2024 akan dibangun 18 (delapan belas) PLBN, 11 (sebelas) diantaranya merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 (sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan. Berdasarkan Instruksi Presiden dimaksud, terdapat 1 (satu) PLBN di Sota, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua yang telah selesai dibangun tahun 2020, sementara 10 (sepuluh) PLBN lainnya yang akan dibangun meliputi:

- 1) Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;
- 2) Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;
- 3) Sei Kelik, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;
- 4) Sei Nyamuk, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- 5) Labang, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- 6) Long Midang, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- 7) Long Nawang, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;
- 8) Oepoli, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 9) Napan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 10) Yetetkun, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua.

Selanjutnya . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

Selanjutnya untuk rencana 8 (delapan) PLBN lainnya yang akan dibangun berdasarkan jumlah target RPJMN Tahun 2020-2024, akan dilakukan kajian terlebih dahulu dengan memperhatikan aktivitas perlintasan baik orang maupun barang serta resiprokalitas pelayanan lintas negara dari negara tetangga. Kedelapan PLBN tersebut direncanakan di Provinsi Riau, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Maluku, dan Provinsi Papua. Selain itu penerapan *smart border post* dilakukan secara bertahap melalui pola keterpaduan pengawasan dan pelayanan lintas batas negara dalam satu manajemen pengelolaan PLBN Terpadu berbasis teknologi informasi untuk menghadirkan rasa aman, nyaman, tertib dan berdaulat di Kawasan Perbatasan negara.

- b. Membangun Area di Sekitar PLBN Sebagai Fasilitas Sosial-Ekonomi untuk Memicu dalam Membangkitkan Perekonomian Masyarakat

Sarana prasarana penunjang di PLBN merupakan salah satu faktor pendukung yang berperan tidak hanya pada aktivitas perekonomian tetapi juga pada aktivitas lainnya. Penyediaan sarana prasarana yang memadai seperti pertokoan, pasar, fasilitas perbankan, dan sebagainya akan menjadi pemicu aktivitas perekonomian, sekaligus menjadikan kawasan PLBN sebagai episentrum pengembangan ekonomi. Selanjutnya untuk membangkitkan perekonomian masyarakat dengan mengoptimalkan potensi sumber daya alam di Kawasan Perbatasan, dilakukan melalui upaya sinergi program dan kegiatan kementerian/lembaga terkait percepatan pembangunan ekonomi Kawasan Perbatasan khususnya di sekitar PLBN.

- c. Menyusun Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Pintu Gerbang PLBN dan Non-PLBN

Optimalisasi pengelolaan dan pelayanan pintu gerbang PLBN dan non-PLBN, antara lain dilakukan melalui:

- 1) penataan kebijakan pengelolaan dan pelayanan PLBN;
- 2) kebijakan peningkatan sarana prasarana pelayanan pintu gerbang non-PLBN sesuai Standar Pelayanan Minimal;
- 3) kebijakan penguatan pengendalian dan pengawasan/pemeriksaan titik perlintasan atau jalur tidak resmi pelintas batas negara.

2. Bidang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

2. Bidang Kerja Sama Lintas Batas Negara

Subbidang Strategi Pelaksanaan Kerja Sama Sosial-Ekonomi Lintas Batas Negara

Kebijakan kerja sama sosial ekonomi lintas batas negara diarahkan pada pengembangan kerja sama ekonomi regional serta terbentuknya interaksi masyarakat lokal lintas batas negara. Strategi pelaksanaannya adalah:

a. Meningkatkan Interaksi Sosial Budaya Masyarakat Lokal Lintas Negara

Meningkatkan interaksi sosial budaya melalui kegiatan lokal bersama atau acara tertentu yang melibatkan penduduk perbatasan dan penduduk di negara tetangga, dan mendorong interaksi sosial antara masyarakat lokal perbatasan dengan negara tetangga.

b. Mengembangkan Kerja Sama Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat di Kawasan Perbatasan

Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui kerja sama perdagangan perbatasan dengan negara tetangga dalam pemenuhan barang-barang kebutuhan dasar di Kawasan Perbatasan. Hal ini dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat perbatasan dan meminimalkan aktivitas ilegal lalu lintas barang-barang kebutuhan dasar terutama yang telah disubsidi pemerintah Indonesia maupun pemerintah negara tetangga.

c. Pengembangan Kerja Sama Perdagangan Ekspor-Import di Kawasan Perbatasan dengan Negara Tetangga

Kerja sama perdagangan luar negeri yang mencakup ekspor-import barang dan jasa melalui Kawasan Perbatasan negara dengan negara tetangga perlu terus dikembangkan. Hal ini untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di Kawasan Perbatasan yang berorientasi pada pemenuhan potensi pasar negara tetangga.

D. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Pada dimensi pembangunan Kawasan Perbatasan negara, arah strategis pembangunan Kawasan Perbatasan negara ditujukan untuk menjadikan Kawasan Perbatasan negara sebagai wilayah yang maju, baik dari sisi ekonomi, infrastruktur, serta kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu kebijakan dan strategi pelaksanaan berdasarkan bidang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bidang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

1. Bidang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan

a) Subbidang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan

Kebijakan Subbidang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan diarahkan pada upaya memberikan kepastian pemanfaatan ruang melalui perencanaan terintegrasi, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Strategi pelaksanaannya adalah:

- 1) Penyediaan Peta Dasar RDTR dan Penyelesaian Dokumen RDTR pada Lokpri dan PKS N yang Terintegrasi Antar-kepentingan Nasional dan Daerah

Penyusunan Peta Dasar RDTR menjadi bagian dalam proses penyusunan Materi Teknis (Matek) RDTR Kawasan Perbatasan Negara yang terintegrasi dengan kawasan sekitarnya. Berdasarkan regulasi tentang penataan ruang dan pemerintahan daerah, dokumen Matek selanjutnya harus disahkan melalui proses legislasi dalam bentuk peraturan presiden. Dalam RPJMN Tahun 2020-2024 ditargetkan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) dokumen Matek, termasuk 7 (tujuh) dokumen Matek pada periode lalu (RPJMN Tahun 2015-2019) yang belum masuk proses legislasi. Penyusunan RDTR PKS N Kawasan Perbatasan Negara mengacu pada fungsi pemanfaatan ruang, yaitu Fungsi Pusat Pelayanan Utama, Fungsi Pusat Pelayanan Penyangga, dan Fungsi Pusat Pelayanan Pintu Gerbang.

Target lain yang akan menjadi fokus hingga tahun 2024 adalah penyelesaian RTRKPN. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional, menetapkan 9 (sembilan) kawasan perbatasan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan diamanatkan untuk menyusun RTR dalam bentuk RTRKPN. Pada periode yang lalu (tahun 2014 hingga 2018) telah ditetapkan pengaturan ruang Kawasan Perbatasan negara yang berbatasan langsung dengan negara tetangga melalui 7 (tujuh) Peraturan Presiden mengenai RTRKPN. Dalam periode tahun 2020 hingga tahun 2024 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau serta ditargetkan penyelesaian RTRKPN untuk kawasan yang berbatasan dengan laut lepas.

2) Pengembangan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

2) Pengembangan Instrumen Pengendalian dan Pemantauan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perbatasan

Hal tersebut dilakukan melalui pengembangan instrumen pengendalian dan pemantauan pemanfaatan ruang, dengan memperkuat evaluasi pemanfaatan ruang melalui peninjauan kembali dokumen rencana tata ruang, serta penyusunan kebijakan pemberian insentif dan disinsentif untuk pengendalian pemanfaatan ruang. Proses penataan ruang bukan hanya terbatas pada perencanaan semata, namun tantangan terbesar adalah bagaimana menerapkan dokumen perencanaan tata ruang berdasarkan instrumen dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

b) Subbidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan tidak dibatasi wilayah administrasi, seperti halnya konsep yang digunakan dalam pengelolaan lingkungan hidup pada Daerah Aliran Sungai. Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan di Kawasan Perbatasan negara diarahkan pada pengembangan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Hal tersebut dilaksanakan melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim. Kegiatan yang dilakukan antara lain pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati, pengelolaan kawasan konservasi taman nasional, dan peningkatan penyuluhan.

2. Bidang Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Perbatasan

Pertumbuhan ekonomi Kawasan Perbatasan dilakukan di Kawasan PKSN. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, PKSN dikembangkan sebagai pusat kegiatan berkarakteristik perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitar dan/atau pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan disekitarnya. Selain itu, PKSN difungsikan sebagai pusat yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dan pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga.

a) Subbidang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

a) Subbidang Pembangunan dan Pengelolaan Potensi PKSN

Sebagai pusat pertumbuhan, pembangunan PKSN dilaksanakan berbasis potensi unggulan daerah yang meliputi sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan), sektor kehutanan, sektor kelautan dan perikanan (perikanan tangkap dan budi daya) serta sektor pariwisata. Strategi pelaksanaannya adalah:

1) Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Kehutanan

Hal ini dilakukan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi pada komoditas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan. Selain itu, efisiensi produksi akan berpengaruh terhadap daya saing produk termasuk upaya untuk mendorong peningkatan produktivitas sektor primer baik di dalam PKSN maupun beberapa wilayah di sekitarnya, dengan tetap memfokuskan produk yang akan dikembangkan di PKSN.

2) Pengembangan Sektor Industri dari Hasil Produksi Sektor Primer

Hal ini dilakukan melalui pengolahan hasil produksi sektor primer agar mendapatkan nilai tambah sebelum keluar dari wilayah PKSN, seperti mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi, meningkatkan kemasan, dan memenuhi standar produk dalam dan luar negeri. Selain itu upaya yang dilakukan adalah dengan membuka ruang bagi investor untuk membangun fasilitas pengolahan hasil produksi primer di wilayah PKSN dan sekitarnya.

3) Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Kelautan dan Perikanan

Hal ini dilakukan melalui pembangunan industri kelautan dan perikanan serta pengadaan bantuan sarana prasarana infrastruktur kelautan dan perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budi daya. Pembangunan industri kelautan dan perikanan pada SKPT di Kawasan Perbatasan dan PPKT perlu terus ditingkatkan sarana dan prasarannya. Beberapa SKPT di PKSN yang telah terbangun adalah SKPT Sabang, SKPT Natuna, SKPT Sebatik, SKPT Talaud, SKPT Morotai, SKPT Saumlaki, dan SKPT Merauke. Sementara itu, untuk penguatan kelompok nelayan/petani dilakukan dengan memberikan pelatihan dan bantuan sarana prasarana kapal penangkap ikan beserta peralatannya, sarana prasarana budi daya rumput laut, dan sarana prasarana budi daya perikanan darat dan laut.

4) Peningkatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 37 -

4) Peningkatan Aksesibilitas, Atraksi, dan Amenitas Pariwisata

Potensi daya tarik wisata merupakan salah satu potensi unggulan di PKS N. Pada umumnya daya tarik wisata di Kawasan Perbatasan adalah pariwisata alam, pariwisata budaya, dan pariwisata sejarah. Beberapa PKS N yang memiliki potensi unggulan pariwisata antara lain PKS N Sabang, PKS N Ranai, PKS N Paloh Aruk, PKS N Daruba, dan PKS N Saumlaki. Peningkatan aksesibilitas dilaksanakan melalui pembangunan sarana prasarana jalan dan transportasi menuju objek wisata. Peningkatan amenitas dilaksanakan melalui pembangunan sarana prasarana daya tarik wisata dan pembangunan *tourist information center*. Sementara untuk atraksi dilaksanakan melalui *event-event* kegiatan, termasuk *cross border tourism*. Dengan strategi tersebut diharapkan akan meningkatkan daya saing objek wisata yang dapat menambah lama tinggal (*length of stay*) di lokasi wisata.

5) Perluasan Kesempatan Berusaha di Sektor Ekonomi Kreatif

Peningkatan kapasitas individu untuk mampu bersaing dan memanfaatkan peluang pengembangan ekonomi dilakukan antara lain melalui pelatihan manajerial wirausaha, pemasaran dalam jaringan (*online*), dan teknis vokasional. Selain itu pengembangan dilakukan dengan memperluas akses kepada lembaga keuangan termasuk akses kerja sama dalam meningkatkan pemasaran bagi individu, koperasi, dan UMKM di wilayah perbatasan. Beberapa bentuk pelaksanaannya seperti pemberian bantuan permodalan bagi wirausaha pemula, pemberian fasilitas dana bergulir kepada koperasi, fasilitasi kemitraan kerja sama UMKM, pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu, pendataan dan identifikasi koperasi dan UMKM, serta revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah perbatasan, tertinggal, dan pascabencana.

6) Pengembangan Sumber Daya Manusia Terampil

Pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu fokus dari pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Kapasitas sumber daya manusia dikembangkan melalui peningkatan kemampuan masing-masing individu dan kelompok yang diarahkan sesuai sektor potensi unggulan di PKS N dengan kegiatan seperti pelatihan/bimbingan teknis/vokasional. Diharapkan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya

manusia . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 38 -

manusia di PKS N yang kompetitif tersebut akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing.

b) Subbidang Pembangunan dan Pengelolaan Infrastruktur PKS N

Kebijakan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur PKS N diarahkan untuk mewujudkan PKS N sebagai pusat/sentra pertumbuhan ekonomi, industri, dan perdagangan dengan dukungan sarana prasarana pendukung pergerakan perekonomian dari dan ke Kawasan PKS N. Selain itu, PKS N perlu didukung dengan peningkatan fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi wilayah serta tata kelola pemerintahan agar dapat menjadi rujukan layanan bagi kawasan di sekitarnya sesuai fungsi pembentukannya. Strategi pelaksanaannya adalah:

1) Peningkatan Infrastruktur Konektivitas Wilayah di PKS N

Peningkatan konektivitas dilakukan melalui program pembangunan berupa penyediaan sarana dan prasarana jalan/jembatan (nasional/provinsi/kabupaten/strategis desa/non-status), transportasi (darat, laut, dan udara), dan telekomunikasi dan informasi. Hal tersebut sangat penting karena ketersediaan infrastruktur menjadi salah satu ukuran keberhasilan pengelolaan Kawasan Perbatasan, yang dilakukan melalui:

(a) Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Jalan/Jembatan

Pembangunan infrastruktur konektivitas merupakan prioritas pemerintah untuk meningkatkan serta membuka akses antar-wilayah. Beberapa upaya yang dilakukan berupa pembangunan, pembukaan, dan peningkatan jalan/jembatan strategis nasional (sejajar perbatasan), serta jalan strategis desa/non-status, sebagai jalan yang bernilai strategis karena selain memiliki fungsi menumbuhkan ekonomi di Kawasan Perbatasan, termasuk pengembangan simpul transportasi kawasan, juga untuk kepentingan pertahanan keamanan.

(b) Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Transportasi

Pengembangan perekonomian di Kawasan Perbatasan salah satunya sangat tergantung pada ketersediaan aksesibilitas transportasi yang menjamin kelancaran distribusi barang dan aliran komoditas unggulan dari Kawasan Perbatasan ke kawasan industri di perkotaan dan sebaliknya.

(1) Transportasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

(1) Transportasi Darat

Pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat merupakan upaya dalam menyediakan fasilitas yang mendukung pergerakan cepat, aman, nyaman, dan sesuai kebutuhan akan kapasitas angkut dengan menyesuaikan dengan jenis moda yang digunakan di PKS N.

(2) Transportasi Laut

Pembangunan transportasi laut dilakukan melalui peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan laut yang difungsikan sebagai pintu masuk bagi barang dan orang menuju dan keluar wilayah PKS N. Pengembangan beberapa pelabuhan laut strategis ke depan akan diarahkan berskala internasional. Selain itu, juga dilakukan melalui perluasan layanan jaringan perintis, jaringan tol laut, dan kapal ternak untuk meningkatkan distribusi barang dan komoditas unggulan daerah guna memperluas pangsa pasar ke luar daerah dan negara tetangga.

(3) Transportasi Udara

Pembangunan transportasi udara diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam kerangka penyediaan aksesibilitas kepada masyarakat di Kawasan Perbatasan. Kegiatan dilakukan melalui pembangunan bandara baru, penyediaan fasilitas terminal dan landasan, peningkatan cakupan layanan penerbangan perintis, dan jembatan udara.

(c) Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi

Sejalan dengan kebijakan transformasi digital nasional, peningkatan konektivitas telekomunikasi dan informasi di PKS N dilakukan melalui peningkatan ketersediaan infrastruktur guna memperluas cakupan layanan telekomunikasi dan informasi. Upaya yang dilakukan antara lain penyediaan BTS di wilayah *blankspot*, dan meningkatkan kualitas layanan komunikasi data untuk memperkuat dan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses telekomunikasi dan informasi.

Penyediaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

Penyediaan infrastruktur BTS merupakan penyediaan layanan *mobile broadband* atau menara jaringan seluler di PKSNI yang belum terlayani akses telekomunikasi. Selanjutnya untuk akses internet diutamakan pada titik layanan publik seperti sekolah, puskesmas, kantor pemerintah, balai latihan kerja, ruang publik, terminal, dan PLBN.

2) Peningkatan Infrastruktur Sumber Daya Energi di PKSNI

Untuk mendukung aktivitas PKSNI sebagai pusat kegiatan perekonomian wilayah, salah satu prioritas yang dilakukan adalah memastikan ketersediaan energi yang memadai berupa ketersediaan Energi (*On-Grid Off-Grid*). Pentingnya ketersediaan energi menjadi salah satu pendukung keberhasilan pengelolaan yang dilakukan melalui:

a) Penyediaan EBT

Upaya percepatan pengembangan EBT, khususnya pemanfaatan tenaga surya, diarahkan melalui pengembangan PLTS komunal/PLTS Sentralisasi, dan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE). Kegiatan ini ditujukan untuk wilayah yang tidak terdapat jaringan *grid*/PLN.

b) Penyediaan Energi Listrik yang bersumber dari PLN

Kebutuhan energi listrik di Kawasan Perbatasan masih tinggi. Hal ini dikarenakan medan pendistribusian yang sulit dijangkau, berdampak pada biaya yang dibutuhkan dalam penyediaan suplai listrik. Kegiatan yang dilakukan adalah pendistribusian jaringan listrik berupa penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari sistem pembangkit ke rumah penduduk.

c) Penyediaan Bahan Bakar Minyak Satu Harga

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pemerintah membuat kebijakan berupa penyediaan, pendistribusian, serta pengaturan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga, yang dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat di Kawasan Perbatasan. Tersedianya BBM satu harga berdampak pada penguatan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan bahan bakar untuk transportasi dan aktivitas perekonomian. Implementasi penyediaan BBM satu harga diharapkan dapat menjamin stabilitas harga bahan pokok di Kawasan Perbatasan.

3) Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

3) Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Kesehatan

Penyediaan layanan kesehatan rujukan dilaksanakan melalui pembangunan Rumah Sakit Pratama atau Rumah Sakit Tipe D sebagai fasilitas kesehatan rujukan untuk Kawasan di sekitarnya. Kegiatan yang dilaksanakan berupa: (1) pembangunan rumah sakit pratama di PKSN; (2) pembangunan sarana penunjang rumah sakit yang antara lain meliputi rumah dinas; Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) rumah sakit, instalasi farmasi; (3) penyediaan prasarana rumah sakit antara lain pengadaan peralatan kesehatan rumah sakit, penyediaan farmasi, pengadaan alat penunjang pelayanan kebidanan, dan alat-alat penunjang medis lainnya.

4) Peningkatan Infrastruktur Pendidikan

Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menuju sekolah unggulan dan pusat pendidikan vokasional di PKSN dilaksanakan melalui pembangunan sekolah-sekolah unggulan di PKSN yang menjadi model dalam meningkatkan pendidikan di PKSN. Di samping itu didorong pula terwujudnya SMK unggulan sebagai pusat pendidikan vokasional di PKSN yang mendukung penyediaan tenaga kerja sesuai potensi kawasan PKSN. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain: (1) fasilitasi dan pembinaan SMA menjadi Sekolah Penggerak; (2) fasilitasi dan pembinaan SMK menjadi Sekolah Rujukan; (3) fasilitasi sertifikasi kompetensi siswa SMK; (4) fasilitasi pengembangan sarana praktek dan prasarana kursus dan pelatihan vokasi di PKSN.

5) Peningkatan Infrastruktur Permukiman

Peningkatan sarana dan prasarana permukiman dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas permukiman yang ada saat ini di PKSN serta membangun permukiman baru yang didukung oleh ketersediaan akses air minum dan sanitasi lingkungan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui: (1) pembangunan infrastruktur permukiman berbasis masyarakat; (2) penataan permukiman kumuh secara terintegrasi; (3) pembangunan rumah khusus beserta prasarana umumnya; (4) pembangunan, peningkatan dan perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); (5) pembangunan SPAM berbasis masyarakat; (6) penyediaan SPAM regional; (7) penyediaan instalasi pengolahan limbah rumah tangga skala komunal.

6) Penyediaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 42 -

6) Penyediaan Pasar Rakyat dan Gudang Non-Sistem Resi Gudang (SRG)

Penyediaan pasar rakyat dan gudang non-SRG dilakukan terintegrasi dalam satu sistem guna mendukung perekonomian di PKSN. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat setempat mempunyai akses pada perekonomian PKSN sehingga kemajuan yang dicapai PKSN dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi: (1) pembangunan/revitalisasi pasar rakyat; (2) pembangunan gudang non-SRG; (3) pemberdayaan UMKM; (4) pelatihan manajemen pasar; (5) penyediaan sarana metrologi legal kabupaten/kota.

7) Peningkatan Pelayanan Pemerintahan

Pembangunan perbatasan khususnya di PKSN diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kawasan Perbatasan. Hal tersebut memerlukan peran pemerintah dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas secara efektif dan menjembatani kebijakan pemerintah pusat hingga pemerintah daerah kabupaten/kota. Sarana prasarana pemerintahan serta sumber daya manusia menjadi hal yang utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun kegiatan peningkatan pelayanan pemerintahan di PKSN, antara lain: (1) membangun/merehabilitasi kantor untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhan; dan (2) meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3. Bidang Pemerataan Pembangunan Kawasan Perbatasan

Subbidang Pengelolaan Lokpri

Kebijakan pengelolaan Lokpri sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 diarahkan pada aspek pemerataan pembangunan melalui penyediaan fasilitas pelayanan sosial dasar dan pengembangan perekonomian termasuk pemanfaatan potensi yang dimiliki. Sebagaimana diketahui bahwa Kawasan Perbatasan, dalam hal ini Lokpri termasuk PPKT banyak memiliki potensi sumber daya alam berupa pertanian (perkebunan, hortikultura, dan peternakan), kelautan dan perikanan, serta pariwisata. Potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk peningkatan pengembangan ekonomi masyarakat. Strategi pelaksanaannya adalah:

a. Pengembangan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 43 -

a. Pengembangan Ekonomi Masyarakat Skala Lokal

Pengembangan ekonomi masyarakat skala lokal dilakukan melalui:

- 1) Pengembangan perekonomian warga masyarakat yang berbasis pada ekonomi rumah tangga, pemenuhan kebutuhan dan stabilitas harga bahan makanan pokok, serta pengembangan terhadap mata pencaharian masyarakat.
- 2) Pengembangan sektor primer terutama sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan peternakan. Sektor primer selanjutnya dikembangkan berdasarkan potensi masing-masing Lokpri menjadi produk unggulan melalui pengembangan kawasan sentra produksi tanaman padi untuk menghasilkan beras premium, peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan, peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura, peningkatan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan, pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat, penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pertanian, penciptaan teknologi dan inovasi pertanian bio-industri berkelanjutan, peningkatan penyuluhan dan pelatihan pertanian, peningkatan kualitas perkarantina pertanian dan pengawasan keanekaragaman hayati, serta peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat.

b. Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Kelautan dan Perikanan

Pembangunan industri kelautan dan perikanan, serta pengadaan bantuan sarana prasarana infrastruktur kelautan dan perikanan, baik perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Dalam pembangunan industri kelautan dan perikanan pada SKPT di Kawasan Perbatasan dan PPKT perlu terus ditingkatkan sarana prasarannya, seperti di SKPT Rote Ndao dan SKPT Biak. Sementara itu, untuk penguatan kelompok nelayan dilakukan melalui pelatihan dan bantuan sarana prasarana kapal penangkap ikan beserta peralatannya, sarana prasarana budi daya rumput laut, sarana prasarana budi daya perikanan darat dan laut, serta konservasi lingkungan.

c. Peningkatan Atraksi dan Amenitas Pariwisata

Potensi daya tarik wisata merupakan salah satu potensi unggulan di Kawasan Perbatasan. Pada umumnya daya tarik wisata di Kawasan Perbatasan adalah pariwisata alam, pariwisata budaya, dan pariwisata sejarah. Peningkatan aksesibilitas dilaksanakan melalui pembangunan

sarana . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 44 -

sarana prasarana jalan dan transportasi menuju objek wisata. Peningkatan amenitas dilaksanakan melalui pembangunan sarana prasarana daya tarik wisata berbasis masyarakat dan pembangunan *tourist information center*. Sementara untuk atraksi dilaksanakan melalui *event-event* kegiatan, termasuk *cross border tourism*.

d. Pembangunan Sarana Prasarana Perdagangan Gudang Non-SRG

Kecamatan Lokpri di Kawasan Perbatasan sebagian besar merupakan daerah *remote* yang sulit terjangkau dan sebagian diantaranya memiliki ketergantungan cukup tinggi akan pasokan barang dari luar. Untuk itu diperlukan pembangunan Gudang Non-SRG sebagai tempat penyimpanan barang kebutuhan pokok dan komoditas lainnya dalam upaya untuk menjaga ketahanan pangan, dan stabilitas harga.

e. Peningkatan Jejaring Sosial-Budaya Masyarakat di Perbatasan

Selain masalah ekonomi, urusan sosial kemasyarakatan perlu disentuh untuk mendukung stabilitas keamanan dan ketertiban dan pengembangan ekonomi dengan memanfaatkan jejaring antar kelompok masyarakat serta peningkatan jejaring sosial budaya masyarakat di Kawasan Perbatasan. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan antara lain membangun kelompok masyarakat berbasis keagamaan, kepemudaan, dan lain-lain. Di samping itu juga dapat dilakukan kerja sama antarkelompok masyarakat lintas negara untuk beraktivitas bersama. Peningkatan jejaring sosial budaya masyarakat di perbatasan diarahkan untuk meningkatkan kohesi sosial antar-masyarakat di perbatasan dan sekaligus saling pengertian dengan masyarakat perbatasan negara tetangga yang dilaksanakan melalui antara lain: pengembangan *city to city partnership* antar-pemerintah daerah di perbatasan dengan pemerintah daerah di negara tetangga; penyelenggaraan festival budaya perbatasan; pengembangan pasar bersama perbatasan (*cross border market*); dan mengaktifkan komunikasi budaya masyarakat perbatasan melalui radio dan TV komunitas.

f. Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Konektivitas dan Sumber Daya Energi

Penyelenggaraan konektivitas yang meliputi pembangunan serta pemeliharaan jalan dan jembatan, transportasi, telekomunikasi dan informasi, melalui percepatan pembangunan konektivitas diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Lokpri.

1) Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

1) Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Jalan/Jembatan

Pembangunan infrastruktur konektivitas merupakan prioritas pemerintah untuk meningkatkan serta membuka akses antarwilayah. Upaya yang dilakukan berupa pembangunan, pembukaan, dan peningkatan jalan/jembatan strategis nasional (sejajar perbatasan), serta jalan strategis desa/non-status, sebagai jalan yang bernilai strategis karena selain memiliki fungsi menumbuhkan perekonomian juga untuk kepentingan pertahanan keamanan. Kegiatan prioritas diarahkan untuk pembangunan ruas jalan strategis nasional (pembangunan baru, preservasi, pemeliharaan rutin dan berkala), dan kegiatan pembangunan ruas jalan Desa Strategis di Lokpri.

2) Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Transportasi

Pembangunan transportasi meliputi prasarana transportasi darat (terminal orang dan barang, serta dermaga penyeberangan sungai danau), transportasi laut (dermaga penyeberangan laut, kapal perintis, tol laut, subsidi angkutan), dan transportasi udara (bandara perintis, peningkatan fasilitas bangunan, fasilitas terminal, fasilitas landasan).

3) Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi

Sejalan dengan kebijakan transformasi digital yang dicanangkan oleh pemerintah, peningkatan konektivitas telekomunikasi dan informasi di kecamatan lokasi prioritas dilakukan dengan memperluas cakupan layanan telekomunikasi dan informasi. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informasi di Kawasan Perbatasan masih belum merata, serta terkendala kondisi geografis dan luas wilayah. Hal ini mengakibatkan masih cukup banyak wilayah pedesaan di kecamatan lokpri Kawasan Perbatasan yang belum terjangkau layanan telekomunikasi (*blankspot*) dan akses internet. Upaya yang dilakukan antara lain penyediaan BTS di wilayah *blankspot* dan meningkatkan kualitas layanan komunikasi data untuk memperkuat dan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses telekomunikasi dan informasi. Kegiatan diarahkan untuk penyediaan akses telekomunikasi berupa penyediaan menara pemancar atau BTS dengan beragam teknologi dan penyediaan akses internet yang diarahkan untuk mendukung layanan kesehatan, pendidikan, pemerintahan, dan perekonomian.

4) Pembangunan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 46 -

4) Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Sumber Daya Energi

Untuk mendukung aktivitas Lokpri sebagai pusat kegiatan perekonomian wilayah, salah satu prioritas yang dilakukan adalah:

a) Penyediaan Energi Listrik yang bersumber dari PLN

Kebutuhan energi listrik di Kawasan Perbatasan masih cukup tinggi. Hal ini dikarenakan medan pendistribusian yang sulit dijangkau yang berdampak pada biaya yang dibutuhkan dalam penyediaan suplai listrik. Untuk itu, pemerintah terus berusaha menyuplai pasokan listrik di Lokpri sehingga ketersediaan energi listrik yang memadai diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat dan pelayanan publik di Kawasan Perbatasan. Kegiatan yang dilakukan adalah meningkatkan pendistribusian jaringan listrik berupa penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari sistem pembangkit ke rumah-rumah penduduk.

b) Pemanfaatan EBT

Mendorong ketersediaan pembangkit listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan seperti (PLTS Komunal, *Solar Home System*, dan LTSHE), mampu mengalirkan listrik ke desa-desa yang sangat terisolasi dan sulit dijangkau distribusi PLN.

c) Penyediaan BBM Satu Harga

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa penyediaan, pendistribusian, serta pengaturan harga BBM satu harga, yang dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat di Kawasan Perbatasan. Dengan tersedianya BBM satu harga akan berdampak pada penguatan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan bahan bakar untuk transportasi dan aktivitas perekonomian. Implementasi penyediaan BBM satu harga diharapkan dapat mendorong stabilitas harga bahan pokok dan akselerasi kesejahteraan masyarakat di Kawasan Perbatasan.

g. Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Sosial Dasar

Pemenuhan fasilitas pelayanan sosial dasar diarahkan untuk memastikan masyarakat di Kawasan Perbatasan mendapatkan akses terhadap layanan sosial dasar sesuai dengan standar minimal sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan. Beberapa kegiatan untuk mendukung pemenuhan layanan sosial dasar di Lokpri meliputi:

1) Pemenuhan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 47 -

1) Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Masyarakat di Kawasan Perbatasan

Hal tersebut diupayakan sesuai standar nasional pendidikan, yang meliputi ketersediaan sarana prasarana pendidikan, aksesibilitas masyarakat/anak usia sekolah dan mutu pendidikan, melalui: (1) peningkatan tata kelola pendidikan pada semua jenjang; (2) peningkatan kualitas pengajaran pada semua jenjang; (3) peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik serta tenaga kependidikan; (4) peningkatan ketersediaan dan mutu sarana dan prasarana pendidikan pada semua jenjang; (5) afirmasi akses dan percepatan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun. Pembangunan dan penyediaan layanan dasar sektor pendidikan di Lokpri diarahkan pada peningkatan akses pendidikan dasar hingga pendidikan lanjutan termasuk pendidikan vokasional (jenjang SMA/SMK).

2) Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Sesuai dengan Standar Pelayanan

Upaya pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat dilaksanakan melalui peningkatan kesiapan sistem kesehatan termasuk ketersediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan baik pelayanan dasar (Puskesmas Pembantu dan Puskesmas), pelayanan rujukan (rumah sakit), maupun layanan kefarmasian dan laboratorium kesehatan, percepatan perbaikan gizi masyarakat dalam penurunan *stunting*, peningkatan intervensi kesehatan ibu dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), serta penguatan Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) melalui peningkatan deteksi dini penyakit dan perilaku hidup sehat.

3) Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Permukiman Masyarakat

Kebutuhan fasilitas permukiman masyarakat di Kawasan Perbatasan dilakukan melalui pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar, berupa penyediaan rumah layak huni yang didukung oleh ketersediaan akses air minum dan sanitasi permukiman, yang meliputi antara lain drainase lingkungan, sarana persampahan dan pengelolaan limbah rumah tangga, serta pembudayaan pola hidup bersih dan sehat.

4) Pemenuhan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 48 -

4) Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Perekonomian Lokal Masyarakat

Pemenuhan fasilitas pelayanan perekonomian masyarakat dilaksanakan untuk memfasilitasi aktivitas perdagangan dan perputaran perekonomian skala lokal seperti jual-beli hasil produksi masyarakat setempat. Upaya pemenuhan sarana perekonomian bagi masyarakat dilaksanakan melalui antara lain: fasilitasi pembangunan dan pengembangan sarana perdagangan berupa pasar rakyat, pembentukan dan operasionalisasi Unit Metrologi Legal pada Kawasan Perbatasan; pengawasan barang dan jasa yang beredar pada Kawasan Perbatasan; peningkatan kemampuan pengelolaan pasar rakyat; dan peningkatan kemampuan pelaku usaha dari masyarakat dan UMKM di wilayah perbatasan.

h. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat di Kawasan Perbatasan, perlu didukung dengan ketersediaan dan kelayakan infrastruktur pemerintahan di kecamatan dan desa/kelurahan. Upaya yang dilakukan antara lain meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan, khususnya di Lokpri melalui pembangunan/rehabilitasi kantor, balai pertemuan umum di kecamatan dan desa/kelurahan yang belum memadai.

i. Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dengan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang didukung ketersediaan sarana prasarana yang memadai, diharapkan dapat memberikan kepastian atas dokumen kewarganegaraan mulai dari lahir sampai dengan meninggal dunia. Hal ini sangat diperlukan untuk mengantisipasi adanya kejahatan lintas negara yang terjadi di Kawasan Perbatasan. Selain itu, kebijakan pada sektor ini harus mampu mengatasi permasalahan status kewarganegaraan yang terjadi di beberapa Kawasan Perbatasan.

Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negara Indonesia melalui pelayanan dokumen kependudukan secara cepat, akurat, lengkap dan gratis. Salah satu langkah strategis yang dilaksanakan adalah gerakan membangun ekosistem pemerintahan yang sadar pentingnya administrasi kependudukan, yaitu program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA), meliputi: (1) sadar kepemilikan dokumen kependudukan; (2) sadar pemutakhiran data penduduk; (3) sadar pemanfaatan data kependudukan; (4) sadar melayani administrasi kependudukan.

j. Peningkatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 49 -

j. Peningkatan Kapasitas Aparatur

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan di Kawasan Perbatasan negara merupakan bagian dari kebijakan pengelolaan BWN-KP. Hal tersebut diupayakan antara lain melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan pertemuan tematik kementerian/lembaga teknis untuk meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur. Selanjutnya khusus bagi aparatur pemerintahan kecamatan di Kawasan Perbatasan negara, harus memiliki kemampuan dan kompetensi dalam pengelolaan BWN-KP seperti membantu pemerintah pusat dalam melaksanakan pengawasan di bidang keimigrasian, kepabeanan, dan perkarantinaan yang ditugaskan kementerian/lembaga terkait kepada bupati/walikota, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

k. Bantuan Sosial Pemerintah

Bantuan Sosial Pemerintah merupakan salah satu kebijakan yang diberikan dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan di Kawasan Perbatasan. Kebijakan tersebut dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kondisi pada masing-masing daerah, dalam bentuk program bantuan sosial seperti: (1) penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan; (2) penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera; (3) Pangan Non-Tunai; (4) penyaluran Bantuan Sarana Prasarana Lingkungan; (5) penyaluran Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni; (6) penyaluran Bantuan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil; (7) program Kewirausahaan Sosial.

E. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN BWN-KP

Pelaksanaan penguatan kelembagaan pengelolaan BWN-KP dilakukan untuk menjadikan BNPP sebagai lembaga yang komunikatif, koordinatif, dan akuntabel. Untuk mewujudkan hal tersebut dirumuskan kebijakan serta strategi pelaksanaan pada masing-masing bidang sebagai berikut:

1. Bidang Koordinasi Pengelolaan Perbatasan Negara.

a. Subbidang Kerja Sama Pengelolaan Perbatasan Antarnegara

Kebijakan pengelolaan perbatasan melalui kerja sama antarnegara diarahkan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan komunikasi dan koordinasi kerja sama antarnegara. Strategi pelaksanaannya adalah:

1) mengembangkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 50 -

- 1) mengembangkan komunikasi dan koordinasi pengelola perbatasan antarnegara yang terintegrasi antar-pemangku kepentingan, serta kelembagaan perundingan dan kerja sama ekonomi dan sosial budaya;
- 2) mendorong program kerja sama baik secara bilateral maupun regional dan subregional untuk pengembangan Kawasan Perbatasan;
- 3) mengoptimalkan peran atase dan konsulat jenderal, atau kantor perwakilan dan lembaga di luar negeri dalam rangka menjembatani komunikasi untuk pengembangan Kawasan Perbatasan negara.

b. Subbidang Koordinasi Pengelolaan Tingkat Pusat

Kebijakan koordinasi pengelolaan pada tingkat pusat diarahkan untuk mengoptimalkan peran serta kementerian/lembaga dalam membangun dan mengelola Kawasan Perbatasan sesuai tugas dan fungsinya yang didukung dengan pemanfaatan teknologi berbasis digital. Strategi pelaksanaannya adalah:

- 1) meningkatkan komitmen bersama antar-kementerian/lembaga untuk mengalokasikan sumber daya ke Kawasan Perbatasan;
- 2) memperkuat kapasitas sumber daya manusia pengelola BWN-KP lintas kementerian/lembaga; dan
- 3) meningkatkan sistem koordinasi dan komunikasi berbasis data dan teknologi informasi dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan BWN-KP dengan transformasi digital.

c. Subbidang Koordinasi Pengelolaan Pusat-Daerah

Kebijakan subbidang koordinasi pengelolaan pada tingkat pusat dan daerah diarahkan untuk meningkatkan sinergi pusat dan daerah yang berkesinambungan dalam memajukan Kawasan Perbatasan. Strategi pelaksanaannya adalah:

- 1) meningkatkan koordinasi dan komunikasi kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah yang didukung teknologi informasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengelolaan BWN-KP antar pusat dan daerah;

2) memperkuat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 51 -

- 2) memperkuat peran kelembagaan pengelola perbatasan di daerah yaitu Badan Pengelola Perbatasan Daerah dan/atau unit kerja yang membidangi pengelolaan BWN-KP di daerah untuk mewujudkan pengelolaan perbatasan di daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah, baik dalam aspek perencanaan maupun pengendalian dan evaluasi, serta tugas pemerintah daerah dalam pengelolaan BWN-KP.
- d. Subbidang Kerja Sama Perguruan Tinggi dan Partisipasi Aktor Nonpemerintah

Kebijakan kerja sama perguruan tinggi dan partisipasi aktor nonpemerintah diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di perbatasan serta mengembangkan dan menyediakan infrastruktur dasar dalam mendukung pembangunan dan pengelolaan perbatasan. Strategi pelaksanaannya adalah:

- 1) meningkatkan peran serta perguruan tinggi dalam pemberdayaan masyarakat Kawasan Perbatasan melalui penelitian dan pelatihan serta pengembangan potensi Kawasan Perbatasan, sebagai bagian dari pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
 - 2) meningkatkan partisipasi berbagai elemen nonpemerintah dalam memaksimalkan pengelolaan perbatasan dan mendorong tidak hanya terfokus pada pembangunan oleh pemerintah saja;
 - 3) mengembangkan komunikasi formal dan informal antara elemen nonpemerintah dengan pemangku kebijakan pengelola BWN-KP untuk mengoptimalkan pengelolaan perbatasan.
2. Bidang Perencanaan Pengelolaan Perbatasan Negara

Untuk memperkuat pendekatan integratif dalam pelaksanaan program dan prioritas pengelolaan perbatasan negara sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, upaya untuk memadukan pelaksanaan perencanaan program pengelolaan BWN-KP salah satunya dilakukan melalui pembagian peran oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan juga menyebutkan bahwa program pengelolaan perbatasan

negara . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 52 -

negara dilaksanakan dan didanai oleh masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang merupakan anggota BNPP, sedangkan BNPP berperan sebagai koordinator yang menyinergikan program pengelolaan perbatasan. Pendekatan integratif diperlukan untuk memastikan kesiapan para pihak terkait dalam mempersiapkan dan merencanakan prioritas pengelolaan perbatasan negara agar pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan negara dapat berjalan secara efektif, sinergis dan terintegrasi untuk mencapai tujuan, sasaran, dan target pembangunan.

Subbidang Perencanaan Pengelolaan BWN-KP

Kebijakan Perencanaan Pengelolaan BWN-KP diarahkan pada sinkronisasi penyusunan perencanaan pengelolaan BWN-KP antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan pendekatan holistik, integratif, tematik, serta berorientasi pada konektivitas antarruang yang berkelanjutan. Strategi pelaksanaannya adalah:

- a. menjadikan Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 dan Renaksi Pengelolaan BWN-KP sebagai pedoman dalam tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, khususnya dalam pengelolaan BWN-KP;
- b. memastikan kebijakan, program, kegiatan, dan indikasi anggaran dalam dokumen Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 dan Renaksi Pengelolaan BWN-KP termuat dalam dokumen perencanaan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang memiliki wilayah perbatasan.

3. Bidang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Perbatasan Negara

a. Subbidang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan BWN-KP

Kebijakan monitoring dan evaluasi pengelolaan perbatasan diarahkan untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan serta memastikan pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana pengelolaan perbatasan. Strategi pelaksanaannya adalah:

- 1) mengimplementasikan instrumen monitoring dan evaluasi dalam memantau dan mengukur kinerja pengelolaan BWN-KP;

2) meningkatkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 53 -

- 2) meningkatkan peran kelembagaan pengendalian dan evaluasi pusat dan daerah dalam pengelolaan perbatasan. Monitoring dan evaluasi tidak hanya dilakukan pemerintah saja, namun juga dapat melibatkan partisipasi masyarakat untuk menilai capaian pengelolaan BWN-KP.

b. Subbidang Data dan Informasi Pengelolaan BWN-KP

Kebijakan penguatan data dan informasi diarahkan untuk memperkuat basis data pengelolaan BWN-KP sebagai rujukan dan input dalam pengambilan kebijakan untuk memajukan Kawasan Perbatasan. Strategi pelaksanaannya adalah:

- 1) membangun sistem basis data pengelolaan BWN-KP yang akurat dan mutakhir serta ekosistem yang terkoneksi didukung transformasi digital;
- 2) memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam sektor pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, serta pemanfaatan data dan informasi pengelolaan BWN-KP.

BAB IV . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

BAB IV WILAYAH PENGELOLAAN

Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 mengacu pada 2 (dua) prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu Pembangunan Kewilayahan dan Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (polhukhankam). Pembangunan Kewilayahan diarahkan untuk menyelesaikan isu strategis utama yaitu ketimpangan antarwilayah, dengan sasaran antara lain: (1) meningkatnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah NKRI; (2) meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah; (3) meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah; (4) meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang wilayah. Pembangunan kewilayahan menekankan keterpaduan pembangunan dengan pendekatan spasial atas dasar data dan informasi yang lengkap sesuai dengan rencana tata ruang dan daya dukung lingkungan. Pembangunan dimaksud dilaksanakan secara terintegrasi, mengutamakan kerja sama dan keterpaduan program dan kegiatan antar-kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, antar-pemerintah daerah, serta antar-pemerintah dan badan usaha dalam perencanaan, pendanaan dan pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Pendekatan ini tidak hanya terkait pertumbuhan ekonomi semata tetapi juga pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah dan masyarakat, melalui pendekatan pertumbuhan dan pemerataan, sebagaimana tercermin dari pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan, yang di dalamnya juga terdapat Kawasan Perbatasan.

Pengelolaan perbatasan memiliki tujuan untuk menjamin keutuhan wilayah negara dan kedaulatan negara melalui pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di Kawasan Perbatasan. Pembangunan polhukhankam diarahkan untuk mewujudkan penetapan dan penegasan Batas Wilayah Negara, penguatan sistem pertahanan dan keamanan serta penegakan hukum dan kesadaran politik atas kedaulatan negara, meningkatnya pelayanan lintas batas negara serta kerja sama lintas negara di perbatasan.

Berdasarkan kebijakan penataan ruang, pengelolaan Kawasan Perbatasan terbagi atas 9 (sembilan) Kawasan Perbatasan negara sebagai berikut:

1. Kawasan Perbatasan negara di Aceh dan Sumatera Utara;
2. Kawasan Perbatasan negara di Riau dan Kepulauan Riau;
3. Kawasan Perbatasan negara di Pulau Kalimantan;

4. Kawasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

4. Kawasan Perbatasan negara di Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara;
5. Kawasan Perbatasan negara di Maluku Utara dan Papua Barat;
6. Kawasan Perbatasan negara di Maluku;
7. Kawasan Perbatasan negara di Nusa Tenggara Timur;
8. Kawasan Perbatasan negara di Papua;
9. Kawasan Perbatasan dengan Laut Lepas.

Lokasi pengelolaan perbatasan diprioritaskan pada Kawasan Perbatasan, dalam hal ini adalah kecamatan-kecamatan terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain. Lokasi pengelolaan yang dipilih disebut sebagai Lokpri. Pemilihan Lokpri pengelolaan perbatasan secara garis besar dilakukan berdasarkan pendekatan pertahanan dan keamanan (*hankam*) atau *security approach* dan pendekatan kesejahteraan masyarakat atau *prosperity approach*. Pendekatan pertama yang menjadi perhatian adalah aspek *hankam*, kemudian aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan selanjutnya aspek kelestarian lingkungan (*environmental approach*) melengkapi kedua aspek *hankam* dan kesejahteraan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kawasan Perbatasan.

Pemilihan Lokpri juga mempertimbangkan aspek ketataruangan dan regional kawasan-kawasan pusat kegiatan dan penyangga di sekitarnya. Kriteria kecamatan perbatasan yang menjadi Lokpri dalam pengelolaan BWN-KP 2020-2024, adalah:

1. kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga di darat;
2. kecamatan yang berbatasan langsung (kecuali laut lepas) dengan negara tetangga di laut, yang merupakan pemantapan Lokpri tahun 2015-2019;
3. kecamatan yang merupakan/berada dan/atau memiliki PPKT, yang berbatasan langsung dengan negara tetangga;
4. kecamatan yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Pintu Gerbang sebagaimana tercantum dalam peraturan presiden yang mengatur mengenai RTR KPN;
5. kecamatan yang di wilayahnya terdapat PLBN berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 (Sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan;

6. kecamatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

6. kecamatan yang berfungsi sebagai PKSN dan merupakan pemantapan PKSN Tahun 2015-2019, PKSN yang di wilayahnya terdapat PLBN, serta PKSN dengan pertimbangan khusus untuk mendorong aspek pemerataan.

Untuk menjabarkan program dan kegiatan Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 lebih fokus dan terintegrasi mengacu pada prioritas Pembangunan Nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, lokus wilayah pengelolaan BWN-KP dilakukan pada 4 (empat) unsur yaitu PLBN, PPKT, PKSN, dan Lokpri. Wilayah Pengelolaan BWN-KP 2020-2024, diuraikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel Wilayah Pengelolaan BWN-KP 2020-2024

No	Jenis	Jumlah	Darat	Laut	Keterangan
1	PLBN	26 Lokasi	21	5	<ul style="list-style-type: none">• 8 PLBN telah selesai dibangun pada tahun 2019• 10 PLBN dibangun mulai Tahun 2020• 8 PLBN akan dibangun pada tahun 2022-2024
2	PPKT Tidak Berpenduduk	49 Pulau	-	49	<ul style="list-style-type: none">• PPKT Berpenduduk sudah termasuk dalam intervensi Lokpri
3	PKSN	18 Lokasi	10	8	<ul style="list-style-type: none">• 16 PKSN dalam Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan; 6 diantaranya <i>Major Project</i>.• 2 PKSN di Luar Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan.
4	Lokpri	222 Kecamatan	69	153	<ul style="list-style-type: none">• 176 Lokpri di dalam Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan.• 46 Lokpri di Luar Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan.

A. POS LINTAS BATAS NEGARA

PLBN di Kawasan Perbatasan telah menjadi wajah baru pengelolaan BWN-KP, sebagai beranda depan bagi para pelintas batas yang masuk ke Indonesia. Beberapa pertimbangan dalam menetapkan rencana lokasi PLBN adalah Instruksi Presiden serta keberadaan lokasi strategis kebutuhan pelayanan lintas batas negara dan unsur resiprokalitasnya. Saat ini telah

terbangun . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 57 -

terbangun 7 (tujuh) PLBN selama periode lalu melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan. Selanjutnya pada tahun 2019 telah ditetapkan 11 (sebelas) PLBN baru yang akan dibangun melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 (Sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan. Pada akhir tahun 2019 telah selesai 1 (satu) PLBN di Sota, Kabupaten Merauke, sementara sisanya dibangun secara bertahap hingga tahun 2024. Di samping itu, berdasarkan keberadaan kebutuhan pelayanan lintas batas dalam RPJMN Tahun 2020-2024, direncanakan 8 (delapan) lokasi yang akan dibangun PLBN pada tahun 2022-2024, sehingga target pengelolaan dan pembangunan PLBN Tahun 2020-2024 menjadi 26 (dua puluh enam) PLBN.

Adapun 18 (delapan belas) PLBN berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 (sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan menurut provinsi, meliputi:

1. Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna di Serasan (PLBN Laut).
2. Provinsi Kalimantan Barat (PLBN Darat):
 - a. Kabupaten Sambas di Aruk;
 - b. Kabupaten Bengkayang di Jagoi Babang;
 - c. Kabupaten Sanggau di Entikong;
 - d. Kabupaten Sintang di Sei Kelik;
 - e. Kabupaten Kapuas Hulu di Badau.
3. Provinsi Kalimantan Utara:
 - a. Kabupaten Malinau di Long Nawang (PLBN Darat);
 - b. Kabupaten Nunukan di Labang, Long Midang, (PLBN Darat), dan Sei Nyamuk/Sei Pancang (PLBN Laut).
4. Provinsi Nusa Tenggara Timur (PLBN Darat):
 - a. Kabupaten Kupang di Oepoli;
 - b. Kabupaten Timor Tengah Utara di Wini dan Napan;
 - c. Kabupaten Belu di Motaain;
 - d. Kabupaten Malaka di Motamasin.

5. Provinsi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

5. Provinsi Papua (PLBN Darat):
 - a. Kota Jayapura di Skouw;
 - b. Kabupaten Boven Digoel di Yetetkun;
 - c. Kabupaten Merauke di Sota.

B. PULAU-PULAU KECIL TERLUAR

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar, PPKT merupakan Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), yaitu kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional. Pemanfaatan PPKT dilakukan berdasarkan Rencana Zonasi dengan tujuan untuk menjaga kedaulatan NKRI. Pemanfaatan PPKT hanya dapat dilakukan untuk: (1) pertahanan keamanan; (2) kesejahteraan masyarakat; (3) pelestarian lingkungan.

Secara umum PPKT dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu: PPKT berpenduduk dan PPKT tidak berpenduduk. Pembangunan PPKT berpenduduk dilakukan secara terintegrasi dengan program dan kegiatan pembangunan di Lokpri. Selanjutnya, PPKT tidak berpenduduk difungsikan sebagai kawasan pertahanan dan keamanan, yang pengelolaannya sesuai target RPJMN Tahun 2020-2024 dilakukan di sejumlah 49 (empat puluh sembilan) PPKT pada 26 (dua puluh enam) kabupaten di 13 (tiga belas) provinsi, sebagai berikut:

1. Provinsi Aceh, Kota Sabang: Pulau Rondo.
2. Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai: Pulau Berhala.
3. Provinsi Riau, Kabupaten Rokan Hilir: Pulau Batumandi.
4. Provinsi Kepulauan Riau:
 - a. Kabupaten Bintan: Pulau Berakit, Pulau Malang berdaun, dan Pulau Sentut;
 - b. Kabupaten Karimun: Pulau Tokonghiu Kecil/Pulau Iyu Kecil;
 - c. Kabupaten Natuna: Pulau Tokongboro, Pulau Semiun, Pulau Sebetul, Pulau Sekatung, Pulau Senua, dan Pulau Kepala;
 - d. Kabupaten Kepulauan Anambas: Pulau Tokong Belayar, Pulau Tokong Malang Biru, Pulau Damar, Pulau Tokong Nanas, dan Pulau Mangkai;

e. Kota . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 59 -

- e. Kota Batam: Pulau Nipa, Pulau Batuberantai/Pulau Batu Berhanti, dan Pulau Putri/Pulau Nongsa.
5. Provinsi Nusa Tenggara Timur:
 - a. Kabupaten Kupang: Pulau Batek;
 - b. Kabupaten Rote Ndao: Pulau Ndana/Pulau Dana;
 - c. Kabupaten Sabu Raijua: Pulau Dana.
6. Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Berau: Pulau Sambit.
7. Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Nunukan: Pulau Karang Unarang.
8. Provinsi Sulawesi Utara:
 - a. Kabupaten Kepulauan Sangihe: Pulau Batubawaikang;
 - b. Kabupaten Kepulauan Talaud: Pulau Intata;
 - c. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara: Pulau Bongkil/Pulau Bangkit.
9. Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Toli-Toli: Pulau Dolangan dan Pulau Solando/Pulau Salando.
10. Provinsi Maluku:
 - a. Kabupaten Kepulauan Tanimbar: Pulau Asutubun dan Pulau Batarkusu;
 - b. Kabupaten Kepulauan Aru: Pulau Kultubai Utara, Pulau Kultubai Selatan, Pulau Ararkula, Pulau Karerei/Pulau Karaweira Besar, Pulau Karang, Pulau Batugoyang, dan Pulau Enu.
11. Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Tengah: Pulau Yiew Besar/Pulau Jiew.
12. Provinsi Papua:
 - a. Kabupaten Merauke: Pulau Habe/Pulau Habee dan Pulau Komolom;
 - b. Kabupaten Mimika: Pulau Puriri;
 - c. Kabupaten Supiori: Pulau Fanildo;
 - d. Kabupaten Asmat: Pulau Laag.
13. Provinsi Papua Barat:
 - a. Kabupaten Raja Ampat: Pulau Fani, dan Pulau Moff/Pulau Budd.
 - b. Kabupaten Tambraw: Pulau Missou.

C. PUSAT . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

C. PUSAT KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL

Pengelolaan dan pengembangan PKSN tahun 2020-2024 didasarkan pada amanat RPJMN Tahun 2020-2024, yang menetapkan koridor pembangunan terbagi menjadi dua yaitu “koridor pertumbuhan” dan “koridor pemerataan”. Berdasarkan pertimbangan di atas, ditetapkan PKSN yang menjadi fokus pada pengelolaan BWN-KP tahun 2020-2024 yaitu 16 (enam belas) PKSN di dalam koridor pertumbuhan dan pemerataan, yang terdiri atas 9 (sembilan) PKSN Darat, dan 7 (tujuh) PKSN Laut (termasuk enam diantaranya adalah *Major Project* RPJMN Tahun 2020-2024), dan 2 (dua) PKSN di luar koridor pertumbuhan dan pemerataan, yang terdiri atas 1 (satu) PKSN Darat dan 1 (satu) PKSN Laut. Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Di Dalam Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan
 - a. Provinsi Aceh, Kota Sabang: PKSN Sabang (PKSN Laut);
 - b. Provinsi Riau, Kabupaten Bengkalis: PKSN Bengkalis (PKSN Laut);
 - c. Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna: PKSN Ranai (PKSN Laut);
 - d. Provinsi Kalimantan Barat (PKSN Darat):
 - 1) Kabupaten Sambas: PKSN Paloh Aruk;
 - 2) Kabupaten Bengkayang: PKSN Jagoi Babang;
 - e. Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Nunukan: PKSN Tou Lumbis dan PKSN Long Midang, (PKSN Darat) dan PKSN Nunukan (PKSN Laut);
 - f. Provinsi Nusa Tenggara Timur (PKSN Darat):
 - 1) Kabupaten Belu: PKSN Atambua;
 - 2) Kabupaten Timor Tengah Utara: PKSN Kefamenanu;
 - g. Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe: PKSN Tahuna (PKSN Laut).
 - h. Provinsi Maluku, Kabupaten Kepulauan Tanimbar: PKSN Saumlaki (PKSN Laut).
 - i. Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Kepulauan Morotai: PKSN Daruba (PKSN Laut).
 - j. Provinsi Papua (PKSN Darat);
 - 1) Kota Jayapura: PKSN Jayapura;
 - 2) Kabupaten . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

- 2) Kabupaten Boven Digoel: PKSN Tanah Merah;
 - 3) Kabupaten Merauke: PKSN Merauke.
2. Di Luar Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan
- a. Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Malinau: PKSN Long Nawang (PKSN Darat).
 - b. Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud: PKSN Melonguane (PKSN Laut).

Cakupan kecamatan yang masuk dalam wilayah PKSN ditetapkan melalui deliniasi PKSN. Penetapan kecamatan tersebut menjadi bagian instrumen untuk pemantauan dan pengukuran tingkat keberhasilan pengembangan ekonomi wilayah. Deliniasi PKSN didasarkan pada RDTR PKSN, RTRW kabupaten/kota, RTRKPN, dan *Masterplan* Percepatan Pembangunan Ekonomi berbasis PKSN. Dari hasil deliniasi PKSN diperoleh 46 (empat puluh enam) kecamatan, yaitu 36 (tiga puluh enam) kecamatan yang merupakan Lokpri dan 10 (sepuluh) kecamatan di luar Lokpri yang ditangani pada periode Tahun 2020-2024, namun berada dalam cakupan wilayah PKSN, yaitu:

1. Kecamatan Lokpri
 - a. PKSN Sabang: Kecamatan Sukakarya dan Kecamatan Sukajaya;
 - b. PKSN Bengkalis: Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan;
 - c. PKSN Ranai: Kecamatan Bunguran Utara; Kecamatan Bunguran, Timur, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kecamatan Bunguran Selatan, dan Kecamatan Pulau Tiga;
 - d. PKSN Atambua: Kecamatan Tasifeto Timur dan Kecamatan Raihat;
 - e. PKSN Kefamenanu: Kecamatan Insana Utara, Kecamatan Bikomi Utara, Kecamatan Bikomi Tengah, dan Kecamatan Bikomi Nilulat;
 - f. PKSN Paloh Aruk: Kecamatan Saingan Besar dan Kecamatan Paloh;
 - g. PKSN Jagoi Babang: Kecamatan Jagoi Babang;
 - h. PKSN Log Nawang: Kecamatan Kayan Hulu;
 - i. PKSN Tou Lumbis: Kecamatan Lumbis Ogong;
 - j. PKSN Long Midang: Kecamatan Krayan;
 - k. PKSN Nunukan: Kecamatan Nunukan, Kecamatan Nunukan Selatan, dan Kecamatan Sebatik Utara;
 - l. PKSN Tahuna: Kecamatan Tahuna dan Kecamatan Tahuna Timur;
 - m. PKSN Melonguane: Kecamatan Melonguane;

n. PKSN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

- n. PKSN Saumlaki: Kecamatan Tanimba Utara dan Kecamatan Tanimbar Selatan;
 - o. PKSN Daruba: Kecamatan Morotai Selatan;
 - p. PKSN Jayapura: Kecamatan Jayapura Utara dan Kecamatan Muara Tami;
 - q. PKSN Tanah Merah: Kecamatan Ninati;
 - r. PKSN Merauke: Kecamatan Meraike, Kecamatan Sota, dan Kecamatan Semangga.
2. Kecamatan di Luar Lokpri
- a. PKSN Atambua: Kecamatan Atambua Barat; Kecamatan Atambua Selatan, Kecamatan Kalkuluk Mesak, dan Kecamatan Kota Atambua;
 - b. PKSN Kefamenanu: Kecamatan Kota Kefamenanu dan Kecamatan Bikomi Selatan;
 - c. PKSN Tahuna: Kecamatan Tahuna Barat;
 - d. PKSN Jayapura: Kecamatan Jayapura Selatan dan Kecamatan Abepura;
 - e. PKSN Tanah Merah: Kecamatan Mandobo.

Konsep pengembangan kecamatan yang masuk ke dalam cakupan wilayah PKSN, sebagai wilayah *hinterland* pusat pertumbuhan PKSN, dilakukan melalui pemenuhan pelayanan dasar, pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar dan konektivitas dalam kecamatan, pengembangan ekonomi melalui pengembangan komoditas unggulan dari hulu sampai dengan hilir, serta tata kelola pemerintahan. Sedangkan konsep pengembangan kecamatan perbatasan non-Lokpri dan kecamatan nonperbatasan yang masuk ke dalam deliniasi PKSN, diarahkan pada pengembangan komoditas unggulan dari hulu sampai hilir.

Dari 18 (delapan belas) PKSN di atas, 6 (enam) PKSN di antaranya ditetapkan sebagai proyek prioritas atau *Major Project* meliputi: (1) PKSN Paloh Aruk; (2) PKSN Nunukan; (3) PKSN Jayapura; (4) PKSN Merauke; (5) PKSN Atambua; dan (6) PKSN Kefamenanu. Selanjutnya, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Kawasan Perbatasan, 3 (tiga) PKSN di antaranya dilakukan percepatan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw. Kawasan Perbatasan Aruk dalam lingkup PKSN Paloh Aruk, Kawasan Perbatasan Motaain dalam lingkup PKSN Atambua, dan Kawasan Perbatasan Skouw dalam lingkup PKSN Jayapura.

D. LOKASI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

D. LOKASI PRIORITAS

Penentuan Lokpri dilakukan melalui beberapa parameter sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Lokasi ini berada pada wilayah administrasi kecamatan sebagaimana diamanatkan dalam UU Wilayah Negara. Berdasarkan pertimbangan keberadaan Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, serta amanat RTRKPN dan hasil evaluasi pengelolaan Lokpri periode sebelumnya, jumlah Lokpri yang dikelola pada tahun 2020-2024 sebanyak 222 (dua ratus dua puluh dua) Lokpri pada 54 (lima puluh empat) kabupaten/kota di 15 (lima belas) provinsi, dan terbagi ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu 176 (seratus tujuh puluh enam) Lokpri pada 43 (empat puluh tiga) kabupaten/kota di 15 (lima belas) provinsi berada di dalam Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan, dan 46 (empat puluh enam) Lokpri pada 11 (sebelas) kabupaten di 6 (enam) provinsi berada di luar Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan.

Tabel Daftar Lokasi Prioritas dalam RPJMN Tahun 2020-2024

PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	PENANGANAN TAHUN 2020-2024			DALAM/LUAR KORIDOR PERTUMBUHAN DAN Pemerataan	
	LOKPRI		DARAT/ LAUT		
I. ACEH					
1.	Aceh Besar	1	Mesjid Raya	Laut	Dalam Koridor
2.	Kota Sabang	2	Sukakarya	Laut	Dalam Koridor
		3	Sukajaya	Laut	Dalam Koridor
3.	Kota Langsa	4	Langsa Barat	Laut	Dalam Koridor
II. SUMATERA UTARA					
4.	Serdang Bedagai	5	Tanjung Beringin	Laut	Dalam Koridor
5.	Batu Bara	6	Sei Suka	Laut	Dalam Koridor
III. RIAU					
6.	Bengkalis	7	Bengkalis	Laut	Dalam Koridor
		8	Bantan	Laut	Dalam Koridor
		9	Rupat	Laut	Dalam Koridor
		10	Rupat Utara	Laut	Dalam Koridor
		11	Bandar Laksamana	Laut	Dalam Koridor
7.	Rokan Hilir	12	Bangko	Laut	Dalam Koridor
		13	Pasir Limau Kapas	Laut	Dalam Koridor
		14	Sinaboi	Laut	Dalam Koridor
8.	Kota Dumai	15	Sungai Sembilan	Laut	Dalam Koridor
		16	Medang Kampai	Laut	Dalam Koridor

9. Kep. Meranti . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 64 -

PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA		PENANGANAN TAHUN 2020-2024			DALAM/LUAR KORIDOR PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN
		LOKPRI		DARAT/ LAUT	
9.	Kep. Meranti	17	Rangsang Barat	Laut	Luar Koridor
		18	Rangsang	Laut	Luar Koridor
		19	Pulau Merbau	Laut	Luar Koridor
		20	Tasik Putri Puyu	Laut	Luar Koridor
		21	Rangsang Pesisir	Laut	Luar Koridor
IV. KEPULAUAN RIAU					
10.	Bintan	22	Gunung Kijang	Laut	Dalam Koridor
		23	Bintan Utara	Laut	Dalam Koridor
		24	Telok Sebong	Laut	Dalam Koridor
		25	Bintan Pesisir	Laut	Dalam Koridor
11.	Karimun	26	Moro	Laut	Dalam Koridor
		27	Karimun	Laut	Dalam Koridor
		28	Meral	Laut	Dalam Koridor
		29	Tebing	Laut	Dalam Koridor
		30	Buru	Laut	Dalam Koridor
		31	Meral Barat	Laut	Dalam Koridor
		32	Belat	Laut	Dalam Koridor
12.	Natuna	33	Bunguran Barat	Laut	Dalam Koridor
		34	Serasan	Laut	Dalam Koridor
		35	Bunguran Timur	Laut	Dalam Koridor
		36	Bunguran Utara	Laut	Dalam Koridor
		37	Subi	Laut	Dalam Koridor
		38	Pulau Laut	Laut	Dalam Koridor
		39	Pulau Tiga	Laut	Dalam Koridor
		40	Bunguran Timur Laut	Laut	Dalam Koridor
		41	Bunguran Selatan	Laut	Dalam Koridor
		42	Serasan Timur	Laut	Dalam Koridor
13.	Kep. Anambas	43	Siantan	Laut	Dalam Koridor
		44	Palatak	Laut	Dalam Koridor
		45	Siantan Selatan	Laut	Dalam Koridor
		46	Jemaja Timur	Laut	Dalam Koridor
		47	Jemaja	Laut	Dalam Koridor
		48	Siantan Utara	Laut	Dalam Koridor
		49	Jemaja Barat	Laut	Dalam Koridor
14.	Kota Batam	50	Belakang Padang	Laut	Dalam Koridor
		51	Batu Ampar	Laut	Dalam Koridor
		52	Sekupang	Laut	Dalam Koridor
		53	Nongsa	Laut	Dalam Koridor
		54	Lubuk Raja	Laut	Dalam Koridor
		55	Bengkong	Laut	Dalam Koridor
		56	Batam Kota	Laut	Dalam Koridor

V. NUSA . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 65 -

PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA		PENANGANAN TAHUN 2020-2024			DALAM/LUAR KORIDOR PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN
		LOKPRI		DARAT/ LAUT	
V. NUSA TENGGARA TIMUR					
15.	Kupang	57	Amfoang Timur	Darat	Dalam Koridor
16.	Timor Tengah Utara	58	Miomafo Barat	Darat	Dalam Koridor
		59	Insana Utara	Darat	Dalam Koridor
		60	Mutis	Darat	Dalam Koridor
		61	Bikomi Tengah	Darat	Dalam Koridor
		62	Bikomi Nilulat	Darat	Dalam Koridor
		63	Bikomi Utara	Darat	Dalam Koridor
		64	Naibenu	Darat	Dalam Koridor
17.	Belu	65	Lamaknen	Darat	Dalam Koridor
		66	Tasifeto Timur	Darat	Dalam Koridor
		67	Raihat	Darat	Dalam Koridor
		68	Tasifeto Barat	Darat	Dalam Koridor
		69	Lasiolat	Darat	Dalam Koridor
		70	Lamaknen Selatan	Darat	Dalam Koridor
		71	Nanaet Dubesi	Darat	Dalam Koridor
18.	Malaka	72	Malaka Tengah	Laut	Dalam Koridor
		73	Malaka Barat	Laut	Dalam Koridor
		74	Wewiku	Laut	Dalam Koridor
		75	Kobalima Timur	Darat	Dalam Koridor
		76	Kobalima	Laut	Dalam Koridor
19.	Alor	77	Teluk Mutiara	Laut	Luar Koridor
		78	Alor Barat Daya	Laut	Luar Koridor
		79	Alor Selatan	Laut	Luar Koridor
		80	Alor Timur	Laut	Luar Koridor
		81	Mataru	Laut	Luar Koridor
		82	Pureman	Laut	Luar Koridor
		83	Pantar Tengah	Laut	Luar Koridor
20.	Rote Ndao	84	Rote Barat Daya	Laut	Luar Koridor
		85	Lobalain	Laut	Luar Koridor
		86	Pantai Baru	Laut	Luar Koridor
		87	Rote Timur	Laut	Luar Koridor
		88	Rote Barat	Laut	Luar Koridor
		89	Rote Selatan	Laut	Luar Koridor
		90	Landu Leko	Laut	Luar Koridor
21.	Sabu Raijua	91	Sabu Timur	Laut	Luar Koridor
		92	Sabu Liae	Laut	Luar Koridor
		93	Hawu Mehara	Laut	Luar Koridor
		94	Raijua	Laut	Luar Koridor
VI. KALIMANTAN BARAT					
22.	Sambas	95	Paloh	Darat	Dalam Koridor
		96	Sajingan Besar	Darat	Dalam Koridor

23. Bengkulu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA		PENANGANAN TAHUN 2020-2024			DALAM/LUAR KORIDOR PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN
		LOKPRI		DARAT/ LAUT	
23.	Bengkayang	97	Jagoi Babang	Darat	Dalam Koridor
		98	Siding	Darat	Dalam Koridor
24.	Sanggau	99	Entikong	Darat	Luar Koridor
		100	Sekayam	Darat	Luar Koridor
25.	Sintang	101	Ketungau Tengah	Darat	Luar Koridor
		102	Ketungau Hulu	Darat	Luar Koridor
26.	Kapuas Hulu	103	Putussibau Utara	Darat	Luar Koridor
		104	Embaloh Hulu	Darat	Luar Koridor
		105	Batang Lupar	Darat	Luar Koridor
		106	Badau	Darat	Luar Koridor
		107	Putussibau Selatan	Darat	Luar Koridor
		108	Puring Kencana	Darat	Luar Koridor
VII. KALIMANTAN TIMUR					
27.	Berau	109	Maratua	Laut	Dalam Koridor
28.	Mahakam Ulu	110	Long Apari	Darat	Luar Koridor
		111	Long Pahangai	Darat	Luar Koridor
VIII. KALIMANTAN UTARA					
29.	Nunukan	112	Sebatik	Laut	Dalam Koridor
		113	Nunukan	Laut	Dalam Koridor
		114	Krayan	Darat	Dalam Koridor
		115	Krayan Selatan	Darat	Dalam Koridor
		116	Sebatik Barat	Laut	Dalam Koridor
		117	Nunukan Selatan	Laut	Dalam Koridor
		118	Sebatik Timur	Laut	Dalam Koridor
		119	Sebatik Utara	Laut	Dalam Koridor
		120	Sebatik Tengah	Darat	Dalam Koridor
		121	Sei Menggaris	Darat	Dalam Koridor
		122	Tulin Onsoi	Darat	Dalam Koridor
		123	Krayan Tengah	Darat	Dalam Koridor
		124	Krayan Timur	Darat	Dalam Koridor
		125	Krayan Barat	Darat	Dalam Koridor
30.	Malinau	126	Lumbis Ogong	Darat	Dalam Koridor
		127	Pujungan	Darat	Luar Koridor
		128	Kayan Hilir	Darat	Luar Koridor
		129	Kayan Hulu	Darat	Luar Koridor
		130	Kayan Selatan	Darat	Luar Koridor
		131	Bahau Hulu	Darat	Luar Koridor
IX. SULAWESI UTARA					
31.	Kep. Sangihe	132	Tabukan Utara	Laut	Dalam Koridor
		133	Nusa Tabukan	Laut	Dalam Koridor
		134	Kendahe	Laut	Dalam Koridor
		135	Tahuna	Laut	Dalam Koridor
		136	Tahuna Timur	Laut	Dalam Koridor

137 Kepulauan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	PENANGANAN TAHUN 2020-2024			DALAM/LUAR KORIDOR PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN	
	LOKPRI	DARAT/ LAUT			
	137	Kepulauan Marore	Laut	Dalam Koridor	
32. Minahasa Utara	138	Wori	Laut	Dalam Koridor	
33. Bolaang Mongondow Utara	139	Pinogaluman	Laut	Dalam Koridor	
34. Kep. Talaud	140	Nanusa	Laut	Luar Koridor	
	141	Kabaruan	Laut	Luar Koridor	
	142	Melonguane	Laut	Luar Koridor	
	143	Damau	Laut	Luar Koridor	
	144	Miangas	Laut	Luar Koridor	
35. Kep. Siau, Tagulandang, Biaro	145	Siau Barat	Laut	Luar Koridor	
X. SULAWESI TENGAH					
36. Toli-toli	146	Dampal Utara	Laut	Dalam Koridor	
	147	Toli-toli Utara	Laut	Dalam Koridor	
	148	Dako Pemean	Laut	Dalam Koridor	
XI. GORONTALO					
37. Gorontalo Utara	149	Anggrek	Laut	Dalam Koridor	
XII. MALUKU					
38. Maluku Tenggara	150	Kei Besar	Laut	Dalam Koridor	
	151	Kei Besar Selatan	Laut	Dalam Koridor	
	152	Kei Besar Utara Timur	Laut	Dalam Koridor	
	153	Kei Besar Selatan Barat	Laut	Dalam Koridor	
39. Kep. Tanimbar	154	Tanimbar Selatan	Laut	Dalam Koridor	
	155	Selaru	Laut	Dalam Koridor	
	156	Wer Tamrian	Laut	Dalam Koridor	
	157	Tanimbar Utara	Laut	Dalam Koridor	
	158	Yaru	Laut	Dalam Koridor	
	159	Kormomolin	Laut	Dalam Koridor	
	160	Nirunmas	Laut	Dalam Koridor	
40. Kepulauan Aru	161	Pulau-Pulau Aru	Laut	Dalam Koridor	
	162	Aru Tengah Selatan	Laut	Dalam Koridor	
	163	Sir-Sir	Laut	Dalam Koridor	
	164	Aru Tengah Timur	Laut	Dalam Koridor	
	165	Aru Selatan Timur	Laut	Dalam Koridor	
41. Maluku Barat Daya (MBD)	166	Moa Lakor	Laut	Dalam Koridor	
	167	Mndona Hiera	Laut	Dalam Koridor	
	168	Pulau-Pulau Babar	Laut	Dalam Koridor	
	169	Wetar	Laut	Dalam Koridor	

170 Pulau-Pulau . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA		PENANGANAN TAHUN 2020-2024			DALAM/LUAR KORIDOR: PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN
		LOKPRI		DARAT/ LAUT	
		170	Pulau-Pulau Terselatan	Laut	Dalam Koridor
		171	Pulau Leti	Laut	Dalam Koridor
		172	Pulau Masela	Laut	Dalam Koridor
		173	Pulau Lakor	Laut	Dalam Koridor
		174	Wetar Utara	Laut	Dalam Koridor
		175	Wetar Barat	Laut	Dalam Koridor
		176	Wetar Timur	Laut	Dalam Koridor
		177	Kisar Utara	Laut	Dalam Koridor
XIII. MALUKU UTARA					
42.	Halmahera Tengah	178	Patani Utara	Laut	Dalam Koridor
43.	Pulau Morotai	179	Morotai Selatan	Laut	Dalam Koridor
		180	Morotai Selatan Barat	Laut	Dalam Koridor
		181	Morotai Jaya	Laut	Dalam Koridor
		182	Morotai Utara	Laut	Dalam Koridor
		183	Morotai Timur	Laut	Dalam Koridor
XIV. PAPUA					
44.	Merauke	184	Merauke	Laut	Dalam Koridor
		185	Kimaam	Laut	Dalam Koridor
		186	Semangga	Laut	Dalam Koridor
		187	Ulilin	Darat	Dalam Koridor
		188	Sota	Darat	Dalam Koridor
		189	Elikobal	Darat	Dalam Koridor
		190	Naukenjerai	Laut	Dalam Koridor
		191	Okaba	Laut	Dalam Koridor
		192	Tabonji	Laut	Dalam Koridor
		193	Waan	Laut	Dalam Koridor
45.	Biak Numfor	194	Biak Kota	Laut	Dalam Koridor
46.	Mimika	195	Mimika Timur Jauh	Laut	Dalam Koridor
47.	Sarmi	196	Sarmi	Laut	Dalam Koridor
48.	Keerom	197	Waris	Darat	Dalam Koridor
		198	Web	Darat	Dalam Koridor
		199	Arso Timur	Darat	Dalam Koridor
		200	Towe	Darat	Dalam Koridor
		201	Yaffi	Darat	Dalam Koridor
49.	Pegunungan Bintang	202	Iwur	Darat	Dalam Koridor
		203	Batom	Darat	Dalam Koridor
		204	Kiwirok Timur	Darat	Dalam Koridor
		205	Tarup	Darat	Dalam Koridor
		206	Oksamol	Darat	Dalam Koridor

207 Okbemtau . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA		PENANGANAN TAHUN 2020-2024			DALAM/LUAR KORIDOR PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN
		LOKPRI		DARAT/ LAUT	
50	Supiori	207	Okbemptau	Darat	Dalam Koridor
		208	Mofinop	Darat	Dalam Koridor
		209	Supiori Utara	Laut	Dalam Koridor
		210	Supiori Timur	Laut	Dalam Koridor
		211	Kep. Aruri	Laut	Dalam Koridor
51	Boven Digoel	212	Supiori Barat	Laut	Dalam Koridor
		213	Waropko	Darat	Dalam Koridor
		214	Jair	Darat	Dalam Koridor
		215	Kombut	Darat	Dalam Koridor
		216	Ninati	Darat	Dalam Koridor
52	Kota Jayapura	217	Sesnuk	Darat	Dalam Koridor
		218	Jayapura Utara	Laut	Dalam Koridor
		219	Muaratami	Darat	Dalam Koridor
XV. PAPUA BARAT					
53	Raja Ampat	220	Kep. Ayau	Laut	Dalam Koridor
		221	Ayau	Laut	Dalam Koridor
54	Tambraw	222	Sausapor	Laut	Dalam Koridor
TOTAL PENANGANAN TAHUN 2020-2024: 222 KECAMATAN, 54 KABUPATEN/KOTA DAN 15 PROVINSI					

BAB V . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 70 -

BAB V

PROGRAM SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. PROGRAM DAN KEGIATAN

Sejalan dengan agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, pengelolaan BWN-KP Tahun 2020-2024 difokuskan pada 2 (dua) agenda pembangunan, yaitu: (1) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (2) memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik. Kedua agenda pembangunan tersebut diturunkan ke dalam arah strategis, kebijakan, dan strategi pelaksanaan pengelolaan BWN-KP, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Kebijakan dan strategi pelaksanaan di atas selanjutnya dikonsolidasikan ke dalam satu program, yaitu Program Pengelolaan Perbatasan Negara. Sasaran program dimaksud yaitu: (1) meningkatnya pengelolaan Batas Wilayah Negara dan lintas batas negara melalui penyelesaian dan penegasan Batas Wilayah Negara, peningkatan pertahanan wilayah negara, peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah, serta pembangunan dan pengelolaan PLBN; (2) terwujudnya pengelolaan potensi unggulan yang berkesinambungan berbasis tata ruang di Kawasan Perbatasan; (3) meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan tata kelola pemerintahan di Kawasan Perbatasan negara melalui pengembangan infrastruktur konektivitas dan pengembangan infrastruktur sosial dasar serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, penyediaan sarana prasarana layanan pemerintahan serta aparatur pemerintahan yang memadai; (4) meningkatnya sistem kelembagaan antar-lembaga melalui penguatan koordinasi lembaga, baik antar-lembaga pusat, maupun pusat dan daerah.

Program ini memberikan arah bagi program dan kegiatan-kegiatan sektoral kementerian/lembaga agar terpadu, sinergis, dan komplementer. Selain itu, program ini mencerminkan pokok kegiatan-kegiatan teknis sektoral kementerian/lembaga yang dialokasikan untuk pembangunan Kawasan Perbatasan dan masyarakat di Kawasan Perbatasan yang memuat kegiatan yang bersifat lintas sektor, sebagai wujud implementasi kebijakan dan komitmen negara melalui kementerian/lembaga. Mengacu pada kebijakan, strategi pelaksanaan, dan program tersebut, kegiatan pengelolaan BWN-KP dibagi dalam 3 (tiga) kelompok:

Pertama . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 71 -

Pertama, Batas Wilayah Negara, dengan 3 (tiga) kegiatan prioritas, yaitu: (1) penyelesaian dan penegasan Batas Wilayah Negara; (2) peningkatan pertahanan wilayah negara; (3) peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah. Uraian kegiatan tersebut dituangkan dalam Matriks Kegiatan Pengelolaan Batas Wilayah Negara.

Kedua, lintas batas negara, dengan kegiatan pembangunan dan pengelolaan PLBN. Uraian Kegiatan tersebut dituangkan dalam Matriks Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara.

Ketiga, pembangunan Kawasan Perbatasan negara, dengan 4 (empat) kegiatan prioritas, yaitu: (1) penataan ruang Kawasan Perbatasan; (2) pengembangan potensi Kawasan Perbatasan negara; (3) pengembangan infrastruktur konektivitas; (4) pengembangan infrastruktur sosial dasar. Uraian Kegiatan tersebut dituangkan dalam Matriks Kegiatan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara.

Untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pengelolaan BWN-KP berdasarkan fokus Renaksi Pengelolaan BWN-KP tiap tahunnya, diperlukan dukungan pendanaan mengacu pada RKP, dengan fokus pada pengelolaan Batas Wilayah Negara, lintas batas negara, pembangunan Kawasan Perbatasan, dan sistem tata kelola perbatasan negara yang berkelanjutan. Kebijakan pendanaan diarahkan untuk memperkuat *money follow programme* sesuai RKP melalui penguatan aspek perencanaan dalam kerangka pencapaian prioritas nasional. Perencanaan dan pendanaan program prioritas juga disertai dengan langkah pengintegrasian kebijakan antarsektor yang mencakup pengintegrasian dan optimalisasi potensi sumber pendanaan.

Sesuai Pasal 15 ayat (1) huruf b UU Wilayah Negara, rencana kebutuhan anggaran pengelolaan BWN-KP bersumber dari APBN, APBD provinsi/kabupaten/kota, dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, sesuai Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, diamanatkan bahwa pendanaan pelaksanaan teknis pengelolaan BWN-KP dibebankan pada APBN kementerian/lembaga terkait dan APBD setelah dikoordinasikan oleh BNPP.

Penyusunan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 72 -

Penyusunan kegiatan dan pendanaan pengelolaan BWN-KP dalam Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024, dikoordinasikan oleh:

1. Sekretariat Tetap BNPP

Sekretariat Tetap BNPP menyusun kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran pengelolaan BWN-KP untuk jangka pendek (tahunan) yang tertuang dalam Rencana Aksi dan jangka menengah (lima tahunan) yang tertuang dalam Rencana Induk.

2. Kementerian/Lembaga

Kementerian/lembaga menyusun kegiatan dan pendanaan pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan untuk jangka pendek (tahunan) dan jangka menengah (lima tahunan) dengan berpedoman pada Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024. Pendanaan pengelolaan BWN-KP oleh kementerian/lembaga meliputi pembangunan batas negara seperti tapal batas, tugu tanda batas, gerbang batas, batas fisik, ataupun pos lintas batas; dan pembangunan Kawasan Perbatasan berupa pembangunan konektivitas kawasan, pengembangan kawasan berbasis potensi wilayah, dan pembangunan infrastruktur sosial dasar, yang dilaksanakan berbasis RTR KPN termasuk RDTR KPN.

3. Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota menyusun kegiatan dan pendanaan untuk mendukung pengelolaan BWN-KP yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan berpedoman pada Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024. Selanjutnya pendanaannya bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan perbatasan yang dikelola oleh perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah atau instansi/unit kerja yang membidangi pengelolaan perbatasan negara di daerah.

4. Sektor Swasta

Sektor swasta dapat berperan dalam pembangunan Kawasan Perbatasan, antara lain melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA), *corporate social responsibility* (CSR), dan berbagai skema kerja sama lainnya.

B. PEMANTAUAN . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 73 -

B. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Pemantauan dan Evaluasi

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya, akuntabilitas, serta mengoptimalkan kinerja program pengelolaan perbatasan negara, dilakukan pengendalian dan evaluasi yang merupakan satu kesatuan manajemen dengan proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BWN-KP.

a. Pengendalian

Pengendalian dimaksudkan untuk memastikan agar pelaksanaan program pengelolaan perbatasan negara sesuai dengan Renaksi Pengelolaan BWN-KP yang ditetapkan pada setiap tahunnya. Pengendalian dilakukan dalam bentuk pemantauan dan pengawasan. Pemantauan dilakukan melalui kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Renaksi Pengelolaan BWN-KP, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Sementara pengawasan dilakukan secara internal baik oleh masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah maupun oleh aparat pengawasan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Evaluasi

Evaluasi dimaksudkan untuk menilai capaian pelaksanaan dan dampak melalui pengukuran kemajuan dan kendala dalam pelaksanaan pengelolaan BWN-KP, sebagai bahan masukan dalam perencanaan program pengelolaan perbatasan negara selanjutnya. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara realisasi masukan, keluaran, hasil, dan manfaat pelaksanaan program pengelolaan perbatasan negara, terhadap baik Renaksi Pengelolaan BWN-KP pada tahun berkenaan, maupun Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024.

Evaluasi pengelolaan BWN-KP tahun 2020-2024 dilakukan seluruh anggota BNPP untuk mengukur kinerja program dan kegiatan dalam pengelolaan BWN-KP sesuai lingkup tugas masing-masing. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan BWN-KP tahun 2020-2024 dilakukan sebagai bagian dari rangkaian koordinasi BNPP untuk menyinergikan pelaksanaan program melalui rapat koordinasi serta melalui forum-forum koordinasi dan evaluasi yang ada. Seluruh rangkaian kegiatan pengendalian dan evaluasi dilakukan setiap tahun untuk memastikan bahwa agenda prioritas dalam Renduk

Pengelolaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 74 -

Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 yang dijabarkan ke dalam Renaksi Pengelolaan BWN-KP dapat terlaksana dengan baik.

Secara umum kegiatan pengendalian dan evaluasi perlu diikuti dengan pelaporan secara berkala dan berjenjang oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi.

2. Indikator Pembangunan Pengelolaan BWN-KP

Untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja pengelolaan perbatasan negara dalam RPJMN Tahun 2020-2024, kegiatan pengendalian dan evaluasi pengelolaan BWN-KP dilakukan terhadap aspek pengelolaan Batas Wilayah Negara, lintas batas negara, dan pembangunan Kawasan Perbatasan. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional di wilayah perbatasan negara, dengan Indikator Pembangunan sebagai berikut:

- a. Sasaran Pembangunan Wilayah (Prioritas Nasional 2) di Kawasan Perbatasan dengan indikator:

Tabel Indikator Pembangunan Wilayah (PN2)

No	Indikator Pembangunan	Baseline 2019	Target RPJMN 2020-2024
1	Jumlah Lokpri yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya (kecamatan)	187	222
2	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di 18 PKSN	0,42	0,52
3	RDTR Perbatasan Negara	10 Matek RDTR KPN	10 Rancangan Perpres

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

b. Sasaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

- b. Sasaran Penguatan Pertahanan Keamanan (Prioritas Nasional 7) di Perbatasan dan Pulau Terluar yang difokuskan pada Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional, dengan indikator Angka Pelanggaran Lintas Batas Negara akan diturunkan secara signifikan dari tahun ke tahun.

Dalam rangka melaksanakan agenda pembangunan ke-7 RPJMN Tahun 2020-2024 melalui Program Prioritas Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional dengan Kegiatan Prioritas Penguatan Keamanan Dalam Negeri, dilaksanakan 7 (tujuh) Proyek Prioritas Penguatan Pertahanan dan Keamanan di Perbatasan dan Pulau Terluar, yaitu:

Tabel Proyek Prioritas Penguatan Hankam di Perbatasan dan PPKT Tahun 2020-2024

No	Proyek Prioritas	Target					Total target RPJMN 2024	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024		
1	Pembangunan Pos Pamtas	12 Pos	8 Pos	9 Pos	7 Pos	7 Pos	43 Pos	Kementerian Pertahanan
2	Pembangunan Pos AL	15 Pos	16 Pos	16 Pos	16 Pos	16 Pos	79 Pos	Kementerian Pertahanan
3	Pembangunan Mako Polsek/ Polsubsektor	-	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	36 Unit	Kepolisian Negara Republik Indonesia
4	Pembangunan PLBN	10 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	18 Unit	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5	Pembangunan Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP)	200 Km	200 Km	200 Km	200 Km	200 Km	1000 Km	Kementerian Pertahanan
6	Fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa terdepan perbatasan negara sebagai bagian sistem Hankam	180 Org	180 Org	180 Org	180 Org	180 Org	900 Org	Sekretariat Tetap BNPP

7 Koordinasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

No	Proyek Prioritas	Target					Total target RPJMN 2024	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024		
7	Koordinasi perencanaan dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan sarana-prasarana Hankam di PPKT tidak berpenduduk	36 PPKT	41 PPKT	49 PPKT	49 PPKT	49 PPKT	49 PPKT	Sekretariat Tetap BNPP

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

3. PENGUKURAN KINERJA

Instrumen pengukuran kinerja Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 menggunakan pendekatan capaian keluaran dan hasil (*output and outcomes based*). Hal ini sejalan dengan kebijakan penganggaran yang menghendaki agar pelaksanaan anggaran dipastikan tidak hanya terlaksana (*sent*) tetapi juga membawa perubahan yang bisa dirasakan oleh masyarakat (*delivered*). Pengukuran kinerja menggunakan indikator berbasis capaian hasil yang didasarkan pada manfaat yang diperoleh masyarakat.

Instrumen pengukuran kinerja pengelolaan BWN-KP 2020-2024 merupakan bagian dari instrumen evaluasi yang difokuskan pada capaian dan dampak untuk memperjelas makna capaian keluaran dan hasil program dan kegiatan dalam pengelolaan PLBN, PPKT tidak berpenduduk, dan pembangunan Kawasan Perbatasan baik di PKSN maupun Lokpri. Untuk memenuhi prinsip yang transparan dan akuntabel, perencanaan harus disertai dengan indikator kinerja pelaksanaan rencana, sekurang-kurangnya meliputi indikator keluaran dan indikator hasil/manfaat. Indikator keluaran merupakan konsekuensi dari perencanaan program dan akan terus dipantau pelaksanaan dan realisasinya hingga tahun 2024. Sementara evaluasi terhadap capaian hasil/manfaat diperlukan untuk menggambarkan informasi progres serta situasi yang terjadi dan dihadapi di Kawasan Perbatasan berdasarkan indikator dimaksud. Indikator-indikator tersebut diturunkan dari sejumlah variabel yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan dan sasaran strategis dengan fokus pada capaian berupa hasil dan dampak.

Variabel . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

Variabel dalam instrumen evaluasi pengelolaan BWN-KP 2020-2024 dispesifikan dengan dimensi yang menjadi fokus pada masing-masing lokasi. Variabel yang digunakan didesain sensitif terhadap keragaman konteks dan tuntutan situasi di Kawasan Perbatasan yang berusaha dijawab melalui serangkaian kegiatan yang telah dicanangkan. Spesifikasi beragam konteks dan kondisi di Kawasan Perbatasan menghasilkan klasifikasi Kawasan Perbatasan berdasarkan lokus, yaitu:

- a. Lokpri dan PKS N sebagai fokus pada dimensi “Pembangunan Kawasan”;
- b. Lokasi Titik Keluar-Masuk (*Exit-Entry Point*) yang terdiri dari PLBN, Pos Lintas Batas (PLB), dan Pusat Pelayanan Pintu Gerbang, sebagai fokus pada dimensi Lintas Batas Negara”;
- c. Batas Teritorial dan lokasi PPKT yang tidak berpenduduk, sebagai fokus pada dimensi “Batas Wilayah Negara”.

Masing-masing lokasi tersebut dievaluasi berdasarkan sejumlah variabel dan indikator turunannya sesuai intervensi pada lokus bersangkutan. Untuk mengoptimalkan upaya pengelolaan BWN-KP di PKS N, pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan berbagai indikator yang dikonsolidasikan ke dalam Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) yang merupakan indeks pengukuran kinerja capaian hasil (*outcome*) di PKS N.

MATRIKS . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 78 -

MATRIKS KEGIATAN PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR	VOLUME	SATUAN	CAPAIAN		TARGET			PUSAT/ DAERAH/ LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KP 1	PENYELESAIAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH NEGARA										
1	Perundingan batas wilayah negara Republik Indonesia (RI)-Malaysia (JIM, Sosek Malindo)	Jumlah perundingan yang dilaksanakan	5	Kegiatan	1	1	1	1	1	Prov. Kalbar, Prov. Kaltim, Prov. Kaltara	Kementerian Dalam Negeri
2	Perundingan Batas Wilayah Negara RI-Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) (JBC)	Jumlah perundingan yang dilaksanakan	4	Kegiatan	-	1	1	1	1	Prov. NTT	Kementerian Dalam Negeri
3	Perundingan Batas Wilayah Negara RI-Papua Nugini (Papua New Guinea/PNG) (JBC)	Jumlah perundingan yang dilaksanakan	4	Kegiatan	-	1	1	1	1	Prov. Papua	Kementerian Dalam Negeri
4	Perundingan Batas Wilayah Negara RI-RDTL (SOC)	Jumlah perundingan yang dilaksanakan	1	Kegiatan	-	-	1	-	-	Prov. NTT	Kementerian Luar Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR	VOLUME	SATUAN	CAPAIAN		TARGET			PUSAT/ DAERAH/ LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Kesepakatan teknis perundingan batas negara wilayah laut	Jumlah dokumen kesepakatan teknis perundingan batas negara wilayah laut	30	Dokumen	4	8	6	6	6	Pusat	Badan Informasi Geospasial
6	Kesepakatan teknis perundingan batas negara wilayah darat	Jumlah dokumen kesepakatan teknis perundingan batas negara wilayah darat	15	Dokumen	2	4	3	3	3	Prov. Kalbar, Prov. Kaltim, Prov. Kaltara, Prov. NTT	Badan Informasi Geospasial
7	Pilar <i>Common Border Datum Reference Frame</i> (CBDRF) RI-Malaysia	Jumlah tanda batas negara terukur	50	Unit	10	10	10	10	10	Prov. Kalbar, Prov. Kaltim, Prov. Kaltara	Badan Informasi Geospasial
8	Pembangunan pilar batas negara RI-RDTL	Jumlah tanda batas negara terbangun dan terukur	163	Unit	5	70	36	36	16	Prov. NTT	Badan Informasi Geospasial



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR	VOLUME	SATUAN	CAPAIAN		TARGET			PUSAT/ DAERAH/ LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Pembangunan pilar batas negara RI-PNG	Jumlah tanda batas negara terbangun dan terukur	200	Unit	30	50	40	40	40	Prov. Papua	Badan Informasi Geospasial
10	Verifikasi Titik Dasar dan Titik Referensi	Jumlah Tanda Batas dan Titik Referensi yang terverifikasi	45	Unit	5	10	10	10	10	Pusat	Badan Informasi Geospasial
11	Pembuatan peta batas negara	Luas cakupan peta batas negara	1.204,5	Km ²	16	438,5	250	250	250	Pusat	Badan Informasi Geospasial
12	Identifikasi Tanda Batas negara wilayah darat	Panjang segmen batas negara wilayah darat yang teridentifikasi pilar batasnya	250	Km	50	50	50	50	50	Prov. Kalbar, Prov. Kaltim, Prov. NTT, Prov. Papua	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
13	Survei identifikasi titik perlintasan Non-PLB dan Non-PLBN	Jumlah titik perlintasan Non-PLB dan Non-PLBN yang teridentifikasi	100	Lokasi	20	20	20	20	20	Daerah	Badan Nasional Pengelola Perbatasan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR	VOLUME	SATUAN	CAPAIAN		TARGET			PUSAT/ DAERAH/ LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Kalibrasi/verifikasi/pemeliharaan Pilar Titik Referensi (TR) di PPKT tidak berpenduduk	Jumlah Pilar Referensi di PPKT tidak berpenduduk yang dikalibrasi/diverifikasi/dipelihara	9	TR	1	2	2	2	2	PPKT	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
15	Pembangunan sempadan dan tanggul abrasi pantai PPKT tidak berpenduduk	Jumlah PPKT yang dibangun sempadan dan tanggul abrasi pantai	19	PPKT	-	-	-	9	10	PPKT	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
KP 2	PENINGKATAN PERTAHANAN WILAYAH NEGARA										
1	Pembukaan/rintisan Jalur Inspeksi Patroli Perbatasan	Panjang Rintisan/ Pembukaan Jalur Inspeksi Patroli Perbatasan	932	Km	-	128,7	57,98	375	370,28	Prov. Kalbar, Prov. Kaltim, Prov. Kaltara	Kementerian Pertahanan
2	Perkerasan Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan	Panjang Perkerasan Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan	1662	Km	-	79,6	59,81	765	761,54	Prov. Kalbar, Prov. Kaltim, Prov. Kaltara	Kementerian Pertahanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR	VOLUME	SATUAN	CAPAIAN		TARGET			PUSAT/ DAERAH/ LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Asistensi Teknik Perwira Topografi Pengamanan Perbatasan (Asnik Patop Pamtas)	Jumlah kegiatan Asnik Patop Wilayah Kalimantan, Papua, dan NTT	5	Paket	1	1	1	1	1	Prov. Kalbar, Prov. NTT, Prov. Kaltara dan Prov. Papua	TNI UO TNI AD
4	Pembekalan Survei dan Pemetaan Satgas Pamtas TNI AD	Jumlah kegiatan Pembekalan Surta Satgas Pamtas TNI AD	5	Paket	1	1	1	1	1	Prov. Kalbar, Prov. NTT, Prov. Kaltara dan Prov. Papua	TNI UO TNI AD
5	Pengendalian dan Pengawasan Pamtas Penyangga	Jumlah kegiatan Dalwas Pamtas Penyangga	5	Paket	1	1	1	1	1	Prov. Papua	TNI UO TNI AD
6	Pengendalian dan Pengawasan Pamtas RI-Malaysia (Kaltara)	Jumlah kegiatan Dalwas Pamtas RI-Malaysia (Kaltara)	5	Paket	1	1	1	1	1	Prov. Kaltara	TNI UO TNI AD
7	Pengendalian dan Pengawasan Pamtas RI-Malaysia (Kalbar)	Jumlah kegiatan Dalwas Pamtas RI-Malaysia (Kalbar)	5	Paket	1	1	1	1	1	Prov. Kalbar	TNI UO Mabes TNI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR	VOLUME	SATUAN	CAPAIAN		TARGET			PUSAT/ DAERAH/ LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Pengendalian dan Pengawasan Pamtas RI-RDTL	Jumlah kegiatan Dalwas Pamtas RI-RDTL	5	Paket	1	1	1	1	1	Prov. NTT	TNI UO TNI AD
9	Pengendalian dan Pengawasan Pamtas RI-PNG	Jumlah kegiatan Dalwas Pamtas RI-PNG	5	Paket	1	1	1	1	1	Prov. Papua	TNI UO TNI AD
10	Pembangunan Pos Pengamanan Perbatasan (Pamtas)	Jumlah Pos Pamtas yang dibangun	43	Pos	13	10	12	4	4	Prov. Kalbar, Prov. Kaltara, Prov. Papua, dan Prov. NTT	TNI/ UO TNI AD
11	Operasi Pengamanan Perbatasan Darat RI-Malaysia	Jumlah Satuan Setingkat Batalyon (SSY) yang melaksanakan Operasi Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia	5	Paket	1	1	1	1	1	Prov. Kalbar, Prov. Kaltara, Prov. Kaltim	TNI UO Mabes TNI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR	VOLUME	SATUAN	CAPAIAN		TARGET			PUSAT/ DAERAH/ LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Operasi Pengamanan Perbatasan Darat RI-RDTL	Jumlah Satuan Setingkat Batalyon (SSY) yang melaksanakan Operasi Pengamanan Perbatasan RI-RDTL	5	Paket	1	1	1	1	1	Prov. NTT	TNI UO Mabes TNI
13	Operasi Pengamanan Perbatasan Darat RI-PNG	Jumlah Satuan Setingkat Batalyon (SSY) yang melaksanakan Operasi Pengamanan Perbatasan RI-PNG	5	Paket	1	1	1	1	1	Prov. Papua	TNI UO Mabes TNI
14	Pembinaan Wilayah Perbatasan Laut berupa Bela Negara, Wawasan Kebangsaan dan Rasa Cinta Tanah Air	Bela Negara, Wawasan Kebangsaan dan Rasa Cinta Tanah Air	1	Kegiatan	1	-	-	-	-	Lanal Sabang (Pulau Weh)	TNI/UO TNI AL
15	Pembinaan Wilayah Perbatasan Laut berupa Ketahanan Pangan Budi Daya ikan dengan sistem Keramba Jaring Apung (KJA)	Ketahanan Pangan Budi Daya ikan dengan sistem Keramba Jaring Apung (KJA)	1	Kegiatan	1	-	-	-	-	Lanal Nias	TNI/UO TNI AL



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR	VOLUME	SATUAN	CAPAIAN		TARGET			PUSAT/ DAERAH/ LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Pembinaan Wilayah Perbatasan Laut Ketahanan Pangan berupa kegiatan Budi Daya Udang Vaname Tambak Mini skala rumah tangga (Butamira)	Ketahanan Pangan berupa kegiatan Budi Daya Udang Vaname Tambak Mini skala rumah tangga (Butamira).	1	Kegiatan	1	-	-	-	-	Lanal Lampung	TNI/VO TNI AL
17	Pembinaan Wilayah Perbatasan Laut Ketahanan Pangan berupa kegiatan Budi Daya Ayam potong dan telur	Ketahanan Pangan berupa kegiatan Budi Daya Ayam potong dan telur.	1	Kegiatan	1	-	-	-	-	Lanal Tarempa	TNI/VO TNI AL
18	Pembinaan Wilayah Perbatasan Laut Ketahanan Pangan berupa Budi Daya Ikan Sidat	Ketahanan Pangan berupa Budi Daya Ikan Sidat	1	Kegiatan	1	-	-	-	-	Lanal Cilacap	TNI/VO TNI AL
19	Pembinaan Wilayah Perbatasan Laut Ketahanan Pangan berupa Budi Daya Ikan Sunu	Ketahanan Pangan berupa Budi Daya Ikan Sunu	1	Kegiatan	1	-	-	-	-	Lanal Maumere	TNI/VO TNI AL



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR	VOLUME	SATUAN	CAPAIAN		TARGET			PUSAT/ DAERAH/ LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Pembinaan Wilayah Perbatasan Laut Ketahanan Pangan berupa Budi Daya Ikan Nila dan Ikan lele	Ketahanan Pangan berupa Budi Daya Ikan Nila dan Ikan lele	1	Kegiatan	1	-	-	-	-	Lanal Melonguane	TNI/VO TNI AL
21	Pembinaan Wilayah Perbatasan Laut Ketahanan Pangan berupa Budi Daya Rumput laut	Ketahanan Pangan berupa Budi Daya Rumput laut	1	Kegiatan	1	-	-	-	-	Lanal Nunukan	TNI/VO TNI AL
22	Pembinaan Wilayah Perbatasan Laut Ketahanan Pangan berupa Budi Daya Rumput laut	Ketahanan Pangan berupa Budi Daya Rumput laut	1	Kegiatan	1	-	-	-	-	Lanal Saumlaki	TNI/VO TNI AL
23	Pembinaan Wilayah Perbatasan Laut Ketahanan Pangan berupa Budi Daya Ikan Nila	Ketahanan Pangan berupa Budi Daya Ikan Nila	1	Kegiatan	1	-	-	-	-	Lanal Timika	TNI/VO TNI AL
24	Pembinaan Wilayah Perbatasan Laut berupa Pelatihan Budi Daya Udang Vaname	Budi Daya Udang Vaname	10	Kegiatan	-	10	-	-	-	- Lanal Dumai, - Lanal Tual, - Lanal Tanjung	TNI/VO TNI AL



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR	VOLUME	SATUAN	CAPAIAN		TARGET			PUSAT/ DAERAH/ LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Balai Karimun, - Lantamal XII Pontianak, - Lanal Mataram, - Lanal Ranai, - Lanal Tolitoli, - Koarmada III Sorong, - Lanal Ternate, - Lantamal XIII Tarakan, - Lanal Biak	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR	VOLUME	SATUAN	CAPAIAN		TARGET			PUSAT/ DAERAH/ LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Pembinaan Wilayah Perbatasan Laut berupa Bela Negara, Wawasan Kebangsaan dan Rasa Cinta Tanah Air	Bela Negara, Wawasan Kebangsaan dan Rasa Cinta Tanah Air	8	Kegiatan	-	-	8	-	-	- Lanal Tanjung Balai Asahan, - Lantamal II Padang, - Lantamal IV Tanjung Pinang, - Lantamal VII Kupang, - Lantamal VIII Manado, - Lantamal IX Ambon, - Lanal Aru,	TNI/ UO TNI AL



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 89 -

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR	VOLUME	SATUAN	CAPAIAN		TARGET			PUSAT/ DAERAH/ LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										- Lantamal X Jayapura	
26	Pembinaan Wilayah Perbatasan Laut berupa Wawasan Kebangsaan dan Rasa Cinta Tanah Air	Wawasan Kebangsaan dan Rasa Cinta Tanah Air	10	Kegiatan	-	-	-	10	-	- Lanal Sabang, - Lanal Sibolga, - Lanal Bengkulu, - Lanal Batam, - Lanal Tarempa, - Lanal Nunukan, - Lanal Tahuna,	TNI/ UO TNI AL



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR	VOLUME	SATUAN	CAPAIAN		TARGET			PUSAT/ DAERAH/ LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										- Lantamal VII Kupang, - Lanal Timika, - Lanal Morotai	
27	Pembangunan Pos TNI AL	Jumlah Pos TNI AL yang dibangun	74	Pos	14	14	14	16	16	Prov. Aceh, Prov. Sumut, Prov. Sumbar, Prov. Bengkulu, Prov. Riau, Prov. Kepri, Prov. Babel, Prov. Bali, Prov. Sulteng,	TNI AL



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 91 -

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR	VOLUME	SATUAN	CAPAIAN		TARGET			PUSAT/ DAERAH/ LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Prov. Sulut, Prov. Sultra, Prov. Kaltim, Prov. Kalbar, Prov. Kalsel, Prov. NTT, Prov. NTB, Prov. Maluku, Prov. Maluku, Prov. Papua, Prov. Papua Barat	
28	Operasi Pengamanan Perbatasan Laut RI-Thailand	Jumlah kegiatan pelaksanaan Operasi Pengamanan Perbatasan Laut RI-Thailand	5	Paket	1	1	1	1	1	Laut perbatasan RI-Thailand	TNI UO Mabes TNI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR	VOLUME	SATUAN	CAPAIAN		TARGET			PUSAT/ DAERAH/ LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Operasi Pengamanan Perbatasan Laut RI-Singapura	Jumlah kegiatan pelaksanaan Operasi Pengamanan Perbatasan Laut RI-Singapura	5	Paket	1	1	1	1	1	Laut perbatasan RI-Singapura	TNI UO Mabes TNI
30	Operasi Pengamanan Perbatasan Laut RI-RDTL-Australia	Jumlah kegiatan pelaksanaan Operasi Pengamanan Perbatasan Laut RI-RDTL-Australia	5	Paket	1	1	1	1	1	Laut perbatasan RI-RDTL-Australia	TNI UO Mabes TNI
31	Operasi Pengamanan Perbatasan Laut RI-Filipina	Jumlah kegiatan pelaksanaan Operasi Pengamanan Perbatasan Laut RI-Filipina	5	Paket	1	1	1	1	1	Laut perbatasan RI-Filipina	TNI UO Mabes TNI
32	Patroli Terkoordinasi <i>Malacca Straits Sea Patrol</i> (Patkor MSSP) Malsindothei	Jumlah kegiatan pelaksanaan Patkor MSSP Malsindothei	5	Paket	1	1	1	1	1	Laut perbatasan RI-Singapura-Malaysia - Thailand	TNI UO Mabes TNI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR	VOLUME	SATUAN	CAPAIAN		TARGET			PUSAT/ DAERAH/ LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Patroli Terkoordinasi Operasi Tindakan Maritim (Optima) Malindo	Jumlah kegiatan pelaksanaan Patkor Operasi Tindakan Maritim (Optima) Malindo	5	Paket	1	1	1	1	1	Laut perbatasan RI-Malaysia	TNI UO Mabes TNI
34	Patroli Terkoordinasi Malindo	Jumlah kegiatan pelaksanaan Patkor Malindo	5	Paket	1	1	1	1	1	Laut perbatasan RI-Malaysia	TNI UO Mabes TNI
35	Patroli Terkoordinasi Indindo	Jumlah kegiatan pelaksanaan Patkor India Indonesia (Indindo)	5	Paket	1	1	1	1	1	Laut perbatasan RI-India	TNI UO Mabes TNI
36	Patroli Terkoordinasi Philindo	Jumlah kegiatan pelaksanaan Patkor Philindo	5	Paket	1	1	1	1	1	Laut perbatasan RI-Filipina	TNI UO Mabes TNI
37	Patroli Terkoordinasi Ausindo	Jumlah kegiatan pelaksanaan Patkor Ausindo	5	Paket	1	1	1	1	1	Laut perbatasan RI-Australia	TNI UO Mabes TNI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR	VOLUME	SATUAN	CAPAIAN		TARGET			PUSAT/ DAERAH/ LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	<i>Trilateral Maritime Patrol (TMP)</i> Indomalphi	Jumlah kegiatan pelaksanaan TMP Indomalphi	5	Paket	1	1	1	1	1	Laut perbatasan RI-Malaysia- Filipina	TNI UO Mabes TNI
39	<i>Trilateral Air Patrol (TMP)</i> Indomalphi	Jumlah kegiatan pelaksanaan TAP Indomalphi	5	Paket	1	1	1	1	1	Laut dan udara perbatasan RI-Malaysia- Filipina	TNI UO Mabes TNI
40	<i>Eyes In The Sky (EIS)</i> Malsindothai	Jumlah kegiatan pelaksanaan EIS Malsindothai	5	Paket	1	1	1	1	1	Laut dan udara perbatasan RI-Malaysia- Singapura- Thailand	TNI UO Mabes TNI



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 95 -

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR	VOLUME	SATUAN	CAPAIAN		TARGET			PUSAT/ DAERAH/ LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Operasi Pengamanan Pulau Terluar (Ops Pamputer)	Jumlah kegiatan pelaksanaan Ops Pamputer	5	Paket	1	1	1	1	1	Prov. NAD - P.Rondo Prov. Sumut - P.Berhala Prov. Riau - P.Nipah - P.Sekatung Prov. NTT - P.Batek - P. Dana Rote Prov. Sulawesi Utara - P. Miangas - P. Marore - P. Marampit - P. Kawaluso	TNI UO Mabes TNI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR	VOLUME	SATUAN	CAPAIAN		TARGET			PUSAT/ DAERAH/ LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										- P. Kabaruan Prov. Maluku - P. Wetar - P. Lirang - P. Kisar - P. Leti - P. Masela - P. Selaru - P. Larat - P. Batugoyang - P. Penambulai - P. Metimarang	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR	VOLUME	SATUAN	CAPAIAN		TARGET			PUSAT/ DAERAH/ LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Prov. Papua - P. Fani - P. Bras - P.Fanildo	
42	Operasi Pengamanan Ambalat	Jumlah kegiatan pelaksanaan Operasi Pengamanan Ambalat	5	Paket	1	1	1	1	1	Pulau Ambalat	TNI UO Mabes TNI
43	Pengadaan Alutsista Ranpur <i>Infantry Light Strike Vehicle (ILSV)</i>	Jumlah Ranpur yang diadakan untuk satuan TNI di Wil. Perbatasan	1	Paket	-	1	-	-	-	Prov. Papua	TNI UO Mabes TNI
44	Pengadaan Alkom Satgas Kodim Wil. Perbatasan	Jumlah Alkom dan perangkat pendukungnya di Kodim Wil. Perbatasan RI-PNG	1	Paket	-	-	1	-	-	Prov. Papua -Kab. Peg. Bintang	TNI UO Mabes TNI
45	Pengadaan Alkom Kodal Mabes TNI untuk Wil. Papua	Jumlah Alkom dan perangkat pendukungnya untuk Mabes TNI	1	Paket	-	-	1	-	-	Pusat	TNI UO Mabes TNI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 98 -

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR	VOLUME	SATUAN	CAPAIAN		TARGET			PUSAT/ DAERAH/ LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Pengadaan Alkom Pamtas Kodam VI/Mulawarman	Jumlah Alkom dan perangkat pendukungnya di Kodam Wil. Perbatasan RI-Malaysia	1	Paket	-	-	1	-	-	Prov. Kaltara Prov. Kaltim	TNI UO Mabes TNI
47	Pengadaan Alkom Pamtas Kodam XII/Tanjungpura	Jumlah Alkom dan perangkat pendukungnya di Kodam Wil. Perbatasan RI-Malaysia	1	Paket	-	-	1	-	-	Prov. Kalbar	TNI UO Mabes TNI
48	Pengadaan Alkom Pengamanan Pulau Terluar (Pamputer) Kodam VI/Mulawarman	Jumlah Alkom dan perangkat pendukungnya di Pulau Terluar Wil. Kodam VI/Mlw	1	Paket	-	-	1	-	-	Prov. Kaltara Prov. Kaltim	TNI UO Mabes TNI
49	Pengadaan Alkom Pengamanan Pulau Terluar (Pamputer) Korem 132/Tadulako	Jumlah Alkom dan perangkat pendukungnya di Pulau Terluar Wil. Korem 132/Tadulako	1	Paket	-	-	1	-	-	Prov. Sulawesi Utara	TNI UO Mabes TNI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR	VOLUME	SATUAN	CAPAIAN		TARGET			PUSAT/ DAERAH/ LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Sarana prasarana penguatan kedaulatan udara nasional	Jumlah sarana prasarana penguatan kedaulatan udara nasional	1	Paket	-	-	1	-	-	Pusat	TNI UO Mabes TNI
51	Renovasi Pos Pulau Terluar	Jumlah Pos Pulau Terluar yang direnovasi	3	Pos	-	-	3	-	-	Prov. NAD - P.Rondo Prov. Sumut - P.Berhala Prov. Riau - P.Nipah	TNI UO Mabes TNI
52	Pembangunan Faskes di Saumlaki	Jumlah Faskes TNI di Saumlaki	1	Paket	-	-	1	-	-	Prov. Maluku	TNI UO Mabes TNI
53	TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Perbatasan Negara	Jumlah kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Karya Bakti di Wil. Perbatasan Negara	5	Paket	1	1	1	1	1	Prov. Kalbar/ Prov. Kaltara/ Prov. Kaltim/ Prov. NTT/ Prov. Papua	TNI UO Mabes TNI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR	VOLUME	SATUAN	CAPAIAN		TARGET			PUSAT/ DAERAH/ LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Penguatan masyarakat desa terdepan perbatasan sebagai bagian sistem pertahanan keamanan	Jumlah masyarakat yang terlatih bidang pertahanan dan keamanan	900	Orang	180	180	180	180	180	Prov. Kalbar, Prov. Kaltim, Prov. Kaltara, Prov. Papua, Prov. NTT	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
55	Identifikasi sarana prasarana ALKOM dan sarana bantu navigasi di PPKT tidak berpenduduk	Jumlah sarana prasarana ALKOM dan sarana bantu navigasi di PPKT tidak berpenduduk yang teridentifikasi	49	PPKT	-	-	16	16	17	49 PPKT	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
56	Koordinasi perencanaan dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana di PPKT tidak berpenduduk	Jumlah PPKT tidak berpenduduk yang menjadi lokus koordinasi perencanaan dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana	49	PPKT	36	41	49	49	49	49 PPKT	Badan Nasional Pengelola Perbatasan



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 101 -

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR	VOLUME	SATUAN	CAPAIAN		TARGET			PUSAT/ DAERAH/ LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut (Operasi Dalam Negeri)	Jumlah Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut (Operasi Dalam Negeri) yang terlaksana	941	Hari Operasi	21	10	180	365	365	Prov. Kepri, Prov. Maluku	Badan Keamanan Laut
58	Operasi Udara Maritim (Operasi Dalam Negeri)	Jumlah Operasi Udara Maritim (Operasi Dalam Negeri) yang terlaksana	9.389/8	Jam Operasi/ Operasi	221	8	3.056	3.056	3.056	Prov. Kepri, Prov. Maluku, Prov. Sulut	Badan Keamanan Laut
KP 3	PENINGKATAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN WILAYAH										
1	Bhakti Kesehatan Kemhan/TNI di perbatasan	Jumlah kegiatan Bhakti Kesehatan Kemhan/TNI	2	Kegiatan	-	-	-	1	1	Prov. Kalbar/ Prov. Kaltara/ Prov. Kaltim/ Prov. NTT/ Prov. Papua	Kementerian Pertahanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 102 -

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR	VOLUME	SATUAN	CAPAIAN		TARGET			PUSAT/ DAERAH/ LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Sosialisasi Bela Negara di perbatasan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Bela Negara di perbatasan	5	Kegiatan	1	1	1	1	1	Prov. Kalbar/ Prov. Kaltara/ Prov. Kaltim/ Prov. NTT/ Prov. Papua	Kementerian Pertahanan
3	Kerja sama RI-Malaysia <i>Coordinated Operations Control Committee (COCC)</i>	Jumlah pertemuan	5	Paket	1	1	1	1	1	RI-Malaysia	TNI UO Mabes TNI
4	Kerja sama RI-Singapura <i>Indonesia-Singapore Joint Operation and Exercise Subcommittee (ISJOEC)</i>	Jumlah pertemuan	5	Paket	1	1	1	1	1	RI-Singapura	TNI UO Mabes TNI
5	Kerja sama RI-Thailand <i>Joint Operation and Exercise Sub-Committee (JOESC)</i>	Jumlah pertemuan	5	Paket	1	1	1	1	1	RI-Thailand	TNI UO Mabes TNI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR	VOLUME	SATUAN	CAPAIAN		TARGET			PUSAT/ DAERAH/ LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Kerja sama RI-Filipina <i>Joint Operation and Exercise Sub-Committee (JOESC) & Indonesia-Philippines Border Committee (ID-PH BC)</i>	Jumlah pertemuan	5	Paket	1	1	1	1	1	RI-Filipina	TNI UO Mabes TNI
7	Kerja sama RI-Australia <i>Joint Operation and Exercise Sub-Committee (JOESC)</i>	Jumlah pertemuan	5	Paket	1	1	1	1	1	RI-Australia	TNI UO Mabes TNI
8	Kerja sama RI-RDTL <i>Technical Sub-Committee on Border Security (TSC BS)</i>	Jumlah pertemuan	5	Paket	1	1	1	1	1	RI-RDTL	TNI UO Mabes TNI
9	Kerjasama RI-PNG <i>Joint Sub-Committee on Security Matter (JSCSM)</i>	Jumlah pertemuan	5	Paket	1	1	1	1	1	RI-PNG	TNI UO Mabes TNI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR	VOLUME	SATUAN	CAPAIAN		TARGET			PUSAT/ DAERAH/ LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Kerja sama Indomalphi <i>Trilateral Maritime Patrol Sub Working Security (TMP SWG)</i>	Jumlah pertemuan	5	Paket	1	1	1	1	1	RI-MAL-PHIL	TNI
11	Kerja sama Malsindo-thai <i>Malacca Straits Patrol Joint Coordinating Committee (MSP JCC)</i>	Jumlah pertemuan	5	Paket	1	1	1	1	1	MAL-SIN-RI-THAI	TNI UO Mabes TNI
12	<i>Joint Task Force on Narcotics</i>	Jumlah kegiatan <i>Joint Task Force</i> yang dilaksanakan	4	Kegiatan	-	1	1	1	1	Kalimantan, Papua	Kementerian Keuangan
13	Pembangunan Rumah Khusus Yon A Pelopor di Koya Koso, Jayapura	Jumlah Rumah Khusus T.38 M2 yang terbangun	20	Unit	-	-	20	-	-	PKSN Jayapura	Kepolisian Negara Republik Indonesia
14	Pembangunan Mako Polsubsektor Pulau Tiga	Jumlah Mako Polsubsektor yang terbangun	1	Unit	-	1	-	-	-	Kec. Pulau Tiga	Kepolisian Negara Republik Indonesia
15	Pembangunan Mako Polsubsektor Lakmaras	Jumlah Mako Polsubsektor yang terbangun	1	Unit	-	1	-	-	-	Kec. Lakmanen Selatan	Kepolisian Negara Republik Indonesia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 105 -

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR	VOLUME	SATUAN	CAPAIAN		TARGET			PUSAT/ DAERAH/ LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Pembangunan Rumah Dinas Danki	Jumlah Rumah Dinas Tipe 70 yang terbangun	1	Unit	-	-	1	-	-	Kec. Tasifeto Barat	Kepolisian Negara Republik Indonesia
17	Pembangunan Rumah Dinas Wadanki	Jumlah Rumah Dinas Tipe 70 yang terbangun	1	Unit	-	-	1	-	-	Kec. Tasifeto Barat	Kepolisian Negara Republik Indonesia
18	Pembangunan Rumah Dinas Danton	Jumlah Rumah Dinas tipe 45 yang terbangun	7	Unit	-	-	7	-	-	Kec. Tasifeto Barat	Kepolisian Negara Republik Indonesia
19	Pembangunan Rumah Susun Anggota Kompi 2 Yon A Pelopor	Jumlah Rumah Susun yang terbangun untuk Kompi 2 Yon A Pelopor T.38/32 KK	1	Unit	-	-	1	-	-	Kec. Tasifeto Barat	Kepolisian Negara Republik Indonesia
20	Pembangunan Markas Komando Polsek Muara Tami	Jumlah Mako Polsek Muara Tami T. 555 M2 (2 Lantai) yang terbangun	1	Unit	-	-	1	-	-	Kec. Muara Tami	Kepolisian Negara Republik Indonesia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 106 -

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR	VOLUME	SATUAN	CAPAIAN		TARGET			PUSAT/ DAERAH/ LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Pembangunan Rumah Susun Polsek Muara Tami	Jumlah Rumah Susun Polsek Muara Tami T. 810 M2/2 Lantai/27 KK yang terbangun	1	Unit	-	-	1	-	-	Kec. Muara Tami	Kepolisian Negara Republik Indonesia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 107 -

MATRIKS PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN POS LINTAS BATAS NEGARA

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/ KECAMATAN/PLBN/KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	PROVINSI KEPULAUAN RIAU									
A	Kabupaten Natuna									
1	Kecamatan Serasan									
PLBN Serasan										
1	Pembangunan PLBN Serasan	Terbangunnya PLBN	1	Unit	-	1	-	-		Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	Operasional PLBN Serasan	Terlaksananya operasional PLBN Serasan	1	Kegiatan	-	-	-	1	1	Badan Nasional Pengelola Perbatasan



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 108 -

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/ KECAMATAN/PLBN/KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai	Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai	2	Paket	-	-	-	1	1	Kementerian Keuangan
II	PROVINSI KALIMANTAN BARAT									
A	Kabupaten Bengkayang									
1	Kecamatan Jagoi Babang									
	PLBN Jagoi Babang									
1	Pembangunan PLBN Jagoi Babang	Terbangunnya PLBN	1	Unit	-	1	-	-		Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	Operasional PLBN Jagoi Babang	Terlaksananya operasional PLBN Jagoi Babang	1	Kegiatan	-	-	-	1	1	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
3	Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan	Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai	2	Paket	-	-	-	1	1	Kementerian Keuangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 109 -

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/ KECAMATAN/PLBN/KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dan cukai									
B	Kabupaten Sintang									
1	Kecamatan Sintang									
	PLBN Sei Kelik									
1	Pembangunan PLBN Sei Kelik	Terbangunnya PLBN	1	Unit	-	1	-	-		Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	Operasional PLBN Sei Kelik	Terlaksananya operasional PLBN Sei Kelik	1	Kegiatan	-	-	-	1	1	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
3	Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai	Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai	2	Paket	-	-	-	1	1	Kementerian Keuangan
C	Kabupaten Sambas									



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 110 -

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/ KECAMATAN/PLBN/KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kecamatan Sajingan Besar									
PLBN Aruk										
1	Operasional PLBN Aruk (termasuk zona pendukung)	Terlaksananya operasional PLBN Aruk	1	Kegiatan	1	1	1	1	1	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
2	Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai	Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai	5	Paket	1	1	1	1	1	Kementerian Keuangan
3	Pembangunan Terminal Barang Internasional Aruk	Jumlah terminal barang yang terbangun	1	Unit	1	-	-	-	-	Kementerian Perhubungan
D	Kabupaten Sanggau									
1	Kecamatan Entikong									
PLBN Entikong										
1	Operasional PLBN Entikong (termasuk zona pendukung)	Terlaksananya operasional PLBN Entikong	1	Kegiatan	1	1	1	1	1	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
2	Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan	Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan	5	Paket	1	1	1	1	1	Kementerian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/ KECAMATAN/PLBN/KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai	pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai								Keuangan
E	Kabupaten Kapuas Hulu									
1	Kecamatan Putussibau									
	PLBN Badau									
1	Operasional PLBN Badau (termasuk zona pendukung)	Terlaksananya operasional PLBN Badau	1	Kegiatan	1	1	1	1	1	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
2	Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai	Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai	5	Paket	1	1	1	1	1	Kementerian Keuangan
III	PROVINSI KALIMANTAN UTARA									
A	Kabupaten Nunukan									
1	Kecamatan Sebatik Utara									
	PLBN Sei Nyamuk									
1	Pembangunan PLBN Sei Nyamuk	Terbangunnya PLBN	1	Unit	-	1	-	-	-	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 112 -

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/ KECAMATAN/PLBN/KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Rakyat
2	Operasional PLBN Sei Nyamuk	Terlaksananya operasional PLBN Sei Nyamuk	1	Kegiatan	-	-	-	1	1	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
3	Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai	Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai	2	Paket	-	-	-	1	1	Kementerian Keuangan
2	Kecamatan Lumbis Ogong									
PLBN Labang										
1	Pembangunan PLBN Labang	Terbangunnya PLBN	1	Unit	-	1	-	-	-	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	Operasional PLBN Labang	Terlaksananya operasional PLBN Labang	1	Kegiatan	-	-	-	1	1	Badan Nasional Pengelola Perbatasan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 113 -

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/ KECAMATAN/PLBN/KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai	Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai	2	Paket	-	-	-	1	1	Kementerian Keuangan
3	Kecamatan Krayan									
PLBN Long Midang										
1	Pembangunan PLBN Long Midang	Terbangunnya PLBN	1	Unit	-	1	-	-		Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	Operasional PLBN Long Midang	Terlaksananya operasional PLBN Long Midang	1	Kegiatan	-	-	-	1	1	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
3	Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan	Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai	2	Paket	-	-	-	1	1	Kementerian Keuangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 114 -

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/ KECAMATAN/PLBN/KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dan cukai									
B	Kabupaten Malinau									
1	Kecamatan Krayan Hulu									
	PLBN Long Nawang									
1	Pembangunan PLBN Long Nawang	Terbangunnya PLBN	1	Unit	-	1	-	-		Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	Operasional PLBN Long Nawang	Terlaksananya operasional PLBN Long Nawang	1	Kegiatan	-	-	-	1	1	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
3	Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanaan dan cukai	Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanaan dan cukai	2	Paket	-	-	-	1	1	Kementerian Keuangan
IV	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR									



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 115 -

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/ KECAMATAN/PLBN/KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	Kabupaten Kupang									
1	Kecamatan Amfoang Timur									
PLBN Oepoli										
1	Pembangunan PLBN Oepoli	Terbangunnya PLBN	1	Unit	-	1	-	-		Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	Operasional PLBN Oepoli	Terlaksananya operasional PLBN Oepoli	1	Kegiatan	-	-	-	1	1	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
3	Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai	Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai	2	Paket	-	-	-	1	1	Kementerian Keuangan
B	Kabupaten Timor Tengah Utara									
1	Kecamatan Bikomi Utara									
PLBN Napan										



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 116 -

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/ KECAMATAN/PLBN/KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pembangunan PLBN Napan	Terbangunnya PLBN	1	Unit	-	1	-	-		Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	Operasional PLBN Napan	Terlaksananya operasional PLBN Napan	1	Kegiatan	-	-	-	1	1	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
3	Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai	Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai	2	Paket	-	-	-	1	1	Kementerian Keuangan
2	Kecamatan Insana Utara									
PLBN Wini										
1	Operasional PLBN Wini (termasuk zona pendukung)	Terlaksananya operasional PLBN Wini	1	Kegiatan	1	1	1	1	1	Badan Nasional Pengelola Perbatasan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 117 -

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/ KECAMATAN/PLBN/KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai	Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai	5	Paket	1	1	1	1	1	Kementerian Keuangan
3	Kecamatan Tasifeto Timor									
PLBN Motaain										
1	Operasional PLBN Motaain (termasuk zona pendukung)	Terlaksananya operasional PLBN Motaain	1	Kegiatan	1	1	1	1	1	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
2	Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai	Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai	5	Paket	1	1	1	1	1	Kementerian Keuangan
C	Kabupaten Malaka									
1	Kecamatan Kobalima Timur									
PLBN Motamasin										
1	Operasional PLBN Motamasin (termasuk zona pendukung)	Terlaksananya operasional PLBN Motamasin	1	Kegiatan	1	1	1	1	1	Badan Nasional Pengelola



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 118 -

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/ KECAMATAN/PLBN/KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Perbatasan
2	Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai	Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai	5	Paket	1	1	1	1	1	Kementerian Keuangan
VI	PROVINSI PAPUA									
A	Kabupaten Merauke									
1	Distrik Sota									
	PLBN Sota									
1	Pembangunan PLBN Sota	Terbangunnya PLBN	1	Unit	1	-	-	-	-	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	Operasional PLBN Sota	Terlaksananya operasional PLBN Sota	1	Kegiatan	1	1	1	1	1	Badan Nasional Pengelola Perbatasan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 119 -

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/ KECAMATAN/PLBN/KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai	Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai	5	Paket	1	1	1	1	1	Kementerian Keuangan
B	Kabupaten Boven Digoel									
1	Distrik Ninati									
PLBN Yetetkun										
1	Pembangunan PLBN Yetetkun	Terbangunnya PLBN	1	Unit	1	-	-	-	-	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	Operasional PLBN Yetetkun	Terlaksananya operasional PLBN Yetetkun	1	Kegiatan	-	-	1	1	1	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
3	Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan	Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan	3	Paket	-	-	1	1	1	Kementerian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 120 -

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/ KECAMATAN/PLBN/KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai	pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai								Keuangan
C	Kota Jayapura									
1	Distrik Muara Tami									
	PLBN Skouw									
1	Operasional PLBN Skouw (termasuk zona pendukung)	Terlaksananya operasional PLBN Skouw	1	Kegiatan	1	1	1	1	1	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
2	Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai	Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai	5	Paket	1	1	1	1	1	Kementerian Keuangan
3	Pembangunan Terminal Barang Internasional Skouw	Jumlah terminal barang yang terbangun	1	Unit	-	-	1	-	-	Kementerian Perhubungan



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 121 -

MATRIKS KEGIATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
I	PROVINSI ACEH										
KP 1	PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA										
1	Penyusunan Materi Teknis Peninjauan Kembali Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara	Jumlah Materi Teknis Kawasan Strategis Nasional	1	Paket	-	-	-	-	1	Prov. Aceh	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
2	Fasilitasi Legislasi Rancangan Peraturan Presiden Kawasan Perbatasan Negara Sabang	Jumlah Rancangan Peraturan Presiden Kawasan Perbatasan Negara	1	Paket	-	-	-	1	-	PKSN Sabang	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 122 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
3	Penyusunan Materi Teknis Kawasan Perbatasan Negara Lamreh, Kuala Langsa	Jumlah Materi Teknis Kawasan Perbatasan Negara	2	Paket	-	-	2	-	-	Kec. Masjid Raya, Kec. Langsa Barat	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
KP 2	PENGEMBANGAN POTENSI KAWASAN PERBATASAN NEGARA										
1	Pembangunan Sentra IKM Bordir	Jumlah Sentra IKM Bordir yang terbangun	1	Sentra IKM	-	1	-	-	-	Kab. Aceh Besar	Kementerian Perindustrian
2	Bimbingan teknis diversifikasi produk olahan rotan	Jumlah bimbingan teknis yang terlaksana	15	IKM	-	15	-	-	-	Kab. Aceh Besar	Kementerian Perindustrian
3	Bimbingan teknis kerajinan bili (bemban)	Jumlah bimbingan teknis yang terlaksana	22	IKM	-	22	-	-	-	Kab. Aceh Besar	Kementerian Perindustrian
4	Revitalisasi Sentra IKM	Jumlah Sentra IKM yang direvitalisasi	2	Sentra IKM	-	2	-	-	-	Kota Sabang, Kota Langsa	Kementerian Perindustrian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 123 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
5	Peningkatan efektif pengawasan barang beredar dan jasa	Jumlah kegiatan pengawasan barang yang beredar sesuai ketentuan SNI, manual kartu garansi dan label	1	Kegiatan	-	1	-	-	-	PKSN Sabang (Kec. Sukajaya)	Kementerian Perdagangan
6	Dukungan sarana ekonomi kreatif	Meningkatnya kualitas pelaku ekonomi kreatif	1	Kegiatan	1	-	-	-	-	PKSN Sabang (Kec. Sukakarya)	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
7	Peningkatan kualitas amenities dan atraksi pada destinasi pariwisata	Meningkatnya kualitas amenities dan atraksi pada destinasi pariwisata	1	Kegiatan	1	-	-	-	-	PKSN Sabang (Kec. Sukajaya)	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
8	SKPT Sabang yang mandiri	Tingkat (skala) kemandirian SKPT Sabang	4	Skala Kemandirian	3	3	3	4	4	PKSN Sabang (Kec. Sukakarya)	Kementerian Kelautan dan Perikanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 124 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
9	Pengembangan Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan desa digital	2	Desa	-	-	-	1	1	Kec. Mesjid Raya	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
KP 3	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS										
1	Penyediaan aksesibilitas telekomunikasi dan informasi (Bakti Sinyal/ <i>Lastmile</i>)	Jumlah lokasi BTS/WIFI di wilayah pelayanan universal telekomunikasi dan informatika	1	Unit	-	-	-	-	1	PKSN Sabang	Kementerian Komunikasi dan Informatika
2	Peningkatan jalan desa strategis ruas jalan Pria Laot-Air Terjun	Panjang ruas jalan yang ditingkatkan	0,928	Km	-	0,928	-	-	-	PKSN Sabang (Kec. Sukakarya)	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
3	Pengadaan sarana transportasi darat	Jumlah sarana transportasi darat yang tersedia	2	Unit	-	2	-	-	-	PKSN Sabang (Kec. Sukakarya, Kec. Sukajaya)	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 125 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
4	Peningkatan jalan desa strategis ruas jalan Meunasah-Keramat	Panjang ruas jalan yang ditingkatkan	0,44	Km	-	0,44	-	-	-	PKSN Sabang (Kec. Sukajaya)	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
5	Rehabilitasi/peningkatan Terminal Langsa	Peningkatan layanan terminal tipe A	1	Unit	-	-	-	1	-	Kec. Langsa Barat	Kementerian Perhubungan
6	Digitalisasi Terminal Langsa	Peningkatan layanan terminal tipe A	1	Unit	-	-	-	-	1	Kec. Langsa Barat	Kementerian Perhubungan
7	Peningkatan jalan desa strategis ruas jalan Sp. Nasional-GP. Durung	Panjang ruas jalan yang ditingkatkan	1,75	Km	-	1,75	-	-	-	Kec. Mesjid Raya	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
8	Peningkatan jalan desa strategis ruas jalan Sp. Nasional-Perumahan Ujung Bate	Panjang ruas jalan yang ditingkatkan	0,72	Km	-	0,72	-	-	-	Kec. Mesjid Raya	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
9	Peningkatan jalan desa strategis ruas jalan Gp. Simpang Lhee-Gp. Seuriget	Panjang ruas jalan yang ditingkatkan	1,068	Km	-	1,068	-	-	-	Kec. Langsa Barat	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 126 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
10	Pengadaan sarana transportasi darat	Jumlah sarana transportasi darat yang tersedia	2	Unit	-	2	-	-	-	Kec. Masjid Raya, Kec. Langsa Barat	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
11	Pengadaan sarana transportasi perairan dibawah 20 <i>Gross Tonnage</i> (GT) dan/atau maksimal kapasitas 25 orang	Tersedianya sarana transportasi perairan	1	unit	-	1	-	-	-	Kec. Langsa Barat	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
KP 4	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL DASAR										
1	Rehabilitasi bangunan kantor desa	Jumlah kantor desa yang direhabilitasi	8	Unit	-	-	2	3	3	Prov. Aceh	Kementerian Dalam Negeri
2	Pelayanan administrasi kependudukan di daerah	Pelayanan administrasi kependudukan di daerah (KTP el, KIA, Akta Kelahiran)	15	Paket	3	3	3	3	3	Kab. Aceh Besar, Kota Sabang, Kota Langsa	Kementerian Dalam Negeri
3	Bantuan Sosial Pemerintah	Persentase keluarga penerima manfaat yang mendapatkan bantuan sosial pemerintah	100	%	100	100	100	100	100	Kab. Aceh Besar, Kota Sabang, Kota Langsa	Kementerian Sosial



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 127 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
4	Peningkatan titik penyalur program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	10	Penyalur	-	2	2	2	4	PKSN Sabang	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5	Penyediaan konverter kit BBM ke bahan bakar gas untuk nelayan	Jumlah konverter kit BBM ke bahan bakar gas untuk nelayan yang difasilitasi	50	Unit	-	-	-	-	50	PKSN Sabang	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6	Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas SD	Jumlah ruang kelas yang terbangun/direhabilitasi	89	Ruang	-	34	17	18	20	PKSN Sabang (Kec. Sukakarya, Kec. Sukajaya), Kec. Mesjid Raya, Kec. Langsa Barat	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
7	Pembangunan/rehabilitasi perpustakaan SD	Jumlah ruang perpustakaan yang terbangun/direhabilitasi	20	Ruang	-	3	5	6	6	PKSN Sabang (Kec. Sukakarya, Kec. Sukajaya), Kec. Langsa Barat, Kec. Mesjid Raya	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
8	Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas SMP	Jumlah ruang kelas yang terbangun/direhabilitasi	49	Ruang	-	34	5	6	4	PKSN Sabang (Kec. Sukakarya, Kec. Sukajaya), Kec. Mesjid Raya, Kec. Langsa Barat	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 128 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
9	Pembangunan/rehabilitasi laboratorium SMP	Jumlah ruang laboratorium yang terbangun/direhabilitasi	7	Ruang	-	1	1	2	3	PKSN Sabang (Kec. Sukakarya, Kec. Sukajaya), Kec. Mesjid Raya	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
10	Pembangunan/rehabilitasi perpustakaan SMP	Jumlah ruang perpustakaan yang terbangun/direhabilitasi	13	Ruang	-	2	3	4	4	PKSN Sabang (Kec. Sukakarya, Kec. Sukajaya), Kec. Langsa Barat, Kec. Mesjid Raya	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
11	Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas SMA/SMK	Jumlah ruang kelas yang terbangun/direhabilitasi	22	Ruang	-	8	4	5	5	PKSN Sabang (Kec. Sukajaya), Kec. Mesjid Raya, Kec. Langsa Barat	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
12	Pembangunan/rehabilitasi ruang laboratorium SMA/SMK	Jumlah ruang laboratorium yang terbangun/direhabilitasi	11	Ruang	-	1	4	4	2	PKSN Sabang (Kec. Sukakarya, Kec. Sukajaya), Kec. Mesjid Raya, Kec. Langsa Barat	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 129 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
13	Pembangunan/rehabilitasi perpustakaan SMA/SMK	Jumlah ruang perpustakaan yang terbangun/direhabilitasi	5	Ruang	-	1	-	3	1	PKSN Sabang (Kec. Sukakarya, Kec. Sukajaya), Kec. Mesjid Raya	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
14	Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan	Jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia	2	Paket	-	2	-	-	-	PKSN Sabang (Kec. Sukakarya, Kec. Sukajaya)	Kementerian Kesehatan
15	Penyediaan alat kesehatan	Jumlah alat kesehatan yang tersedia	2	Paket	-	2	-	-	-	PKSN Sabang (Kec. Sukakarya, Kec. Sukajaya)	Kementerian Kesehatan
16	Pembangunan baru IPAL skala permukiman kombinasi MCK	Jumlah IPAL skala permukiman kombinasi MCK yang terbangun	1	Unit	-	1	-	-	-	PKSN Sabang (Kec. Sukakarya)	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
17	Pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah	Jumlah jaringan distribusi dan sambungan rumah yang terbangun	810	SR	-	510	-	300	-	PKSN Sabang (Kec. Sukakarya, Kec. Sukajaya), Kec. Masjid Raya, Kec. Langsa Barat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
18	Pembangunan/relokasi Puskesmas Rawat Inap	Jumlah Puskesmas Rawat Inap yang dibangun/direlokasi	1	Unit	-	-	-	1	-	Kec. Mesjid Raya	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 130 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
19	Bantuan pembangunan baru rumah secara swadaya	Jumlah rumah baru secara swadaya di daerah afirmasi yang terbangun	475	Unit	-	275	-	-	200	Kec. Masjid Raya, Kec. Langsa Barat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
20	Pembangunan baru IPAL Skala Permukiman kombinasi MCK dengan jumlah layanan minimal 25 KK	Jumlah IPAL Skala Permukiman kombinasi MCK yang terbangun	6	Unit	-	3	-	-	3	Kec. Masjid Raya, Kec. Langsa Barat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
21	Pembangunan SPAM (Desa Pusung)	Jumlah SPAM yang terbangun	1	Unit	-	-	-	1	-	Kec. Langsa Barat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
II	PROVINSI SUMATERA UTARA										
KP 1	PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA										
1	Penyusunan Materi Teknis PK Kawasan Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara	Jumlah Materi Teknis Kawasan Strategis Nasional	1	Paket	-	-	-	-	1	Prov. Sumatera Utara	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 131 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
2	Penyusunan Materi Teknis Kawasan Perbatasan Negara di Kota Medan, Kuala Tanjung	Jumlah Materi Teknis Kawasan Perbatasan Negara	2	Paket	-	-	1	1	-	PKSN Medan, Kec. Sei Suka	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
KP 2	PENGEMBANGAN POTENSI KAWASAN PERBATASAN NEGARA										
1	Revitalisasi Sentra IKM	Jumlah Sentra IKM yang direvitalisasi	1	Sentra IKM	-	1	-	-	-	Kab. Serdang Bedagai	Kementerian Perindustrian
2	Penumbuhan Wirausaha Baru (WUB) melalui bimtek anyaman pandan	Jumlah bimtek anyaman pandan WUB yang terlaksana	25	IKM	-	25	-	-	-	Kab. Serdang Bedagai	Kementerian Perindustrian
3	Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat	Jumlah pasar rakyat yang dibangun/direvitalisasi	1	Unit	-	-	-	-	1	Kec. Tanjung Beringin	Kementerian Perdagangan
4	Pelatihan kewirausahaan	Jumlah pelatihan kewirausahaan	60	Orang	-	-	-	-	60	Kec. Tanjung Beringin	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 132 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
KP 3	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS										
1	Peningkatan Jalan Desa Strategis Ruas Jalan Sp. 3 Desa Simodong-Sp. 3 Pekan Sabtu	Panjang ruas jalan yang ditingkatkan	1,1	Km	-	1,1	-	-	-	Kec. Sei Suka	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
2	Peningkatan jalan desa strategis ruas jalan Dusun III Desa Tebing Tinggi	Panjang ruas jalan yang ditingkatkan	0,8	Km	-	0,8	-	-	-	Kec. Tanjung Beringin	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
3	Peningkatan jalan desa strategis ruas jalan Dusun IV Kp. Lalang-Mangga Dua Pasar Besar Nagur	Panjang ruas jalan yang ditingkatkan	1	Km	-	1	-	-	-	Kec. Tanjung Beringin	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
4	Peningkatan jalan desa strategis ruas jalan Dusun V Penggatalan-Dusun IV Kampung Baru Desa Pematang Cermai	Panjang ruas jalan yang ditingkatkan	1,2965	Km	-	1,2965	-	-	-	Kec. Tanjung Beringin	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 133 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
5	Pengadaan sarana transportasi darat	Jumlah sarana transportasi darat yang tersedia	5	Unit	-	5	-	-	-	Kec. Tanjung Beringin, Kec. Sei Suka	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
KP 4	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL DASAR										
1	Rehabilitasi bangunan kantor desa	Jumlah kantor desa yang direhabilitasi	5	Unit	-	-	1	2	2	Prov. Sumatera Utara	Kementerian Dalam Negeri
2	Pelayanan administrasi kependudukan di daerah	Pelayanan administrasi kependudukan di daerah (KTP el, KIA, Akta Kelahiran)	10	Paket	2	2	2	2	2	Kab. Serdang Bedagai, Kab. Batu Bara	Kementerian Dalam Negeri
3	Bantuan Sosial Pemerintah	Persentase keluarga penerima manfaat yang mendapatkan bantuan sosial pemerintah	100	%	100	100	100	100	100	Kab. Serdang Bedagai, Kab. Batu Bara	Kementerian Sosial



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 134 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
4	Pembangunan Balai pertemuan umum kecamatan	Jumlah Balai pertemuan umum kecamatan yang dibangun	1	Unit	-	-	-	1	-	Kec. Tanjung Beringin	Kementerian Dalam Negeri
5	Pembinaan upaya kesehatan dasar	Terlaksananya pembinaan upaya kesehatan dasar	1	Kegiatan	-	1	-	-	-	Kec. Tanjung Beringin	Kementerian Kesehatan
6	Pelayanan kefarmasian	Jumlah pelayanan kefarmasian	1	Paket	1	-	-	-	-	Kec. Tanjung Beringin	Kementerian Kesehatan
7	Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas SD	Jumlah ruang kelas yang terbangun/direhabilitasi	40	Ruang	-	7	11	11	11	Kec. Tanjung Beringin, Kec. Sei Suka	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
8	Pembangunan/rehabilitasi perpustakaan SD	Jumlah ruang perpustakaan yang terbangun/direhabilitasi	12	Ruang	-	-	3	4	5	Kec. Tanjung Beringin, Kec. Sei Suka	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
9	Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas SMP	Jumlah ruang kelas yang terbangun/direhabilitasi	36	Ruang	-	6	10	10	10	Kec. Tanjung Beringin, Kec. Sei Suka	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 135 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
10	Pembangunan/rehabilitasi perpustakaan SMP	Jumlah ruang perpustakaan yang terbangun/direhabilitasi	12	Ruang	-	-	4	4	4	Kec. Tanjung Beringin, Kec. Sei Suka	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
11	Pembangunan/rehabilitasi ruang laboratorium SMP	Jumlah ruang laboratorium yang terbangun/direhabilitasi	9	Ruang	-	-	2	3	4	Kec. Tanjung Beringin, Kec. Sei Suka	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
12	Pembangunan/rehabilitasi laboratorium SMA/SMK	Jumlah ruang laboratorium yang terbangun/direhabilitasi	7	Ruang	-	-	2	2	3	Kec. Tanjung Beringin, Kec. Sei Suka	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
13	Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas SMA	Jumlah ruang kelas yang terbangun/direhabilitasi	5	Ruang	-	-	1	2	2	Kec. Sei Suka	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
14	Pembangunan baru IPAL Skala Permukiman kombinasi MCK	Jumlah IPAL Skala Permukiman kombinasi MCK yang terbangun	5	Unit	-	5	-	-	-	Kec. Tanjung Beringin	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 136 -

NO.	PROVINSI/ KEGLATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
15	Pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah air bersih	Jumlah jaringan distribusi dan sambungan rumah yang tersedia	320	SR	-	320	-	-	-	Kec. Tanjung Beringin	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
16	Pembangunan baru rumah secara swadaya	Jumlah rumah secara swadaya yang dibangun	124	Unit	-	124	-	-	-	Kec. Sei Suka	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
III	PROVINSI RIAU										
KP 1	PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA										
1	Penyusunan Materi Teknis Kawasan Perbatasan Negara Bengkalis, Dumai	Jumlah Materi Teknis Kawasan Perbatasan Negara	2	Paket	-	1	1	-	-	PKSN Bengkalis, PKSN Dumai	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
2	Fasilitasi Legislasi Rancangan Peraturan Presiden Kawasan Perbatasan Negara Bengkalis, Dumai	Jumlah Rancangan Peraturan Presiden Kawasan Perbatasan Negara	2	Paket	-	-	-	-	2	PKSN Bengkalis, PKSN Dumai	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 137 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
3	Penyusunan Materi Teknis Kawasan Perbatasan Negara Panipahan, Sinaboi, Tanjung Medang, Tanjung Kedabu	Jumlah Materi Teknis Kawasan Perbatasan Negara	4	Paket	-	-	-	-	4	Kec. Pasir Limau Kapas, Kec. Sinaboi, Kec. Rupert Utara, Kec. Rangsang Pesisir	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
KP 2	PENGEMBANGAN POTENSI KAWASAN PERBATASAN NEGARA										
1	Revitalisasi Sentra IKM Sagu	Jumlah Sentra IKM sagu yang direvitalisasi	1	Sentra IKM	-	1	-	-	-	Kab. Kep. Meranti	Kementerian Perindustrian
2	Pemanfaatan bahan baku/limbah dari industri besar dalam pengolahan ampas	Pemanfaatan bahan baku/limbah dari industri besar dalam pengolahan ampas yang terlaksana	1	IKM	-	1	-	-	-	Kab. Kep. Meranti	Kementerian Perindustrian
3	Pembangunan dermaga wisata	Jumlah dermaga wisata yang terbangun	1	Unit	-	1	-	-	-	PKSN Bengkalis (Kec. Bantan)	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 138 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
4	Pembangunan titik labuh/singgah kapal layar (yacht)	Jumlah titik labuh kapal yang terbangun	1	Unit	-	1	-	-	-	PKSN Bengkalis (Kec. Bantan)	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
5	BUMDes yang dikembangkan untuk mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes	2	Desa	-	-	-	-	2	PKSN Bengkalis	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
6	Pengembangan Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	2	Desa	-	-	-	1	1	PKSN Bengkalis	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
7	Penyediaan Kapal <5 GT, alat tangkap, dan sarana pendukung	Jumlah kapal dan alat tangkap yang tersedia	11	Unit	-	-	-	-	11	Kec. Bandar Laksamana	Kementerian Kelautan dan Perikanan
8	Pengadaan Kapal Motor 5 GT	Jumlah Kapal Motor 5 GT yang tersedia	40	Unit	-	-	-	-	40	Kec. Rukat Utara, Kec. Rukat	Kementerian Kelautan dan Perikanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 139 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
9	Pembangunan dermaga apung	Jumlah dermaga apung yang terbangun	1	Unit	-	-	-	-	1	Kec. Rupert	Kementerian Kelautan dan Perikanan
10	Pembangunan pengaman sabuk pantai	Jumlah pengaman sabuk pantai yang terbangun	2	Lokasi	-	-	-	-	2	Kec. Rupert	Kementerian Kelautan dan Perikanan
11	Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang tersedia	165	Paket	-	-	-	-	165	Kec. Pulau Merbau, Kec. Tasik Putri Puyu, Kec. Rangsang Pesisir, Kec. Rangsang	Kementerian Kelautan dan Perikanan
12	Penyediaan sarana dan prasarana budi daya perikanan	Jumlah sarana dan prasarana budi daya perikanan yang tersedia	170	Paket	-	-	-	-	170	Kec. Pulau Merbau, Kec. Tasik Putri Puyu, Kec. Rangsang Pesisir, Kec. Rangsang	Kementerian Kelautan dan Perikanan
13	Pengadaan Keramba Jaring Apung	Jumlah Keramba Jaring Apung yang tersedia	104	Kelompok	-	-	-	-	104	Kec. Pulau Merbau, Kec. Tasik Putri Puyu, Kec. Rangsang Pesisir, Kec. Rangsang	Kementerian Kelautan dan Perikanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 140 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
14	Pengadaan Kapal Patroli perbatasan/pengawas perikanan	Jumlah Kapal Patroli perbatasan yang tersedia	3	Unit	-	-	-	-	3	Kec. Rangsang Pesisir, Kec. Rangsang	Kementerian Kelautan dan Perikanan
15	Pembangunan Pasar Rakyat Non-Prototipe	Jumlah Pasar Rakyat Non-Prototipe yang dibangun	1	Unit	1	-	-	-	-	Kec. Sinaboi	Kementerian Perdagangan
16	Pembangunan/revitalisasi Sentra IKM kopi	Jumlah Sentra IKM kopi yang terbangun/ direvitalisasi	1	Paket	-	-	-	-	1	Kec. Rangsang Pesisir	Kementerian Perindustrian
17	Pelatihan kewirausahaan	Jumlah pelatihan kewirausahaan yang terlaksana	120	Orang	-	-	-	-	120	Kec. Tasik Putri Puyu	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
KP 3	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS										
1	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Ketam Putih	Jumlah pelabuhan penyeberangan yang terbangun	3	Paket	-	-	1	1	1	PKSN Bengkalis (Kec. Bengkalis)	Kementerian Perhubungan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 141 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
2	Penyediaan aksesibilitas telekomunikasi dan informasi (Bakti Sinyal/ <i>Lastmile</i>)	Jumlah lokasi BTS/WIFI di wilayah pelayanan universal telekomunikasi dan informatika	1	Unit	-	-	-	-	1	PKSN Bengkalis	Kementerian Komunikasi dan Informatika
3	Pembangunan pelabuhan penyeberangan Dakal	Jumlah pelabuhan penyeberangan yang terbangun	3	Paket	-	-	1	1	1	Kec. Pulau Merbau	Kementerian Perhubungan
4	Pengadaan sarana transportasi darat	Jumlah sarana transportasi darat yang tersedia	2	Unit	-	2	-	-	-	Kec. Rupal Utara	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
5	Pembangunan dermaga rakyat (sungai/danau) untuk orang dan barang Pengadaan sarana transportasi darat	Jumlah dermaga rakyat (sungai/danau) yang terbangun	1	Unit	-	1	-	-	-	Kec. Rupal Utara	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
6	Peningkatan jalan desa strategis ruas jalan Sudirman	Panjang ruas jalan yang ditingkatkan	0,8	Km	-	0,8	-	-	-	Kec. Pulau Merbau	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 142 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
7	Peningkatan jalan desa strategis ruas jalan Pelabuhan	Panjang ruas jalan yang ditingkatkan	0,94	Km	-	0,94	-	-	-	Kec. Pulau Merbau	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
8	Peningkatan jalan desa strategis ruas jalan Jl. Perkebunan	Panjang ruas jalan yang ditingkatkan	2,53	Km	-	2,53	-	-	-	Kec. Bangko	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
9	Peningkatan jalan desa strategis ruas jalan Jl. Abdullah Ali	Panjang ruas jalan yang ditingkatkan	1,037	Km	-	1,037	-	-	-	Kec. Medang Kampai	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
10	Penyediaan Titik Lokasi dan pembangunan BTS	Jumlah titik lokasi penyediaan BTS khususnya di kelautan dan daerah pesisir	4	Lokasi	-	4	-	-	-	Kec. Pasir Limau Kapas, Kec. Rumat Utara, Kec. Rangsang	Kementerian Komunikasi dan Informatika
KP 4	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL DASAR										



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 143 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
1	Pelayanan administrasi kependudukan di daerah	Pelayanan administrasi kependudukan di daerah (KTP el, KIA, Akta Kelahiran)	20	Paket	4	4	4	4	4	Kab. Bengkalis, Kab. Rokan Hilir, Kab. Kep. Meranti, Kota Dumai	Kementerian Dalam Negeri
2	Bantuan Sosial Pemerintah	Persentase keluarga penerima manfaat yang mendapatkan bantuan sosial pemerintah	100	%	100	100	100	100	100	Kab. Bengkalis, Kab. Rokan Hilir, Kab. Kep. Meranti, Kota Dumai	Kementerian Sosial
3	Peningkatan Titik Penyalur program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	10	Penyalur	-	2	2	2	4	PKSN Bengkalis	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4	Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk nelayan	Jumlah Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk nelayan yang difasilitasi	50	Unit	10	10	10	10	10	PKSN Bengkalis	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5	Pembangunan kantor kecamatan	Jumlah kantor kecamatan yang dibangun	1	Unit	-	-	-	1	-	PKSN Bengkalis (Kec. Bantan)	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 144 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
6	Peningkatan puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap	Jumlah puskesmas yang ditingkatkan	1	Unit	-	1	-	-	-	PKSN Bengkalis (Kec. Bengkalis)	Kementerian Kesehatan
7	Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas SD	Jumlah ruang kelas yang terbangun/direhabilitasi	397	Ruang	-	114	89	94	100	PKSN Bengkalis (Kec. Bantan, Kec. Bengkalis) Kec. Pasir Limau Kapas, Kec. Bangko, Kec. Sinaboi, Kec. Medang Kampai, Kec. Sungai Sembilan, Kec. Bandar Laksamana, Kec. Rupert Utara, Kec. Rupert, Kec. P. Merbau, Kec. Tasik Putri Puyu, Kec. Rangsang, Kec. Rangsang Barat, Kec. Rangsang Pesisir	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
8	Pembangunan/rehabilitasi perpustakaan SD	Jumlah ruang perpustakaan yang terbangun/direhabilitasi	100	Ruang	-	9	27	31	33	PKSN Bengkalis (Kec. Bantan, Kec. Bengkalis), Kec. Pasir Limau Kapas, Kec. Bangko, Kec. Sinaboi, Kec. Medang Kampai,	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 145 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
										Kec. Sungai Sembilan, Kec. Bandar Laksamana, Kec. Rupat Utara, Kec. Rupat, Kec. P. Merbau, Kec. Tasik Putri Puyu, Kec. Rangsang Barat, Kec. Rangsang Pesisir, Kec. Rangsang	
9	Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas SMP	Jumlah ruang kelas yang terbangun/direhabilitasi	205	Ruang	-	60	44	50	51	PKSN Bengkalis (Kec. Bantan, Kec. Bengkalis), Kec. Pasir Limau Kapas, Kec. Bangko, Kec. Sinaboi, Kec. Medang Kampai, Kec. Sungai Sembilan, Kec. Bandar Laksamana, Kec. Rupat Utara, Kec. Rupat, Kec. P. Merbau, Kec. Tasik	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 146 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
										Putri Puyu, Kec. Rangsang, Kec. Rangsang Barat, Kec. Rangsang Pesisir	
10	Pembangunan/rehabilitasi perpustakaan SMP	Jumlah ruang perpustakaan yang terbangun/direhabilitasi	71	Ruang	-	5	17	24	25	PKSN Bengkalis (Kec. Bantan, Kec. Bengkalis), Kec. Pasir Limau Kapas, Kec. Bangko, Kec. Sinaboi, Kec. Medang Kampai, Kec. Sungai Sembilan, Kec. Bandar Laksamana, Kec. Rupal Utara, Kec. Rupal, Kec. P. Merbau, Kec. Tasik Putri Puyu, Kec. Rangsang, Kec. Rangsang Barat, Kec. Rangsang Pesisir	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 147 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
11	Pembangunan/rehabilitasi ruang laboratorium SMP	Jumlah ruang laboratorium yang terbangun/direhabilitasi	35	Ruang	-	1	11	12	11	PKSN Bengkalis (Kec. Bantan, Kec. Bengkalis) Kec. Pasir Limau kapas, Kec. Bangko, Kec. Sinaboi, Kec. Sungai Sembilan, Kec. Medang Kampai, Kec. P. Merbau, Kec. Rangsang Pesisir	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
12	Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas SMA/SMK	Jumlah ruang kelas yang terbangun/direhabilitasi	68	Ruang	-	-	19	20	29	PKSN Bengkalis (Kec. Bantan, Kec. Bengkalis), Kec. Pasir Limau Kapas, Kec. Bangko, Kec. Medang Kampai, Kec. Sungai Sembilan, Kec. Rupal Utara, Kec. Rupal, Kec. P. Merbau, Kec. Tasik Putri Puyu, Kec. Rangsang Barat, Kec. Rangsang Pesisir	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 148 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
13	Pembangunan/rehabilitasi laboratorium SMA/SMK	Jumlah ruang laboratorium yang terbangun/direhabilitasi	127	Ruang	-	17	32	38	40	PKSN Bengkalis (Kec. Bantan, Kec. Bengkalis), Kec. Pasir Limau Kapas, Kec. Bangko, Kec. Sinaboi, Kec. Medang Kampai, Kec. Sungai Sembilan, Kec. Bandar Laksamana, Kec. Rupal Utara, Kec. Rupal, Kec. P. Merbau, Kec. Tasik Putri Puyu, Kec. Rangsang, Kec. Rangsang Barat, Kec. Rangsang Pesisir	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
14	Pembangunan/rehabilitasi perpustakaan SMA/SMK	Jumlah ruang perpustakaan yang terbangun/direhabilitasi	44	Ruang	-	9	10	12	13	Kec. Rupal, Kec. Rupal Utara, Kec. P. Merbau, Kec. Pasir Limau Kapas, Kec. Bangko	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 149 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
15	Rehabilitasi bangunan kantor desa	Jumlah kantor desa yang direhabilitasi	2	Unit	-	-	-	1	1	Kec. Sinaboi, Kec. Medang Kampai	Kementerian Dalam Negeri
16	Peningkatan pelayanan kesehatan di Kawasan Perbatasan	Jumlah layanan kesehatan yang ditingkatkan	1	Paket	-	1	-	-	-	Kec. Bandar Laksamana	Kementerian Kesehatan
17	Pembangunan Puskesmas Rawat Inap (relokasi)	Jumlah Puskesmas Rawat Inap yang terbangun	1	Unit	-	1	-	-	-	Kec. Rupert	Kementerian Kesehatan
18	Pengadaan ambulans darat	Jumlah ambulans darat yang tersedia	1	Unit	-	-	-	-	1	Kec. Tasik Putri Puyu	Kementerian Kesehatan
19	Pengadaan alat kesehatan Puskesmas	Tersedianya alat kesehatan Puskesmas	1	Paket	-	-	-	-	1	Kec. Rangsang Barat	Kementerian Kesehatan
20	Pengadaan kendaraan Puskesmas Keliling	Tersedianya Puskesmas Keliling	1	Unit	-	-	-	-	1	Kec. Rangsang Barat	Kementerian Kesehatan
21	Pengadaan sepeda motor untuk tenaga kesehatan daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan	Tersedianya sepeda motor tenaga kesehatan	10	Unit	-	-	-	-	10	Kec. Rangsang Barat	Kementerian Kesehatan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 150 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
22	Pembangunan Rumah Dinas medis dan Paramedis	Jumlah Rumah Dinas medis dan Paramedis yang terbangun	4	Unit	-	-	-	-	4	Kec. Rangsang Barat	Kementerian Kesehatan
23	Pengadaan ambulans darat	Tersedianya ambulans darat	1	Unit	-	-	-	-	1	Kec. Rangsang Barat	Kementerian Kesehatan
24	Pembangunan Rumah Sakit Pratama	Jumlah Rumah Sakit Pratama yang terbangun	1	Unit	-	-	-	-	1	Kec. Rangsang	Kementerian Kesehatan
25	Peningkatan titik penyalur program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	1	Unit	-	-	-	-	1	Kec. Medang Kampai	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
26	Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di daerah afirmasi selain daerah transmigrasi	Jumlah rumah swadaya yang ditingkatkan kualitasnya	101	Unit	-	101	-	-	-	Kec. Bangko	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
27	Pembangunan sumur dalam terlindungi	Jumlah sambungan rumah yang terlayani dari pembangunan sumur dalam terlindungi	85	SR	-	85	-	-	-	Kec. Medang Kampai	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 151 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
IV	PROVINSI KEPULAUAN RIAU										
KP 1	PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA										
1	Penyusunan Materi Teknis Kawasan Perbatasan Negara Serasan, Tanjung Balai- Karimun, Letung, Tanjung Uban, Batam	Jumlah Materi Teknis Kawasan Perbatasan Negara	5	Paket	1	-	2	-	2	PKSN Batam, Kec. Karimun, Kec. Jemaja, Kec. Serasan, Kec. Bintan Utara	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
2	Fasilitasi Legislasi Rancangan Peraturan Presiden Kawasan Perbatasan Negara Serasan, Ranai, Batam	Jumlah Rancangan Peraturan Presiden Kawasan Perbatasan Negara	3	Paket	1	1	1	-	-	PKSN Ranai, PKSN Batam, Kec. Serasan	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
KP 2	PENGEMBANGAN POTENSI KAWASAN PERBATASAN NEGARA										
1	Pelatihan pengembangan tenun di Pulau Ngenang	Jumlah pelatihan pengembangan tenun di Pulau Ngenang yang terlaksana	20	IKM	-	20	-	-	-	Kota Batam	Kementerian Perindustrian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 152 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
2	Revitalisasi Sentra IKM pangan	Jumlah Sentra IKM pangan yang direvitalisasi	3	Sentra IKM	-	3	-	-	-	Kab. Natuna, Kab. Bintan, Kab. Kep. Anambas	Kementerian Perindustrian
3	Pengembangan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes	5	BUMDes	-	-	-	-	5	Kab. Natuna	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
4	Percepatan pembangunan Geopark Natuna Menuju UNESCO Global Geopark	Geopark Natuna menuju UNESCO Global Geopark	1	Lokasi	-	-	-	-	1	PKSN Ranai	Kemenko Marves
5	Pengembangan Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	2	Desa	-	-	-	1	1	PKSN Ranai	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
6	BUMDes yang dikembangkan untuk mendukung produk unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes	2	Desa	-	-	-	1	1	PKSN Ranai	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 153 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
7	SKPT Natuna yang mandiri	Tingkat Skala kemandirian SKPT Natuna	5	Skala Kemandirian	-	-	-	-	5	PKSN Ranai	Kementerian Kelautan dan Perikanan
8	Pengadaan mesin <i>Ice Flake</i> (1,5 Ton)	Tersedianya mesin <i>Ice Flake</i>	2	Unit	-	2	-	-	-	PKSN Ranai (Bunguran Utara), Kec. Serasan Timur	Kementerian Kelautan dan Perikanan
9	Pembangunan Pabrik Es Mini	Jumlah Pabrik Es Mini yang terbangun	1	Unit	-	-	1	-	-	PKSN Ranai (Kec. Bunguran Timur)	Kementerian Kelautan dan Perikanan
10	Pengadaan <i>Cool Box</i> Kapasitas 200 dan 300 Kg	Jumlah <i>Cool Box</i> yang tersedia	100	Buah	-	100	-	-	-	PKSN Ranai (Kec. Bunguran Timur)	Kementerian Kelautan dan Perikanan
11	Pengadaan mobil roda 4 bak berpendingin	Jumlah mobil yang tersedia	1	Unit	-	1	-	-	-	PKSN Ranai (Kec. Bunguran Timur)	Kementerian Kelautan dan Perikanan
12	Pengadaan kapal ikan nelayan Kecamatan Bunguran Timur kapasitas 50-100 Ton	Tersedianya sarana dan prasarana untuk nelayan	50	Kapal	-	-	50	-	-	PKSN Ranai (Kec. Bunguran Timur)	Kementerian Kelautan dan Perikanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 154 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
13	Pengadaan bibit ikan kerapu	Jumlah bibit ikan kerapu yang tersedia	60.000	Ekor	-	60.000	-	-	-	PKSN Ranai (Kec. Pulau Tiga), Kec. Subi, Kec. Bunguran Barat	Kementerian Kelautan dan Perikanan
14	Pengembangan dan penyediaan budi daya rumput laut	Jumlah budi daya rumput laut	2	Paket	-	-	2	-	-	PKSN Ranai (Kec. Pulau Tiga)	Kementerian Kelautan dan Perikanan
15	Pengadaan kapal nelayan 10 GT beserta alat tangkap	Tersedianya sarana dan prasarana untuk nelayan	10	Paket	-	-	-	5	5	PKSN Ranai (Kec. Pulau Tiga)	Kementerian Kelautan dan Perikanan
16	Pembangunan Gudang Non-SRG	Jumlah Gudang Non-SRG yang terbangun	1	Unit	-	1	-	-	-	PKSN Ranai (Kec. Bunguran Timur)	Kementerian Perdagangan
17	Penyediaan alat tangkap ikan (Jaring Tenggiri)	Tersedianya alat tangkap ikan (Jaring Tenggiri)	1	Paket	-	-	1	-	-	Kec. Tebing	Kementerian Kelautan dan Perikanan
18	Pengadaan sarana prasarana alat penangkapan ikan (Jaring Nilon Tenggiri 3,5 inc) Kelurahan Teluk Uma Nelayan Leho	Tersedianya sarana prasarana alat penangkapan ikan (Jaring Nilon Tenggiri 3,5 inc) Kelurahan Teluk Uma Nelayan Leho	1.750	Unit	-	-	1.750	-	-	Kec. Tebing	Kementerian Kelautan dan Perikanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 155 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
19	Pengadaan sarana prasarana alat penangkapan ikan (Kapal Perahu <i>Full Fiber</i> 3 GT) Kelurahan Teluk Uma Nelayan Leho	Tersedianya sarana prasarana alat penangkapan ikan (Kapal Perahu <i>Full Fiber</i> 3 GT) Kelurahan Teluk Uma Nelayan Leho	30	Unit	-	-	-	30	-	Kec. Tebing	Kementerian Kelautan dan Perikanan
20	Pengadaan sarana prasarana alat penangkapan ikan di Desa Pongkar (Jaring Tangsi 3,5 inc)	Tersedianya sarana prasarana alat penangkapan ikan di Desa Pongkar (Jaring Tangsi 3,5 inc)	1	Paket	-	-	-	1	-	Kec. Tebing	Kementerian Kelautan dan Perikanan
21	Rehabilitasi bibit balai benih ikan dan balai benih ikan laut	Bibit balai benih ikan dan balai benih ikan laut yang direhabilitasi	2	Unit	-	-	2	-	-	Kec. Tebing	Kementerian Kelautan dan Perikanan
22	Rehabilitasi balai benih ikan laut	Terlaksananya rehabilitasi balai benih ikan laut	3	Paket	-	-	3	-	-	Kec. Moro	Kementerian Kelautan dan Perikanan
23	Pengadaan bibit benih dan indukan ikan air tawar, air laut dan air asin (beserta pakan)	Tersedianya bibit benih dan indukan ikan air tawar, air laut dan air asin (beserta pakan)	1	Paket	-	-	1	-	-	Kec. Tebing	Kementerian Kelautan dan Perikanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 156 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
24	Percontohan budi daya bandeng di tambak	Terlaksananya budi daya bandeng di tambak	4	Paket	-	-	4	-	-	Kec. Buru	Kementerian Kelautan dan Perikanan
25	Pembangunan tambatan perahu nelayan UPT kecamatan	Terbangunnya tambatan perahu nelayan UPT kecamatan	1	Paket	-	-	1	-	-	Kec. Buru	Kementerian Kelautan dan Perikanan
26	Pengadaan kapal tangkap ikan	Tersedianya kapal tangkap ikan	2	Paket	-	-	1	1	-	Kec. Moro, Kec. Belat	Kementerian Kelautan dan Perikanan
27	Pengadaan bibit benih dan indukan ikan air tawar, air laut dan air payau (beserta pakan)	Tersedianya bibit benih dan indukan ikan air tawar, air laut dan air payau beserta pakan	1	Paket	-	-	-	1	-	Kec. Moro	Kementerian Kelautan dan Perikanan
28	Pengadaan bibit rumput laut	Tersedianya bibit rumput laut	1	Paket	-	-	1	-	-	Kec. Moro	Kementerian Kelautan dan Perikanan
29	Pengadaan kebun bibit untuk rumput laut	Tersedianya kebun bibit untuk rumput laut	1	Paket	-	-	1	-	-	Kec. Moro	Kementerian Kelautan dan Perikanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 157 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
30	Pengadaan perahu/kapal penangkap ikan berukuran 5-10 GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan	Tersedianya perahu/kapal penangkap ikan	15	Paket	-	-	1	5	9	Kec. Belakang Padang, Kec. Batu Ampar, Kec. Sekupang, Kec. Lubuk Baja, Kec. Bengkong	Kementerian Kelautan dan Perikanan
31	Pengadaan perahu/kapal penangkap ikan berukuran 10-20 GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan	Tersedianya perahu/kapal penangkap ikan	10	Paket	-	-	-	-	10	Kec. Belakang Padang, Kec. Batu Ampar, Kec. Sekupang, Kec. Lubuk Baja, Kec. Bengkong	Kementerian Kelautan dan Perikanan
32	Pengadaan Keramba Jaring Apung <i>High Density Polyethylene (HDPE)</i>	Tersedianya Pengadaan Keramba Jaring Apung <i>HDPE</i>	9	Unit	-	-	-	-	9	Kec. Nongsa, Kec. Belakang Padang, Kec. Sekupang, Kec. Batu Ampar	Kementerian Kelautan dan Perikanan
33	Pembinaan pengembangan dan pengawasan perikanan	Jumlah kelompok pengembangan dan pengawasan perikanan yang terbina	40	Kelompok	-	6	11	14	9	Kec. Sekupang, Kec. Lubuk Baja	Kementerian Kelautan dan Perikanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 158 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
34	Pengadaan kapal penangkap ikan kecil 3 GT serta mesin, peralatan, dan alat bantu penangkapan ikan	Jumlah kapal penangkapan ikan yang tersedia	200	Paket	-	-	30	80	90	Kec. Lubuk Baja, Kec. Sekupang, Kec. Bengkong, Kec. Batu Ampar	Kementerian Kelautan dan Perikanan
35	Pengadaan kapal penangkapan ikan (Fiber) 3-5 GT	Jumlah kapal penangkapan ikan yang tersedia	60	Unit	-	-	-	-	60	Kec. Sekupang, Kec. Lubuk Baja, Kec. Batu Ampar, Kec. Bengkong	Kementerian Kelautan dan Perikanan
36	Pengadaan mesin tempel <i>boat</i> 40 PK	Jumlah mesin tempel <i>boat</i> 40 PK yang tersedia	300	Unit	-	-	-	-	300	Kec. Batu Ampar, Kec. Sekupang, Kec. Lubuk Baja	Kementerian Kelautan dan Perikanan
37	Pengadaan benih ikan laut	Jumlah benih ikan laut yang tersedia	160.000	Ekor	-	-	-	-	160.000	Kec. Sekupang	Kementerian Kelautan dan Perikanan
38	Pengadaan pakan ikan laut	Jumlah pakan ikan laut yang tersedia	8.000	Kg	-	-	-	-	8.000	Kec. Sekupang	Kementerian Kelautan dan Perikanan
39	Pengadaan mesin tempel <i>boat</i> 15-20 PK	Jumlah mesin tempel <i>boat</i> 15-20 PK yang tersedia	450	Unit	-	-	-	-	450	Kec. Sekupang, Kec. Lubuk Baja, Kec. Batu Ampar	Kementerian Kelautan dan Perikanan



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 159 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
40	Pengadaan <i>Gill Net</i> Hanyut	Jumlah <i>Gill Net</i> Hanyut yang tersedia	2.500	Unit	-	-	-	-	2.500	Kec. Nongsa, Kec. Lubuk Baja, Kec. Sekupang, Kec. Bengkong, Kec. Batu Ampar	Kementerian Kelautan dan Perikanan
41	Pengadaan kawat bubu	Jumlah kawat bubu yang tersedia	3.000	Gulung	-	-	-	-	3.000	Kec. Nongsa, Kec. Batu Ampar, Kec. Sekupang	Kementerian Kelautan dan Perikanan
42	Pengadaan perahu dan mesin ketinting	Jumlah perahu dan mesin ketinting yang tersedia	600	Unit	-	-	-	-	600	Kec. Sekupang, Kec. Batu Ampar, Kec. Nongsa	Kementerian Kelautan dan Perikanan
43	Pengadaan benih ikan laut	Jumlah benih ikan laut yang tersedia	320.000	Ekor	-	-	-	80.000	240.000	Kec. Batu Ampar, Kec. Nongsa	Kementerian Kelautan dan Perikanan
44	Pengadaan mesin tempel <i>boat</i> 40 PK	Jumlah mesin tempel <i>boat</i> 40 PK yang tersedia	200	Unit	-	-	-	60	140	Kec. Nongsa, Kec. Bengkong	Kementerian Kelautan dan Perikanan
45	Pengadaan mesin tempel <i>boat</i> 15-20 PK	Jumlah mesin tempel <i>boat</i> 15-20 PK yang tersedia	300	Unit	-	-	-	-	300	Kec. Nongsa, Kec. Bengkong	Kementerian Kelautan dan Perikanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 160 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
46	Bantuan kapal <5 GT, alat tangkap, sarana pendukung	Tersedianya kapal, alat tangkap dan sarana pendukung	22	Unit	-	-	-	-	22	Kec. Bintang Pesisir, Kec. Telok Sebong	Kementerian Kelautan dan Perikanan
47	Pengadaan Sarana Sistem Rantai Dingin (<i>Cool Box</i>)	Jumlah Sarana Sistem Rantai Dingin (<i>Cool Box</i>) yang tersedia	5	Paket	-	-	-	-	5	Kec. Bintang Pesisir	Kementerian Kelautan dan Perikanan
48	Pengadaan peralatan pengolahan pengasapan ikan	Jumlah peralatan pengolahan pengasapan ikan yang tersedia	5	Paket	-	-	-	-	5	Kec. Bintang Pesisir	Kementerian Kelautan dan Perikanan
49	Pembangunan dermaga rakyat/tambatan perahu pulau-pulau perbatasan	Terbangunnya dermaga rakyat/tambatan perahu	1	Paket	-	1	-	-	-	Kec. Bintang Pesisir	Kementerian Kelautan dan Perikanan
50	Pembangunan dan penyediaan sarana balai benih ikan	Jumlah sarana balai benih ikan yang tersedia	1	Unit	-	-	1	-	-	Kec. Jemaja Timur	Kementerian Kelautan dan Perikanan
51	Pembangunan gudang rumput laut	Jumlah gudang rumput laut yang terbangun	1	Unit	-	1	-	-	-	Kec. Jemaja Timur	Kementerian Kelautan dan Perikanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 161 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
52	Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan Jangkat	Jumlah Tempat Pelelangan Ikan Jangkat yang terbangun	1	Paket	-	-	1	-	-	Kec. Jemaja Timur	Kementerian Kelautan dan Perikanan
53	Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan	Jumlah Tempat Pelelangan Ikan yang terbangun	1	Paket	-	1	-	-	-	Kec. Siantan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
54	Pembangunan sarana prasarana pendaratan perikanan	Jumlah sarana prasarana pendaratan perikanan yang terbangun	1	Paket	-	-	1	-	-	Kec. Subi	Kementerian Kelautan dan Perikanan
55	Pengembangan dan penyediaan budi daya rumput laut	Jumlah budi daya rumput laut yang tersedia	2	Paket	-	2	-	-	-	Kec. Serasan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
56	Pembangunan pasar rakyat	Jumlah pasar rakyat yang terbangun	1	Unit	-	1	-	-	-	Kec. Meral Barat	Kementerian Perdagangan
57	Penyediaan Sarana Metrologi Legal Kabupaten/Kota	Peralatan pengawasan untuk SPBU dan pasar	1	Paket	-	-	1	-	-	Kec. Meral	Kementerian Perdagangan
58	Bimtek peningkatan usaha dan manajemen pengusaha mikro kecil	Jumlah usaha dan manajemen pengusaha mikro kecil yang tersedia	100	Peserta	-	-	100	-	-	Kec. Karimun	Kementerian Perdagangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 162 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
59	Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat	Jumlah pasar rakyat yang dibangun/direvitalisasi	1	Unit	-	-	1	-	-	Kec. Moro	Kementerian Perdagangan
60	Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat	Jumlah pasar rakyat yang dibangun/direvitalisasi	1	Unit	-	-	-	-	1	Kec. Serasan Timur	Kementerian Perdagangan
61	Pembangunan/revitalisasi kompleks pusat jajanan Tanjung Rambut Coastal Area	Jumlah pusat jajanan Tanjung Rambut Coastal Area yang terbangun/ditingkatkan	1	Paket	-	1	-	-	-	Kec. Meral Barat	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
62	Konservasi daerah objek wisata Air Panas Tanjung Utan	Terkonservasinya daerah objek wisata air	1	Paket	-	1	-	-	-	Kec. Buru	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
63	Pelatihan kewirausahaan	Jumlah pelatihan kewirausahaan yang terlaksana	180	Orang	-	-	-	-	180	Kec. Batam Kota	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 163 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
64	Operasi Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM	Jumlah Operasi Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM	1	Unit	-	1	-	-	-	Kec. Batam Kota	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
65	Bantuan permodalan bagi wirausaha pemula	Jumlah bantuan permodalan bagi wirausaha pemula	10	WP	-	-	-	-	10	Kec. Batam Kota	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
66	Pelatihan perkoperasian	Jumlah pelatihan perkoperasian yang terlaksana	60	Orang	-	-	-	-	60	Kec. Batam Kota	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
KP 3	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS										
1	Pengembangan <i>Integrated Land Transport System</i>	Terlayani oleh <i>Integrated Land Transport System</i>	1	Lokasi	-	-	1	-	-	Kota Batam	Kementerian Perhubungan
2	Subsidi Angkutan Umum Perkotaan	Terlayani oleh angkutan umum bersubsidi	1	Layanan	-	-	1			Kota Batam	Kementerian Perhubungan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 164 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
3	Penyediaan aksesibilitas telekomunikasi dan informasi (Bakti Sinyal/ Lastmile)	Jumlah lokasi BTS/WIFI di wilayah pelayanan universal telekomunikasi dan informatika	1	Unit	-	-	-	-	1	PKSN Ranai	Kementerian Komunikasi dan Informatika
4	Pengembangan Bandar Udara Natuna	Jumlah bandar udara yang dikembangkan	1	Bandara	-	1	-	-	-	PKSN Ranai	Kementerian Perhubungan
5	Pembangunan jalan desa strategis pada ruas jalan Segeram-Seminte	Panjang ruas jalan yang dibangun	2,74	Km	-	2,74	-	-	-	PKSN Ranai (Kec. Bunguran Utara)	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
6	Penyediaan Titik Lokasi dan Pembangunan BTS	Jumlah titik lokasi penyediaan BTS khususnya di kelautan dan daerah pesisir	23	Lokasi	-	23	-	-	-	PKSN Ranai (Kec. Bunguran Utara, Kec. Bunguran Timur Laut, Kec. Pulau Tiga), Kec. Jemaja, Kec. Jemaja Timur, Kec. Siantan Selatan, Kec. Palmatak, Kec. Bunguran Barat, Kec. Subi, Kec. Serasan, Kec. Serasan Timur	Kementerian Komunikasi dan Informatika



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 165 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
7	Pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah (Sei Bati)	Jumlah bandar udara yang dikembangkan	1	Paket	-	-	1	-	-	Kec. Tebing	Kementerian Perhubungan
8	Pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda di KSPN Lagoi Bintan	Fasilitas pendukung dan integrasi moda di KSPN Lagoi Bintan yang terbangun	1	Lokasi	-	-	-	-	1	Kec. Telok Sebong	Kementerian Perhubungan
9	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Tarempa dan Sedanau	Jumlah pelabuhan penyeberangan yang terbangun	2	Unit	1	1	1	1	1	Kec. Siantan, Kec. Bunguran Barat	Kementerian Perhubungan
10	Pengadaan sarana transportasi darat	Tersedianya sarana transportasi darat	11	Unit	-	11	-	-	-	Kec. Teluk Sebong, Kec. Moro, Kec. Belat, Kec. Jemaja, Kec. Jemaja Timur, Kec. Palmatak, Kec. Pulau Laut, Kec. Subi, Kec. Serasan Timur	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
11	Pengadaan sarana transportasi perairan di bawah 20 GT/ maksimal kapasitas 25 penumpang	Jumlah sarana transportasi perairan yang tersedia	1	Unit	-	1	-	-	-	Kec. Jemaja	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 166 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
12	Peningkatan jalan desa strategis (Ruas Jalan Jl. Karet)	Panjang jalan desa strategis yang ditingkatkan	1,15	Km	-	1,15	-	-	-	Kec. Bintan Utara	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
13	Peningkatan jalan desa strategis (Ruas Jalan Jl. Sei Seram)	Panjang jalan desa strategis yang ditingkatkan	1	Km	-	1	-	-	-	Kec. Bintan Utara	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
14	Peningkatan jalan desa strategis ruas jalan Jl. Pelabuhan Parit I-Jl. Selat Mendaun (Desa Parit)	Panjang jalan desa strategis yang ditingkatkan	2,481	Km	-	2,481	-	-	-	Kec. Karimun	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
15	Peningkatan jalan desa strategis ruas jalan Kampung Baru Atas	Panjang jalan desa strategis yang ditingkatkan	0,258	Km	-	0,258	-	-	-	Kec. Siantan	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
16	Peningkatan jalan desa strategis ruas jalan lingkaran Pulau Belakang Padang	Panjang jalan desa strategis yang ditingkatkan	0,95	Km	-	0,95	-	-	-	Kec. Belakang Padang	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 167 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
KP 4	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL DASAR										
1	Rehabilitasi bangunan kantor desa	Jumlah kantor desa yang direhabilitasi	5	Unit	-	2	1	1	1	Prov. Kep. Riau	Kementerian Dalam Negeri
2	Pelayanan administrasi kependudukan di daerah	Pelayanan administrasi kependudukan di daerah (KTP el, KIA, Akta Kelahiran)	20	Paket	4	4	4	4	4	Kab. Karimun, Kab. Kep. Anambas, Kab. Natuna, Kota Batam	Kementerian Dalam Negeri
3	Bantuan Sosial Pemerintah	Persentase keluarga penerima manfaat yang mendapatkan bantuan sosial pemerintah	100	%	100	100	100	100	100	Kab. Karimun, Kab. Bintan, Kab. Kep. Anambas, Kab. Natuna, Kota Batam	Kementerian Sosial
4	Penambahan ruang Puskesmas Kelarik	Jumlah ruang Puskesmas Kelarik yang terbangun	1	Paket	-	1	-	-	-	Kab. Natuna	Kementerian Kesehatan
5	Pembangunan pagar Puskesmas Kelarik	Terbangunnya pagar Puskesmas	1	Paket	-	-	1	-	-	Kab. Natuna	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 168 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
6	Pembangunan ruang rawat inap kelas III dua lantai RSUD Natuna	Terbangunnya ruang rawat inap kelas III Rumah sakit	1	Paket	-	1	-	-	-	PKSN Ranai (Kec. Bunguran Timur)	Kementerian Kesehatan
7	Pembangunan ruang program dan ruang pertemuan Puskesmas Tanjung	Terbangunnya ruang program dan ruang pertemuan Puskesmas	1	Paket	-	1	-	-	-	PKSN Ranai (Kec. Bungur Timur Laut)	Kementerian Kesehatan
8	Pembangunan Puskesmas Cemaga	Jumlah Puskesmas Cemaga yang terbangun	1	Paket	-	1	-	-	-	PKSN Ranai (Kec. Bunguran Selatan)	Kementerian Kesehatan
9	Pengadaan <i>speed boat</i> puskesmas keliling	Tersedianya kapal puskesmas keliling	1	Unit	-	-	1	-	-	PKSN Ranai (Kec. Pulau Tiga)	Kementerian Kesehatan
10	Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk nelayan	Jumlah Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk nelayan yang difasilitasi	50	Unit	10	10	10	10	10	PKSN Ranai	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
11	Peningkatan titik penyalur program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	10	Penyalur	3	2	2	2	1	PKSN Ranai	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
12	Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas SD	Jumlah ruang kelas yang terbangun/direhabilitasi	686	Ruang	-	126	177	184	199	PKSN Ranai (Kec. Bunguran Utara, Kec. Bunguran Timur, Kec.	Kementerian Pendidikan,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 169 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
										Bunguran Timur Laut, Kec. Bunguran Selatan, Kec. Pulau Tiga), Kec. Meral Barat, Kec. Tebing, Kec. Meral, Kec. Karimun, Kec. Buru, Kec. Belat, Kec. Moro, Kec. Belakang Padang, Kec. Sekupang, Kec. Lubuk Baja, Kec. Bengkong, Kec. Batam Kota, Kec. Nongsa, Kec. Batu Ampar, Kec. Telok Sebong, Kec. Bintan Utara, Kec. Gunung Kijang, Kec. Bintan Pesisir, Kec. Jemaja Timur, Kec. Siantan Selatan, Kec. Jemaja, Kec. Pulau	Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 170 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
										Laut, Kec. Siantan, Kec. Palmatak, Kec. Bunguran Barat, Kec. Serasan, Kec. Subi, Kec. Serasan Timur	
13	Pembangunan/rehabilitasi perpustakaan SD	Jumlah ruang perpustakaan yang terbangun/direhabilitasi	317	Ruang	-	21	87	100	109	PKSN Ranai (Kec. Bunguran Utara, Kec. Bunguran Timur, Kec. Bunguran Timur Laut, Kec. Bunguran Selatan, Kec. Pulau Tiga), Kec. Meral Barat, Kec. Tebing, Kec. Meral, Kec. Karimun, Kec. Buru, Kec. Belat, Kec. Moro, Kec. Belakang Padang, Kec. Sekupang, Kec. Lubuk Baja, Kec. Bengkong, Kec. Batam Kota, Kec. Nongsa, Kec. Batu Ampar, Kec.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 171 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
										Telok Sebong, Kec. Bintan Utara, Kec. Gunung Kijang, Kec. Bintan Pesisir, Kec. Jemaja Timur, Kec. Siantan Selatan, Kec. Jemaja, Kec. Pulau Laut, Kec. Siantan, Kec. Palmatak, Kec. Bunguran Barat, Kec. Serasan, Kec. Subi, Kec. Serasan Timur	
14	Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas SMP	Jumlah ruang kelas yang terbangun/direhabilitasi	229	Ruang	-	81	44	51	53	PKSN Ranai (Kec. Bunguran Timur Laut, Kec. Bunguran Utara, Kec. Bunguran Selatan, Kec. Bunguran Timur, Kec. Pulau Tiga), Kec. Meral Barat, Kec. Tebing, Kec. Buru, Kec. Belat, Kec. Meral,	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 172 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
										Kec. Moro, Kec. Belakang Padang, Kec. Sekupang, Kec. Lubuk Baja, Kec. Batu Ampar, Kec. Batam Kota, Kec. Bintan Utara, Kec. Bengkong, Kec. Nongsa, Kec. Bintan Pesisir, Kec. Telok Sebong, Kec. Jemaja, Kec. Palmatak, Kec. Siantan Selatan, Kec. Jemaja Timur, Kec. Pulau Laut	
15	Pembangunan/rehabilitasi perpustakaan SMP	Jumlah ruang perpustakaan yang terbangun/direhabilitasi	147	Ruang	-	17	40	45	45	PKSN Ranai (Kec. Pulau Tiga, Kec. Bunguran Timur Laut, Kec. Bunguran Utara, Kec. Bunguran Timur, Kec. Bunguran Selatan), Kec. Meral	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 173 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
										Barat, Kec. Tebing, Kec. Buru, Kec. Belat, Kec. Meral, Kec. Moro, Kec. Belakang Padang, Kec. Sekupang, Kec. Lubuk Baja, Kec. Batu Ampar, Kec. Batam Kota, Kec. Bintan Utara, Kec. Bengkong, Kec. Nongsa, Kec. Bintan Pesisir, Kec. Telok Sebong, Kec. Jemaja, Kec. Palmatok, Kec. Siantan Selatan, Kec. Jemaja Timur, Kec. Pulau Laut	
16	Pembangunan/rehabilitasi laboratorium SMP	Jumlah ruang laboratorium yang terbangun/ direhabilitasi	97	Ruang	-	7	23	34	33	PKSN Ranai (Kec. Pulau Tiga, Kec. Bunguran Timur Laut, Kec. Bunguran Utara,	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 174 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
										Kec. Bunguran Timur, Kec. Bunguran Selatan), Kec. Meral Barat, Kec. Tebing, Kec. Buru, Kec. Belat, Kec. Meral, Kec. Moro, Kec. Belakang Padang, Kec. Sekupang, Kec. Lubuk Baja, Kec. Batu Ampar, Kec. Batam Kota, Kec. Bintan Utara, Kec. Bengkong, Kec. Nongsa, Kec. Bintan Pesisir, Kec. Telok Sebong, Kec. Jemaja, Kec. Palmatok, Kec. Siantan Selatan, Kec. Jemaja Timur, Kec. Pulau Laut	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 175 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
17	Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas SMA/SMK	Jumlah ruang kelas yang terbangun/direhabilitasi	235	Ruang	-	26	63	71	75	PKSN Ranai (Kec. Pulau Tiga, Kec. Bunguran Timur Laut, Kec. Bunguran Utara, Kec. Bunguran Timur), Kec. Telok Sebong, Kec. Nongsa, Kec. Belakang Padang, Kec. Batam Kota, Kec. Sekupang, Kec. Moro, Kec. Buru, Kec. Karimun, Kec. Meral, Kec. Tebing, Kec. Lubuk Baja, Kec. Batu Ampar, Kec. Bengkong, Kec. Bintan Utara, Kec. Bintan Pesisir, Kec. Jemaja Timur, Kec. Palmatak, Kec. Bunguran Barat	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 176 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
18	Pembangunan/rehabilitasi ruang laboratorium SMA/SMK	Jumlah ruang laboratorium yang terbangun/direhabilitasi	138	Ruang	-	9	35	46	48	PKSN Ranai (Kec. Pulau Tiga, Kec. Bunguran Kec. Timur Laut, Kec. Bunguran Utara, Kec. Bunguran Timur, Kec. Bunguran Selatan), Kec. Meral Barat, Kec. Tebing, Kec. Meral, Kec. Karimun, Kec. Buru, Kec. Belat, Kec. Moro, Kec. Belakang Padang, Kec. Sekupang, Kec. Lubuk Baja, Kec. Bengkong, Kec. Batam Kota, Kec. Nongsa, Kec. Batu Ampar, Kec. Telok Sebong, Kec. Bintan Utara, Kec. Gunung Kijang, Kec. Bintan Pesisir, Kec. Jemaja	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 177 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
										Timur, Kec. Siantan Selatan, Kec. Jemaja, Kec. Pulau Laut, Kec. Siantan, Kec. Palmatak, Kec. Bunguran Barat, Kec. Serasan, Kec. Subi, Kec. Serasan Timur	
19	Pembangunan/rehabilitasi perpustakaan SMA/SMK	Jumlah ruang perpustakaan yang terbangun/direhabilitasi	9	Ruang	-	2	2	3	2	Kec. Serasan Timur, Kec. Buru, Kec. Bintan Utara, Kec. Gunung Kijang, Kec. Palmatak	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
20	Pembangunan balai pertemuan umum kecamatan	Jumlah balai pertemuan umum kecamatan yang dibangun	5	Unit	-	-	-	-	5	Kec. Meral Barat, Kec. Meral, Kec. Karimun, Kec. Jemaja, Kec. Siantan	Kementerian Dalam Negeri
21	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Kawasan Perbatasan (sarana prasarana dan alat kesehatan)	Jumlah pelayanan kesehatan dasar di Kawasan Perbatasan yang ditingkatkan	6	Paket	-	6	-	-	-	Kec. Serasan Timur	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 178 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
22	Penyediaan alat kesehatan Puskesmas	Tersedianya alat kesehatan Puskesmas	6	Paket	-	2	4	-	-	Kec. Tebing, Kec. Moro, Kec. Jemaja Barat, Kec. Karimun, Kec. Siantan Utara	Kementerian Kesehatan
23	Penyediaan Prasarana Puskesmas	Tersedianya Prasarana Puskesmas Tebing	1	Paket	-	-	1	-	-	Kec. Tebing	Kementerian Kesehatan
24	Pengadaan Prasarana Laboratorium Kesehatan Daerah	Tersedianya Prasarana Laboratorium Kesehatan Daerah	1	Paket	-	-	1	-	-	Kec. Meral	Kementerian Kesehatan
25	Pengadaan alat laboratorium kesehatan daerah	Tersedianya alat laboratorium kesehatan daerah	1	Paket	-	-	1	-	-	Kec. Meral	Kementerian Kesehatan
26	Pembangunan gedung/relokasi Puskesmas	Terbangunnya gedung/relokasi Puskesmas	3	Unit	-	-	3	-	-	Kec. Karimun, Kec. Moro	Kementerian Kesehatan
27	Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas	Terbangunnya Rumah Dinas Puskesmas	5	Unit	-	1	4	-	-	Kec. Karimun, Kec. Moro, Kec. Jemaja Barat, Kec. Siantan Utara	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 179 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
28	Penyediaan prasarana Puskesmas	Tersedianya prasarana Puskesmas	2	Paket	-	-	2	-	-	Kec. Moro	Kementerian Kesehatan
29	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang terbangun	3	Unit	-	1	1	-	1	Kec. Karimun, Kec. Telok Sebong, Kec. Jemaja Barat	Kementerian Kesehatan
30	Pengadaan Puskesmas Keliling Darat	Jumlah Puskesmas Keliling Darat	1	Unit	-	1	-	-	-	Kec. Jemaja Barat	Kementerian Kesehatan
31	Pengadaan Ambulans Darat <i>Double Gardan</i>	Jumlah Ambulans Darat <i>Double Gardan</i>	2	Unit	-	2	-	-	-	Kec. Jemaja Barat, Kec. Siantan Utara	Kementerian Kesehatan
32	Pengadaan alat kesehatan RSUD	Jumlah alat kesehatan RSUD yang tersedia	3	Paket	-	3	-	-	-	Kec. Jemaja, Kec. Siantan, Kec. Palmatak	Kementerian Kesehatan
33	Pembangunan kamar operasi RSUD	Jumlah Kamar Operasi RSUD yang terbangun	1	Paket	-	1	-	-	-	Kec. Jemaja	Kementerian Kesehatan
34	Pengadaan IPAL Puskesmas	Jumlah IPAL Puskesmas yang tersedia	5	Paket	-	5	-	-	-	Kec. Jemaja Barat, Kec. Jemaja, Kec. Siantan Selatan, Kec. Siantan Utara, Kec. Palmatak	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 180 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
35	Peningkatan sarana dan prasarana instalasi farmasi	Jumlah peningkatan sarana dan prasarana instalasi farmasi yang ditingkatkan	3	Paket	-	3	-	-	-	Kec. Jemaja	Kementerian Kesehatan
36	Pengadaan sarana dan prasarana Rumah Sakit	Jumlah sarana dan prasarana rumah sakit yang tersedia	3	Paket	-	3	-	-	-	Kec. Jemaja	Kementerian Kesehatan
37	Pengadaan sarana dan prasarana fisik program Keluarga Berencana	Jumlah sarana dan prasarana fisik program Keluarga Berencana yang tersedia	4	Paket	-	4	-	-	-	Kec. Jemaja	Kementerian Kesehatan
38	Pengadaan Ambulans Laut	Jumlah Ambulans Laut yang tersedia	2	Unit	-	2	-	-	-	Kec. Jemaja, Kec. Siantan Selatan	Kementerian Kesehatan
39	Pengadaan Puskesmas Keliling Laut/Perairan	Jumlah Puskesmas Keliling Laut/Perairan yang tersedia	6	Unit	-	6	-	-	-	Kec. Siantan Selatan, Kec. Siantan Utara, Kec. Jemaja Timur, Kec. Jemaja, Kec. Palmatak, Kec. Jemaja Barat	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 181 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
40	Pengadaan Transportasi Puskesmas Keliling (Transportasi Laut)	Jumlah Puskesmas Keliling (Transportasi Laut) yang tersedia	1	Paket	-	1	-	-	-	Kec. Siantan Selatan	Kementerian Kesehatan
41	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang terbangun	1	Unit	-	1	-	-	-	Kec. Siantan Utara	Kementerian Kesehatan
42	Pengadaan Puskesmas Keliling Darat	Jumlah Puskesmas Keliling Darat yang tersedia	1	Unit	-	1	-	-	-	Kec. Siantan Utara	Kementerian Kesehatan
43	Pengadaan Puskesmas Keliling Roda Dua	Jumlah Puskesmas Keliling Roda Dua yang tersedia	4	Unit	-	4	-	-	-	Kec. Siantan Utara	Kementerian Kesehatan
44	Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas	Jumlah sarana dan prasarana Puskesmas yang tersedia	9	Paket	-	9	-	-	-	Kec. Siantan	Kementerian Kesehatan
45	Pengadaan sarana dan prasarana Rumah Sakit	Jumlah sarana dan prasarana Rumah Sakit yang tersedia	3	Paket	-	3	-	-	-	Kec. Siantan	Kementerian Kesehatan
46	Penyediaan alat prasarana (Pusling Perairan)	Jumlah alat prasarana yang tersedia	1	Unit	-	1	-	-	-	Kec. Siantan	Kementerian Kesehatan
47	Revitalisasi berat RSUD	Jumlah RSUD yang direvitalisasi	2	Paket	-	2	-	-	-	Kec. Palmatak, Kec. Jemaja	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 182 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
48	Pembangunan kamar operasi RSUD	Jumlah kamar operasi RSUD yang terbangun	1	Paket	-	1	-	-	-	Kec. Palmatak	Kementerian Kesehatan
49	Pembangunan dan rehabilitasi Rumah Sakit (Gedung IGD)	Jumlah Rumah Sakit yang direhabilitasi	1	Paket	-	1	-	-	-	Kec. Palmatak	Kementerian Kesehatan
50	Pembangunan dan rehabilitasi Rumah Sakit (Gudang Farmasi)	Jumlah Rumah Sakit yang terbangun	1	Paket	-	1	-	-	-	Kec. Palmatak	Kementerian Kesehatan
51	Pengadaan kapal Puskesmas keliling	Tersedianya kapal Puskesmas keliling	1	Unit	-	-	-	1	-	Kec. Pulau Laut	Kementerian Kesehatan
52	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Kawasan Perbatasan	Jumlah pelayanan kesehatan dasar yang ditingkatkan	5	Paket	-	5	-	-	-	Kec. Pulau Laut	Kementerian Kesehatan
53	Pembangunan ruang Puskesmas Sedanau	Jumlah ruang Puskesmas Sedanau yang terbangun	1	Paket	-	1	-	-	-	Kec. Bunguran Barat	Kementerian Kesehatan
54	Pembangunan pagar Puskesmas	Jumlah pagar Puskesmas yang terbangun	1	Unit	-	1	-	-	-	Kec. Subi	Kementerian Kesehatan
55	Penyediaan alat laboratorium Puskesmas Serasan	Tersedianya alat laboratorium Puskesmas Serasan	1	Paket	1	-	-	-	-	Kec. Serasan	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 183 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
56	Pengadaan alat penunjang pelayanan kebidanan	Tersedianya alat penunjang pelayanan kebidanan	1	Paket	1	-	-	-	-	Kec. Serasan	Kementerian Kesehatan
57	Pengadaan pompong Puskel GT.20	Tersedianya pompong Puskel GT.20	1	Paket	1	-	-	-	-	Kec. Serasan	Kementerian Kesehatan
58	Pembangunan tambah ruang Puskesmas Tanjung	Jumlah ruang Puskesmas yang terbangun	1	Paket	-	1	-	-	-	Kec. Serasan Timur	Kementerian Kesehatan
59	Pembangunan jaringan distribusi listrik	Jumlah jaringan distribusi listrik yang terbangun	21	Paket	15	3	1	2	-	Kec. Karimun, Kec. Buru, Kec. Belat, Kec. Moro, Kec. Nongsa, Kec. Bintan Utara, Kec. Telok Sebong, Kec. Jemaja Barat, Kec. Jemaja, Kec. Siantan Selatan, Kec. Siantan, Kec. Palmatak	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/PLN
60	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya	Jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang terbangun	3	Paket	-	1	1	1	-	Kec. Moro, Kec. Belakang Padang	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/PLN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 184 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
61	Pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah	Jumlah distribusi dan sambungan rumah yang dikembangkan	241	SR	-	241	-	-	-	Kec. Telok Sebong, Kec. Gunung Kijang, Kec. Serasan Timur	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
62	Pembangunan baru rumah secara swadaya di daerah afirmasi selain daerah transmigrasi	Jumlah rumah secara swadaya di daerah afirmasi selain daerah transmigrasi yang dibangun	45	Unit	-	45	-	-	-	Kec. Gunung Kijang	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
63	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK)- Tematik <i>Stunting</i>	Jumlah tangki septik yang terbangun	5	Unit	-	5	-	-	-	Kec. Pulau Laut	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
64	Pengembangan sanitasi	Jumlah sanitasi yang dikembangkan	11	Unit	-	11	-	-	-	Kec. Serasan Timur	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
V	PROVINSI KALIMANTAN BARAT										
KP 1	PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA										



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 185 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
1	Penyusunan Materi Teknis Peninjauan Kembali Kawasan Perbatasan Negara di Pulau Kalimantan	Jumlah Materi Teknis Kawasan Strategis Nasional	1	Paket	-	-	1	-	-	Prov. Kalimantan Barat	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
2	Fasilitasi Legislasi Rancangan Peraturan Presiden Kawasan Perbatasan Negara Jagoi Babang, Paloh Aruk, Entikong, Nangabadau, Jasa-Sei Kelik	Jumlah Rancangan Peraturan Presiden Kawasan Perbatasan Negara	5	Paket	-	-	5	-	-	PKSN Jagoi Babang, PKSN Paloh Aruk, PKSN Entikong, PKSN Nanga Badau, PKSN Jasa	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
KP 2	PENGEMBANGAN POTENSI KAWASAN PERBATASAN NEGARA										
1	Kegiatan Bimtek Diversifikasi Olahan Kayu	Jumlah Bimtek yang terlaksana	20	IKM	-	20	-	-	-	Kab. Sanggau	Kementerian Perindustrian
2	Pembangunan Sentra IKM Tahu Tempe	Jumlah Sentra IKM yang terbangun	1	Sentra IKM	-	1	-	-	-	Kab. Sanggau	Kementerian Perindustrian
3	Kegiatan Bimtek Diversifikasi Anyaman Bambu	Jumlah Bimtek yang terlaksana	20	IKM	-	20	-	-	-	Kab. Bengkayan	Kementerian Perindustrian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 186 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
4	Revitalisasi Sentra IKM Anyaman Rotan	Jumlah Sentra IKM yang direvitalisasi	1	Sentra IKM	-	1	-	-	-	Kab. Bengkayan	Kementerian Perindustrian
5	Pelatihan Pemasaran <i>Online</i> Produk/IKM	Jumlah pelatihan Pemasaran <i>Online</i> Produk/IKM yang terlaksana	80	IKM	-	80	-	-	-	Kab. Sambas	Kementerian Perindustrian
6	Revitalisasi Sentra IKM Tenun	Jumlah Sentra IKM yang direvitalisasi	1	Sentra IKM	-	1	-	-	-	Kab. Sambas	Kementerian Perindustrian
7	Pengembangan IKM Tenun Sidan	Jumlah Sentra IKM yang terbangun	1	IKM	-	1	-	-	-	Kab. Kapuas Hulu	Kementerian Perindustrian
8	Revitalisasi Sentra IKM Tenun Ikat	Jumlah Sentra IKM yang direvitalisasi	1	Sentra IKM	-	1	-	-	-	Kab. Kapuas Hulu	Kementerian Perindustrian
9	Pengembangan BUMDes untuk mendukung produk unggulan Desa	Jumlah Desa yang mengembangkan BUMDes	20	BUMDes	-	-	4	4	12	Kab. Sambas, Kab. Bengkayang, Kab. Sanggau, Kab. Kapuas Hulu	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
10	Pembangunan/revitalisasi sentra IKM	Jumlah sentra IKM yang dibangun/direvitalisasi	1	IKM	-	-	-	-	1	PKSN Paloh Aruk	Kementerian Perindustrian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 187 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
11	Pembangunan industri kemasan lada kualitas ekspor	Terselesaikannya pembangunan industri kemasan lada kualitas ekspor	1	Paket	-	-	1	-	-	PKSN Paloh Aruk	Kementerian Perindustrian
12	Pengembangan industri pengolahan dan kemasan komoditas jeruk	Terselesaikannya pengembangan industri pengolahan dan kemasan komoditas jeruk	1	Paket	-	-	1	-	-	PKSN Paloh Aruk	Kementerian Perindustrian
13	Pengembangan industri pengolahan dan <i>packaging</i> /kemasan komoditas beras	Terselesaikannya pengembangan industri pengolahan komoditas beras	1	Paket	-	-	1	-	-	PKSN Paloh Aruk	Kementerian Perindustrian
14	Pengembangan industri pengolahan kelapa di Kawasan Industri Semparuk (KIS)	Terselesaikannya pengembangan industri pengolahan kelapa di KIS	1	Paket	-	-	1	-	-	PKSN Paloh Aruk	Kementerian Perindustrian
15	Pembangunan Gudang/Depo Non-SRG	Jumlah Gudang SRG yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya	1	Unit	-	-	1	-	-	PKSN Paloh Aruk	Kementerian Perdagangan
16	Penyedia jasa logistik sektor perdagangan yang diberikan pembinaan	Jumlah penyedia jasa yang diberikan pembinaan	10	Kegiatan	2	2	2	2	2	PKSN Paloh Aruk	Kementerian Perdagangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 188 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
17	Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat	Terselesaikannya pembangunan/ revitalisasi pasar rakyat	3	Unit	-	-	3	-	-	PKSN Paloh Aruk	Kementerian Perdagangan
18	Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan, dan rawan bencana	Jumlah pasar rakyat yang direvitalisasi	1	Unit	-	-	-	-	1	PKSN Jagoi Babang	Kementerian Perdagangan
19	Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi/kelompok di daerah tertinggal, perbatasan, dan pascabencana	Jumlah pasar rakyat yang dibangun	1	Unit	-	-	-	-	1	PKSN Paloh Aruk	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
20	Pengembangan area sentra industri lada	Luas area kawasan industri lada yang dikembangkan	500	Ha	-	-	500	-	-	PKSN Paloh Aruk	Kementerian Pertanian
21	Pembangunan pusat pembenihan dan pengembangan kawasan sentra produksi tanaman lada	Terselesaikannya pembangunan pusat pembenihan dan pengembangan kawasan sentra produksi tanaman lada	1	Paket	-	-	1	-	-	PKSN Paloh Aruk	Kementerian Pertanian



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 189 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
22	Pengembangan kawasan Sentra Produksi Tanaman Jeruk yang menerapkan Teknologi Buah Berjenjang Sepanjang Tahun (BUJANGSETA)	Terselesaikannya pengembangan kawasan Sentra Produksi Tanaman Jeruk yang menerapkan Teknologi BUJANGSETA	1.000	Ha	-	-	1.000	-	-	PKSN Paloh Aruk	Kementerian Pertanian
23	Pengembangan budi daya Padi Rawa dan Padi Inbrida.	Terselesaikannya pengembangan budi daya Padi Rawa dan Padi Inbrida	1	Paket	-	-	1	-	-	PKSN Paloh Aruk	Kementerian Pertanian
24	Pengembangan kawasan sentra produksi tanaman padi untuk menghasilkan Beras Premium (Bantuan Benih Padi Hibrida)	Terselesaikannya pengembangan kawasan sentra produksi tanaman padi untuk menghasilkan Beras Premium	10.800	Ha	-	-	10.800	-	-	PKSN Paloh Aruk	Kementerian Pertanian
25	Pengembangan kawasan sentra produksi tanaman padi untuk menghasilkan Beras Premium (Pengembangan Budi daya Padi Kaya Gizi)	Terselesaikannya pengembangan kawasan sentra produksi tanaman padi untuk menghasilkan Beras Premium	300	Ha	-	-	300	-	-		
26	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Kelapa	Terselesaikannya pengembangan Kawasan Sentra Produksi Kelapa	1	Paket	-	-	1	-	-	PKSN Paloh Aruk	Kementerian Pertanian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 190 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
27	Pembangunan Gudang Non-SRG berpendingin <i>Controlled Atmosphere Storage</i> (CAS)	Jumlah Gudang Non-SRG yang terbangun	1	Unit	-	-	1	-	-	PKSN Paloh Aruk	Kementerian Perdagangan
28	Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat	Jumlah pasar rakyat yang dibangun/direvitalisasi	3	Unit	-	-	3	-	-	PKSN Paloh Aruk (Pasar Temajuk, Pasar Sejangkung, Pasar Galing)	Kementerian Perdagangan
29	Kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan	Luas kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan yang ditingkatkan produksinya	85	Ha	17	17	17	17	17	PKSN Jagoi Babang	Kementerian Pertanian
30	Pengembangan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes	8	Desa	-	-	2	3	3	PKSN Jagoi Babang, PKSN Paloh Aruk	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
31	Pengembangan Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	3	Desa	-	-	1	1	1	PKSN Jagoi Babang	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 191 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
32	Pengadaan mesin pengolah tepung tapioka di Desa Mungguk Gelombang	Jumlah mesin pengolah tepung tapioka yang tersedia	1	Unit	-	-	1	-	-	Kec. Ketungau Tengah	Kementerian Perindustrian
33	Pengadaan mesin pengolah tepung tapioka di Desa Swadaya	Jumlah mesin pengolah tepung tapioka yang tersedia	1	Unit	-	-	1	-	-	Kec. Ketungau Tengah	Kementerian Perindustrian
34	Pengadaan mesin pengolah tepung lada di 10 desa	Jumlah mesin pengolah tepung lada yang tersedia	10	Unit	-	-	10	-	-	Kec. Ketungau Tengah	Kementerian Perindustrian
35	Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat	Jumlah pasar rakyat yang dibangun/direvitalisasi	2	Unit	-	-	2	-	-	Kec. Ketungau Hulu, Kec. Ketungau Tengah	Kementerian Perdagangan
36	Penyediaan Sarana Metrologi Legal Kab/Kota	Jumlah peralatan pengawasan untuk SPBU dan pasar	1	Paket	-	-	1	-	-	Kec. Ketungau Hulu	Kementerian Perdagangan
37	Pembangunan Gudang Non-SRG	Jumlah Gudang Non-SRG yang terbangun	1	Unit	-	-	1	-	-	Kec. Ketungau Tengah	Kementerian Perdagangan
KP 3	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS										



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 192 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)	
					2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	
1	Kawasan transmigrasi prioritas yang sarana dan prasarana nya dikembangkan dan fungsional	Berkembang dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan transmigrasi prioritas	2	Kawasan	-	-	2			Kab. Sambas	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	
2	Kawasan Transmigrasi Prioritas yang dikembangkan ekonominya	Berkembangnya ekonomi Kawasan Transmigrasi Prioritas	2	Kawasan	2						Kab. Sambas	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
3	Pembangunan Terminal Temajuk	Jumlah terminal yang terbangun	1	Unit	-	-	-	1		Kec. Paloh	Kementerian Perhubungan	
4	Pembangunan Terminal Jagoi Babang	Jumlah terminal yang terbangun	1	Unit	-	-	1		-	Kec. Jagoi Babang	Kementerian Perhubungan	
5	Pembangunan Jalan Aruk-Batas Kec. Siding/Seluas	Panjang ruas jalan yang dibangun	12	Km	12	-	-	-	-	Kab. Sambas	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
6	Pembangunan Jalan Temajuk Aruk	Panjang ruas jalan yang dibangun	22	Km	-	22	-	-	-	Kab. Sambas	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 193 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
7	Pembangunan Jalan Batas Kec. Siding Seluas - Batas Kec. Sekayam/Entikong (Total 40,5 Km)	Panjang jalan yang dibangun	22,53	Km	-	22,53	-	-	-	Kab. Sanggau	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8	Pembangunan Jalan Batas Kapuas Hulu/Sintang Naga Badau	Panjang ruas jalan yang dibangun	14,4	Km	-	14,4	-	-	-	Kab. Sintang	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
9	Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Sintete	Panjang ruas jalan yang dibangun	5,0	Km	-	5,0	-	-	-	Kab. Sambas	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
10	Pembangunan Terminal Aruk	Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ditingkatkan	1	Lokasi	-	-	1	-	-	PKSN Paloh Aruk	Kementerian Perhubungan
11	Pembangunan Terminal Temajuk	Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ditingkatkan	1	Unit	-	-	-	1	-	PKSN Paloh Aruk	Kementerian Perhubungan
12	Pengembangan terminal barang dan penumpang PLBN Aruk	Terselesaikannya pengembangan terminal barang dan penumpang	1	Paket	-	1	-	-	-	PKSN Paloh Aruk	Kementerian Perhubungan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 194 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
13	Penyediaan aksesibilitas telekomunikasi dan informasi (Bakti Internet)	Jumlah titik Bakti Internet yang dibangun	1	Lokasi	-	-	-	-	1	PKSN Paloh Aruk	Kementerian Komunikasi dan Informatika
14	Peningkatan kapasitas jaringan telekomunikasi (seluler dan internet)	Terselesaikannya peningkatan kapasitas jaringan telekomunikasi	1	Paket	-	1	-	-	-	PKSN Paloh Aruk	Kementerian Komunikasi dan Informatika
15	Penyediaan aksesibilitas telekomunikasi dan informasi (Bakti Sinyal/ Lastmile)	Jumlah lokasi BTS/WIFI di wilayah pelayanan universal telekomunikasi dan informatika	1	Unit	-	-	-	-	1	PKSN Jagoi Babang	Kementerian Komunikasi dan Informatika
16	Peningkatan jalan perbatasan Desa Temajuk, Kecamatan Paloh	Terselesaikannya peningkatan jalan perbatasan	2,16	Km	-	-	2,16	-	-	PKSN Paloh Aruk	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
17	Jalan perbatasan Kalimantan Barat	Panjang ruas jalan yang dibangun	12	Km	-	-	-	-	12	PKSN Paloh Aruk	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
18	Pembangunan jalan sejajar perbatasan di Kalimantan Barat:	Panjang ruas jalan yang terbangun	174	Km	-	98	76	-	-	PKSN Paloh Aruk	Kementerian Pekerjaan Umum



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 195 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
	a. Temajuk-Aruk-Nanga Badau; b. Nanga Era-Batas Kalimantan Timur										dan Perumahan Rakyat
19	Pembangunan Jalan Nasional di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat: a. Ruas Merbau-Temajuk; b. Ruas Tebas-Jembatan Sambas Besar; dan c. Jembatan Sambas Besar- Merbau	Panjang ruas jalan yang terbangun	1	Paket	-	-	1	-	-	PKSN Paloh Aruk	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
20	Peningkatan jalan Teluk Atong, Desa Temajuk, Kecamatan Paloh	Panjang ruas jalan yang ditingkatkan	4,8	Km	-	-	4,8	-	-	PKSN Paloh Aruk	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
21	Penyediaan titik lokasi dan pembangunan BTS	Jumlah titik lokasi penyediaan BTS khususnya di kelautan dan daerah pesisir	62	Lokasi	-	62	-	-	-	PKSN Jagoi Babang, PKSN Nanga Badau, PKSN Paloh-Aruk (Kec.Paloh), Kec. Siding, Ketungau Hulu, Ketungau	Kementerian Komunikasi dan Informatika



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 196 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
										Tengah, Puring Kencana, Batang Lupar, Embaloh Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Selatan	
22	Pengembangan Bandar Udara Pangsuma	Jumlah bandar udara yang dikembangkan	1	Paket	1		-	-	-	Kec. Putussibau Selatan	Kementerian Perhubungan
23	Pembangunan jalan desa strategis pada ruas jalan Kapot-Batu Ampar	Panjang ruas jalan desa strategis yang dibangun	1,88	Km	-	1,88	-	-	-	Kec. Sidsing	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
24	Pengadaan sarana transportasi darat	Jumlah sarana transportasi darat yang tersedia	3	Unit	-	3	-	-	-	Kec. Jagoi Babang, Kec. Batang Lupar, Kec. Entikong	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
25	Pengadaan sarana transportasi perairan dibawah 20 GT dan/atau maksimal kapasitas 25 penumpang	Jumlah sarana transportasi perairan yang tersedia	1	Unit	-	1	-	-	-	Kec. Ketungau Tengah	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 197 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
26	Peningkatan jalan desa strategis pada ruas jalan Nanga Awin-Kirin Nangka	Jumlah jalan desa strategis yang ditingkatkan	9,47	Km	-	9,47	-	-	-	Kec. Putussibau Utara	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
27	Pembangunan jalan desa strategis pada ruas jalan Jl. Dusun Sei Dungun	Jumlah jalan desa strategis yang dibangun	1	Km	-	1	-	-	-	Kec. Paloh	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
28	Peningkatan jalan desa strategis pada ruas jalan Sungai Tekam-Perimpah	Jumlah jalan desa strategis yang ditingkatkan	1,50	Km	-	1,50	-	-	-	Kec. Sekayam	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
29	Penggantian jembatan dan renovasi jembatan gantung (bentang maksimal 120 m)	Jumlah jembatan yang diganti dan direnovasi	120	m	-	120	-	-	-	Kec. Ketungau Tengah	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
30	Pengadaan sarana transportasi darat	Tersedianya sarana transportasi darat	1	Unit	-	1	-	-	-	Kec. Putussibau Utara	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 198 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
KP 4	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL DASAR										
1	Rehabilitasi bangunan kantor desa	Jumlah kantor desa yang direhabilitasi	5	Unit	-	-	1	2	2	Prov. Kalimantan Barat	Kementerian Dalam Negeri
2	Pelayanan administrasi kependudukan di daerah	Pelayanan administrasi kependudukan di daerah (KTP el, KIA, Akta Kelahiran)	20	Paket	4	4	4	4	4	Kab. Sambas, Bengkayang, Kab. Sanggau, Kab. Kapuas Hulu	Kementerian Dalam Negeri
3	Bantuan Sosial Pemerintah	Persentase keluarga penerima manfaat yang mendapatkan bantuan sosial pemerintah	100	%	100	100	100	100	100	Kab. Sambas, Bengkayang, Kab. Sanggau, Kab. Sintang, Kab. Kapuas Hulu	Kementerian Sosial
4	Pembangunan IPAL Skala Permukiman minimal 25 KK- Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah IPAL Skala Permukiman yang terbangun	1	Unit	-	1	-	-	-	PKSN Jagoi Babang	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 199 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
5	Pengembangan jaringan distribusi listrik di Kawasan Perbatasan Aruk	Terselesaikannya pengembangan jaringan distribusi listrik	2	Paket	-	-	2	-	-	PKSN Paloh Aruk	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6	Pembangunan SPAM	Terselesaikannya pembangunan SPAM	2	Paket	-	1	1	-	-	PKSN Paloh Aruk	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
7	Jaringan air baku yang dibangun/ditingkatkan	Total debit air baku yang dihasilkan	0,19	m3/det	-	-	-	-	0,19	PKSN Jagoi Babang	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8	Pembangunan SPBU di Aruk	Terselesaikannya pembangunan SPBU di Aruk	1	Unit	-	-	1	-	-	PKSN Paloh Aruk	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
9	Pembangunan Pasar Tipe C	Jumlah Pasar Tipe C yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya	1	Unit	-	-	-	-	1	PKSN Paloh Aruk	Kementerian Perdagangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 200 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
10	Peningkatan titik penyalur program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	10	Penyalur	-	2	2	2	4	PKSN Jagoi Babang	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
11	Pembangunan balai pertemuan umum kecamatan	Jumlah balai pertemuan umum kecamatan yang dibangun	5	Unit	-	-	-	1	4	PKSN Paloh Aruk, Kec. Entikong, Kec. Ketungau Hulu, Kec. Puring Kencana, Kec. Putussibau Utara	Kementerian Dalam Negeri
12	Pembangunan kantor desa/kelurahan	Jumlah kantor desa/kelurahan yang dibangun	4	Unit	-	1	1	-	2	PKSN Paloh Aruk, Kec. Entikong, Kec. Ketungau Hulu	Kementerian Dalam Negeri
13	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Kawasan Perbatasan (sarana prasarana dan alat kesehatan)	Jumlah pelayanan kesehatan dasar yang ditingkatkan	3	Paket	-	3	-	-	-	Kec. Badau	Kementerian Kesehatan
14	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya	Jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang terbangun	3	Unit	-	-	-	2	1	PKSN Jagoi Babang (Kec. Jagoi Babang), Kec. Ketungau Tengah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/ PLN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 201 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
15	Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik	Jumlah jaringan distribusi listrik yang terbangun	26	Paket	1	7	11	5	2	PKSN Jagoi Babang (Kec. Jagoi Babang), Kec. Siding, Kec. Ketungau Hulu, Kec. Batang Lupar, Kec. Embaloh Hulu, Kec. Putussibau Utara, Kec. Ketungau Tengah, Kec. Kayan Hulu	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/PLN
16	Pembangunan Rumah Sakit Rujukan	Jumlah rumah sakit rujukan yang terbangun	1	Paket	-	1	-	-	-	Kec. Entikong	Kementerian Kesehatan
17	Puskesmas yang mendapatkan bantuan operasional kesehatan	Jumlah puskesmas yang mendapatkan bantuan operasional kesehatan	2	Unit	-	2	-	-	-	Kec. Entikong, Kec. Sekayam	Kementerian Kesehatan
18	Bimtek pencegahan dan pengendalian penyakit	Jumlah bimtek pencegahan dan pengendalian penyakit yang terbangun	2	Bimtek	-	2	-	-	-	Kec. Entikong, Kec. Sekayam	Kementerian Kesehatan
19	Penyelenggaraan bimtek penanggulangan <i>stunting</i> secara terpadu di Kawasan Perbatasan	Jumlah bimtek <i>stunting</i> secara terpadu di Kawasan Perbatasan yang ditanggulangi	2	Bimtek	-	2	-	-	-	Kec. Entikong, Sekayam	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 202 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
20	Penyelenggaraan bimtek Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Jumlah bimtek yang menyelenggarakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	2	Bimtek	-	2	-	-	-	Kec. Entikong, Sekayam	Kementerian Kesehatan
21	Peningkatan kualitas rumah secara swadaya	Jumlah rumah swadaya yang ditingkatkan	88	Unit	-	88	-	-	-	Kec. Sekayam	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
22	Pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah	Jumlah jaringan distribusi dan sambungan rumah yang dikembangkan	50	SR	-	50	-	-	-	Kec. Batang Lupar	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
23	Pengembangan perumahan	Jumlah perumahan yang dikembangkan	175	Unit	-	175	-	-	-	Kec. Embaloh Hulu	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
VI	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR										



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 203 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
KP 1	PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA										
1	Penyusunan Materi Teknis Peninjauan Kembali Kawasan Perbatasan Negara di Pulau Kalimantan	Jumlah Materi Teknis Peninjauan Kembali Kawasan Strategis Nasional	1	Paket	-	-	1	-	-	Prov. Kalimantan Timur	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
2	Penyusunan Materi Teknis Peninjauan Kembali Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara	Jumlah Materi Teknis Kawasan Strategis Nasional	1	Paket	-	-	-	1	-	Prov. Kalimantan Timur	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
3	Penyusunan Materi Teknis Kawasan Perbatasan Negara Long Apari	Jumlah Materi Teknis Kawasan Perbatasan Negara	1	Paket	-	-	-	1	-	PKSN Long Apari	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 204 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
4	Fasilitasi Legislasi Rancangan Peraturan Presiden Kawasan Perbatasan Negara Long Pahangai	Jumlah Rancangan Peraturan Presiden Kawasan Perbatasan Negara	1	Paket	-	-	-	1	-	PKSN Long Pahangai	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
KP 2	PENGEMBANGAN POTENSI KAWASAN PERBATASAN NEGARA										
1	Bimtek pengolahan bahan makanan berbasis lokal bagi wirausaha baru	Jumlah bimtek pengolahan bahan makanan berbasis lokal bagi wirausaha baru yang terlaksana	20	IKM	-	20	-	-	-	Kab. Mahakam Ulu	Kementerian Perindustrian
2	Program penyelenggaraan/ revitalisasi pasar rakyat	Jumlah pasar rakyat yang dibangun/direvitalisasi	1	Unit	-	-	1	-	-	Kec. Maratua	Kementerian Perdagangan
KP 3	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS										
1	Pembangunan Jalan Long Bagun-Tering	Panjang ruas jalan yang dibangun	36,52	Km	7,32	8,2	7	7	7	Kab. Mahakam Ulu	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 205 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
2	Pengembangan Bandar Udara Maratua	Jumlah bandar udara yang dikembangkan	1	Paket	-	1	-	-	-	Kec. Maratua	Kementerian Perhubungan
3	Pembangunan dan peningkatan jalan desa strategis pada ruas jalan Long Pahangai-Datah Suling	Panjang jalan desa strategis yang terbangun	0,514	Km	-	0,514	-	-	-	Kec. Long Pahangai	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
4	Pembangunan dan peningkatan Jalan Desa strategis pada ruas jalan Jl. Tanjung Bahaba-Tugu Merah	Panjang jalan desa strategis yang terbangun	1	Km	-	1	-	-	-	Kec. Long Pahangai	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
5	Pembangunan dermaga rakyat (sungai/danau) untuk orang dan barang	Jumlah dermaga rakyat (sungai/danau) yang terbangun	1	Unit	-	1	-	-	-	Kec. Long Pahangai	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
6	Pengadaan sarana transportasi darat	Jumlah sarana transportasi darat yang tersedia	1	Unit	-	1	-	-	-	Kec. Maratua	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 206 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
7	Penyediaan titik lokasi dan pembangunan BTS	Jumlah titik lokasi penyediaan BTS khususnya di kelautan dan daerah pesisir	16	Lokasi	-	16	-	-	-	Kec. Long Pahangai, Kec. Maratua, Kec. Long Apari	Kementerian Komunikasi dan Informatika
8	Pembangunan Jalan Tiong Ohang-Long Apari	Panjang jalan yang dibangun	23,7	Km	-	-	6	8	9,7	Kec. Long Apari	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
9	Pembangunan Jalan Batas Kalbar-Tiong Ohang	Panjang jalan yang dibangun	20	Km	2	5	3	5	5	Kec. Long Apari	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
10	Pembangunan Jalan Tiong Ohang Long Pahangai	Panjang jalan yang dibangun	28,64	Km	13,64	6,0	3,0	3,0	3,0	Kec. Long Apari	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
11	Pembangunan Jalan Long Pahangai-Long Boh	Panjang jalan yang dibangun	21,5	Km	4,5	5,0	3,0	4,5	4,5	Kec. Long Apari	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 207 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
KP 4	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL DASAR										
1	Rehabilitasi bangunan kantor desa	Jumlah kantor desa yang direhabilitasi	5	Unit	-	-	1	2	2	Prov. Kalimantan Timur	Kementerian Dalam Negeri
2	Pelayanan administrasi kependudukan di daerah	Pelayanan administrasi kependudukan di daerah (KTP el, KIA, Akta Kelahiran)	10	Paket	2	2	2	2	2	Kab. Mahakam Ulu, Kab. Berau	Kementerian Dalam Negeri
3	Bantuan Sosial Pemerintah	Persentase keluarga penerima manfaat yang mendapatkan bantuan sosial pemerintah	100	%	100	100	100	100	100	Kab. Mahakam Ulu, Kab. Berau	Kementerian Sosial
4	Pembangunan jaringan distribusi listrik	Jumlah jaringan distribusi listrik yang terbangun	7	Paket	3	-	1	3	-	PKSN Long Pahangai, Kec. Maratua	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/PLN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 208 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
VII	PROVINSI KALIMANTAN UTARA										
KP 1	PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA										
1	Penyusunan Materi Teknis Peninjauan Kembali Kawasan Perbatasan Negara di Pulau Kalimantan	Jumlah Materi Teknis Peninjauan Kawasan Strategis Nasional	1	Paket	-	-	1	-	-	Prov. Kalimantan Utara	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
2	Penyusunan Materi Teknis Peninjauan Kembali Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara	Jumlah Materi Teknis Kawasan Strategis Nasional	1	Paket	-	-	-	1	-	Prov. Kalimantan Utara	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
3	Penyusunan Materi Teknis Kawasan Perbatasan Negara Tarakan	Jumlah Materi Teknis Kawasan Perbatasan Negara	1	Paket	-	-	1	-	-	PKSN Tarakan	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 209 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
4	Fasilitasi Legislasi Rancangan Peraturan Presiden Kawasan Perbatasan Negara Nunukan, Sei Pancang, Long Nawang, Long Midang, Tou Lumbis-Labang, Sei Manggaris	Jumlah Rancangan Peraturan Presiden Kawasan Perbatasan Negara	6	Paket	2	-	3	1	-	PKSN Nunukan, PKSN Long Nawang, PKSN Long Midang, PKSN Tou Lumbis, PKSN Sei Manggaris, Kec. Sebatik Timur, Kec. Sebatik Utara	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
KP 2	PENGEMBANGAN POTENSI KAWASAN PERBATASAN NEGARA										
1	Bimtek 20 Wirausaha Baru IKM pengelasan dan sertifikasi kompetensi SKKNI	Jumlah bimtek yang terlaksana	20	IKM	-	20	-	-	-	Kab. Nunukan	Kementerian Perindustrian
2	Revitalisasi Sentra IKM Garam	Jumlah sentra IKM yang direvitalisasi	1	Sentra IKM	-	1	-	-	-	Kab. Nunukan	Kementerian Perindustrian
3	Pengembangan BUMDes untuk mendukung produk unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes	10	BUMDes	-	-	3	5	2	Kab. Malinau, Kab. Nunukan	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 210 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
4	Pembangunan gedung/Depo Non-SRG	Jumlah gedung/Depo Non-SRG yang terbangun	1	Unit	-	1	-	-	-	PKSN Nunukan	Kementerian Perdagangan
5	Penyediaan Jasa Logistik sektor perdagangan	Jumlah penyedia jasa yang diberikan pembinaan	10	Paket	-	-	10	-	-	PKSN Nunukan	Kementerian Perdagangan
6	Kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan	Luas kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan yang ditingkatkan produksinya	240	Ha	48	48	48	48	48	PKSN Long Nawang, PKSN Long Midang, PKSN Tou Lumbis	Kementerian Pertanian
7	Pengembangan Aplikasi Informatika UMKM <i>Go Online</i>	Jumlah <i>user</i> aktif <i>selling</i> UMKM	250	<i>User</i>	-	-	-	-	250	PKSN Nunukan	Kementerian Komunikasi dan Informatika
8	Pengembangan Aplikasi Informatika Nelayan <i>Go Online</i>	Jumlah <i>user</i> aktif nelayan yang mendaftar	250	<i>User</i>	-	-	-	-	250	PKSN Nunukan	Kementerian Komunikasi dan Informatika
9	Pengembangan Aplikasi Informatika Petani <i>Go Online</i>	Jumlah <i>user</i> aktif petani yang mendaftar	250	<i>User</i>	-	-	-	-	250	PKSN Nunukan	Kementerian Komunikasi dan Informatika



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 211 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
10	BUMDes yang dikembangkan untuk mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes	39	Desa	-	-	-	-	39	PKSN Long Nawang, PKSN Long Midang, PKSN Tou Lumbis, PKSN Nunukan	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
11	Pengembangan Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	24	Desa	-	6	6	6	6	PKSN Long Nawang, PKSN Long Midang, PKSN Tou Lumbis	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
12	Pengadaan kapal perikanan tangkap	Pengadaan kapal perikanan tangkap	9	Paket	-	-	-	9	-	PKSN Nunukan (Kec. Nunukan Selatan)	Kementerian Kelautan dan Perikanan
13	Pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap	43	Unit	-	-	-	43	-	PKSN Nunukan (Kec. Nunukan Selatan)	Kementerian Kelautan dan Perikanan
14	Alat Bantu Penangkapan Ikan (Cool Box)	Alat Bantu Penangkapan Ikan (Cool Box)	100	Unit	-	-	-	-	100	PKSN Nunukan (Kec. Nunukan Selatan)	Kementerian Kelautan dan Perikanan
15	Pengadaan keramba jaring apung	Tersedianya keramba jaring apung	2	Paket	-	-	-	2	-	PKSN Nunukan (Kec. Nunukan Selatan)	Kementerian Kelautan dan Perikanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 212 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
16	Penyediaan bibit unggul	Penyediaan bibit unggul	1	Paket	-	-	-	1	-	PKSN Nunukan (Kec. Nunukan Selatan)	Kementerian Kelautan dan Perikanan
17	Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha skala kecil masyarakat kelautan dan perikanan pembudi daya ikan	Tersedianya sarana dan prasarana pemberdayaan usaha skala kecil masyarakat kelautan dan perikanan pembudi daya ikan	3	Paket	-	-	-	3	-	PKSN Nunukan (Kec. Nunukan Selatan)	Kementerian Kelautan dan Perikanan
18	Peningkatan atau penyediaan sarana dan prasarana budi daya (<i>Marine Technopark</i>)	Jumlah sarana dan prasarana budi daya yang ditingkatkan	1	Paket	-	-	-	-	1	PKSN Nunukan (Kec. Nunukan Selatan)	Kementerian Kelautan dan Perikanan
19	Pengadaan <i>Cold Storage</i>	Jumlah <i>Cold Storage</i> yang tersedia	1	Unit	-	-	-	1	-	PKSN Nunukan (Kec. Sebatik Utara)	Kementerian Kelautan dan Perikanan
20	Bimtek pengembangan pariwisata	Meningkatnya kompetensi SDM pariwisata	7	Paket	-	1	-	6	-	PKSN Nunukan (Kec. Nunukan, Kec. Sebatik Utara), Kec. Kayan Selatan, Kec. Krayan, Kec. Sebatik Barat, Kec. Sebatik Tengah, Kec. Sebatik	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 213 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
21	Pembangunan pabrik pengolahan (<i>Miniplant</i>) pengolahan rumput laut menjadi agar-agar dan karagenan	Jumlah pabrik pengolahan rumput laut yang terbangun	2	Kelompok	-	2	-	-	-	Kec. Sebatik Tengah	Kementerian Kelautan dan Perikanan
22	Pengembangan SKPT (pengolahan lanjutan)	Jumlah SKPT (pengolahan lanjutan) yang dikembangkan	1	Unit	-	-	-	1	-	Kec. Sebatik Timur	Kementerian Kelautan dan Perikanan
23	Pembangunan/peningkatan sarana prasarana potensi wisata (hutan alam darat, mangrove dan pantai)	Jumlah sarana prasarana potensi wisata yang terbangun/ditingkatkan	2	Paket	-	2	-	-	-	Kec. Sebatik	Kementerian Kelautan dan Perikanan
24	Alat tangkap dan alat bantu penangkapan untuk kapal berukuran <3 GT	Jumlah alat tangkap dan alat bantu penangkapan yang tersedia	1	Paket	-	1	-	-	-	Kec. Sebatik	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP 3	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS										



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 214 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
1	Pembangunan dan peningkatan jalan desa strategis pada ruas jalan Simp. Kanan II Jl. Panamas menuju kantor Kelurahan Mansapa	Panjang ruas jalan yang terbangun	1,41	Km	-	1,41	-	-	-	PKSN Nunukan (Kec. Nunukan Selatan)	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
2	Pembangunan dan peningkatan Jalan Desa strategis pada ruas jalan Simp. Kanan I Jl. Ujang Dewa menuju Membunut Dalam	Panjang ruas jalan yang terbangun	0,87	Km	-	0,87	-	-	-	PKSN Nunukan (Kec. Nunukan Selatan)	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
3	Penyediaan titik lokasi dan pembangunan BTS	Jumlah titik lokasi penyediaan BTS khususnya di kelautan dan daerah pesisir	152	Lokasi	-	152	-	-	-	PKSN Long Nawang (Kec. Kayan Hulu), PKSN Long Midang (Kec. Krayan), PKSN Tau Lumbis (Lumbis Ogong), Kec. Pujungan, Kec. Kayan Hilir, Kec. Kayan Selatan, Kec. Krayan Selatan, Kec. Seimanggaris, Kec.	Kementerian Komunikasi dan Informatika



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 215 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
										Tulin Onsoi, Kec. Krayan Tengah, Kec. Krayan Barat	
4	Peningkatan/Pemantapan Bandar Udara Long Apung	Jumlah bandar udara yang ditingkatkan	1	Paket	1	1	-	-	-	Kec. Krayan Selatan	Kementerian Perhubungan
5	Pembangunan dan peningkatan jalan desa strategis pada ruas jalan menuju Rumah Sakit Pratama Long Apung	Panjang ruas jalan yang terbangun	1,12	Km	-	1,12	-	-	-	Kec. Kayan Selatan	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
6	Pengadaan sarana transportasi darat	Jumlah sarana transportasi darat yang tersedia	1	Unit	-	1	-	-	-	Kec. Kayan Hulu	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
7	Pembangunan dermaga rakyat (sungai/danau) untuk orang dan barang	Jumlah dermaga rakyat (sungai/danau) untuk orang dan barang yang dibangun	1	Unit	-	1	-	-	-	Kec. Pujungan	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 216 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
8	Penggantian dan renovasi jembatan gantung	Jumlah jembatan gantung yang diganti dan direnovasi (bentang maksimal 120 M)	120	M	-	1	-	-	-	Kec. Lumbis Ogong	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
KP 4	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL DASAR										
1	Rehabilitasi bangunan kantor desa	Jumlah kantor desa yang direhabilitasi	4	Unit	-	-	1	1	2	Prov. Kaltara	Kementerian Dalam Negeri
2	Pelayanan administrasi kependudukan di daerah	Pelayanan administrasi kependudukan di daerah (KTP el, KIA, Akta Kelahiran)	10	Paket	2	2	2	2	2	Kab. Malinau, Kab. Nunukan	Kementerian Dalam Negeri
3	Bantuan Sosial Pemerintah	Persentase keluarga penerima manfaat yang mendapatkan bantuan sosial pemerintah	100	%	100	100	100	100	100	Kab. Malinau, Kab. Nunukan	Kementerian Sosial



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 217 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
4	Satuan pemukiman yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas	Terbangun dan berfungsinya satuan permukiman transmigrasi di kawasan transmigrasi prioritas	1	Kawasan	-	-	1	1	1	Kab. Nunukan	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
5	Kawasan transmigrasi prioritas yang sarana dan prasarana nya dikembangkan dan fungsional	Berkembang dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas kawasan transmigrasi prioritas	1	Kawasan	1	-	1	1	1	Kab. Nunukan	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
6	Kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya	Berkembangnya ekonomi kawasan transmigrasi prioritas	1	Kawasan	1	-	1	-	1	Kab. Nunukan	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
7	Pembangunan balai pertemuan umum kecamatan	Jumlah balai pertemuan umum kecamatan yang dibangun	4	Unit	-	-	2	2	-	PKSN Nunukan (Kec. Sebatik Utara), Kec. Tulin Onsoi, Kec. Sebatik Tengah, Kec. Sebatik Timur	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 218 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
8	Renovasi Gedung Puskesmas Data Dian dan Long Nawang	Jumlah gedung puskesmas yang direnovasi	2	Unit	-	2	-	-	-	PKSN Long Nawang (Kec.Kayan Hulu), Kec. Kayan Hilir	Kementerian Kesehatan
9	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas perairan	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas perairan	2	Paket	-	-	-	2	-	PKSN Tou Lumbis (Kec. Lumbis Ogong).	Kementerian Kesehatan
10	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling	Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas keliling	1	Paket	-	-	-	1	-	PKSN Tou Lumbis (Kec. Lumbis Ogong)	Kementerian Kesehatan
11	Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan, dan rawan bencana	Jumlah pasar rakyat yang direvitalisasi	3	Unit	-	-	-	1	2	PKSN Long Nawang, PKSN Long Midang, PKSN Tou Lumbis	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
12	Peningkatan titik penyalur program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur BBM yang difasilitasi/ditingkatkan	41	Penyalur	-	8	8	8	17	PKSN Long Midang, PKSN Long Nawang, PKSN Nunukan, PKSN Tou Lumbis, Kec. Kayan Hilir	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 219 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
13	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Kawasan Perbatasan (sarana-prasarana dan alat kesehatan)	Pelayanan kesehatan dasar di Kawasan Perbatasan yang ditingkatkan	4	Paket	-	4	-	-	-	PKSN Nunukan (Kec. Sebatik Utara), Kec. Sebatik Timur	Kementerian Kesehatan
14	Rehabilitasi bangunan kantor desa	Jumlah kantor desa yang direhabilitasi	1	Unit	-	-	-	1	-	Kec. Krayan Selatan	Kementerian Dalam Negeri
15	Pembangunan gedung Puskesmas Long Pujungan	Jumlah gedung puskesmas yang terbangun	1	Unit	-	1	-	-	-	Kec. Pujungan	Kementerian Kesehatan
16	Penyediaan IPAL Puskesmas	Tersedianya IPAL Puskesmas	3	Paket	-	3	-	-	-	Kec. Pujungan, Kec. Kayan Hilir, Kec. Bahau Hulu	Kementerian Kesehatan
17	Penyediaan IPAL RS Pratama Long Apung	Tersedianya IPAL RS Pratama Long Apung	1	Paket	-	1	-	-	-	Kec. Kayan Selatan	Kementerian Kesehatan
18	Pembangunan Puskesmas Long Ampung	Jumlah puskesmas yang dibangun	1	Unit	-	1	-	-	-	Kec. Kayan Selatan	Kementerian Kesehatan
19	Pengadaan alat kesehatan RS Pratama Long Ampung dan RS Pratama	Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang tersedia	2	Paket	-	1	-	1	-	Kec. Krayan Selatan	Kementerian Kesehatan
20	Penyediaan solar cell Puskesmas	Tersedianya solar cell Puskesmas	6	Unit	-	6	-	-	-	Kec. Kayan Selatan	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 220 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
21	Penyediaan Pengolahan limbah padat Puskesmas	Tersedianya Pengolahan limbah padat Puskesmas	6	Unit	-	6	-	-	-	Kec. Kayan Selatan	Kementerian Kesehatan
22	Kalibrasi alat kesehatan Puskesmas	Tersedianya Kalibrasi alat kesehatan Puskesmas	6	Unit	-	6	-	-	-	Kec. Kayan Selatan	Kementerian Kesehatan
23	Pembangunan Rumah Dinas Medis Puskesmas Lapri	Tersedianya Rumah Dinas Medis Puskesmas Lapri	1	Paket	-	-	-	1	-	Kec. Sebatik Barat	Kementerian Kesehatan
24	Pengadaan sarana dan perlengkapan Puskesmas	Pengadaan sarana dan perlengkapan puskesmas	3	Paket	-	-	-	3	-	Kec. Krayan Tengah, Kec. Krayan Timur, Kec. Krayan Barat	Kementerian Kesehatan
25	Peningkatan Pustu Menjadi Puskesmas	Peningkatan Pustu menjadi Puskesmas	1	Unit	-	-	-	1	-	Kec. Krayan Tengah	Kementerian Kesehatan
26	Pengadaan Puskesmas Keliling roda empat	Pengadaan Puskesmas Keliling roda empat	12	Unit	-	-	-	12	-	Kec. Krayan timur	Kementerian Kesehatan
27	Pengadaan Puskesmas Keliling roda dua	Pengadaan Puskesmas Keliling roda dua	12	Unit	-	-	-	12	-	Kec. Krayan timur	Kementerian Kesehatan
28	Pembangunan jaringan distribusi listrik	Jumlah jaringan distribusi listrik yang terbangun	33	Paket	-	10	21	2	-	Kec. Lumbis Ogong, Kec. Krayan Timur, Kec. Krayan Barat, Kec. Krayan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/PLN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 221 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
29	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya	Jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang terbangun	7	Unit	-	-	1	2	4	Kec. Krayan, Kec. Lumbis Ogong, Kec. Sei Menggaris	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/PLN
VIII	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR										
KP 1	PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA										
1	Penyusunan Materi Teknis Peninjauan Kembali Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Jumlah Materi Teknis Kawasan Strategis Nasional	1	Paket	-	-	1	-	-	Prov. Nusa Tenggara Timur	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
2	Fasilitasi Legislasi Rancangan Peraturan Presiden Kawasan Perbatasan Negara Atambua, Kalabahi, Kefamenanu	Jumlah Rancangan Peraturan Presiden Kawasan Perbatasan Negara	3	Paket	1	-	-	-	2	PKSN Atambua, PKSN Kalabahi, PKSN Kefamenanu	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 222 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
3	Penyusunan Materi Teknis Kawasan Perbatasan Negara Turiskain, Haumeni Ana	Jumlah Materi Teknis Kawasan Perbatasan Negara	2	Paket	-	-	-	2	-	Kec. Raihat, Kec. Bikomi Nilulat	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
4	Fasilitasi Legislasi Rancangan Peraturan Presiden Kawasan Perbatasan Negara Motaain, Motamasin, Wini, Oepoli, Napan	Jumlah Rancangan Peraturan Presiden Kawasan Perbatasan Negara	5	Paket	3	-	-	2	-	Kec. Tasifeto Timur, Kec. Kobalima Timur, Kec. Insana Utara, Kec. Amfoang Timur, Kec. Bikomi Utara	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
KP 2	PENGEMBANGAN POTENSI KAWASAN PERBATASAN NEGARA										
1	Pendampingan IK Logam dan Mesin di Kota Kupang dan Kab. Kupang	Jumlah pendampingan yang terlaksana	12	IKM	-	12	-	-	-	Kab. Kupang	Kementerian Perindustrian
2	Revitalisasi Sentra IKM	Jumlah Sentra IKM yang direvitalisasi	1	Sentra IKM	-	1	-	-	-	Kota Kupang	Kementerian Perindustrian
3	Revitalisasi Sentra IKM Gula Lontar	Jumlah Sentra IKM yang direvitalisasi	1	Sentra IKM	-	1	-	-	-	Kab. Rote Ndao	Kementerian Perindustrian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 223 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
4	Revitalisasi Sentra IKM Pande Besi	Jumlah Sentra IKM yang direvitalisasi	1	Sentra IKM	-	1	-	-	-	Kab. Sabu Raijua	Kementerian Perindustrian
5	Revitalisasi Sentra IKM Garam	Jumlah Sentra IKM yang direvitalisasi	1	Sentra IKM	-	1	-	-	-	Kab. Timur Tenga Utara	Kementerian Perindustrian
6	Pengembangan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes	20	BUMDes	-	-	11	2	7	Kab. Belu, Kab. Malaka, Kab. Alor, Kab. Kupang	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
7	Peningkatan kapasitas tenaga kerja di daerah tertinggal	Meningkatnya kapasitas tenaga kerja di daerah tertinggal	300	Orang	-	-	100	200	-	Kab. Belu, Kab. Malaka, Kab. Kupang	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
8	Bantuan peningkatan nilai tambah Prukades di daerah tertinggal	Meningkatnya nilai tambah Prukades di daerah tertinggal	3	Unit	-	-	1	1	1	Kab. Belu, Kab. Malaka, Kab. Kupang	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
9	Kawasan transmigrasi prioritas yang sarana dan prasarana nya dikembangkan dan fungsional	Berkembang dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas kawasan transmigrasi prioritas	1	Kawasan	1	1	1	1	1	Kab. Timor Tengah Utara	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 224 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
10	Kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya	Berkembangnya ekonomi kawasan transmigrasi prioritas	1	Kawasan	1					Kab. Timor Tengah Utara	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
11	Penyediaan moda kapal ternak	Jumlah moda kapal ternak yang tersedia	1	Rute	1	1	1	1	1	PKSN Atambua	Kementerian Perhubungan
12	Penyedia jasa logistik sektor perdagangan yang diberikan pembinaan	Jumlah penyedia jasa yang diberikan pembinaan	10	Kegiatan	2	2	2	2	2	PKSN Atambua	Kementerian Perdagangan
13	Pembangunan industri pakan ternak ayam	Terselesalkannya pembangunan industri pakan ternak ayam	1	Unit	-	-	1	-	-	PKSN Atambua	Kementerian Perindustrian
14	Pengembangan Aplikasi Informatika UMKM <i>Go Online</i>	Jumlah <i>user</i> aktif <i>selling</i> UMKM	500	<i>User</i>	-	-	-	-	500	PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu	Kementerian Komunikasi dan Informatika
15	Pengembangan Aplikasi Informatika Petani dan Nelayan <i>Go Online</i>	Jumlah <i>user</i> aktif petani dan nelayan yang mendaftar	1.000	<i>User</i>	-	250	250	250	250	PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu	Kementerian Komunikasi dan Informatika



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 225 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
16	Pelatihan vokasional	Jumlah peserta pelatihan yang ditingkatkan kapasitasnya	100	Orang	-	-	-	-	100	PKSN Atambua	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
17	Pengadaan kendaraan traktor roda empat untuk komoditas jagung	Pengadaan kendaraan traktor roda untuk komoditas jagung	1	Unit	-	-	-	-	1	PKSN Atambua	Kementerian Pertanian
18	Pengadaan kendaraan traktor roda untuk komoditas bawang merah	Pengadaan kendaraan traktor roda untuk komoditas bawang merah	1	Unit	-	-	-	-	1	PKSN Atambua	Kementerian Pertanian
19	Pengembangan sarana industri alat mesin pertanian jagung	Jumlah sarana prasarana produksi pertanian jagung	1	Unit	-	-	-	-	1	PKSN Atambua	Kementerian Pertanian
20	Pelatihan penggemukan sapi yang berorientasi ekonomi dan lingkungan berkelanjutan	Pelatihan penggemukan sapi yang berorientasi ekonomi dan lingkungan berkelanjutan	1	Paket	-	-	-	-	1	PKSN Atambua	Kementerian Pertanian
21	Pelatihan penanganan penyakit ternak, teknologi produksi dan pembuatan pakan ternak	Jumlah pelatihan penanganan penyakit ternak, teknologi produksi dan pembuatan pakan ternak yang terlaksana	1	Paket	-	-	-	-	1	PKSN Atambua	Kementerian Pertanian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 226 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
22	Pelatihan sistem agribisnis usaha tani ternak sapi	Jumlah pelatihan sistem agribisnis usaha tani ternak sapi yang terlaksana	1	Paket	-	-	-	-	1	PKSN Atambua	Kementerian Pertanian
23	Pelatihan budi daya jagung dan bawang merah yang berorientasi ekonomi dan lingkungan berkelanjutan	Jumlah pelatihan budi daya jagung dan bawang merah yang berorientasi ekonomi dan lingkungan berkelanjutan yang terlaksana	1	Paket	-	-	-	-	1	PKSN Atambua	Kementerian Pertanian
24	Pelatihan penanganan penyakit hama, teknologi produksi untuk komoditas jagung dan bawang merah	Jumlah pelatihan mengenai penanganan penyakit hama untuk komoditas jagung dan bawang merah yang terlaksana	1	Unit	-	-	-	-	1	PKSN Atambua	Kementerian Pertanian
25	Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat	Jumlah pasar rakyat yang dibangun/direvitalisasi	2	Unit	-	-	2	-	-	PKSN Atambua (Pasar Sabete, Pasar Henes)	Kementerian Perdagangan
26	Pelaksanaan inseminasi buatan	Jumlah inseminasi buatan yang terlaksana	1	Akseptor	-	-	-	-	1	PKSN Kefamenanu	Kementerian Pertanian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 227 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
27	Pelatihan penggemukan sapi dan kambing	Jumlah pelatihan yang terlaksana untuk penggemukan sapi dan kambing	1	Kegiatan	-	-	-	-	1	PKSN Kefamenanu	Kementerian Pertanian
28	Pelatihan pembuatan pakan ternak sapi dan kambing	Jumlah masyarakat yang difasilitasi pelatihan pakan ternak sapi dan kambing	1	Kegiatan	-	-	-	-	1	PKSN Kefamenanu	Kementerian Pertanian
29	Pelatihan pemeliharaan dan pembesaran sapi potong	Jumlah masyarakat yang difasilitasi pelatihan pemeliharaan dan pembesaran sapi potong	1	Kegiatan	-	-	-	-	1	PKSN Kefamenanu	Kementerian Pertanian
30	Fasilitasi teknologi produksi biogas dan kompos	Jumlah masyarakat yang difasilitasi teknologi produksi biogas dan kompos	1	Paket	-	-	-	-	1	PKSN Kefamenanu	Kementerian Pertanian
31	Pelatihan budi daya kambing	Jumlah masyarakat yang diberikan pelatihan budi daya kambing	1	Kegiatan	-	-	-	-	1	PKSN Kefamenanu	Kementerian Pertanian



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 228 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
32	Pengadaan dan distribusi bibit sapi potong	Pengadaan dan distribusi bibit sapi potong	100	Ekor	-	-	-	-	100	PKSN Kefamenanu	Kementerian Pertanian
33	BUMDes yang dikembangkan untuk mendukung produk unggulan desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes	11	Desa	-	-	-	-	11	PKSN Kefamenanu	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
34	Fasilitasi lahan garam	Luas lahan garam yang difasilitasi	20	Ha	-	-	-	-	20	PKSN Kefamenanu	Kementerian Kelautan dan Perikanan
35	Pembangunan sarana niaga garam rakyat	Jumlah sarana niaga garam rakyat yang dibangun	1	Unit	-	-	-	-	1	PKSN Kefamenanu	Kementerian Kelautan dan Perikanan
36	Pengadaan Kapal Ikan 2 GT <i>Fiber Glass</i>	Tersedianya Kapal Ikan 2 GT <i>Fiber Glass</i>	15	Unit	-	15	-	-	-	Kec. Alor Selatan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
37	Pengadaan alat penangkapan ikan	Tersedianya alat penangkap ikan	1	Paket	-	1	-	-	-	Kec. Alor Selatan	Kementerian Kelautan dan Perikanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 229 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
38	Pengadaan <i>speed boat</i> patroli	Tersedianya <i>speed boat</i> patroli	2	Unit	-	2	-	-	-	Kec. Alor Barat Daya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
39	Pengadaan 4 unit Kapal Ikan <i>Fiber Glass 7 GT</i>	Jumlah kapal yang tersedia	4	Unit	-	4	-	-	-	Kec. Amfoang Timur	Kementerian Kelautan dan Perikanan
40	Pengadaan sampan ketinting kedap air dan kelengkapan	Jumlah sampan ketinting yang tersedia	32	Unit	-	32	-	-	-	Kec. Amfoang Timur	Kementerian Kelautan dan Perikanan
41	Pembuatan lahan permanen budi daya rumput laut air dalam	Jumlah lahan permanen budi daya rumput laut air dalam yang tersedia	16	Lahan	-	16	-	-	-	Kec. Amfoang Timur	Kementerian Kelautan dan Perikanan
42	Pengadaan sampan angkut rumput laut	Jumlah sampan angkut rumput laut yang tersedia	32	Unit	-	32	-	-	-	Kec. Amfoang Timur	Kementerian Kelautan dan Perikanan
43	Bantuan bibit rumput laut	Jumlah bibit rumput laut yang tersedia	8	Paket	-	8	-	-	-	Kec. Amfoang Timur	Kementerian Kelautan dan Perikanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 230 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
44	Pengadaan sarana budi daya rumput laut	Tersedianya sarana budi daya rumput laut	365	Paket	-	-	25	100	240	Kec. Rote Barat, Kec. Rote Timur, Kec. Lobalain, Kec. Rote Selatan, Kec. Rote Barat Daya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
45	Pembuatan gudang penyimpanan rumput laut dan kelengkapan	Jumlah gudang penyimpanan rumput laut dan kelengkapan yang tersedia	8	Unit	-	8	-	-	-	Kec. Amfoang Timur	Kementerian Kelautan dan Perikanan
46	Pengadaan <i>Gill Net</i>	Tersedianya <i>Gill Net</i>	1.655	Unit	-	-	-	300	1.355	Kec. Landu Leko, Kec. Rote Timur, Kec. Rote Barat, Kec. Rote Barat Daya, Kec. Rote Selatan, Kec. Lobalain	Kementerian Kelautan dan Perikanan
47	Pengadaan alat tangkap jaring cumi	Tersedianya alat tangkap jaring cumi	1.500	Unit	-	-	-	-	1.500	Kec. Rote Timur, Kec. Rote Barat, Kec. Landu Leko	Kementerian Kelautan dan Perikanan
48	Pengadaan kapal	Tersedianya kapal	70	Unit	-	-	-	20	50	Kec. Rote Barat, Kec. Rote Timur	Kementerian Kelautan dan Perikanan



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 231 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
49	Pengadaan mesin kapal	Jumlah mesin kapal yang tersedia	760	Unit	-	-	-	300	460	Kec. Landu Leko, Kec. Rote Barat, Kec. Rote Selatan, Kec. Lobalain, Kec. Rote Timur	Kementerian Kelautan dan Perikanan
50	Pengadaan <i>Cool Box</i>	Jumlah pengadaan <i>Cool Box</i> yang tersedia	500	Unit	-	-	-	130	370	Kec. Rote Timur, Kec. Rote Barat, Kec. Rote Barat, Kec. Landu Leko, Kec. Lobalain	Kementerian Kelautan dan Perikanan
51	Pembangunan tempat pelelangan ikan di Papela	Jumlah tempat pelelangan ikan yang terbangun	1	Unit	-	-	-	-	1	Kec. Rote Timur	Kementerian Kelautan dan Perikanan
52	Penyediaan sarana pemasaran bergerak dan berinsulasi	Jumlah sarana pemasaran bergerak dan berinsulasi yang tersedia	100	Unit	-	-	-	30	70	Kec. Rote Barat, Kec. Rote Timur	Kementerian Kelautan dan Perikanan
53	Pembangunan tambatan perahu	Tersedianya tambatan perahu	1	Paket	-	-	-	-	1	Kec. Rote Barat	Kementerian Kelautan dan Perikanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 232 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
54	Pengadaan kapal >3 GT	Jumlah kapal >3 GT yang tersedia	30	Unit	-	-	4	12	14	Kec. Lobalain, Kec. Rote Selatan, Kec. Rote Barat Daya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
55	Pengadaan Perahu/kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 3 GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan	Jumlah perahu/kapal penangkap ikan yang tersedia	30	Unit	-	-	6	11	13	Kec. Lobalain, Kec. Rote Selatan, Kec. Rote Barat Daya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
56	Pembinaan ekonomi kelompok pembudi daya	Jumlah ekonomi kelompok pembudi daya yang terbina	65	Kelompok	-	-	5	10	50	Kec. Rote Selatan, Kec. Lobalain, Kec. Rote Barat Daya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
57	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	Jumlah kelompok nelayan perikanan tangkap yang didampingi	24	Kelompok	-	-	-	-	24	Kec. Lobalain, Kec. Rote Barat Daya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
58	Peningkatan sarana usaha perdagangan	Jumlah sarana usaha perdagangan yang ditingkatkan	10	Unit	-	10	-	-	-	Kec. Alor Selatan	Kementerian Perdagangan
59	Peningkatan PMKM mitra binaan	Jumlah PMKM mitra binaan yang ditingkatkan	25	Kelompok	-	25	-	-	-	Kec. Alor Selatan	Kementerian Perdagangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 233 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
60	Pembangunan pasar mingguan rakyat	Jumlah pasar yang terbangun	2	Unit	-	2	-	-	-	Kec. Pureman, Kec. Alor Selatan	Kementerian Perdagangan
61	Pembangunan gudang komoditas pertanian	Jumlah gudang komoditas pertanian yang terbangun	4	Unit	-	4	-	-	-	Kec. Alor Selatan, Kec. Pureman, Kec. Alor Barat Daya, Kec. Mataru	Kementerian Perdagangan
62	Peningkatan sarana usaha perdagangan	Jumlah sarana usaha perdagangan yang ditingkatkan	40	Unit	-	40	-	-	-	Kec. Alor Selatan, Kec. Pureman, Kec. Teluk Mutiara, Kec. Mataru	Kementerian Perdagangan
63	Peningkatan sarana distribusi perdagangan (pasar)	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang ditingkatkan	2	Paket	-	2	-	-	-	Kec. Pureman, Kec. Alor Barat Daya	Kementerian Perdagangan
64	Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat	Jumlah pasar rakyat yang dibangun/direvitalisasi	4	Unit	-	-	-	2	2	Kec. Malaka Barat, Kec. Wewiku, Kec. Rote Selatan, Kec. Hawu Mehara	Kementerian Perdagangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 234 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
65	Pembangunan <i>cottage/homestay</i>	Jumlah <i>cottage/homestay</i> yang terbangun	7	Unit	-	7	-	-	-	Kec. Alor Barat Daya	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
66	Pelatihan masyarakat bidang (tata kelola destinasi pariwisata, pelatihan manajemen <i>homestay</i> , <i>selam</i> , <i>paralayang</i> , <i>pilihan</i> , <i>TIC</i> , dan <i>supporting</i>)	Jumlah pelatihan yang terlaksana	1	Kegiatan	1	-	-	-	-	Kec. Amfoang Timur	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
67	Pengembangan Kawasan Wisata Pantai dan Bahari di Ds. Netemnanu Utara, Netemnanu Selatan, Kifu, Nunuanah dan P. Batek	Jumlah kawasan wisata yang terbangun	1	Lokasi	-	1	-	-	-	Kec. Amfoang Timur	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 235 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
68	Pelatihan perkoperasian	Jumlah pelatihan perkoperasian	180	Orang	-	-	-	-	180	Kec. Landu Leko	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
69	Kerja sama kemitraan usaha, kecil, dan menengah	Jumlah kerja sama kemitraan usaha, kecil, dan menengah	10	UMKM	-	-	-	-	10	Kec. Landu Leko	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
70	Pelatihan kewirausahaan	Jumlah pelatihan kewirausahaan	2720	Orang	-	-	-	-	1.020	Kec. Landu Leko, Kec. Rote Selatan, Kec. Rote Barat, Kec. Rote Barat Daya, Kec. Lobalain	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
71	Pendataan dan identifikasi KUMKM	Terlaksananya pendataan dan identifikasi KUMKM	1.250	Unit	-	-	-	-	1.250	Kec. Landu Leko	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
72	Fasilitas pendirian akta notaris	Jumlah fasilitas pendirian akta notaris	9	Akta	-	-	-	-	9	Kec. Landu Leko, Kec. Rote Barat Daya	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 236 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
73	Pelatihan perkoperasian	Jumlah pelatihan perkoperasian yang terlaksana	180	Orang	-	-	-	-	180	Kec. Rote Timur, Kec. Rote Barat Daya, Kec. Rote Selatan, Kec. Lobalain	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
74	Pengadaan sarana produksi pertanian	Jumlah sarana produksi pertanian untuk LU II T+3 yang tersedia	1	Paket	1	-	-	-	-	Kec. Teluk Mutiara	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
75	Pengembangan Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	4	Desa	-	1	1	1	1	Kec. Naibenu	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
KP 3	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS										
1	Pembangunan Jalan Oepoli-Noelelo	Panjang ruas jalan yang dibangun	18,38	km	-	18,38	-	-	-	Kab. Kupang	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 237 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
2	Pembangunan Jalan Noelelo-Oenaek	Panjang ruas jalan yang dibangun	12,1	km	-	-	12,1	-	-	Kab. Kupang	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3	Pembangunan Jalan Oenaek-Saenam	Panjang ruas jalan yang dibangun	18,24	km	-	-	13	5,24	-	Kab. Kupang	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4	Pembangunan Jalan Motaain-Haliwen-Haikesak-Nualain-Latutus-Motamasin-(Motaain-Dafala-Laktutus-Motamasin)	Panjang ruas jalan yang dibangun	37,8	km	20	10	7,8	-	-	Kab. Malaka	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5	Pembangunan Terminal Motaain	Jumlah terminal antarnegara yang dibangun	1	Unit	1		-	-	-	PKSN Atambua	Kementerian Perhubungan
6	Pengembangan Bandar Udara Haliwen Atambua	Jumlah bandar udara yang direhabilitasi/dikembangkan	1	Paket	1	-	-	-	-	PKSN Atambua	Kementerian Perhubungan
7	Pengembangan Pelabuhan Wini	Terlaksananya pengembangan/pembangunan pelabuhan	1	Unit	-	-	1	-	-	PKSN Kefamenanu	Kementerian Perhubungan



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 238 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
8	Pembangunan Terminal Wini	Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ditingkatkan	1	Unit	1		-	-	-	PKSN Kefamenanu	Kementerian Perhubungan
9	Penyediaan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti Internet)	Jumlah Titik Bakti Internet yang dibangun	1	Lokasi	-	-	-	-	1	PKSN Atambua	Kementerian Komunikasi dan Informatika
10	Pembangunan jalan masuk Sonis Laloran di Desa Tukuneno	Terselesainya Pembangunan jalan masuk Sonis Laloran	0,8	Km	-	-	0,8	-	-	PKSN Atambua	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
11	Pembangunan jalan desa di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur	Terbangunnya jalan desa di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur	0,6	Km	-	-	0,6	-	-	PKSN Atambua	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
12	Pembangunan Jalan Perbatasan Nusa Tenggara Timur	Panjang jalan yang dibangun	176,5	Km	32,6	49,7	44,8	44,8	4,6	PKSN Atambua	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 239 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
13	Penanganan jalan yang menghubungkan Atapupu-Oekusi (RDTL)	Terselesaikannya penanganan jalan yang menghubungkan Atapupu-Oekusi (RDTL)	14,24	Km	-	-	14,24	-	-	PKSN Atambua	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
14	Penanganan jalan yang menghubungkan Kupang-RDTL, melalui Kupang-Timor Tengah Selatan (TTS)-Timor Tengah Utara (TTU)-Simpang (Sp.) Halilulik-Atambua-Atapupu-Motaain-RDTL	Terselesaikannya penanganan jalan yang menghubungkan Kupang-RDTL, melalui Kupang-TTS-TTU-Sp. Halilulik - Atambua - Atapupu - Motaain - RDTL di Kecamatan Tasifeto Barat	1	Paket	-	-	1	-	-	PKSN Atambua	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
15	Pembangunan Jalan Saenam-Nunpo (Haumeniana)	Panjang ruas jalan yang dibangun	14,8	km	-	-	5	5	4,8	PKSN Kefamenanu	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
16	Pembangunan Jalan Nunpo (Haumeniana)-Inbate	Panjang ruas jalan yang dibangun	9,6	km	-	-	3,2	3,2	3,2	PKSN Kefamenanu	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 240 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
17	Pembangunan Jalan Inbate-Faenake (Napan)	Panjang ruas jalan yang dibangun	11,71	km	-	-	4	4	3,71	PKSN Kefamenanu	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
18	Pembangunan Jalan Sp Amol-Manamas	Panjang ruas jalan yang dibangun	22,62	km	-	-	8,3	8,2	6,12	PKSN Kefamenanu	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
19	Pembangunan Jalan Manamas-Wini	Panjang ruas jalan yang dibangun	11,89	km	-	-	4	4	3,89	PKSN Kefamenanu	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
20	Pembangunan Jalan Akses PLBN Oepoli	Panjang ruas jalan yang dibangun	1,22	km	-	-	1,22	-	-	PKSN Kefamenanu	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
21	Pembangunan Jalan Akses PLBN Napan	Panjang ruas jalan yang dibangun	3,66	km	-	-	3,66	-	-	PKSN Kefamenanu	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 241 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
22	Peningkatan jalan strategis desa di daerah perbatasan Ruas Jalan Desa Halibasar-Desa Badarai	Panjang ruas jalan desa yang ditingkatkan	2	Km	-	2	-	-	-	Kec. Wewiku	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
23	Peningkatan jalan strategis desa di daerah perbatasan Ruas Jalan Desa Weoe-Desa Biris	Panjang ruas jalan desa yang ditingkatkan	1	Km	-	1	-	-	-	Kec. Wewiku	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
24	Pembangunan Jalan Desa Strategis Ruas Jalan Desa Fahluka-Sp. Trans Kotun	Jumlah ruas jalan desa yang terbangun	1	Km	-	1	-	-	-	Kec. Malaka Tengah	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
25	Pembangunan Jalan Desa Strategis Ruas Jalan Desa Harekaka-Lafaekulun	Panjang ruas jalan desa yang terbangun	1	Km	-	1	-	-	-	Kec. Malaka Tengah	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
26	Pengadaan sarana transportasi darat	Tersedianya sarana transportasi darat	26	Unit	-	26	-	-	-	Kec. Malaka Tengah, Kec. Malaka Barat, Kec. Sabu Liae, Kec. Sabu Timur, Kec.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 242 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
										Hawu Mehara, Kec. Alor Barat Daya, Kec. Mataru, Kec. Alor Timur, Kec. Teluk Mutiara, Kec. Pantar Tengah, Kec. Alor Selatan, Kec. Pureman, Kec. Amfoang Timur, Kec. Miomaffo Barat, Kec. Insana Utara	
27	Pembangunan fasilitas perawatan dan parkir RIB (<i>Floating RIB Dock</i>)	Jumlah fasilitas perawatan dan parkir RIB yang terbangun	1	Paket	-	1	-	-	-	Kec. Amfoang Timur	Kementerian Perhubungan
28	Pengadaan pelampung Suar diameter 2,6 M (<i>steel</i>) lengkap dengan penjangkarannya	Jumlah pelampung Suar diameter 2,6 M (<i>steel</i>) lengkap dengan penjangkarannya yang tersedia	5	Unit	-	5	-	-	-	Kec. Amfoang Timur	Kementerian Perhubungan



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 243 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
29	Pembangunan Ruas Jalan Desa Halilulik-Buburlaran	Jumlah ruas jalan desa yang terbangun	1,65	Km	-	1,65	-	-	-	Kec. Tasifeto Barat	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
30	Pembangunan Ruas Jalan Desa Beremuti-Dubesi-Talerun	Jumlah ruas jalan desa yang terbangun	2	Km	-	2	-	-	-	Kec. Nanaet Dubesi	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
31	Peningkatan jalan desa strategis ruas jalan Mbokak-Dasioen	Ditingkatkannya panjang jalan strategis desa di lokasi prioritas perbatasan daerah tertinggal	1	Km	-	1	-	-	-	Kec. Rote Barat Daya	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
32	Peningkatan jalan desa strategis ruas jalan Danoheo-Dete	Ditingkatkannya panjang jalan strategis desa di lokasi prioritas perbatasan daerah tertinggal	1,3	Km	-	1,3	-	-	-	Kec. Rote Barat Daya	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
33	Peningkatan jalan desa strategis pada ruas jalan Inaoe-Tolanamon	Ditingkatkannya panjang jalan strategis desa di lokasi prioritas perbatasan daerah tertinggal	1	Km	-	1	-	-	-	Kec. Rote Selatan	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 244 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
34	Peningkatan ruas jalan Eahub-Kimadale	Ditingkatkannya panjang jalan strategis desa di lokasi prioritas perbatasan daerah tertinggal	2,5	Km	-	2,5	-	-	-	Kec. Rote Timur	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
35	Peningkatan jalan desa strategis ruas jalan Tuaneo-Bunioen	Ditingkatkannya panjang jalan strategis desa di lokasi prioritas perbatasan daerah tertinggal	2	Km	-	2	-	-	-	Kec. Rote Barat	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
36	Peningkatan jalan desa strategis ruas jalan Mokdale-Sanggaoen (SLB)	Ditingkatkannya panjang jalan strategis desa di lokasi prioritas perbatasan daerah tertinggal	1,9	Km	-	1,9	-	-	-	Kec. Lobalain	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
37	Peningkatan Jalan Desa Strategis Ruas Jalan Daeurendale-Sipu	Ditingkatkannya panjang jalan strategis desa di lokasi prioritas perbatasan daerah tertinggal	2,5	Km	-	2,5	-	-	-	Kec. Landu Leko	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
38	Pembangunan jalan desa strategis ruas Jalan Desa Eban Menuju Desa Satab dan Desa Fatuneno	Ditingkatkannya panjang jalan strategis desa di lokasi prioritas perbatasan daerah tertinggal	4	Km	-	4	-	-	-	Kec. Miomaffo Barat	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 245 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
39	Penyediaan titik lokasi dan pembangunan BTS	Jumlah titik lokasi penyediaan BTS khususnya di kelautan dan daerah pesisir	34	Lokasi	-	34	-	-	-	Kec. Alor Selatan, Kec. Alor Barat Daya, Kec. Mataru, Kec. Alor Timur, Kec. Pantar Tengah, Kec. Mutis, Kec. Landu Leko, Kec. Rote Timur, Kec. Pantai Baru, Kec. Rote Selatan, Kec. Raijua	Kementerian Komunikasi dan Informatika
40	Pembangunan pelabuhan penyeberangan Maritaing	Jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun	1	Unit	-	-	1	1	1	Kec. Alor Timur	Kementerian Perhubungan
41	Penanganan jalan penghubung PLBN Motaain-Atapupu	Terselesaikannya penanganan jalan yang menghubungkan PLBN Motaain-Atapupu	238,66	Km	-	119,33	119,33	-	-	PKSN Atambua	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
42	Penanganan jalan dalam kota Atambua yang terhubung dengan Jalan simpang (Sp.) Haliluik	Terselesaikannya penanganan jalan dalam kota Atambua yang terhubung dengan Sp. Haliluik di Atambua.									



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 246 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
43	Penanganan ruas jalan Lalu-Turiskain	Terselesaikannya penanganan ruas jalan Lalu-Turiskain di Lasiolat, Raihat	1	Paket	-	-	-	-	-	PKSN Atambua	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
44	Penanganan ruas jalan Fulur-Nualain-Henes	Terselesaikannya penanganan ruas jalan Fulur-Nualain-Henes	3,24	Km	-	3,24	-	-	-	PKSN Atambua	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
KP 4	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL DASAR										
1	Rehabilitasi bangunan kantor desa	Jumlah kantor desa yang direhabilitasi	7	Unit	-	1	2	2	2	Prov. NTT	Kementerian Dalam Negeri
2	Pelayanan administrasi kependudukan di daerah	Pelayanan administrasi kependudukan di daerah (KTP el, KIA, Akta Kelahiran)	30	Paket	6	6	6	6	6	Kab. Kupang, Kab. Timor Tengah Utara, Kab. Malaka, Kab. Belu, Kab. Alor, Kab. Sabu Raijua	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 247 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
3	Bantuan Sosial Pemerintah	Persentase keluarga penerima manfaat yang mendapatkan bantuan sosial pemerintah	100	%	100	100	100	100	100	Kab. Alor, Kab. Belu, Kab. Malaka, Kab. Timor Tengah Utara, Kab. Kupang, Kab. Rote Ndao, Kab. Sabu Raijua	Kementerian Sosial
4	Satuan pemukiman yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas	Terbangun dan berfungsinya satuan permukiman transmigrasi di kawasan transmigrasi prioritas	1	Kawasan	-	-	-	-	1	Kab. Malaka	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
5	Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL	Terfasilitasinya penerbitan SK HPL pada satuan permukiman transmigrasi	1.752	Ha	1.752	-	-	-	-	Kab. Malaka	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
6	Kawasan transmigrasi prioritas yang sarana dan prasarana dikembangkan dan fungsional	Berkembangnya dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan transmigrasi prioritas	1	Kawasan	-	-	1			Kab. Malaka	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 248 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
7	Sarana dan Prasarana Air Bersih yang dibangun di Daerah Perbatasan	Meningkatnya layanan air bersih dan sanitasi di daerah perbatasan	200	KK	-	-	100	-	100	Kab. Malaka	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
8	Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat	Terselesaikannya pembangunan/revitalisasi pasar rakyat	3	Unit	-	-	3	-	-	PKSN Atambua	Kementerian Perdagangan
9	Pembangunan Pasar Tipe B	Jumlah Pasar Tipe B yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya	1	Unit	-	-	-	-	1	PKSN Kefamenanu	Kementerian Perdagangan
10	Pembangunan Pasar Tipe C	Jumlah Pasar Tipe C yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya	1	Unit	-	-	-	-	1	PKSN Kefamenanu	Kementerian Perdagangan
11	Pembangunan Gudang/Depo Non-SRG	Jumlah Gudang/Depo Non-SRG yang dibangun	2	Unit	-	-	1	-	1	PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu	Kementerian Perdagangan
12	Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola koperasi/keompok di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Pascabencana	Jumlah pasar rakyat yang dibangun	2	Unit	-	-	-	-	2	PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 249 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
13	Pengembangan jaringan distribusi listrik di Kawasan Perbatasan Motaain	Terselesaikannya Pengembangan jaringan distribusi listrik di Kawasan Perbatasan Motaain	3	Paket	-	-	3	-	-	PKSN Atambua	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
14	Pembangunan SPBU di Motaain	Terselesaikannya pembangunan SPBU di Motaain	1	Unit	-	-	1	-	-	PKSN Atambua	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
15	Pembangunan embung teknis Desa Naekasa dan Desa Lookeu	Terselesaikannya Pembangunan embung teknis Desa Naekasa dan Desa Lookeu	2	Unit	-	-	2	-	-	PKSN Atambua	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
16	Pembangunan embung air baku di Kecamatan Lakmanen	Terselesaikannya pembangunan embung air baku di Kecamatan Lakmanen	1	Liter/detik	-	-	1	-	-	PKSN Atambua	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
17	Pembangunan sumur bor air tanah dalam	Terselesaikannya pembangunan sumur bor air tanah dalam	2	Unit	-	-	2	-	-	PKSN Atambua	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 250 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
18	Pembangunan kantor kecamatan	Jumlah kantor kecamatan yang dibangun	4	Unit	-	-	-	2	2	Kec. Alor Barat Daya, Kec. Pantar Tengah, Kec. Alor Selatan, Kec. Malaka Tengah	Kementerian Dalam Negeri
19	Pembangunan Balai pertemuan umum kecamatan	Jumlah Balai pertemuan umum kecamatan yang dibangun	6	Unit	-	-	-	3	3	Kec. Malaka Barat, Kec. Insana Utara, Kec. Naibanu, Kec. Landu Leko, Kec. Rote Selatan, Kec. Pantai Baru	Kementerian Dalam Negeri
20	Pembangunan kantor desa/kelurahan	Jumlah kantor desa/kelurahan yang dibangun	2	Unit	-	-	1	1	-	Kec. Bikomi Utara, Kec. Bikomi Tengah	Kementerian Dalam Negeri
21	Pembangunan Balai Pertemuan Umum Desa/Kelurahan	Jumlah Balai Pertemuan Umum Desa/Kelurahan yang dibangun	2	Unit	-	-	1	1	-	Kec. Bikomi Utara, Kec. Bikomi Tengah	Kementerian Dalam Negeri
22	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Kawasan Perbatasan (sarana-prasarana dan alat kesehatan)	Pelayanan kesehatan dasar di Kawasan Perbatasan yang ditingkatkan	25	Paket	-	25	-	-	-	Kec. Alor Barat Daya, Kec. Teluk Mutiara, Kec. Pantai baru, Kec. Hawu Mehara	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 251 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
23	Pembangunan/peningkatan gedung RSUD Kalabahi	Jumlah gedung rumah RSUD Kalabahi yang terbangun	1	Paket	-	-	1	-	-	Kec. Teluk Mutiara	Kementerian Kesehatan
24	Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) rumah RSUD Kalabahi	Jumlah IPAL RSUD Kalabahi yang terbangun	1	Unit	-	-	1	-	-	Kec. Teluk Mutiara	Kementerian Kesehatan
25	Pembangunan rumah dinas Puskesmas	Jumlah rumah dinas puskesmas yang terbangun	2	Unit	1	1	-	-	-	Kec. Lamaknen	Kementerian Kesehatan
26	Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) puskesmas perbatasan	Jumlah Bantuan Operasional Kegiatan puskesmas perbatasan yang terlaksana	4	Paket	-	-	-	4	-	Kec. Kobalima Timur	Kementerian Kesehatan
27	Pembangunan puskesmas	Jumlah puskesmas yang terbangun	3	Unit	-	-	-	2	1	Kec. Rote Selatan, Kec. Wewiku, Kec. Kobalima	Kementerian Kesehatan
28	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), anemia gizi besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), kurang	Jumlah penanggulangan KEP, anemia gizi besi, GAKY, kurang vitamin A	15	Kegiatan	-	-	-	-	15	Kec. Rote Selatan, Kec. Rote Barat Daya, Kec. Lobalain	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 252 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
	vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	dan kekurangan zat gizi mikro yang terlaksana									
29	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Jumlah masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	15	Kegiatan	-	-	-	-	15	Kec. Rote Selatan, Kec. Rote Barat Daya	Kementerian Kesehatan
30	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	Jumlah vaksinasi bagi balita dan anak sekolah yang terlayani	40	Kegiatan	-	-	-	-	40	Kec. Rote Selatan, Kec. Rote Barat Daya	Kementerian Kesehatan
31	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular tropis terabaikan	Jumlah pelayanan kesehatan dasar yang ditingkatkan	20	Kegiatan	-	-	-	-	20	Kec. Rote Barat Daya, Kec. Lobalain	Kementerian Kesehatan
32	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Jumlah pencegahan dan penanggulangan penyakit menular yang terlaksana	15	Kegiatan	-	-	-	-	15	Kec. Rote Selatan, Kec. Rote Barat Daya, Kec. Lobalain	Kementerian Kesehatan
33	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Jumlah makanan dan vitamin yang tersedia	110	Desa/Paket	-	-	-	-	110	Kec. Rote Selatan	Kementerian Kesehatan
34	Sosialisasi percepatan pencegahan <i>stunting</i>	Jumlah percepatan pencegahan <i>stunting</i> yang tersosialisasi	200	Desa	-	-	-	-	200	Kec. Rote Selatan, Kec. Rote Barat Daya, Kec. Lobalain	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 253 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
35	Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik	Jumlah pencegahnya penularan penyakit endemik/epidemik yang terlaksana	45	Desa	-	-	-	-	45	Kec. Rote Selatan, Kec. Rote Barat Daya, Kec. Lobalain	Kementerian Kesehatan
36	Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah	Jumlah surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah yang ditingkatkan	30	Kegiatan	-	-	-	-	30	Kec. Rote Barat Daya, Kec. Rote Selatan, Kec. Lobalain	Kementerian Kesehatan
37	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya	Jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang terbangun	2	Unit	-	-	2	-	-	Kec. Alor Selatan, Kec. Mataru	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/PLN
38	Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik	Jumlah jaringan distribusi listrik yang tersedia	24	Unit	10	6	5	-	3	Kec. Alor Selatan, Kec. Alor Barat Daya, Kec. Mataru, Kec. Alor Timur, Kec. Teluk Mutiara, Kec. Sabu Timur, Kec. Sabu Liae, Kec. Pureman	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/PLN
39	Peningkatan titik penyalur program BBM Satu Harga	Jumlah jaringan listrik PLN yang tersedia	1	Unit	-	-	-	-	1	Kec. Naibenu	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/PLN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 254 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
40	Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas SD	Jumlah ruang kelas yang terbangun/direhabilitasi	402	Ruang	-	34	114	125	129	Kec. Alor Selatan, Kec. Alor Barat Daya, Kec. Pureman, Kec. Mataru, Kec. Alor Timur, Kec. Teluk Mutiara, Kec. Pantar Tengah, Kec. Tasifeto Timur, Kec. Lasiolat, Kec. Raihat, Kec. Lamaknen, Kec. Lamaknen Selatan, Kec. Tasifeto Barat, Kec. Nanaet Dubesi, Kec. Naibenu, Kec. Bikomi Utara, Kec. Miomaffo Barat, Kec. Amfoang Timur	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
41	Pembangunan/rehabilitasi perpustakaan SD	Jumlah ruang perpustakaan yang terbangun/direhabilitasi	122	Ruang	-	-	34	36	52	Kec. Amfoang Timur, Kec. Miomaffo Barat, Kec. Bikomi Utara, Kec. Naibenu, Kec. Nanaet Dubesi, Kec.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 255 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
										Tasifeto Barat, Kec. Lamaknen Selatan, Kec. Lamaknen, Kec. Raihat, Kec. Lasiolat, Kec. Tasifeto Timur, Kec. Pantar Tengah, Kec. Teluk Mutiara, Kec. Alor Timur, Kec. Mataru, Kec. Pureman, Kec. Alor Barat Daya, Kec. Alor Selatan	
42	Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas SMP	Jumlah ruang kelas yang terbangun/direhabilitasi	230	Ruang	-	10	67	72	81	Kec. Alor Barat Daya, Kec. Pureman, Kec. Mataru, Kec. Alor Timur, Kec. Teluk Mutiara, Kec. Pantar Tengah, Kec. Tasifeto Timur, Kec. Lasiolat, Kec. Raihat, Kec. Lamaknen, Kec. Lamaknen Selatan,	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 256 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
										Kec. Amfoang Timur, Kec. Miomaffo Barat, Kec. Tasifeto Barat, Kec. Bikomi Utara, Kec. Naibenu	
43	Pembangunan/rehabilitasi perpustakaan SMP	Jumlah ruang perpustakaan yang terbangun/direhabilitasi	93	Ruang	-	1	28	32	32	Kec. Naibenu, Kec. Bikomi Utara, Kec. Tasifeto Barat, Kec. Miomaffo Barat, Kec. Amfoang Timur, Kec. Lamaknen Selatan, Kec. Lamaknen, Kec. Raihat, Kec. Lasiolat, Kec. Tasifeto Timur, Kec. Pantar Tengah, Kec. Teluk Mutiara, Kec. Alor Timur, Kec. Mataru, Kec. Pureman, Kec. Alor Barat Daya, Kec. Alor Selatan, Kec. Nanaet Dubesi	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 257 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
44	Pembangunan/rehabilitasi ruang laboratorium SMP	Jumlah ruang laboratorium yang terbangun/direhabilitasi	71	Ruang	-	-	22	23	26	Kec. Amfoang Timur, Kec. Nanaet Dubesi, Kec. Naibenu, Kec. Miomaffo Barat, Kec. Tasifeto Barat, Kec. Lasiolat, Kec. Alor Timur, Kec. Alor Selatan, Kec. Mataru, Kec. Alor Barat Daya, Kec. Pureman, Kec. Pantar Tengah, Kec. Raihat, Kec. Tasifeto Timur, Kec. Teluk Mutiara, Kec. Lamaknen Selatan, Kec. Lamaknen	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
45	Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas SMA/SMK	Jumlah ruang kelas yang terbangun/direhabilitasi	58	Ruang	-	-	18	20	20	Kec. Lamaknen, Kec. Alor Selatan, Kec. Alor Barat Daya, Kec. Pureman, Kec. Mataru, Kec. Alor Timur, Kec. Teluk	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 258 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
										Mutiara, Kec. Pantar Tengah, Kec. Lasiolat, Kec. Naibenu, Kec. Tasifeto Barat, Kec. Bikomi Utara, Kec. Miomaffo Barat	
46	Pembangunan/rehabilitasi perpustakaan SMA/SMK	Jumlah ruang perpustakaan yang terbangun/direhabilitasi	45	Ruang	-	-	11	20	14	Kec. Lamaknen, Kec. Miomaffo Barat, Kec. Naibenu, Kec. Lasiolat, Kec. Teluk Mutiara, Kec. Alor Timur, Kec. Mataru, Kec. Pureman, Kec. Alor Selatan, Kec. Alor Barat Daya, Kec. Pantar Tengah, Kec. Tasifeto Timur, Kec. Raihat, Kec. Lamaknen Selatan, Kec. Tasifeto Barat,	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 259 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
										Kec. Bikomi Utara, Kec. Amfoang Timur	
47	Pembangunan/rehabilitasi laboratorium SMA/SMK	Jumlah ruang laboratorium yang terbangun/ direhabilitasi	66	Ruang	-	2	17	24	23	Kec. Bikomi Utara, Kec. Alor Selatan, Kec. Alor Barat Daya, Kec. Pureman, Kec. Mataru, Kec. Alor Timur, Kec. Teluk Mutiara, Kec. Pantar Tengah, Kec. Tasifeto Timur, Kec. Lasiolat, Raihat, Kec. Lamaknen, Kec. Lamaknen Selatan, Kec. Tasifeto Barat, Kec. Naibenu, Kec. Miomaffo Barat, Kec. Amfoang Timur	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 260 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
IX	SULAWESI TENGAH										
KP 1	PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA										
1	Penyusunan Materi Teknis Peninjauan Kembali Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara	Jumlah Materi Teknis Kawasan Strategis Nasional	1	Paket	-	-	-	1	-	Prov. Sulawesi Tengah	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
KP 2	PENGEMBANGAN POTENSI KAWASAN PERBATASAN NEGARA										
1	Bimtek Desain dan Finishing Meubel Rotan	Jumlah Bimtek yang terlaksana	20	IKM	-	20	-	-	-	Kab. Toli-toli	Kementerian Perindustrian
2	Program penyelenggaraan jalan industri pengolahan ikan	Jumlah industri pengolahan ikan yang terbangun	3	Unit	-	-	3	-	-	Kec. Toli-toli Utara, Kec. Dako Pamean, Kec. Dampal Utara	Kementerian Perindustrian



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 261 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
3	Program penyelenggaraan industri pengolahan minyak atsiri	Jumlah industri pengolahan minyak atsiri yang terbangun	5	Unit	-	-	5	-	-	Kec. Toli-toli Utara, Kec. Dako Pamean, Kec. Dampal Utara	Kementerian Perindustrian
KP 3	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS										
1	Penyelenggaraan subsidi angkutan laut perintis (trayek) di Pelabuhan Toli-Toli (Pelabuhan Singgah)	Penyelenggaraan subsidi angkutan laut perintis (trayek) yang terselenggara	5	Trayek	1	1	1	1	1	Kec. Toli-Toli Utara	Kementerian Perhubungan
2	Penyediaan titik lokasi dan pembangunan BTS	Jumlah titik lokasi penyediaan BTS khususnya di kelautan dan daerah pesisir	7	Lokasi	-	7	-	-	-	Kec. Toli-Toli Utara, Kec. Dampal Utara	Kementerian Komunikasi dan Informatika
3	Peningkatan jalan desa strategis ruas jalan Sp. Galumpang-GIO KP 1	Ditingkatkannya panjang jalan strategis desa di lokasi prioritas perbatasan daerah tertinggal	2	Km	-	2	-	-	-	Kec. Dako Pamean	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 262 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
4	Pengadaan sarana transportasi darat	Tersedianya sarana transportasi darat	1	Unit	-	1	-	-	-	Kec. Dampal Utara	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
5	Pengadaan Sarana transportasi perairan dibawah 20 GT dan/atau maksimal kapasitas 25 orang	Tersedianya sarana transportasi perairan	2	Unit	-	2	-	-	-	Kec. Dampal Utara	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
KP 4	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL DASAR										
1	Rehabilitasi bangunan kantor desa	Jumlah kantor desa yang direhabilitasi	4	Unit	-	1	1	1	1	Prov. Sulawesi Tengah	Kementerian Dalam Negeri
2	Pelayanan administrasi kependudukan di daerah	Pelayanan administrasi kependudukan di daerah (KTP el, KIA, Akta Kelahiran)	5	Paket	1	1	1	1	1	Kab. Toli-Toli	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 263 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
4	Bantuan Sosial Pemerintah	Persentase keluarga penerima manfaat yang mendapatkan bantuan sosial pemerintah	100	%	100	100	100	100	100	Kab. Toli-Toli	Kementerian Sosial
3	Pembangunan Balai pertemuan umum kecamatan	Jumlah balai pertemuan umum kecamatan yang dibangun	2	Unit	-	-	-	2	-	Kec. Toli-Toli Utara, Kec. Dampal Utara	Kementerian Dalam Negeri
5	Rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan dasar	Jumlah puskesmas yang dibangun/direvitalisasi	3	Unit	-	-	3	-	-	Kec. Toli-Toli Utara, Kec. Dako Pamean	Kementerian Kesehatan
6	Pengadaan sarana pendukung puskesmas (alat kesehatan, peralatan dan kendaraan operasional)	Jumlah sarana pendukung puskesmas yang tersedia	5	Unit	-	-	5	-	-	Kec. Toli-toli Utara	Kementerian Kesehatan
7	Pengadaan sarana pendukung puskesmas	Jumlah sarana pendukung puskesmas yang ditingkatkan (alat kesehatan, peralatan dan kendaraan operasional)	1	Paket	-	-	1	-	-	Kec. Dako Pamean	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 264 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
8	Pembinaan upaya promotif dan preventif kesehatan	Jumlah kegiatan pembinaan upaya promotif dan preventif kesehatan yang terlaksana	40	Kegiatan	-	-	40	-	-	Kec. Dako Pamean	Kementerian Kesehatan
9	Pembangunan jaringan distribusi listrik	Jumlah jaringan distribusi listrik yang terbangun	1	Paket	1	-	-	-	-	Kec. Dako Pamean	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/PLN
10	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK)	Jumlah tangki septik skala komunal (5-10 KK) yang terbangun	7	Unit	-	7	-	-	-	Kec. Dampal Utara	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
X	PROVINSI GORONTALO										
KP 1	PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA										



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 265 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
1	Penyusunan Materi Teknis Peninjauan Kembali Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara	Jumlah Materi Teknis Kawasan Strategis Nasional	1	Paket	-	-	-	1	-	Prov. Gorontalo	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
2	Penyusunan Materi Teknis Kawasan Perbatasan Negara Ilangata	Jumlah Materi Teknis Kawasan Perbatasan Negara	1	Paket	-	-	1	-	-	Kec. Anggrek	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
KP 2	PENGEMBANGAN POTENSI KAWASAN PERBATASAN NEGARA										
1	Bimtek pengirisan dan sulaman karawo	Jumlah Bimtek yang terlaksana	20	IKM	-	20	-	-	-	Kab. Gorontalo Utara	Kementerian Perindustrian
2	Pengadaan kapal pengawas perikanan	Jumlah kapal pengawas perikanan yang tersedia	5	Unit	-	-	1	2	2	Kec. Anggrek	Kementerian Kelautan dan Perikanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 266 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
KP 3	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS										
1	Pengadaan sarana transportasi darat	Tersedianya sarana transportasi darat	1	Unit	-	1	-	-	-	Kec. Anggrek	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
2	Penyediaan titik lokasi dan pembangunan BTS	Jumlah titik lokasi penyediaan BTS khususnya di kelautan dan daerah pesisir	1	Lokasi	-	1	-	-	-	Kec. Anggrek	Kementerian Komunikasi dan Informatika
KP 4	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL DASAR										
1	Rehabilitasi bangunan kantor desa	Jumlah kantor desa yang direhabilitasi	4	Unit	-	1	1	1	1	Prov. Gorontalo	Kementerian Dalam Negeri
2	Pelayanan administrasi kependudukan di daerah	Pelayanan administrasi kependudukan di daerah (KTP el, KIA, Akta Kelahiran)	5	Paket	1	1	1	1	1	Kab. Gorontalo Utara	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 267 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
3	Bantuan Sosial Pemerintah	Persentase keluarga penerima manfaat yang mendapatkan bantuan sosial pemerintah	100	%	100	100	100	100	100	Kab. Gorontalo Utara	Kementerian Sosial
4	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Kawasan Perbatasan	Pelayanan kesehatan dasar di Kawasan Perbatasan yang ditingkatkan	2	Paket	-	2	-	-	-	Kec. Anggrek	Kementerian Kesehatan
5	Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK)- tematik penanggulangan kemiskinan	Jumlah tangki septik yang terbangun	7	Unit	-	7	-	-	-	Kec. Anggrek	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
XI	PROVINSI SULAWESI UTARA										
KP 1	PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA										



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 268 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
1	Penyusunan Materi Teknis Peninjauan Kembali Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara	Jumlah Materi Teknis Kawasan Strategis Nasional	1	Paket	-	-	-	1	-	Prov. Sulawesi Utara	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
2	Fasilitasi Legislasi Rancangan Peraturan Presiden Kawasan Perbatasan Negara Tahuna, Melonguane	Jumlah Rancangan Peraturan Presiden Kawasan Perbatasan Negara	2	Paket	-	-	-	1	1	PKSN Tahuna, PKSN Melonguane	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
3	Penyusunan Materi Teknis Kawasan Perbatasan Negara Karatung	Jumlah Materi Teknis Kawasan Perbatasan Negara	1	Paket	-	-	-	-	1	Kec. Nanusa	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
KP 2	PENGEMBANGAN POTENSI KAWASAN PERBATASAN NEGARA										



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 269 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
1	Pengembangan BUMDes untuk mendukung produk unggulan Desa	Jumlah Desa yang mengembangkan BUMDes	10	BUMDes	-	-	10	-	-	Kab. Kep. Talaud, Kab. Kep. Sangihe	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
2	Bimtek Pengolahan Ikan Bagi Wirausaha Baru	Jumlah Bimtek yang terlaksana	25	IKM	-	25	-	-	-	Kab. Kep. Talaud	Kementerian Perindustrian
3	Revitalisasi Sentra IKM	Jumlah Sentra IKM yang direvitalisasi	1	Sentra IKM	-	1	-	-	-	Kab. Kep. Talaud	Kementerian Perindustrian
4	Bimtek Kerajinan Berbahan Baku Serat Abaka	Jumlah Bimtek yang terlaksana	25	IKM	-	25	-	-	-	Kab. Kep. Sangihe	Kementerian Perindustrian
5	Bimtek Kerajinan Berbahan Baku Rotan	Jumlah Bimtek yang terlaksana	25	IKM	-	25	-	-	-	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Kementerian Perindustrian
6	Bimtek Kerajinan Berbahan Baku Turunan Kelapa	Jumlah Bimtek yang terlaksana	25	IKM	-	25	-	-	-	Kab. Siau Tagulandang Biaro	Kementerian Perindustrian
7	Bimtek Pengolahan Pala Bagi Wirausaha Baru	Jumlah Bimtek yang terlaksana	20	IKM	-	20	-	-	-	Kab. Minahasa Utara	Kementerian Perindustrian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 270 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
8	Sosialisasi pemanfaatan fasilitas kepabeanan dan cukai dalam rangka pengembangan ekonomi daerah perbatasan	Terselenggaranya kegiatan sosialisasi pemanfaatan fasilitas kepabeanan dan cukai	1	Kegiatan	-	-	-	-	1	PKSN Melonguane	Kementerian Keuangan
9	Pengembangan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes	4	Desa	-	-	-	2	2	PKSN Melonguane, PKSN Tahuna	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
10	Pengembangan SKPT Talaud	Jumlah SKPT yang dikembangkan	1	Skala Kemandirian	-	-	-	-	1	PKSN Melonguane	Kementerian Kelautan dan Perikanan
11	Pembangunan Desa Digital (P3PD)	Terbangunnya Desa Digital	5	Desa	-	-	-	2	3	PKSN Melonguane, PKSN Tahuna	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
12	Pengadaan kapal penangkap ikan 3-4 GT	Jumlah kapal penangkap ikan 3-4 GT yang tersedia	27	Unit	-	-	-	27	-	Kec. Siau Barat	Kementerian Kelautan dan Perikanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 271 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
13	Pembuatan Pengaman Pantai (<i>Boulder</i>)	Jumlah pengaman pantai (<i>Boulder</i>) yang terbangun	450	Meter	-	-	-	450	-	Kec. Siau Barat	Kementerian Kelautan dan Perikanan
14	Pengadaan <i>Cold Storage</i>	Jumlah <i>Cold Storage</i> yang tersedia	1	Unit	-	-	-	-	1	Kec. Pinogaluman	Kementerian Kelautan dan Perikanan
15	Pengadaan alat pengering ikan	Jumlah alat pengering ikan yang tersedia	1	Unit	-	-	-	-	1	Kec. Pinogaluman	Kementerian Kelautan dan Perikanan
16	Pembangunan tambatan perahu	Jumlah tambatan perahu yang terbangun	6	Unit	-	-	-	-	6	Kec. Pinogaluman	Kementerian Kelautan dan Perikanan
17	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Jaringan kerja sama promosi pariwisata yang dikembangkan	1	Kegiatan	-	1	-	-	-	Kec. Nusa Tabukan	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 272 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
KP 3	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS										
1	Pengembangan pelabuhan laut Tahuna	Pengembangan/ Pembangunan pelabuhan laut	1	Unit	1		-	-	-	PKSN Tahuna	Kementerian Perhubungan
2	Pengembangan Bandara Melonguane	Jumlah bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan	1	Paket	1		-	-	-	PKSN Melonguane	Kementerian Perhubungan
3	Pengadaan sarana transportasi perairan dibawah 20 GT dan/atau maksimal kapasitas 25 penumpang	Jumlah sarana transportasi perairan yang tersedia	4	Unit	-	4	-	-	-	Kec. Kabaruan, Kec. Kendahe, Kec. Melonguane, Kec. Nanusa	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
4	Pembangunan Jalan Desa strategis pada ruas jalan Kampung Utaurano	Panjang ruas jalan desa strategis yang terbangun	1,2	Km	-	1,2	-	-	-	Kec. Tabukan Utara	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 273 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
5	Pembangunan Jalan Desa strategis pada ruas jalan Mantehage Buhias	Panjang ruas jalan desa strategis yang terbangun	2	Km	-	2	-	-	-	Kec. Wori	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
6	Pengadaan sarana transportasi darat	Tersedianya sarana transportasi darat	4	Unit	-	4	-	-	-	Kec. Wori	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
7	Penyediaan Titik Lokasi dan Pembangunan BTS	Jumlah titik lokasi penyediaan BTS khususnya di kelautan dan daerah pesisir	9	Lokasi	-	9	-	-	-	Kec. Nanusa, Kec. Kep. Marore	Kementerian Komunikasi dan Informatika
KP 4	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL DASAR										
1	Rehabilitasi bangunan kantor desa	Jumlah kantor desa yang direhabilitasi	10	Unit	-	2	2	3	3	Prov. Sulawesi Utara	Kementerian Dalam Negeri
2	Pelayanan administrasi kependudukan di daerah	Pelayanan administrasi kependudukan di daerah	25	Paket	5	5	5	5	5	Kab. Talaud, Kab. Kep. Sangihe, Kab. Kep. Siau	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 274 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
		(KTP el, KIA, Akta Kelahiran)								Tagulandang Biaro, Kab. Minahasa Utara, Kab. Bolaang Mongondow Utara	
3	Bantuan Sosial Pemerintah	Persentase keluarga penerima manfaat yang mendapatkan bantuan sosial pemerintah	100	%	100	100	100	100	100	Kab. Kep. Talaud, Kab. Kep. Sangihe, Kab. Kep. Siao Tangulandang Biaro, Kab. Minahasa Utara, Kab. Bolaang Mongondow Utara,	Kementerian Sosial
4	Pembangunan Balai pertemuan umum kecamatan	Jumlah Balai pertemuan umum kecamatan yang dibangun	5	Unit	-	-	2	1	2	PKSN Tahuna (Kec. Tahuna Timur), Kec. Kep. Marore, Kec. Kendahe, Kec. Nusa Tabukan, Kec. Wori	Kementerian Dalam Negeri
5	Peningkatan titik penyalur program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	20	Penyalur	-	4	4	8	4	PKSN Melonguane, PKSN Tahuna	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 275 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
6	Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk nelayan	Jumlah Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk nelayan yang difasilitasi	100	Unit	-	-	-	100	-	PKSN Melonguane, PKSN Tahuna	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7	Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan, dan rawan bencana	Jumlah pasar rakyat yang direvitalisasi	2	Unit	-	-	-	-	2	PKSN Melonguane, PKSN Tahuna	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
8	Pembangunan jaringan distribusi listrik	Jumlah jaringan distribusi listrik yang tersedia	17	Paket	5	3	3	1	5	PKSN Melonguane, Kec. Kabaruan, Kec. Tabukan Utara, Kec. Kendahe, Kec. Wori, Kec. Pinogaluman	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
9	Pembangunan Kantor Desa/Kelurahan	Jumlah Kantor Desa/Kelurahan yang dibangun	1	Unit	-	-	-	-	1	Kec. Siau Barat	Kementerian Dalam Negeri
10	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Kawasan Perbatasan	Jumlah layanan kesehatan yang ditingkatkan	16	Paket	-	16	-	-	-	Kec. Damau, Kec. Tahuna	Kementerian Kesehatan
11	Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas	Jumlah Rumah Dinas Puskesmas yang terbangun	1	Unit	-	1	-	-	-	Kec. Damau	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 276 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
12	Pembangunan Rumah Paramedis	Jumlah rumah paramedis yang terbangun	1	Unit	-	-	1	-	-	Kec. Tabukan Utara	Kementerian Kesehatan
13	Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas	Jumlah rumah dinas puskesmas yang terbangun	1	Unit	-	1	-	-	-	Kec. Nusa Tabukan	Kementerian Kesehatan
14	Pembangunan Rumah Sakit Pratama di Makalehi	Jumlah rumah sakit pratama di makalehi terbangun	1	Unit	-	-	-	1	-	Kec. Siau Barat	Kementerian Kesehatan
15	Penyediaan alat kesehatan RS Pratama	Jumlah alat kesehatan RS pratama yang tersedia	1	Paket	-	-	-	1	-	Kec. Siau Barat	Kementerian Kesehatan
16	Pengembangan Puskesmas Desa Buko	Jumlah Puskesmas Desa Buko yang dikembangkan	1	Unit	-	-	-	-	1	Kec. Pinogaluman	Kementerian Kesehatan
17	Pembangunan rumah dinas dokter dan perawat	Jumlah rumah dinas dokter dan perawat yang terbangun	8	Unit	-	-	-	-	8	Kec. Pinogaluman	Kementerian Kesehatan
18	Pengadaan mobil ambulans	Jumlah mobil ambulans yang tersedia	2	Unit	-	-	-	-	2	Kec. Pinogaluman	Kementerian Kesehatan
19	Pengadaan alat kesehatan	Jumlah alat kesehatan yang tersedia	2	Paket	-	-	-	-	2	Kec. Pinogaluman	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 277 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
20	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya	Jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang terbangun	1	Unit	-	-	1	-	-	Kec. Kendahe	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/PLN
XII	PROVINSI MALUKU										
KP 1	PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA										
1	Penyusunan Materi Teknis Peninjauan Kembali Kawasan Perbatasan Negara di Kepulauan Maluku	Jumlah Materi Teknis Kawasan Strategis Nasional	1	Paket	-	-	1	-	-	Prov. Maluku	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
2	Penyusunan Materi Teknis Kawasan Perbatasan Negara Tapa, Wonreli, Tiakur, Benjina, Batu Goyang	Jumlah Materi Kawasan Perbatasan	5	Paket	-	-	1	4	-	Kec. Pulau-Pulau Babar, Kec. Pulau-Pulau Terselatan, Kec. Pulau Lakor, Kec. Aru Tengah, Kec. Aru Selatan timur	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 278 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
3	Materi Teknis Kawasan Perbatasan Negara Tapa, Wonreli, Tiakur	Jumlah Materi Kawasan Perbatasan	3	Paket	-	-	-	3	-	Kec. Pulau-Pulau Babar, Kec. Pulau-Pulau Terselatan, Kec. Pulau Lakor	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
KP 2	PENGEMBANGAN POTENSI KAWASAN PERBATASAN NEGARA										
1	Pendidikan dan pelatihan pengolahan kelapa menjadi VCO kepada IKM dan pengadaan peralatan usaha	Jumlah SDM yang mampu memproduksi VCO yang tersedia	1	Kegiatan	-	-	1	-	-	Prov. Maluku	Kementerian Perindustrian
2	Pelatihan pengolahan tempurung kelapa menjadi kerajinan, minyak asap cair, pupuk organik cair kepada IKM dan pengadaan peralatan usaha	Jumlah terciptanya SDM dalam IKM yang mampu mengolah tempurung kelapa menjadi produk yang lebih bernilai yang tersedia	1	Kegiatan	-	-	-	1	-	Prov. Maluku	Kementerian Perindustrian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 279 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
3	Pendidikan dan pelatihan pengolahan sabut kelapa menjadi aneka kerajinan dan sabut kepala menjadi pupuk organik cair dan pengadaan peralatan usaha	Jumlah terciptanya SDM yang mampu mengolah sabut kelapa menjadi produk yang lebih bernilai	1	Kegiatan	-	-	-	-	1	Prov. Maluku	Kementerian Perindustrian
4	Bantuan peralatan industri pertukangan bagi IKM	Jumlah bantuan peralatan industri yang terdistribusi	1	Paket	-	-	-	1	-	Prov. Maluku	Kementerian Perindustrian
5	Pembangunan rumah produksi pengrajin minyak kayu putih	Jumlah rumah pengrajin yang terbangun	1	Paket	-	-	-	1	-	Prov. Maluku	Kementerian Perindustrian
6	Pembangunan rumah produksi pengrajin pandai besi	Jumlah rumah pengrajin yang terbangun	1	Paket	-	-	-	1	-	Prov. Maluku	Kementerian Perindustrian
7	Pembangunan gedung industri kerajinan tangan	Jumlah gedung industri kerajinan tangan	1	Paket	-	-	1	-	-	Prov. Maluku	Kementerian Perindustrian
8	Pembangunan sarana-prasarana pendukung pengoperasian pabrik pengelolaan rumput laut	Jumlah sarana-prasarana pendukung pengoperasian pabrik pengelolaan rumput laut	1	Paket	-	-	1	-	-	Prov. Maluku	Kementerian Perindustrian



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 280 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
9	Bimtek pemanfaatan pangan lokal menjadi aneka makanan dan minuman	Jumlah Bimtek yang terlaksana	50	IKM	-	50	-	-	-	Kab. Kep. Tanimbar, Kab. Maluku Barat Daya	Kementerian Perindustrian
10	SKPT Saumlaki yang mandiri	Skala kemandirian SKPT	5	Skala Kemandirian	-	-	-	-	5	PKSN Saumlaki	Kementerian Kelautan dan Perikanan
11	Pelatihan teknis <i>vocational</i> wilayah perbatasan bagi pelaku UMKM (pencelupan dan pewarnaan)	Jumlah pelatihan teknis <i>vocational</i> wilayah perbatasan bagi pelaku UMKM	180	Orang	-	-	180	-	-	PKSN Saumlaki (Kec. Tanimbar Utara), Kec. Kormomolin, Kec. Nirunmas	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
12	Pelatihan kewirausahaan	Jumlah pelatihan kewirausahaan	240	Orang	-	-	240	-	-	PKSN Saumlaki (Kec. Tanimbar Utara), Kec. Yaru, Kec. Kormomolin, Kec. Nirunmas	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
13	Pembangunan kapal penangkap ikan 5-10 GT	Tersedianya kapal penangkap ikan	1	Paket	-	1	-	-	-	Kec. Wetar	Kementerian Kelautan dan Perikanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 281 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
14	Pembangunan sarana-prasarana budi daya rumput laut	Tersedianya sarana-prasarana budi daya rumput laut	1	Lokasi	-	1	-	-	-	Kec. Wetar	Kementerian Kelautan dan Perikanan
15	Pengadaan sarana penangkapan ikan dan alat tangkap	Tersedianya sarana penangkapan ikan dan alat tangkap	1	Paket	-	1	-	-	-	Kec. Wertamrian	Kementerian Kelautan dan Perikanan
16	Pengadaan Kapal <i>Gill Net</i> (1,5 GT)	Jumlah kapal penangkap Ikan 1,5 GT tersedia	20	Unit	-	5	15	-	-	Kec. Kei Besar, Kec. Kei Besar Selatan Barat	Kementerian Kelautan dan Perikanan
17	Pembangunan <i>Cold Storage</i> 50 Ton	Jumlah <i>Cold Storage</i> 50 Ton yang terbangun	10	Unit	-	-	-	5	5	Kec. Kei Besar, Kec. Kei Besar Selatan Barat	Kementerian Kelautan dan Perikanan
18	Pembangunan pabrik es 10 Ton	Jumlah pabrik es 10 Ton yang terbangun	5	Unit	-	-	5	-	-	Kec. Kei Besar	Kementerian Kelautan dan Perikanan
19	Pembangunan kapal penangkapan ikan 5 GT (<i>Gill Net</i>)	Jumlah kapal penangkapan ikan 5 GT yang tersedia	2	Unit	-	-	2	-	-	Kec. Kei Besar Utara Timur	Kementerian Kelautan dan Perikanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 282 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
20	Pembangunan kapal purse seine 10 GT	Jumlah kapal purse seine 10 GT yang tersedia	3	Unit	-	-	-	3	-	Kec. Kei Besar Utara Timur	Kementerian Kelautan dan Perikanan
21	Pengadaan kapal penangkap ikan <3 GT	Jumlah kapal penangkap ikan <3 GT yang tersedia	1	Unit	1	-	-	-	-	Kec. Kei Besar Utara Timur	Kementerian Kelautan dan Perikanan
22	Pembangunan Cold Storage (30 Ton)	Jumlah Cold Storage (30 ton) yang terbangun	3	Unit	-	-	-	3	-	Kec. Kei Besar Utara Timur	Kementerian Kelautan dan Perikanan
23	Pembangunan Pabrik Es (5 Ton)	Jumlah pabrik es (5 ton) yang terbangun	3	Unit	-	-	3	-	-	Kec. Kei Besar Utara Timur	Kementerian Kelautan dan Perikanan
24	Pembangunan Air Blast Freezer/ABF (Pembekuan Ikan) (3 Ton)	Jumlah ABF (pembekuan ikan) (3 ton) yang terbangun	3	Unit	-	-	-	-	3	Kec. Kei Besar Utara Timur	Kementerian Kelautan dan Perikanan
25	Pengadaan keramba jaring apung	Jumlah keramba jaring apung <i>aquatec</i> yang tersedia	20	Unit	-	-	8	12	-	Kec. Kei Besar Selatan Barat	Kementerian Kelautan dan Perikanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 283 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
26	Pembangunan kapal ikan <i>pole and line</i> (20 GT)	Jumlah kapal <i>pole and line</i> 20 GT yang terbangun	1	Unit	-	-	1	-	-	Kec. Kei Besar Selatan Barat	Kementerian Kelautan dan Perikanan
27	Pembangunan kapal ikan <i>pole and line</i> (30 GT)	Jumlah kapal <i>pole and line</i> 30 GT yang terbangun	1	Unit	-	-	-	1	-	Kec. Kei Besar Selatan Barat	Kementerian Kelautan dan Perikanan
28	Pembangunan pabrik es 10 Ton	Jumlah pabrik es 10 Ton yang terbangun	5	Unit	-	-	-	5	-	Kec. Kei Besar Selatan Barat	Kementerian Kelautan dan Perikanan
29	Pembangunan Gudang Non-SRG	Jumlah Gudang Non-SRG yang terbangun	1	Unit	-	-	-	1	-	Kec. Mdonia Hiera	Kementerian Perdagangan
30	Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat	Jumlah pasar rakyat yang dibangun/direvitalisasi	6	Unit	-	-	2	4	-	Kec. Mdonia Hiera, Kec. Wetar, Kec. Wetar Timur, Kec. Wetar Barat, Kec. Kormomolin, Kec. Yaru	Kementerian Perdagangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 284 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
31	Pembangunan Pasar	Jumlah pasar yang terbangun	1	Paket	-	1	-	-	-	Kec. Pulau Masela	Kementerian Perdagangan
32	Pembangunan Gudang SRG	Jumlah Gudang SRG yang terbangun	1	Unit	-	1	-	-	-	Kec. Selaru	Kementerian Perdagangan
33	Pembangunan/revitalisasi gedung produksi olahan enbal/ubi kayu di dalam sentra IKM Ohoi/Desa Weduar	Jumlah gedung produksi olahan enbal/ubi kayu yang terbangun/direvitalisasi	1	Paket	-	1	-	-	-	Kec. Kei Besar Selatan	Kementerian Perindustrian
34	Pembangunan sentra produksi terpadu di Desa Elat	Jumlah terbangunnya sentra produksi kelapa terpadu	1	Paket	-	1	-	-	-	Kec. Kei Besar	Kementerian Perindustrian
35	Pembangunan/revitalisasi gedung produksi olahan sagu di dalam sentra IKM Ohoi/Desa Wulurat, Haar	Jumlah gedung produksi olahan sagu yang terbangun/direvitalisasi	2	Paket	-	2	-	-	-	Kec. Kei Besar, Kec. Kei Besar Utara Timur	Kementerian Perindustrian
36	Pembangunan/revitalisasi gedung produksi olahan keripik keladi dan singkong di dalam sentra IKM Ohoi/Desa Waur	Jumlah gedung produksi olahan pertanian khusus umbi-umbian keladi yang terbangun	1	Paket	-	1	-	-	-	Kec. Kei Besar	Kementerian Perindustrian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 285 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
37	Bantuan Peralatan olahan minyak atsiri (minyak lawang) di Ohoi/Desa Renfaan	Jumlah peralatan bagi IKM minyak atsiri yang tersedia	1	Paket	-	1	-	-	-	Kec. Kei Besar Utara Timur	Kementerian Perindustrian
38	Pembangunan/revitalisasi gedung produksi kerajinan logam/mas adat di dalam sentra IKM Ohoi/Desa Banda Elly	Jumlah gedung produksi kerajinan logam yang terbangun/direvitalisasi	1	Paket	-	1	-	-	-	Kec. Kei Besar Utara Timur	Kementerian Perindustrian
39	Pembangunan/revitalisasi gedung produksi olahan ikan asin dan abon ikan di dalam sentra IKM di Ohoi/Desa Ngan	Jumlah gedung produksi olahan ikan asin dan abon ikan yang terbangun	1	Paket	-	1	-	-	-	Kec. Kei Besar Selatan Barat	Kementerian Perindustrian
40	Pembangunan wisata gazebo pada objek	Jumlah sarana dan prasarana terbangun	97	Unit	-	15	30	34	18	Kec. Kei Besar Selatan, Kec. Kei Besar	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 286 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
41	Pembangunan jalan setapak dalam objek wisata	Jumlah sarana dan prasarana terbangun	1.000	M ²	-	100	200	500	200	Kec. Kei Besar Selatan	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
42	Pembangunan toilet dan ruang ganti pada objek wisata	Jumlah sarana dan prasarana terbangun	8	Unit	-	2	2	3	1	Kec. Kei Besar Selatan, Kec. Kei Besar	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
43	Pembangunan pondok wisata/bungalow	Jumlah sarana dan prasarana terbangun	10	Unit	-	2	2	3	3	Kec. Kei Besar Selatan, Kec. Kei Besar	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 287 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
44	Pengadaan perlengkapan pondok wisata/bungalow	Jumlah perlengkapan pondok wisata tersedia	10	Set	-	2	2	4	2	Kec. Kei Besar Selatan, Kec. Kei Besar	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
45	Pembangunan <i>diving center</i>	Jumlah sarana dan prasarana terbangun	3	Unit	-	1	2	-	-	Kec. Kei Besar Selatan, Kec. Kei Besar	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
46	Pengadaan peralatan <i>diving center</i>	Jumlah peralatan <i>diving center</i> tersedia	40	Set	-	6	9	16	9	Kec. Kei Besar Selatan, Kec. Kei Besar	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 288 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
47	Pengadaan <i>glass bottom boat</i>	Jumlah fasilitas pendukung yang tersedia	2	Unit	-	2	-	-	-	Kec. Kei Besar Selatan, Kec. Kei Besar	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
48	Pembangunan jalan setapak dalam objek wisata	Jumlah sarana dan prasarana terbangun	3.000	M ²	-	500	700	1.000	800	Kec. Kei Besar	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
49	Pembangunan panggung kesenian	Jumlah sarana dan prasarana terbangun	1	Unit	-	1	-	-	-	Kec. Kei Besar	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 289 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
50	Fasilitas dana bergulir bagi Koperasi	Jumlah fasilitas dana bergulir bagi koperasi	5	Koperasi	-	-	5	-	-	Kec. Kormomolin	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
51	Pelatihan akuntansi dan laporan keuangan	Jumlah pelatihan perkoperasian	120	Orang	-	-	120	-	-	Kec. Kormomolin, Kec. Nirunmas	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
52	Bantuan permodalan bagi wirausaha pemula	Jumlah bantuan permodalan bagi wirausaha pemula	30	WP	-	-	30	-	-	Kec. Kormomolin, Kec. Kei Besar Utara Timur, Kec. Kei Besar Selatan Barat	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
53	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Jumlah pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja yang terlaksana	1	Kegiatan	-	1	-	-	-	Kec. Selaru	Kementerian Ketenagakerjaan
54	Pengadaan alat pengolahan pascapanen produk unggulan daerah perbatasan	Jumlah pengadaan alat pengolahan pascapanen produk unggulan daerah perbatasan	1	Paket	1	-	-	-	-	Kec. Selaru	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 290 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
KP 3	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS										
1	Pembangunan Jalan Trans Pulau Kei Besar (status jalan provinsi) Ruas Elat Simpang Ngurdu-Fakoholat (panjang total 65,9 Km)	Panjang jalan yang dibangun	4	Km	-	4	-	-	-	Kab. Maluku Tenggara	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	Peningkatan jalan strategis desa di daerah perbatasan	Ditingkatkannya panjang jalan strategis desa di lokasi prioritas perbatasan daerah tertinggal	8	Km	-	-	4	4	-	Kab. Maluku Barat Daya, Kab. Kep. Aru	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
3	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Elat	Jumlah pelabuhan penyeberangan yang terbangun	1	Unit	1	1	-	-	-	Kab. Maluku Tenggara	Kementerian Perhubungan
4	Pengembangan pelabuhan laut Saumlaki	Jumlah pelabuhan laut yang dikembangkan	1	Unit	-	-	-	-	1	PKSN Saumlaki	Kementerian Perhubungan



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 291 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
5	Pengembangan Bandara Saumlaki	Jumlah bandara yang dikembangkan	1	Paket	1	-	-	-	-	PKSN Saumlaki	Kementerian Perhubungan
6	Pengembangan Bandar Udara Mathilda Batlayeri	Jumlah bandar udara yang dikembangkan	1	Unit	-	-	-	1	-	PKSN Saumlaki (Kec. Wertamrian)	Kementerian Perhubungan
7	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sermata	Jumlah pelabuhan penyeberangan yang terbangun	1	Unit	-	1			-	Kec. Mndona Hiera	Kementerian Perhubungan
8	Pengembangan Bandar Udara Moa	Jumlah bandar udara yang dikembangkan	1	Unit	-	1	-	-	-	Kec. Moa Lakor	Kementerian Perhubungan
9	Pengembangan Pelabuhan Moa	Jumlah pelabuhan yang dikembangkan	1	Unit	1		-	-	-	Kec. Moa Lakor	Kementerian Perhubungan
10	Peningkatan/Pemantapan Bandar Udara Dobo	Jumlah bandar udara yang ditingkatkan	1	Unit	1	-	-	-	-	Kec. Pulau-Pulau Aru	Kementerian Perhubungan
11	Pengadaan sarana transportasi darat	Tersedianya sarana transportasi darat	3	Unit	-	3	-	-	-	Kec. Aru Tengah Selatan, Kec. Wertamrian	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 292 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
12	Penyediaan Titik Lokasi dan Pembangunan BTS	Jumlah titik lokasi penyediaan BTS khususnya di kelautan dan daerah pesisir	92	Lokasi	-	92	-	-	-	Kec. Pulau-Pulau Babar, Kec. Mndona Hiera, Kec. Pulau-Pulau Terselatan, Kec. Wetar, Kec. Wetar Utara, Kec. Wetar Timur, Kec. Wetar Barat, Kec. Pulau Leti, Kec. Pulau Masela, Kec. Pulau Lakor, Kec. Moa Lakor, Kec. Kisar Utara, Kec. Aru Tengah Timur, Kec. Aru Tengah Selatan, Kec. Aru Selatan Timur, Kec. Selaru, Kec. Wertamrian, Kec. Kormomolin, Kec. Nirunmas, Kec. Yaru	Kementerian Komunikasi dan Informatika
KP 4	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL DASAR										



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 293 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
1	Rehabilitasi bangunan kantor desa	Jumlah kantor desa yang direhabilitasi	4	Unit	-	-	1	1	2	Prov. Maluku	Kementerian Dalam Negeri
2	Pelayanan administrasi kependudukan di daerah	Pelayanan administrasi kependudukan di daerah (KTP el, KIA, Akta Kelahiran)	20	Paket	4	4	4	4	4	Kab. Maluku Barat Daya, Kab. Kep. Aru, Kab. Kep. Tanimbar, Kab. Maluku Tenggara	Kementerian Dalam Negeri
3	Bantuan Sosial Pemerintah	Persentase keluarga penerima manfaat yang mendapatkan bantuan sosial pemerintah	100	%	100	100	100	100	100	Kab. Maluku Barat Daya, Kab. Kep. Aru, Kab. Kep. Tanimbar, Kab. Maluku Tenggara	Kementerian Sosial
4	Sarana dan Prasarana air bersih yang dibangun di daerah perbatasan	Meningkatnya layanan air bersih dan sanitasi di daerah perbatasan	200	KK	-	-	-	200	-	Kab. Kep. Aru, Kepulauan Tanimbar (PKSN Saumlaki)	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
5	Pembangunan Balai pertemuan umum kecamatan	Jumlah Balai pertemuan umum kecamatan yang dibangun	4	Unit	-	-	2	1	1	PKSN Saumlaki (Kec. Tanimbar Selatan), Kec. Aru Selatan Timur, Kec.	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 294 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
										Wertamrian, Kec. Kei Besar	
6	Peningkatan titik penyalur program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	10	Penyalur	-	2	2	2	4	PKSN Saumlaki	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7	Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk nelayan	Jumlah Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk nelayan yang difasilitasi	50	Unit	-	-	-	-	50	PKSN Saumlaki	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8	Pembangunan gedung Puskesmas	Terbangunnya gedung puskesmas	2	Unit	-	2	-	-	-	Kec. Wetar Utara, Kec. Kei Besar Selatan	Kementerian Kesehatan
9	Pembangunan baru Rumah Sakit Pratama	Jumlah baru rumah sakit pratama yang terbangun	1	Unit	-	-	-	1	-	Kec. Wetar Barat	Kementerian Kesehatan
10	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Kawasan Perbatasan	Pelayanan kesehatan dasar di Kawasan Perbatasan yang ditingkatkan	7	Paket	-	7	-	-	-	Kec. Pulau Lakor	Kementerian Kesehatan
11	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Kawasan Perbatasan (sarana dan prasarana dan alat kesehatan)	Jumlah pelayanan kesehatan dasar yang ditingkatkan	3	Paket	-	3	-	-	-	Kec. Kisar Utara	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 295 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
12	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	Jumlah sarana dan prasarana puskesmas dan jaringan tersedia yang ditingkatkan/diperbaiki	6	Paket	-	-	-	-	6	Kec. Aru Selatan Timur, Kec. Sir-Sir	Kementerian Kesehatan
13	Pengadaan alat kesehatan Puskesmas	Jumlah alat kesehatan puskesmas yang tersedia	3	Paket	-	-	-	-	3	Kec. Sir-Sir	Kementerian Kesehatan
14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Keliling	Jumlah sarana dan prasarana puskesmas keliling	3	Paket	-	-	-	-	3	Kec. Sir-Sir	Kementerian Kesehatan
15	Pembangunan/rehabilitasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun/direhabilitasi	1	Unit	-	-	1	-	-	Kec. Wertamrian	Kementerian Kesehatan
16	Pembangunan/relokasi gedung Puskesmas Larat Kei	Jumlah Puskesmas Larat Kei yang terbangun	1	Unit	-	1	-	-	-	Kec. Kei Besar Selatan	Kementerian Kesehatan
17	Pengadaan Puskesmas Keliling Roda 4 Puskesmas Larat Kei	Jumlah puskesmas keliling roda 4 puskesmas yang tersedia	1	Unit	-	1	-	-	-	Kec. Kei Besar Selatan	Kementerian Kesehatan
18	Pembangunan Rumah Sakit Pratama di Elat dan Alat Kesehatan	Jumlah rumah sakit pratama yang terbangun	1	Unit	-	1	-	-	-	Kec. Kei Besar	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 296 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
19	Pembangunan baru Puskesmas Watsin dan Ohoiel beserta alat kesehatan	Jumlah gedung baru Puskesmas Watsin yang terbangun	2	Unit	-	2	-	-	-	Kec. Kei Besar	Kementerian Kesehatan
20	Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Pembantu Watsin, Mataholat dan Ohoiel	Jumlah rumah dinas Puskesmas Pembantu yang terbangun	3	Unit	-	3	-	-	-	Kec. Kei Besar	Kementerian Kesehatan
21	Pembangunan Baru Puskesmas Mataholat	Jumlah gedung baru Puskesmas Mataholat yang terbangun	1	Unit	-	1	-	-	-	Kec. Kei Besar	Kementerian Kesehatan
22	Pembangunan/relokasi gedung puskesmas Banda Ely	Jumlah puskesmas baru yang terbangun	1	Unit	-	1	-	-	-	Kec. Kei Besar Utara Timur	Kementerian Kesehatan
23	Puskesmas perairan Hollat	Jumlah puskesmas perairan yang terbangun	1	Unit	-	1	-	-	-	Kec. Kei Besar Utara Timur	Kementerian Kesehatan
24	Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan Puskesmas Hollat	Jumlah puskesmas keliling perairan yang tersedia	1	Unit	-	1	-	-	-	Kec. Kei Besar Utara Timur	Kementerian Kesehatan
25	Pengembangan prasarana dan sarana kegiatan kesehatan berupa fasilitas puskesmas	Jumlah prasarana dan sarana kegiatan kesehatan yang dikembangkan	1	Paket	-	1	-	-	-	Kec. Kei Besar Selatan Barat	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 297 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
	dan/atau pelayanan jasa medis Weduar Feer										
26	Pengadaan puskesmas keliling perairan Kec. Kei Besar Selatan Barat	Jumlah puskesmas keliling Perairan yang tersedia	1	Paket	-	1	-	-	-	Kec. Kei Besar Selatan Barat	Kementerian Kesehatan
27	Penyediaan Puskesmas perairan Desa Feer	Jumlah puskesmas perairan Fer yang tersedia	1	Unit	-	1	-	-	-	Kec. Kei Besar Selatan Barat	Kementerian Kesehatan
28	Pembangunan Baru Pukesmas Desa Feer	Jumlah gedung baru Pukesmas Feer yang terbangun	1	Unit	-	1	-	-	-	Kec. Kei Besar Selatan Barat	Kementerian Kesehatan
29	Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Desa Feer	Jumlah rumah dinas Puskesmas Feer yang terbangun	1	Unit	-	1	-	-	-	Kec. Kei Besar Selatan Barat	Kementerian Kesehatan
30	Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan Puskesmas Desa Feer	Jumlah puskesmas keliling perairan Puskesmas Feer yang terbangun	1	Unit	-	1	-	-	-	Kec. Kei Besar Selatan Barat	Kementerian Kesehatan
31	Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik	Jumlah jaringan distribusi listrik yang terbangun	46	Paket	15	1	14	16	-	Kec. Pulau-Pulau Aru, Kec. Aru Tengah Timur, Kec. Sir-Sir,	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 298 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
										Kec. Aru Tengah Selatan, Kec. Aru Selatan Timur, Kec. Kei Besar Selatan Barat, Kec. Kei Besar Selatan, Kec. Wetar Barat, Kec. Wetar Utara, Kec. Wetar Timur, Kec. Wetar, Kec. Tanimbar Utara	
32	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya	Jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang terbangun	17	Unit	-	-	11	6	-	Kec. Pulau-Pulau Aru, Kec. Aru Tengah Timur, Kec. Aru Tengah Selatan, Kec. Aru Selatan Timur, Kec. Kei Besar Selatan Barat, Kec. Moa Lakor, Kec. Mndona Hiera, Kec. Wetar Barat, Kec. Wetar Utara, Kec. P. Masela,	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 299 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
										Kec. P. Leti, Kec. P. Lakor, Kec. Yaru	
33	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK-Tematik <i>Stunting</i>	Jumlah tangki septik yang terbangun	125	Unit	-	125	-	-	-	Kec. Wetar, Kec. Wetar Utara	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
34	Pembangunan sumur dalam terlindungi	Jumlah sumur dalam yang terbangun	162	SR	-	162	-	-	-	Kec. Wetar Timur	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
35	Pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah	Jumlah jaringan distribusi yang dikembangkan	40	SR	-	40	-	-	-	Kec. Aru Tengah Timur	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
XIII	PROVINSI MALUKU UTARA										
KP 2	PENGEMBANGAN POTENSI KAWASAN PERBATASAN NEGARA										
1	Revitalisasi Sentra IKM minyak kelapa	Jumlah Sentra IKM yang direvitalisasi	1	Sentra IKM	-	-	1	-	-	Kab. Halmahera Tengah	Kementerian Perindustrian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 300 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
2	Fasilitasi kapal perikanan bantuan yang terbangun termasuk di daerah perbatasan	Jumlah kapal perikanan bantuan yang tersedia termasuk di daerah perbatasan	2	Unit	-	-	-	-	2	PKSN Daruba	Kementerian Kelautan dan Perikanan
3	Pengembangan Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	2	Desa	-	-	-	1	1	PKSN Daruba	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
4	Bumdes yang dikembangkan untuk mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes	2	Desa	-	-	-	1	1	PKSN Daruba	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
5	Pelatihan masyarakat bidang tata kelola destinasi pariwisata, pelatihan manajemen <i>homestay</i> , <i>selam</i> , <i>paralayang</i> , <i>pilihan</i> , <i>TIC</i> , dan <i>Supporting</i>	Jumlah kegiatan pelatihan masyarakat yang terlaksana	1	Paket	1	-	-	-	-	Kec. Patani Utara	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6	Pengembangan daya tarik wisata	Jumlah pengembangan daya tarik wisata	1	Paket	1	-	-	-	-	Kec. Patani Utara	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 301 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
											Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
7	Pengadaan kapal penangkapan ikan 5 GT	Jumlah kapal penangkapan Ikan 5 GT yang tersedia	18	Unit	-	-	18	-	-	Kec. Morotai Jaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
8	Pengadaan <i>Cool Box</i>	Jumlah <i>Cool Box</i> yang tersedia	500	Unit	-	-	500	-	-	Kec. Morotai Jaya	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KP 3	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS										
1	Pembangunan Bus air	Jumlah Bus air yang terbangun	2	Unit	-	1	1	-	-	PKSN Daruba, Kec. Morotai Selatan	Kementerian Perhubungan
2	Pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda di KSPN	Fasilitas pendukung dan integrasi moda di KSPN Morotai	2	Lokasi	-	1	1	-	-	PKSN Daruba, Kec. Morotai Selatan	Kementerian Perhubungan
3	Penyediaan titik lokasi dan pembangunan BTS	Jumlah titik lokasi penyediaan BTS khususnya	24	Lokasi	-	20	4	-	-	PKSN Daruba, Kec. Morotai Jaya, Kec. Morotai Utara, Kec.	Kementerian Komunikasi dan Informatika



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 302 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
		di kelautan dan daerah pesisir								Morotai Timur, Kec. Morotai Selatan Barat	
4	Penyediaan aksesibilitas telekomunikasi dan informasi (Bakti Sinyal/ Lastmile)	Jumlah lokasi BTS/WIFI di wilayah pelayanan universal telekomunikasi dan informatika	1	Lokasi	-	-	-	-	1	PKSN Daruba	Kementerian Komunikasi dan Informatika
5	Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Morotai	Panjang ruas jalan yang dibangun	43,1	Km	14	9,7	9,7	9,7	-	PKSN Daruba	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
6	Pengadaan sarana transportasi darat	Jumlah sarana transportasi darat yang tersedia	4	Unit	-	4	-	-	-	Kec. Patani Utara, Kec. Morotai Selatan Barat, Kec. Morotai Selatan, Kec. Morotai Jaya	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
7	Pengadaan sarana transportasi perairan dibawah 20 GT dan/atau maksimal kapasitas 25 penumpang	Jumlah sarana transportasi perairan yang tersedia	2	Unit	-	2	-	-	-	Kec. Patani Utara, Kec. Morotai Selatan	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 303 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
8	Pembangunan Jalan Strategis Desa Ruas Jalan Jln. Dalam Desa Gemia	Dibangunnya panjang jalan strategis desa di lokasi prioritas perbatasan daerah tertinggal	1,58	Km	-	1,58	-	-	-	Kec. Patani Utara	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
9	Pembangunan Jalan Strategis Desa Ruas Jalan Wayabula-Tutuhu	Dibangunnya panjang jalan strategis desa di lokasi prioritas perbatasan daerah tertinggal	1,85	Km	-	1,85	-	-	-	Kec. Morotai Selatan Barat	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
KP 4	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL DASAR										
1	Rehabilitasi bangunan kantor desa	Jumlah kantor desa yang direhabilitasi	10	Unit	-	2	2	3	3	Prov. Maluku Utara	Kementerian Dalam Negeri
2	Pelayanan administrasi kependudukan di daerah	Pelayanan administrasi kependudukan di daerah (KTP el, KIA, Akta Kelahiran)	10	Paket	2	2	2	2	2	Kab. Pulau Morotai, Kab. Halmahera Tengah	Kementerian Dalam Negeri
3	Bantuan Sosial Pemerintah	Persentase keluarga penerima manfaat yang	100	%	100	100	100	100	100	Kab. Pulau Morotai, Kab. Halmahera Tengah	Kementerian Sosial



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 304 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
		mendapatkan bantuan sosial pemerintah									
4	Pembangunan Balai pertemuan umum kecamatan	Jumlah Balai pertemuan umum kecamatan yang dibangun	2	Unit	-	-	-	1	1	PKSN Daruba (Kec. Morotai Selatan), Kec. Morotai Jaya	Kementerian Dalam Negeri
5	Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan, dan rawan bencana	Jumlah pasar rakyat yang direvitalisasi	1	Unit	-	-	-	-	1	PKSN Daruba	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
6	Peningkatan titik penyalur program BBM Satu Harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	10	Penyalur	-	2	2	2	4	PKSN Daruba	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7	Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas Untuk Nelayan	Jumlah Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk nelayan yang difasilitasi	50	Unit	-	-	-	-	50	PKSN Daruba	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya	Jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang terbangun	1	Unit	-	-	1	-	-	PKSN Daruba	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 305 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
9	Pembangunan Puskesmas Buho-Buho, Sabatai, Morodadi	Jumlah puskesmas yang dibangun	3	Unit	-	-	3	-	-	PKSN Daruba (Kec.Morotai Selatan), Kec. Morotai Timur	Kementerian Kesehatan
10	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya	Jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang terbangun	4	Unit	-	-	1	3	-	PKSN Daruba (Kec. Morotai Selatan), Kec. Morotai Jaya, Kec. Morotai Utara, Kec. Morotai Selatan Barat	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/PLN
11	Pembangunan kantor desa/kelurahan	Jumlah kantor desa/kelurahan yang dibangun	1	Unit	-	-	-	1	-	Kec. Patani Utara	Kementerian Dalam Negeri
12	Pengadaan Prasarana Alat Kesehatan Puskesmas Cio Gerong, Leo-Leo	Jumlah prasarana alat kesehatan puskesmas yang tersedia	2	Paket	-	-	2	-	-	Kec. Morotai Selatan Barat	Kementerian Kesehatan
13	Pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah	Jumlah jaringan distribusi dan sambungan rumah yang dikembangkan	193	SR	-	193	-	-	-	Kec. Morotai Selatan Barat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
XIV	PROVINSI PAPUA BARAT										
KP 1	PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA										



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 306 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
1	Penyusunan Materi Teknis Peninjauan Kembali Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Papua Barat	Jumlah Materi Teknis Kawasan Strategis Nasional	1	Paket	-	-	1	-	-	Prov. Papua Barat	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
2	Penyusunan Materi Teknis Kawasan Perbatasan Negara Pulau Fani, Kabare	Jumlah Materi Teknis Kawasan Perbatasan Negara	2	Paket	-	-	-	1	1	Distrik Kep. Ayau, Distrik Waigeo Utara	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
KP 2	PENGEMBANGAN POTENSI KAWASAN PERBATASAN										
1	Pendampingan dan Fasilitasi Bagi Sentra Pengolahan Hasil Laut	Pendampingan dan fasilitasi bagi sentra pengolahan hasil laut yang terlaksana	1	Paket	-	1	-	-	-	Kab. Raja Ampat	Kementerian Perindustrian
KP 3	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS										



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 307 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
1	Penyediaan Titik Lokasi dan Pembangunan BTS	Jumlah titik lokasi penyediaan BTS khususnya di kelautan dan daerah pesisir	19	Lokasi	-	19	-	-	-	Distrik Ayau, Kep. Ayau, Sausapor	Kementerian Komunikasi dan Informatika
KP 4	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL DASAR										
1	Rehabilitasi bangunan kantor desa	Jumlah kantor desa yang direhabilitasi	10	Unit	-	2	2	3	3	Prov. Papua Barat	Kementerian Dalam Negeri
2	Pelayanan administrasi kependudukan di daerah	Pelayanan administrasi kependudukan di daerah (KTP el, KIA, Akta Kelahiran)	10	Paket	2	2	2	2	2	Kab. Raja Ampat, Tambraw	Kementerian Dalam Negeri
3	Bantuan Sosial Pemerintah	Persentase Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan bantuan sosial pemerintah	100	%	100	100	100	100	100	Kab. Raja Ampat, Kab. Tambraw	Kementerian Sosial
4	Pembangunan Balai pertemuan umum kecamatan	Jumlah Balai pertemuan umum kecamatan yang dibangun	2	Unit	-	-	2	-	-	Distrik Kep. Ayau, Distrik Sausapor	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 308 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
5	Pembangunan ruang guru beserta perabotnya	Jumlah ruang guru beserta perabotnya yang terbangun	1	Paket	-	1	-	-	-	Distrik Kep. Ayau	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
XV	PROVINSI PAPUA										
KP 1	PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN										
1	Penyusunan Materi Teknis Peninjauan Kembali Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua	Jumlah Materi Teknis Kawasan Strategis Nasional	1	Paket	-	-	1	-	-	Prov. Papua	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
2	Fasilitasi Legislasi Rancangan Peraturan Presiden Kawasan Perbatasan Negara Jayapura, Tanah Merah, Merauke	Jumlah Rancangan Peraturan Presiden Kawasan Perbatasan Negara	3	Paket	-	-	-	3	-	PKSN Jayapura, PKSN Tanah Merah, PKSN Merauke	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
3	Penyusunan Materi Teknis Kawasan Perbatasan Negara Yetetkun, Mindiptana, Hamadi, Batom, Waris, Biak, Merauke	Jumlah Materi Teknis Kawasan Perbatasan Negara	7	Paket	1	1	2	1	2	PKSN Merauke, Distrik Ninati, Distrik Mindiptana, Distrik Jayapura Selatan,	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 309 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
										Distrik Batom, Distrik Waris, Distrik Biak Kota	Pertanahan Nasional
4	Fasilitasi Legislasi Rancangan Peraturan Presiden Kawasan Perbatasan Negara Yetetkun, Skouw, Sota	Jumlah Rancangan Peraturan Presiden Kawasan Perbatasan Negara	3	Paket	-	1	1	1	-	Distrik Ninati, Distrik Muara Tami, Distrik Sota	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
KP 2	PENGEMBANGAN POTENSI KAWASAN PERBATASAN										
1	Penyediaan sarana dan prasarana industri VCO skala kecil	Jumlah sarana dan prasarana industri VCO skala kecil yang tersedia	6	Paket	-	-	6	-	-	Prov. Papua	Kementerian Perindustrian
2	Bimtek Produksi Bagi Wirausaha IKM Kerajinan	Jumlah Bimtek yang terlaksana	25	IKM	-	25	-	-	-	Kota Jayapura	Kementerian Perindustrian
3	Revitalisasi Sentra IKM Cokelat	Jumlah Sentra IKM yang direvitalisasi	1	Sentra IKM	-	1	-	-	-	Kab. Jayapura	Kementerian Perindustrian
4	Bimtek Produksi Bagi Wirausaha IKM Pengolahan Ikan	Jumlah Bimtek yang terlaksana	25	IKM	-	25	-	-	-	Kab. Biak Numfor	Kementerian Perindustrian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 310 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
5	Revitalisasi Sentra IKM Meubel	Jumlah Sentra IKM yang direvitalisasi	1	Sentra IKM	-	1	-	-	-	Kab. Biak Numfor	Kementerian Perindustrian
6	Revitalisasi Sentra IKM Olahan Kelapa	Jumlah Sentra IKM yang direvitalisasi	1	Sentra IKM	-	1	-	-	-	Kab. Sarmi	Kementerian Perindustrian
7	Pengembangan BUMDes untuk mendukung produk unggulan Desa	Jumlah Desa yang mengembangkan BUMDes	21	BUMDes	-	-	4	4	13	Kab. Keerom, PKSN Merauke, PKSN Tanah Merah, PKSN Jayapura	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
8	Satuan pemukiman yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas	Terbangun dan berfungsinya satuan permukiman transmigrasi di kawasan transmigrasi prioritas	7	Kawasan	-	1	2	2	2	Kab. Keerom, PKSN Merauke	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
9	Peningkatan kapasitas tenaga kerja di daerah tertinggal	Meningkatnya kapasitas tenaga kerja di daerah tertinggal	400	Orang	-	-	200	200	-	Kab. Boven Digoel, Kab. Keerom	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 311 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
10	Bantuan peningkatan nilai tambah Prukades di daerah tertinggal	Meningkatnya nilai tambah Prukades di daerah tertinggal	3	Unit	-	-	1	1	1	Kab. Boven Digoel, Kab. Keerom	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
11	Kawasan transmigrasi prioritas yang sarana dan prasarana nya dikembangkan dan fungsional	Berkembang dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas kawasan transmigrasi prioritas	9	Kawasan	2	1	2	2	2	Kab. Keerom, PKSN Merauke	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
12	Kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya	Berkembangnya ekonomi kawasan transmigrasi prioritas	9	Kawasan	2	1	2	2	2	Kab. Keerom, PKSN Merauke	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
13	SKPT Biak	Tingkat kemandirian SKPT Biak (tingkat kemandirian (skala 1-5))	5	Skala Kemandirian	-	-	-	5	-	Kab. Biak Numfor	Kementerian Kelautan dan Perikanan
14	Pembuatan kolam ikan bagi kelompok pembudi daya	Terselesainya pembuatan kolam ikan bagi kelompok pembudi daya	1	Paket	-	-	1	-	-	PKSN Jayapura	Kementerian Kelautan dan Perikanan



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 312 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
15	Pembangunan sarana budi daya benih dan pakan bagi kelompok pembudi daya	Terselesaikannya pembangunan sarana budi daya benih dan pakan bagi kelompok pembudi daya	1	Kelompok	-	-	1	-	-	PKSN Jayapura	Kementerian Kelautan dan Perikanan
16	SKPT Merauke yang mandiri	Jumlah SKPT yang ditingkatkan kemandiriannya	5	Skala Kemandirian	-	-	-	-	5	PKSN Merauke	Kementerian Kelautan dan Perikanan
17	Penataan Perkampungan tradisional sebagai pendukung "Wisata Perbatasan"	Jumlah Kawasan Pariwisata yang difasilitasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Regional III	1	Kawasan	-	-	-	-	1	PKSN Jayapura	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
18	Pembangunan <i>homestay</i> kampung terapung perbatasan	Jumlah kawasan pariwisata yang difasilitasi pengembangan destinasi pariwisata regional III	1	Kawasan	-	-	-	-	1	PKSN Jayapura	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 313 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
19	Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah perbatasan, tertinggal dan pascabencana	Terselesainya revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah perbatasan, tertinggal dan pascabencana	1	Unit	-	-	1	-	-	PKSN Jayapura (Distrik Muara Tami)	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
20	Pelatihan kewirausahaan	Jumlah pelatihan kewirausahaan	240	Orang	-	-	-	240	-	PKSN Jayapura (Distrik Jayapura Utara), Distrik Sarmi	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
21	Koperasi/UKM sektor perikanan dan peternakan yang diperkuat kapasitas usahanya melalui kemitraan	Jumlah KUMKM yang diperkuat fasilitas usaha kemitraannya	2	Kegiatan	-	-	-	1	1	PKSN Merauke	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
22	Pengembangan Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital	1	Desa	-	-	-	-	1	PKSN Tanah Merah	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
23	Pembangunan Gudang/Depo Non-SRG	Jumlah gudang/Depo Non-SRG yang dibangun	2	Unit	-	-	-	-	2	PKSN Jayapura, PKSN Merauke	Kementerian Perdagangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 314 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
24	Penyedia Jasa Logistik Sektor Perdagangan yang diberikan pembinaan	Jumlah penyedia jasa yang diberikan pembinaan	10	Kegiatan	-	-	-	-	10	PKSN Jayapura	Kementerian Perdagangan
25	Pembangunan Pasar Tipe B	Jumlah Pasar Tipe B yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya	2	Unit	-	-	-	-	2	PKSN Jayapura, PKSN Merauke	Kementerian Perdagangan
26	Pembangunan Pasar Tipe C	Jumlah Pasar Tipe C yang dibangun dan ditingkatkan fasilitasnya	2	Unit	-	-	-	-	2	PKSN Jayapura, PKSN Merauke	Kementerian Perdagangan
27	Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat	Jumlah pasar rakyat yang dibangun/direvitalisasi	1	Unit	-	-	-	-	1	PKSN Merauke (Distrik Merauke)	Kementerian Perdagangan
28	Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian Pra-Panen	Jumlah alat dan mesin pertanian pra-panen yang difasilitasi	10	Unit	-	-	-	-	10	PKSN Jayapura	Kementerian Pertanian
29	Pembangunan sarana dan prasarana pengolahan sagu di Skouw Yanbe	Terselesainya Pembangunan sarana dan prasarana pengolahan sagu di Skouw Yanbe	2	Unit	-	1	1	-	-	PKSN Jayapura	Kementerian Pertanian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 315 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
30	Rehabilitasi tambak bagi kelompok pembudi daya	Terselesaikannya rehabilitasi tambak bagi kelompok pembudi daya	1	Paket	-	-	1	-	-	PKSN Jayapura	Kementerian Perindustrian
31	Pengembangan Aplikasi Informatika Petani dan Nelayan <i>Go Online</i>	Jumlah <i>user</i> aktif petani dan nelayan yang mendaftar	500	<i>User</i>	-	-	-	-	500	PKSN Merauke	Kementerian Komunikasi dan Informatika
32	Pengembangan Aplikasi Informatika UMKM <i>Go Online</i>	Jumlah <i>user</i> aktif <i>selling</i> UMKM	250	<i>User</i>	-	-	-	-	250	PKSN Merauke	Kementerian Komunikasi dan Informatika
33	Pengadaan ketingting dan alat-alat nelayan	Jumlah ketingting dan alat nelayan yang tersedia	1	Paket	-	1	-	-	-	Distrik Okaba	Kementerian Kelautan dan Perikanan
34	Pengadaan perahu	Jumlah perahu yang tersedia	2	Unit	-	-	-	2	-	Distrik Web	Kementerian Kelautan dan Perikanan
35	Pembangunan tambatan perahu	Jumlah tambatan perahu yang terbangun	4	Unit	-	-	-	4	-	Distrik Supiori Barat, Distrik Supiori Utara	Kementerian Kelautan dan Perikanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 316 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
36	Pengadaan keramba jaring apung (teripang)	Jumlah keramba jaring apung (teripang) yang tersedia	15	Unit	-	-	-	15	-	Distrik Supiori Barat Distrik Kep. Aruri	Kementerian Kelautan dan Perikanan
37	Pengadaan perahu perikanan tangkap	Jumlah perahu ikan tangkap yang tersedia	10	Unit	-	-	-	10	-	Distrik Kep. Aruri	Kementerian Kelautan dan Perikanan
38	Pembangunan keramba perikanan laut	Jumlah keramba laut yang terbangun	5	Unit	-	-	-	5	-	Distrik Supiori Timur	Kementerian Kelautan dan Perikanan
39	Pelatihan masyarakat bidang tata kelola destinasi pariwisata, pelatihan manajemen <i>homestay</i> , <i>selam</i> , <i>paralayang</i> , <i>pilihan</i> , <i>TIC</i> , dan <i>supporting</i>	Jumlah kegiatan pelatihan masyarakat bidang yang terlaksana	1	Paket	1	-	-	-	-	Distrik Biak Kota	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
40	Pengembangan daya tarik wisata	Jumlah kegiatan daya tarik wisata yang dikembangkan (Panggung Kesenian/ Pertunjukan, Kios Cendera	1	Paket	1	-	-	-	-	Distrik Biak Kota	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 317 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
		mata, Ruang Ganti dan atau Toilet, dan <i>Boardwalk</i>)									Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
41	Pembangunan <i>Long Storage</i>	Jumlah <i>Long Storage</i> yang terbangun	2	Buah	2	-	-	-	-	Distrik Elikobal	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
KP 3	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS										
1	Peningkatan jalan strategis desa di daerah perbatasan	Ditingkatkannya panjang jalan strategis desa di lokasi prioritas perbatasan daerah tertinggal	6	Km	-	-	2	2	2	Kab. Boven Digoel	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
2	Pembangunan atau peningkatan jalan desa strategis di daerah tertinggal	Terbangunnya atau ditingkatkannya panjang jalan desa strategis yang fungsional di daerah tertinggal	1,9	Km	-	-	-	1,9	-	Kab. Boven Digoel	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 318 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
3	Peningkatan jalan strategis Desa di daerah perbatasan	Ditingkatkannya panjang jalan strategis desa di lokasi prioritas perbatasan daerah tertinggal	4	Km	-	-	2	2	-	Kab. Keerom	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
4	Peningkatan jalan strategis desa di daerah perbatasan	Ditingkatkannya panjang jalan strategis desa di lokasi prioritas perbatasan daerah tertinggal	6	Km	-	-	2	2	2	Kab. Supiori	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
5	Pembangunan Jalan Towe Hitam - Oksibil	Panjang ruas jalan yang dibangun	50,35	Km	5,8	12,25	2,3	15	15	Kab. Peg. Bintang	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
6	Pengembangan Terminal Skouw	Jumlah terminal barang yang dibangun/ ditingkatkan	1	Unit	1		-	-	-	PKSN Jayapura	Kementerian Perhubungan
7	Percepatan pembangunan dan operasionalisasi terminal barang internasional dan	Jumlah terminal barang internasional yang terbangun	1	Unit	-	-	1	-	-	PKSN Jayapura	Kementerian Perhubungan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 319 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
	<i>showcase</i> di kawasan PLBN Skouw										
8	Pengembangan Bandara Sentani	Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan	1	Unit	-	1	1	1	-	PKSN Jayapura	Kementerian Perhubungan
9	Pembangunan jembatan udara di Bandara Tanah Merah	Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan	1	Unit	1	1	1	1	1	PKSN Tanah Merah	Kementerian Perhubungan
10	Pengembangan Jembatan Udara Bandara Manggelum	Jumlah jembatan udara yang ditingkatkan	1	Paket	-	1	1	1	1	PKSN Tanah Merah	Kementerian Perhubungan
11	Pengembangan pelabuhan Merauke	Jumlah pelabuhan yang dikembangkan	1	Unit	-	1	1	1	-	PKSN Merauke	Kementerian Perhubungan
12	Pengembangan Bandara Mopah	Jumlah bandara yang dibangun	1	Unit	1	1	-	-	-	PKSN Merauke	Kementerian Perhubungan
13	Penyediaan titik lokasi dan pembangunan BTS	Jumlah titik lokasi penyediaan BTS khususnya di kelautan dan daerah pesisir	3	Lokasi	-	3	-	-	-	PKSN Tanah Merah, PKSN Merauke	Kementerian Komunikasi dan Informatika



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 320 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
14	Penyediaan aksesibilitas telekomunikasi dan informasi (Bakti Internet)	Jumlah titik lokasi Bakti Internet yang dibangun	1	Lokasi	-	-	-	-	1	PKSN Merauke	Kementerian Komunikasi dan Informatika
15	Penyediaan titik lokasi dan pembangunan BTS	Jumlah titik lokasi penyediaan BTS khususnya di kelautan dan daerah pesisir	141	Lokasi	-	80	61	-	-	PKSN Merauke (Distrik Sota), Distrik Tabonji, Distrik Waan, Distrik Kimaam, Distrik Okaba, Distrik Naukenjerai, Distrik Ulilin, Distrik Sarmi, Distrik Jair, Distrik Kombut, Distrik Waropko, Distrik Sesnuk, Distrik Ninati, Distrik Batom, Distrik Iwur, Distrik Oksamol, Distrik Tarub, Distrik Kiwirok Timur, Distrik Mufinop, Distrik Murkim, Distrik Waris, Distrik Arso	Kementerian Komunikasi dan Informatika



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 321 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
										Timur, Distrik Towe, Distrik Web, Distrik Yaffi, Distrik Supiori Barat, Distrik Supiori Utara	
16	Pembangunan dan peningkatan jalan desa strategis pada ruas jalan Kampung Ninaty-Simpang Boda (PNG)	Panjang jalan yang ditingkatkan	2,5	Km	-	2,5	-	-	-	PKSN Tanah Merah (Distrik Ninati)	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
17	Pembangunan dan peningkatan jalan desa strategis pada ruas jalan Kampung Skouw Sae	Panjang jalan desa strategis yang terbangun/ ditingkatkan	1	Km	-	1	-	-	-	PKSN Jayapura (Distrik Muara Tami)	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
18	Pembangunan dan peningkatan jalan desa strategis pada ruas jalan Jl. Skouw Sae	Panjang jalan desa strategis yang terbangun/ ditingkatkan	1,35	Km	-	1,35	-	-	-	PKSN Jayapura (Distrik Muara Tami)	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
19	Pengadaan sarana transportasi darat	Jumlah sarana transportasi darat yang tersedia	1	Unit	-	1	-	-	-	PKSN Jayapura (Distrik Muara Tami)	Kementerian Desa, Pembangunan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 322 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
											Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
20	Pembangunan jalan akses PLBN Yetetkun	Panjang jalan yang dibangun	39	Km	10	7,25	7,25	7,25	7,25	PKSN Tanah Merah (Distrik Ninati)	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
21	Pembangunan jalan akses Terminal Barang Internasional PLBN Skouw	Panjang ruas jalan yang dibangun	0,3	Km	-	0,3	-	-	-	PKSN Jayapura (Distrik Jayapura Utara)	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
22	Pembangunan jalan perbatasan Papua	Panjang ruas jalan yang dibangun	30	Km	6	6	6	6	6	PKSN Jayapura	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
23	Pembangunan jembatan Kali Bian	Jumlah jembatan yang dibangun	1	Unit	-	-	-	-	1	PKSN Merauke	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 323 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
24	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana Bandar Udara Batom	Jumlah prasarana Bandar Udara Batom yang direhab/dipelihara	1	Paket	1	-	-	-	-	Distrik Batom	Kementerian Perhubungan
25	Peningkatan/pemantapan Bandar Udara Batom	Jumlah bandar udara yang ditingkatkan	1	Paket	-	1	-	-	-	Distrik Batom	Kementerian Perhubungan
26	Pembangunan Pelabuhan Merauke	Jumlah pelabuhan yang terbangun	1	Unit	-	-	1			Distrik Towe	Kementerian Perhubungan
27	Pengadaan sarana transportasi darat	Jumlah sarana transportasi darat yang tersedia	5	Unit	-	5	-	-	-	Distrik Waris, Distrik Towe, Distrik Kimaam, Distrik Merauke	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
28	Pembangunan dan peningkatan Jalan Desa strategis pada ruas jalan Muting IV-Muting V	Panjang ruas jalan yang terbangun	2	Km	-	2	-	-	-	Distrik Ulilin	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
29	Pengadaan sarana transportasi perairan di bawah 20 dan/atau maksimal kapasitas 25 penumpang	Jumlah sarana transportasi perairan yang tersedia	1	Unit	-	1	-	-	-	Distrik Sesnuk	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 324 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
KP 4	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL DASAR										
1	Pelayanan Administrasi Kependudukan di Daerah	Pelayanan Administrasi Kependudukan di Daerah (KTP el, KIA, Akta Kelahiran)	45	Paket	9	9	9	9	9	Kab. Mimika, Kab. Boven Digoel, Kab. Peg. Bintang, Kab. Keerom, Kab. Sarmi, Kab. Biak Numfor, Kab. Supiori, PKSN Jayapura, PKSN Tanah Merah, PKSN Merauke	Kementerian Dalam Negeri
2	Bantuan Sosial Pemerintah	Persentase Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan bantuan sosial pemerintah	100	%	100	100	100	100	100	Kab. Mimika, Kab. Boven Digoel, Kab. Peg. Bintang, Kab. Keerom, Kab. Sarmi, Kab. Biak Numfor, Kab. Supiori, PKSN Merauke, PKSN Jayapura	Kementerian Sosial



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 325 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
3	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih	Meningkatnya layanan air bersih dan sanitasi di daerah perbatasan	350	KK	-	-	-	200	150	Kab. Boven Digoel, Kab. Keerom, Kab. Supiori	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
4	Rehabilitasi bangunan kantor desa	Jumlah kantor desa yang direhabilitasi	10	Unit	-	2	2	3	3	PKSN Merauke (Distrik Semangga, Distrik Merauke), Distrik Tabonji, Distrik Elokobel, Distrik Kombut, Distrik Oksamol, Distrik Mofinop, Distrik Yaffi, Distrik Supiori Utara, Distrik Supiori Timur	Kementerian Dalam Negeri
5	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Kawasan Perbatasan (Sarana-Prasarana dan Alat Kesehatan)	Jumlah pelayanan kesehatan dasar yang ditingkatkan	14	Paket	-	14	-	-	-	PKSN Jayapura (Distrik Jayapura Utara), Distrik Sota, Distrik Waan, Distrik Kimaam	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 326 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
6	Pengadaan Alat Kesehatan di Puskesmas	Jumlah alat kesehatan yang tersedia	3	Paket	-	3	-	-	-	PKSN Merauke (Distrik Semangga, Distrik Sota), Naukenjerai	Kementerian Kesehatan
7	Pembangunan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang terbangun	1	Unit	-	-	1	-	-	PKSN Jayapura (Distrik Muara Tami)	Kementerian Kesehatan
8	Pembangunan SPBU di Skouw	Terselesaikannya pembangunan SPBU di Skouw	1	Paket	-	-	1	-	-	PKSN Jayapura	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
9	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	Jumlah ruang kelas yang direhabilitasi	26	Unit	-	26	-	-	-	PKSN Jayapura (Distrik Jayapura Utara), Distrik Mimika Timur Jauh, Distrik Sarmi	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
10	Pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya	Jumlah rumah dinas guru yang terbangun	13	Unit	-	13	-	-	-	PKSN Jayapura (Distrik Jayapura Utara), Distrik Waan, Distrik Kimaam, Distrik Waropko, Distrik Supiori Barat	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 327 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
11	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya	Jumlah RKB yang terbangun	4	Unit	-	4	-	-	-	PKSN Merauke (Distrik Sota), Distrik Waropko	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
12	Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	Jumlah ruang perpustakaan yang direhabilitasi	1	Unit	-	1	-	-	-	PKSN Jayapura (Distrik Jayapura Utara)	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
13	Pembangunan baru SMP	Jumlah SMP yang dibangun	1	Sekolah	-	-	-	-	1	PKSN Jayapura	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
14	Pembangunan baru IPAL Skala Permukiman kombinasi MCK	Jumlah IPAL Skala Permukiman dengan jumlah layanan minimal 25 KK-Tematik Penanggulangan Kemiskinan yang terbangun	13	Unit	-	13	-	-	-	PKSN Jayapura (Distrik Jayapura Utara), Distrik Okaba	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
15	Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya	Jumlah rumah secara swadaya yang ditingkatkan kualitasnya	300	Unit	-	300	-	-	-	PKSN Jayapura (Distrik Jayapura Utara)	Kementerian Pekerjaan Umum



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 328 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
											dan Perumahan Rakyat
16	Pembangunan balai pertemuan umum kecamatan	Jumlah balai pertemuan umum kecamatan yang dibangun	4	Unit	-	-	1	-	3	Distrik Mimika Timur Jauh, Distrik Tabonji, Distrik Naukenjerai, Distrik Towe	Kementerian Dalam Negeri
17	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK-Tematik <i>Stunting</i>	Jumlah tangki septik yang terbangun	55	Unit	-	55	-	-	-	Distrik Waropko	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
18	Pembangunan ruang guru beserta perabotnya	Jumlah ruang guru yang dibangun	7	Unit	-	7	-	-	-	Distrik Waan, Distrik Okaba	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
19	Pengadaan pusling laut	Jumlah pusling laut yang tersedia	1	Unit	-	1	-	-	-	Distrik Mimika Timur Jauh	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 329 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
20	Pengadaan pusling perairan	Jumlah pusling perairan yang tersedia	1	Unit	-	1	-	-	-	Distrik Mimika Timur Jauh	Kementerian Kesehatan
21	Pengadaan generator dan pemasangan instalasi listrik Puskesmas	Jumlah generator puskesmas yang tersedia	1	Unit	-	1	-	-	-	Distrik Mimika Timur Jauh	Kementerian Kesehatan
22	Pembangunan rumah dinas Puskesmas	Jumlah rumah dinas puskesmas yang dibangun	1	Unit	-	1	-	-	-	Distrik Mimika Timur Jauh	Kementerian Kesehatan
23	Instalasi pengolah limbah	Jumlah instalasi pengolah limbah yang terbangun	1	Paket	-	1	-	-	-	Distrik Mimika Timur Jauh	Kementerian Kesehatan
24	Penyediaan prasarana pusling roda dua Puskesmas	Jumlah pusling yang tersedia	2	Unit	-	2	-	-	-	Distrik Kombut	Kementerian Kesehatan
25	Pembangunan rumah petugas kesehatan	Jumlah rumah petugas kesehatan yang terbangun	1	Unit	-	-	-	1	-	Distrik Sarmi	Kementerian Kesehatan
26	Pembangunan Gedung <i>Health Care Center</i> (HCC) 119	Terbangunnya Gedung HCC 119	1	Unit	-	-	-	1	-	Distrik Biak Kota	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 330 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
27	Bantuan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi (SD/SMP)	Jumlah bantuan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi (SD/SMP)	2	Paket	2	-	-	-	-	Distrik Arso Timur, Distrik Yaffi	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
28	Peningkatan titik penyalur program BBM satu harga	Jumlah penyalur yang difasilitasi/ditingkatkan	1	Unit	-	-	-	-	1	Distrik Jair	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
29	Pembangunan jaringan distribusi listrik	Jumlah jaringan distribusi listrik yang terbangun	21	Unit	-	21	-	-	-	Distrik Iwur	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/PLN
30	Pembangunan rumah khusus	Jumlah rumah khusus yang terbangun	12	Unit	-	12	-	-	-	Distrik Waropko	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 331 -

NO.	PROVINSI/ KEGIATAN	INDIKATOR	VOL.	SAT.	CAPAIAN		TARGET			LOKASI	INSTANSI PELAKSANA (KEMENTERIAN/ LEMBAGA)
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
31	Pembangunan Broncaptering	Jumlah Broncaptering yang terbangun	50	SR	-	50	-	-	-	Distrik Murkim	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

BAB VI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 332 -

BAB VI PENUTUP

Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 merupakan penjabaran visi, misi, dan prioritas Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 yang terdiri atas Batang Tubuh dan Lampiran yang memuat Narasi Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 dan Matriks Kegiatan Pengelolaan BWN-KP 2020-2024, sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Dalam perumusan program dan kegiatan di wilayah pengelolaan perbatasan merujuk pada 3 (tiga) aspek yaitu: Pertama, Visi/Misi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis. Kedua, identifikasi kebutuhan dasar masyarakat dan *multiplier effect* yang menjadi agenda strategis. Ketiga, RPJMN Tahun 2020-2024 melalui skema: (1) PLBN, PPKT, dan batas wilayah, dengan pengelolaan diarahkan pada penguatan pertahanan dan keamanan, (2) Lokpri sebagai zona penyangga PLBN, dengan penanganan diarahkan pada aspek pemenuhan pelayanan dasar, infrastruktur dasar, konektivitas, dan tata kelola pemerintahan; serta (3) Lokpri dan kecamatan sebagai *hinterland* pusat pertumbuhan PKSN, dengan pengelolaan diarahkan pada pengembangan hulu-hilir ekonomi komoditas unggulan. Kegiatan kementerian/lembaga mengacu pada lokus PLBN, PPKT, PKSN, dan Lokpri dimaksud.

Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 menjadi titik tolak pembangunan Kawasan Perbatasan negara, yang juga diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia menjadi negara maju. Hal tersebut dilakukan melalui upaya-upaya yang mendorong wilayah negara yang aman, tertib, dan maju, dengan memperkuat ketahanan nasional yang didukung dengan pembentukan pusat/sentra pertumbuhan baru (ekonomi, industri, perdagangan) di Kawasan Perbatasan negara, terutama di 18 (delapan belas) PKSN dan 222 (dua ratus dua puluh dua) Lokpri.

Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 merupakan pedoman nasional dan acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan di pusat dan daerah dan dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan secara terpadu, untuk memperkuat kedaulatan negara serta mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai dokumen dinamis, penyesuaian Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024 dilakukan melalui Renaksi Pengelolaan BWN-KP sesuai ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan kebijakan nasional dalam upaya penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Keberhasilan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 333 -

Keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan visi Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong di Kawasan Perbatasan Negara, dilaksanakan melalui 4 (empat) dari 9 (sembilan) misi dalam Nawacita Kedua Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dengan memberikan penekanan dan fokus pada 2 (dua) agenda pembangunan, yaitu: (1) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, dan (2) meningkatkan stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik. Selain itu, sektor-sektor pembangunan lain yang tidak disebutkan tetap dilakukan dalam mendukung pencapaian visi dan misi di atas.

Pengelolaan BWN-KP merupakan bentuk hadirnya negara di perbatasan negara. Pada dimensi batas wilayah (*border dimension*) hal tersebut mencerminkan semangat kedaulatan negara. Sementara pada dimensi kawasan (*frontier dimension*) perbatasan negara bukan hanya terbatas pada wilayah pinggiran secara ruang fisik, melainkan juga wilayah yang secara fungsional menjadi pintu keluar-masuk dari dan menuju NKRI. Untuk itu pengelolaan BWN-KP juga harus mencerminkan semangat mewujudkan beranda depan dan beranda penghubung internasional, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan berkontribusi terhadap terwujudnya kawasan antarnegara yang kondusif. Pengelolaan BWN-KP harus menjadi konsensus kebijakan dari berbagai pemangku kepentingan, baik secara vertikal maupun horizontal, untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai wilayah yang aman, tertib, dan maju.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan
Administrasi Hukum,



Sylvanna Djaman